



**LAPORAN KEGIATAN
TAHUN 2023**

**KOORDINASI PENYUSUNAN
DOKUMEN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG
PEREKONOMIAN
(RPJPD, RPJMD DAN RKPD)
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur disampaikan kehadiran Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan laporan kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Tahun 2023 dapat diselesaikan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Maksud dan tujuan dari kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Tahun 2023 adalah untuk meningkatkan meningkatkan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan bidang ekonomi di Provinsi Sumatera Barat.

Ucapan terima kasih dan penghargaan disampaikan kepada seluruh Fungsional Perencana Ahli Muda dan pelaksana Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam yang telah membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan ini pada tahun 2023. Untuk penyempurnaan laporan dimasa mendatang, diharapkan masukan dan kritikan yang bersifat membangun.

Padang, Desember 2023

**KEPALA BIDANG EKONOMI
DAN SUMBER DAYA ALAM**



Ir. Benny Sakti, MM.

Pembina Tk I,

NIP. 19670927 199403 1 008

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar isi.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1. 1. Latar Belakang	1
1. 2. Dasar Pelaksanaan	2
1. 3. Tujuan dan Sasaran Kegiatan	4
1. 4. Uraian Kegiatan	4
1. 5. Waktu Pelaksanaan	4
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN	5
2. 1. Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024	6
2. 2. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.....	81
BAB III PELAKSANAAN KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	199
BAB IV PERMASALAHAN	214
BAB V PENUTUP.....	218

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan merupakan hal krusial terkait dengan tujuan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan aspek keberlanjutan (sustainable development). Perencanaan sendiri merupakan salah satu dari aspek manajemen disamping pengorganisasian (organizing), penggerakan (actuating), dan pengawasan (controlling), sedangkan pembangunan secara umum menganut tiga paradigma, yaitu pertumbuhan, perbaikan, dan perubahan. Dengan demikian pada dasarnya perencanaan pembangunan adalah upaya untuk eksploitasi dan eksplorasi sumberdaya secara optimal untuk mencapai pertumbuhan, perbaikan dan perubahan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan, Pemerintah telah mengatur tata cara perencanaan sesuai dengan amanat UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan periode 20 tahun dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan periode 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan periode 1 (satu) tahun.

Dokumen perencanaan pembangunan memuat arah kebijakan yang akan dilaksanakan dalam periode 20 (dua puluh), 5 (lima) dan 1 (satu) tahun. Dokumen RPJMD merupakan penjabaran dari visi dan misi gubernur dan wakil gubernur terpilih serta merupakan breakdown dari RPJP tahun 2005 – 2025. Sedangkan penjabaran dari rencana tahunan pada RPJMD 2021-2026 yang disusun tahun ini akan di breakdown pada RKPD 2023. Dokumen tersebut diharapkan dapat menjawab permasalahan dan isu yang berkembang saat ini sekaligus memberikan arahan untuk pencapaian target-target pembangunan yang telah ditetapkan Pemerintah.

Dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan perlu diperhatikan tahapan dan mekanisme perencanaan yang sesuai dengan mekanisme dan regulasi yang telah ditetapkan. Penyusunan dokumen perencanaan dilakukan dengan

melibatkan seluruh stakeholder termasuk masyarakat dan pihak swasta yang dilaksanakan melalui berbagai Forum mulai dari tingkat terendah sampai tingkat Pusat.

Dalam proses perencanaan juga dibutuhkan data dan informasi yang akurat untuk mendukung perencanaan. Disamping itu juga harus mengakomodir kebijakan pusat serta mempertimbangkan kebijakan ditingkat kabupaten/kota, sehingga dapat terwujud sinkronisasi, kesesuaian dan konsistensi perencanaan ditingkat Pusat dan Daerah.

1. 2. Dasar Pelaksanaan

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat 2005-2025;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 207);
12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 40);
13. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 903-41-2023 tanggal 6 Februari 2023 tentang Perubahan atas keputusan Gubernur Nomor. 903-597-2022 tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara Sebagai Pengguna Anggaran/Barang, Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Yang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban Dan Bendahara Pengeluaran Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023;
14. Surat Keputusan Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat Nomor : 020/12/II/SET/Bappeda-2023 tanggal 8 Februari 2023, tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023;
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Provinsi Sumatera Barat TA. 2022, pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat, Nomor DPA-SKPD : 5.01.0.00.0.00.01.0000, kegiatan 5.01.03.1.02. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam), Sub kegiatan 5.01.03.1.02.01 Koordinasi Penyusunan

Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD, dan RKPD).

1. 3. Tujuan dan Sasaran Kegiatan

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Sumatera Barat jangka menengah dan jangka pendek serta terlaksananya koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian, adapun sasaran dari kegiatan ini adalah:

- a. Tersusunnya dokumen perencanaan tahunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2023.
- b. Terkoordinirnya penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah tahun 2023
- c. Terlaksananya koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah baik dengan Kabupaten/Kota, Provinsi maupun dengan Pusat.

1. 4. Uraian Kegiatan

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, telah dialokasikan dana melalui APBD Awal tahun 2023 Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 97.137.800,- dan pada APBD Perubahan 2023 sebesar Rp.17.433.700,- yang digunakan untuk:

- a. Melakukan pengumpulan data/Informasi penunjang perencanaan pembangunan bidang perekonomian.
- b. Melaksanakan koordinasi terkait lingkup Bidang Ekonomi dengan OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- c. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian/Lembaga lingkup Bidang Ekonomi.
- d. Pelaksanaan rapat-rapat
- e. Pengadaan alat tulis
- f. Penggandaan laporan pelaksanaan kegiatan.

1. 5. Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) selama 12 bulan terhitung mulai Januari - Desember 2022.

BAB II

PELAKSANAAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Waktu pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Tahun 2023 adalah terhitung mulai Januari sampai dengan Desember 2023 atas dasar pelaksanaan koordinasi baik di tingkat pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, dibutuhkan pendanaan, dimana pada Tahun 2023 ini melalui APBD Provinsi Sumatera Barat dialokasikan dana sebesar Rp. 97.137.800,- dan pada APBD Perubahan 2023 sebesar Rp.17.433.700,- dengan uraian kegiatan :

- a. Pelaksanaan Rapat-Rapat
- b. Belanja Makanan dan Minuman kegiatan
- c. Belanja cetak laporan ;
- d. Belanja penggandaan/Foto Copy

Adapun ruang lingkup dari Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Tahun 2022 adalah :

- a. Melaksanakan rapat Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dengan OPD dan Instansi Vertikal Provinsi Sumatera Barat.
- b. Melaksanakan koordinasi perencanaan pembangunan Bidang Perekonomian dengan 9 OPD, 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat
- c. Melaksanakan koordinasi bidang ekonomi dengan Pusat, Kementerian dan Lembaga;
- d. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan lingkup bidang Perekonomian

Seluruh uraian kegiatan dimaksud, dituangkan dalam bentuk laporan dengan perincian sebagai berikut :

2. 1. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2024 (Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2023)

Penulisan dokumen RKPD memakan waktu selama enam bulan dengan beberapa kali perbaikan. Tahapan tersebut meliputi penulisan draft rancangan awal RKPD tahun 2024 yang dilanjutkan dengan pembahasan rencana kerja OPD terkait terlebih dahulu. Selanjutnya dilakukan perbaikan dengan penyesuaian target capaian yang harus merujuk pada RPJMD Tahun 2021 – 2026. Dokumen ini akan menjadi draf rancangan akhir RKPD 2024 dengan pembahasan lebih lanjut terkait rencana kerja OPD lingkup Provinsi Sumatera Barat yang sesuai dengan target capaian Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan RPJMD 2021-2026. Selanjutnya dilakukan pembahasan dengan DPRD Provinsi Sumatera Barat terkait rencana kerja OPD lingkup Provinsi Sumatera Barat. Hingga akhirnya dilakukan penetapan dokumen RPKD 2024 Provinsi Sumatera Barat pada 27 Juni 2023 dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2023.

RKPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 disusun dengan maksud agar terwujudnya kesinambungan pelaksanaan pembangunan daerah, sinergitas dan sinkronisasi pembangunan antar wilayah dan antar sektor serta terciptanya efektifitas dan efisiensi alokasi sumber daya dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. RKPD dijadikan pedoman saat menjabarkan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan pendekatan money follows program dan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS)

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 antara lain:

- a. Terwujudnya penjabaran tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi dan prioritas pembangunan jangka panjang (RPJPD tahun 2005 – 2025) dan RPJMD Tahun 2021-2026.
- b. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintahan.
- c. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan.
- d. Tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
- b. Sebagai dasar dan pedoman dalam penyusunan KUA PPAS Tahun 2023.

Adapun isi pembahasan dokumen RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 pada lingkup bidang perekonomian yang telah ditulis oleh tim lingkup bidang ekonomi adalah sebagai berikut :

I. Gambaran Umum Kondisi Daerah

a. Potensi Pengembangan Ekonomi Wilayah

Tahun ini perekonomian Indonesia mulai pulih, untuk itu perlu mengoptimalkan sumberdaya lokal dan kapasitas lokal dalam rangka Pembangunan Ekonomi berdasarkan potensi yang ada di wilayahnya. Motor penggerak dalam membangun ekonomi daerah merupakan seluruh pemangku kepentingan ekonomi dalam tingkat komunitas, perkotaan, dan kabupaten. Meskipun ini fokus ke lokal/daerah, namun perlu juga diselaraskan dengan kebijakan dari Pemerintah Pusat.

Analisis potensi pengembangan ekonomi wilayah diperlukan untuk dapat mengetahui secara konkrit tentang kategori dan subkategori yang mempunyai potensi pengembangan yang baik berdasarkan perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah. Analisis ini diperlukan mengingat masing-masing daerah mempunyai potensi pengembangan yang bervariasi sesuai dengan kondisi daerah. Informasi ini diperlukan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah dalam menentukan arah kebijakan, strategi dan prioritas pembangunan sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah sehingga pertumbuhan ekonomi daerah dapat diwujudkan secara optimal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih maksimal. Potensi pengembangan suatu wilayah dapat dilihat berdasarkan 2 indikator utama yaitu :

1. Struktur/Kontribusikategori dan subkategori yang terkait dalam perekonomian daerah. Pertimbangan suatu kategori dan subkategori mempunyai potensi pembangunan cukup besar apabila kontribusinya terhadap perekonomian daerah cukup besar.
2. Laju pertumbuhan kategori dan subkategori bersangkutan dalam perekonomian daerah. Indikator ini diperlukan untuk pengembangan kategori dan subkategori yang mempunyai potensi yang cukup tinggi sehingga dapat diketahui laju pertumbuhannya.

Kedua indikator di atas dapat digunakan untuk mengetahui potensi pengembangan ekonomi wilayah menurut kategori dan subkategori di Provinsi Sumatera Barat, seperti digambarkan pada tabel berikut ini.

Tabel Struktur PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (%)
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 – 2022

Kategori	Uraian	2018		2019		2020		2021		2022	
		Prov	Nas	Prov	Nas	Prov	Nas	Prov	Nas	Prov	Nas
A	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	23,18	12,81	22,17	12,72	22,38	13,70	21,71	13,28	21,20	12,40
B	Pertambangan dan Penggalian	4,26	8,08	4,29	7,26	4,27	6,44	4,20	8,98	4,09	12,22
C	Industri Pengolahan	9,09	19,86	8,37	19,70	8,64	19,88	8,81	19,25	8,54	18,34
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,11	1,19	0,11	1,17	0,10	1,16	0,10	1,12	0,10	1,04
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,09	0,07	0,09	0,07	0,09	0,07	0,09	0,07	0,09	0,06
F	Konstruksi	9,64	10,53	10,09	10,75	10,19	10,71	10,20	10,44	10,06	9,77
G	Pedagang Besar & Eceran; Reparasi, Mobil & Sepeda Motor	15,31	13,02	15,80	13,01	15,79	12,93	15,77	12,97	16,50	12,85
H	Transportasi & Pergudangan	12,66	5,38	12,60	5,57	10,44	4,47	10,30	4,24	10,88	5,02
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,36	2,78	1,42	2,78	1,24	2,55	1,27	2,43	1,35	2,41
J	Informasi dan Komunikasi	5,47	3,77	5,82	3,96	6,44	4,51	6,62	4,41	6,68	4,15
K	Jasa Keuangan	3,01	4,15	2,90	4,24	3,04	4,51	3,28	4,51	3,23	4,13
L	Real Estate	1,96	2,74	2,01	2,77	2,06	2,94	2,05	2,94	2,02	2,49
M,N	Jasa Perusahaan	0,43	1,80	0,44	1,92	0,44	1,91	0,43	1,91	0,42	1,74
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	5,92	3,65	6,13	3,62	6,71	3,76	6,90	3,77	6,52	3,09
P	Jasa Pendidikan	4,20	3,25	4,34	3,30	4,70	3,56	4,64	3,56	4,62	2,89
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,39	1,07	1,42	1,10	1,62	1,30	1,69	1,30	1,65	1,21
R,S,T,U	Jasa Lainnya	1,93	1,81	2,00	1,95	1,88	1,96	1,95	1,96	2,05	1,81
Produk Domestik Regional Bruto		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Tabel diatas menggambarkan bahwa dari tahun 2018-2022 bahwa Struktur PDRB Sumatera Barat menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku tidak menunjukkan perubahan berarti. Struktur ekonomi Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 menurut lapangan usaha didukung oleh tiga lapangan usaha utama yaitu lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan, lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor serta lapangan usaha transportasi dan pergudangan. Ketiga lapangan usaha tersebut memberikan sumbangan terhadap perekonomian Provinsi Sumatera Barat sebesar 48,58%. Lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan sebagai penyumbang terbesar memberikan kontribusi sebesar 21,20%, menurun dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 21,71%, sedangkan lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor memberikan kontribusi sebesar 16,50%, meningkat apabila dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 15,77%.

Sedangkan lapangan usaha transportasi dan pergudangan dengan kontribusi sebesar 10,88%, meningkat dibandingkan tahun 2021 sebesar 10,30%.

Jika dibandingkan dengan Nasional maka, Struktur PDRB nasional didominasi oleh Lapangan usaha Industri pengolahan sebesar 18,34%; Lapangan usaha Pedagang Besar & Eceran; Reparasi, Mobil & Sepeda Motor sebesar 12,85%; Lapangan Usaha Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sebesar 12,40%; Lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 12,22%, dan Lapangan usaha Konstruksi sebesar 9,77%.

Potensi pembangunan wilayah Sumatera Barat dapat dikelompokkan atas beberapa wilayah atau kawasan. Dalam hal ini pengelompokan didasarkan pada kandungan potensi sumberdaya alam pada masing-masing wilayah. Analisis ini diperlukan untuk dapat merumuskan strategi dan kebijakan pembangunan wilayah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh wilayah dan kawasan bersangkutan, antara lain:

Kawasan Perikanan dan Kelautan : terbagi dalam 2 aktivitas yaitu perikanan air tawar (di daratan) dan perikanan laut/air payau (di wilayah laut). Akitivitas perikanan laut antara lain Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, Kepulauan Mentawai, Kota Pariaman, Agam dan Kabupaten Pasaman Barat. Sebagai daerah lautan (termasuk kawasan pantai), maka potensi pembangunan yang dimiliki adalah dalam aktivitas budidaya pembesaran dan penangkapan. Dewasa ini daerah-daerah perikanan laut yang cukup potensial untuk dikembangkan guna mendorong proses pembangunan daerah adalah Painan di Kabupaten Pesisir Selatan, Kecamatan Bungus di Kota Padang, Kota Pariaman dan Kecamatan Sasak di Kabupaten Pasaman Barat. Kawasan Bungus sudah sejak beberapa tahun yang lalu ditetapkan sebagai pusat perikanan laut untuk kawasan Pantai Barat Pulau Sumatera ini. Hal ini dilakukan mengingat hasil penelitian terdahulu memperlihatkan bahwa Samudra Indonesia yang terletak di kawasan Pantai Barat Sumatera Barat ini ternyata mempunyai potensi ikan Tuna yang besar dengan kualitas yang sangat baik, sementara aktivitas perikanan air tawar dalam bentuk pembenihan, pembesaran hampir seluruh kabupaten/kota memiliki potensi yang dapat dikembangkan.

Kawasan Tanaman Pangan antara lain Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Solok, Kabupaten Pasaman, Pasaman Barat, Padang Pariaman, Solok Selatan, Sijunjung, Dharmasraya dan Pesisir Selatan. Daerah ini merupakan daerah subur yang sejak lama berfungsi sebagai “lambung pangan” Sumatera Barat dengan produksi utama adalah padi, palawija dan tanaman pangan lainnya. Guna

meningkatkan produktivitas lahan, maka daerah ini sudah sejak lama dilengkapi dengan fasilitas irigasi yang cukup memadai. Dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan, ke depan daerah ini akan terus dikembangkan sebagai penghasil utama komoditi pangan untuk daerah Sumatera Barat maupun provinsi tetangga terutama Riau.

Kawasan Perkebunan antara lain di Kabupaten Sijunjung, Padang Pariaman, Agam, Lima Puluh Kota, Pesisir Selatan Tanah Datar Pasaman, Kabupaten Solok, Dharmasraya, Solok Selatan dan Pasaman Barat, maka produk utama daerah ini adalah karet, kelapa sawit, kopi, gambir, kakao dan teh yang merupakan komoditi ekspor utama Sumatera Barat. Dalam meningkatkan nilai tambah telah dibangun pula industri karet remah (crumb-rubber) terutama di kota Padang dan pabrik minyak sawit (crude palm oil/CPO) terutama di daerah Pasaman Barat dan Dharmasraya. Ke depan kawasan ini akan terus dikembangkan sebagai daerah perkebunan besar dalam rangka mendukung peningkatan ekspor daerah Sumatera Barat.

Kawasan Pertambangan, antara lain di Kota Sawahlunto dan Kabupaten Sijunjung dengan produksi utama adalah batubara. Walaupun sejak beberapa tahun terakhir ini terjadi penurunan jumlah produksi karena berkurangnya produksi tambang luar, namun demikian potensi tambang dalam sebenarnya masih sangat besar. Disamping itu kualitas batubara produksi daerah ini terkenal cukup baik dan mempunyai harga yang relatif cukup tinggi.

b. Pertumbuhan Ekonomi

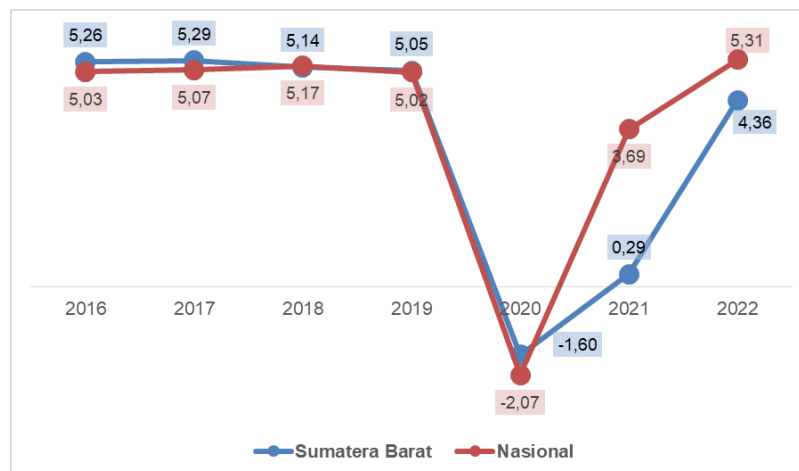
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktifitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 2 (dua) pendekatan, yaitu pendekatan lapangan usaha dan pengeluaran yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan. Pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah diukur berdasarkan pertambahan nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) antara 2 (dua) tahun.

Keduanya pendekatan tersebut menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya. PDB maupun PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas

produksinya. Sedangkan dari sisi pengeluaran menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir yakni tahun 2016-2020, pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat stagnan cenderung melambat dan menurun dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang sekitar 5% dan terus mengalami penurunan hingga hanya puncaknya mengalami kontraksi pada tahun 2020 sebesar 1,6% akibat dampak dari adanya pandemi covid 19. Dengan dilakukannya upaya pemulihan ekonomi secara intensif dan berkesinambungan, maka pada tahun pertumbuhan ekonomi nasional dan juga Sumatera Barat mengalami rebound dengan kondisi yang lebih baik dengan pertumbuhan yang signifikan. Dan dengan dilakukannya program-program pemulihan ekonomi yang berkelanjutan di tahun 2022, maka rebound pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 dapat terjaga dan ditingkatkan laju pertumbuhannya. Hal ini terlihat pada tahun 2021 capaian laju pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 3,69% sedangkan Sumatera Barat sebesar 0,29% dan pada tahun 2022 laju pertumbuhan ekonomi nasional tumbuh sebesar 5,31% dan Sumatera Barat sebesar 4,36%.

Grafik Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Sumatera Barat Tahun 2016-2022



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022

Pertumbuhan Ekonomi di 19 (Sembilan belas) Kabupaten/Kota di Sumatera Barat pada tahun 2022 seluruhnya mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2021. Pada tahun 2022, Laju Pertumbuhan Ekonomi tertinggi yakni pada Kabupaten Padang Pariaman dengan capaian 6,87%, diikuti oleh Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 4,94%, Kota Bukittinggi dengan capaian sebesar 4,68%. Capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi terendah yakni Kabupaten Sijunjung dengan capaian 3,95%, diikuti dengan

Kota Sawahlunto sebesar 3,98 dan Kabupaten Solok Selatan dengan capaian 4,02% dan Kabupaten Pesisir Selatan dengan capaian 4,02%.

Tabel Pertumbuhan Ekonomi Kab/Kota se Sumatera Barat
Tahun 2018-2022 (Persen)

No	Kab/Kota/Provinsi/Nasional	2018	2019	2020	2021	2022
1	Kab. Kep. Mentawai	4,91	4,76	-1,85	2,88	4,94
2	Kab. Pesisir Selatan	5,35	4,81	-1,11	3,37	4,02
3	Kab. Solok	5,22	5,07	-1,14	3,31	4,31
4	Kab. Sijunjung	5,09	4,83	-1,10	3,15	3,95
5	Kab. Tanah Datar	5,07	5,01	-1,12	3,30	4,20
6	Kab. Padang Pariaman	5,46	2,51	-10,46	2,18	6,87
7	Kab. Agam	5,26	4,81	-1,37	3,70	4,21
8	Kab. Lima Puluh Kota	5,26	5,10	-1,16	3,33	4,04
9	Kab. Pasaman	5,00	4,84	-0,87	3,39	4,09
10	Kab. Solok Selatan	5,03	4,89	-1,24	3,35	4,02
11	Kab. Dharmasraya	5,31	4,98	-1,39	3,42	4,28
12	Kab. Pasaman Barat	5,24	4,49	-1,34	3,75	4,17
13	Kota Padang	6,09	5,68	-1,86	3,66	4,33
14	Kota Solok	5,68	5,53	-1,42	3,56	4,60
15	Kota Sawahlunto	5,52	5,34	-1,27	2,49	3,98
16	Kota Padang Panjang	5,73	5,59	-1,44	3,46	4,39
17	Kota Bukittinggi	6,02	5,88	-1,74	3,61	4,68
18	Kota Payakumbuh	6,05	5,92	-1,65	3,59	4,52
19	Kota Pariaman	5,50	5,33	-1,32	3,53	4,55
	Sumatera Barat	5,16	5,05	-1,60	3,29	4,36
	Nasional	5,17	5,02	-2,07	3,69	5,31

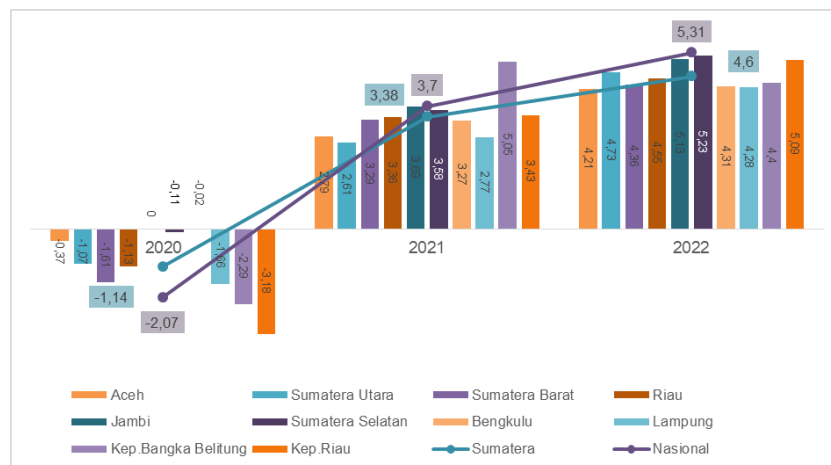
Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Sumatera Barat pada Tahun 2022, maka capaian tersebut dapat dikelompokkan pada :

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota yang berada di bawah Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 sebesar 4,36% sebanyak 12 (empat) Kabupaten/Kota yakni Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Agam, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Pasaman Barat, Kota Padang dan Kota Sawahlunto.
2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota yang berada di atas Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 sebesar 4,36% namun dibawah Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional Tahun 2022 sebesar 5,31% sebanyak 6 (enam) Kabupaten/Kota yakni Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kota Solok, Kota Padang Panjang, Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh, dan Kota Pariaman.
3. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota yang berada di atas Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional Tahun 2022 sebesar 5,31% sebanyak 1 (satu) Kabupaten yakni Kabupaten Padang Pariaman.

Posisi Sumatera Barat dalam laju pertumbuhan ekonomi di pulau Sumatera relatif tidak begitu tinggi jika dibandingkan dengan provinsi lainnya. Pada tahun 2022, Laju Pertumbuhan Sumatera Barat sebesar 4,36% hanya lebih tinggi dari Provinsi Aceh yang sebesar 4,21%, Provinsi Bengkulu sebesar 4,31% dan Provinsi Lampung sebesar 4,28%, serta jika di rata-ratakan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi yang berada di Pulau Sumatera Barat (sebanyak 10 Provinsi) sebesar 4,6%, maka laju Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat juga masih di bawah rata-rata Laju Pertumbuhan Ekonomi Pulau Sumatera, sebagaimana terlihat pada grafik dibawah ini.

Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2020-2022



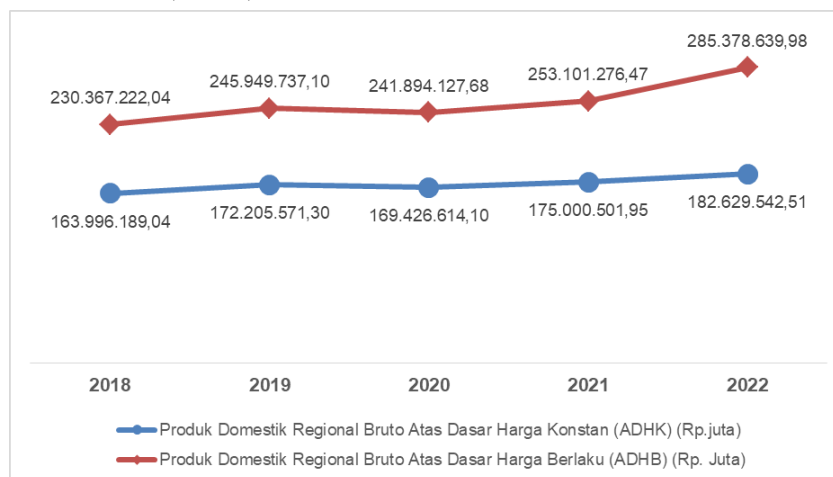
Sumber : Sumatera Barat Dalam Angka Tahun 2023

PDRB Sumatera Barat sejak Tahun 2016-2022 baik atas Atas Dasar Harga Konstan dan Atas Dasar Harga Berlaku mengalami perkembangan sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Pada Tahun 2018, PDRB ADHK sebesar Rp.163,9 Triliun yang kemudian mengalami kenaikan pada Tahun 2019 sebesar Rp.172,2 Triliun, namun dikarenakan adanya pandemic Covid mengakibatkan PDRB ADHK pada tahun 2020 menurun menjadi Rp.169,4 triliun, dan setelah adanya upaya pemulihan ekonomi hingga tahun 2022, maka PDRB ADHK sebesar Rp.182,6 triliun.

Kenaikan PDRB ADHK ini juga diikuti dengan kenaikan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) yang mempertimbangan kenaikan harga serta dampak inflasi. Pada Tahun 2018, PDRB ADHB Sumatera Barat sebesar Rp.230,3 triliun, meningkat pada tahun 2019 menjadi Rp.245,9 triliun dan mengalami penurunan di tahun 2020 akibat pandemic covid menjadi Rp.241,8 triliun dan hingga tahun 2022 ini PDRB ADHB Sumatera Barat

sebesar Rp.285,3 triliun. Adapun perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstans (ADHK) dan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Sumatera Barat Tahun 2018 – 2022 dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Sumatera Barat Tahun 2018-2022



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, 2023

PDRB melalui pendekatan lapangan usaha dan pengeluaran yang keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya. PDB maupun PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi pengeluaran menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.

PDRB menurut lapangan usaha terdiri dari 17 lapangan usaha. PDRB menurut lapangan usaha dirinci menurut total nilai tambah dari seluruh sektor ekonomi yang mencakup lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estat; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa lainnya.

Struktur ekonomi Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 menurut lapangan usaha didukung oleh tiga lapangan usaha utama yaitu lapangan

usaha pertanian, kehutanan dan perikanan, lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor serta lapangan usaha transportasi dan pergudangan. Ketiga lapangan usaha tersebut memberikan sumbangan terhadap perekonomian Provinsi Sumatera Barat sebesar 48,58%. Lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan sebagai penyumbang terbesar memberikan kontribusi sebesar 21,20%, menurun dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 21,69%. Berikutnya adalah lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, yang memberikan kontribusi sebesar 16,50%, meningkat apabila dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 15,84%. Sedangkan lapangan usaha transportasi dan pergudangan dengan kontribusi sebesar 10,88%, meningkat dibandingkan tahun 2021 sebesar 10,29%. Secara lebih rinci distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menurut Lapangan Usaha di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2022

Lapangan Usaha	Distribusi PDRB (%)				
	2018	2019	2020	2021	2022
1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	23,17	22,15	22,36	21,69	21,20
2. Pertambangan dan Penggalan	4,27	4,30	4,28	4,19	4,09
3. Industri Pengolahan	9,10	8,38	8,64	8,79	8,54
4. Pengadaan Listrik & Gas	0,11	0,11	0,10	0,10	0,10
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
6. Konstruksi	9,63	10,09	10,16	10,18	10,06
7. Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	15,30	15,79	15,77	15,84	16,50
8. Transportasi dan Pergudangan	12,65	12,60	10,44	10,29	10,88
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,37	1,43	1,24	1,27	1,35
10. Informasi dan Komunikasi	5,46	5,81	6,43	6,61	6,68
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	3,01	2,91	3,04	3,27	3,23
12. Real Estate	1,96	2,01	2,06	2,04	2,02
13. Jasa Perusahaan	0,44	0,44	0,44	0,43	0,42
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,92	6,13	6,72	6,89	6,52
15. Jasa Pendidikan	4,20	4,35	4,71	4,65	4,62
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,39	1,42	1,62	1,69	1,65
17. Jasa Lainnya	1,93	2,00	1,88	1,95	2,05
PDRB SUMATERA BARAT (%)	100	100	100	100	100

Sumber : Sumatera Barat Dalam Angka Tahun 2023

Jika dilihat pada tabel Distribusi PDRB menurut Lapangan Usaha diatas maka sejak tahun 2018-2022 terjadi pergeseran distribusi PDRB di Sumatera Barat secara perlahan. Distribusi Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan pada tahun 2018 sebesar 23,17% selalu mengalami penurunan hingga pada tahun 2022 sebesar 21,20%. Hal ini dapat dipahami bahwa semakin berkurangnya lahan pertanian yang tersedia

yang sebagian besar beralih fungsi menjadi lahan untuk permukiman seiring dengan meningkatnya jumlah dan kebutuhan penduduk. Begitupun dengan Lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian yang juga selalu mengalami penurunan dari sebesar 4,27% pada tahun 2018 menjadi 4,09% di tahun 2022. Sektor Lapangan Usaha Industri Pengolahan cenderung penurunan dan selanjutnya mengalami stagnasi atau tidak mengalami pergeseran yang berarti dari sebesar 9,10% di tahun 2018 mengalami penurunan di tahun 2019 menjadi 8,38% dan akhirnya pada tahun 2022 sebesar 8,54%. Sektor Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor cenderung mengalami peningkatan yang cukup berarti dari sebesar 15,30% di tahun 2018 selalu mengalami peningkatan hingga di tahun 2022 mencapai 16,50%.

Meskipun sektor lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan memiliki distribusi yang cukup besar pada struktur PDRB Sumatera Barat, namun laju pertumbuhannya di tahun 2022 masih relative kecil yakni sekitar 3,52% namun laju ini meningkat dibandingkan tahun 2021 sebesar 2,18%. Sektor Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan laju 5,60% di tahun 2022 dan meningkat jika dibandingkan tahun 2021 sebesar 5,10%. Pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2022 dialami oleh lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 15,80%, lapangan usaha jasa perusahaan sebesar 7,33%, dan lapangan usaha informasi dan komunikasi sebesar 7,02 %. Pada tahun 2022, tidak satupun lapangan usaha yang mengalami kontraksi pada tahun 2022. Secara lebih rinci laju pertumbuhan PDRB menurut Lapangan Usaha berdasarkan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2018 - 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2022

Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan PDRB (%)				
	2018	2019	2020	2021	2022
1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,52	2,48	1,18	2,18	3,52
2. Pertambangan dan Penggalian	5,79	6,22	-1,31	-1,77	1,94
3. Industri Pengolahan	-0,58	-1,98	-0,54	3,72	1,74
4. Pengadaan Listrik & Gas	4,09	4,20	-6,81	3,15	3,21
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang	2,24	6,10	-1,04	5,53	4,37
6. Konstruksi	7,00	8,47	-2,95	2,18	2,51
7. Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,99	7,29	-1,14	5,10	5,60
8. Transportasi dan Pergudangan	6,43	4,75	-16,10	2,54	5,73
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,23	8,11	-15,95	5,66	15,80
10. Informasi dan Komunikasi	8,52	8,73	9,55	6,42	7,02
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	0,99	2,29	1,34	8,46	4,54
12. Real Estate	4,67	6,78	0,22	2,41	5,78
13. Jasa Perusahaan	5,45	6,20	-3,98	1,13	7,33

Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan PDRB (%)				
	2018	2019	2020	2021	2022
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,97	6,96	- 0,59	0,85	0,89
15. Jasa Pendidikan	7,19	7,94	5,03	1,84	5,13
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,28	7,54	8,83	5,88	4,54
17. Jasa Lainnya	7,86	7,50	- 10,10	7,10	11,88
PDRB SUMATERA BARAT (%)	5,14	5,01	-1,61	3,29	4,36

Sumber : Sumatera Barat Dalam Angka Tahun 2023

Adapun nilai PDRB ADHK dan ADHB pada masing-masing Kabupaten/Kota di Sumatera Barat tahun 2020-2022 secara dominan berada di Kota Padang, hal ini wajar karena Kota Padang sebagai Ibu Kota Provinsi yang juga merupakan daerah dengan basis PDRB pada sektor Lapangan Usaha Perdagangan. Nilai PDRB Kota Padang berdasarkan ADHB pada tahun 2022 sebesar Rp. 72,961 triliun, sedangkan nilai PDRB ADHB yang terkecil yakni berada di Kota Padang Panjang sebesar Rp. 4,08 triliun. Secara lenih rinci PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) masing-masing Kabupaten/Kota tahun 2020-2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel PDRB Kabupaten/Kota se Sumatera Barat
Tahun 2020-2022 (Rp. miliar)

NO	KAB/KOTA	PDRB (Rp.miliar)					
		ATAS DASAR HARGA BERLAKU (ADHB)			ATAS DASAR HARGA KONSTAN (ADHK)		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	Kab. Kep. Mentawai	4.647,09	4.843,81	5.445,46	2.956,00	3.041,04	3.191,29
2	Kab. Pesisir Selatan	14.095,97	14.927,57	16.601,34	9.470,78	9.790,35	10.183,46
3	Kab. Solok	13.581,96	14.178,06	15.781,14	9.792,91	10.116,57	10.553,07
4	Kab. Sijunjung	9.136,55	9.566,57	10.668,55	6.683,02	6.893,21	7.165,52
5	Kab. Tanah Datar	13.023,10	13.590,93	15.055,22	9.575,89	9.892,15	10.307,42
6	Kab. Pdg Pariaman	17.934,814.60	18.455,08	22.193,36	11.939,47	12.199,84	13.037,57
7	Kab. Agam	20.376,570.25	21.351,35	23.827,65	14.409,16	14.942,56	15.572,20
8	Kab. Lima Puluh Kota	15.541,500.82	16.182,47	17.900,76	11.062,31	11.430,50	11.892,29
9	Kab. Pasaman	8.969,724.02	9.433,24	10.390,57	6.122,75	6.330,06	6.588,65
10	Kab. Solok Selatan	5.530,553.59	5.777,97	6.429,23	3.928,03	4.059,51	4.222,84
11	Kab. Dharmasraya	10.243,274.28	10.754,66	12.233,46	7.454,96	7.709,70	8.039,68
12	Kab. Pasaman Barat	15.253,000.84	15.931,87	17.889,12	11.258,35	11.679,97	12.166,81
13	Kota Padang	62.181,006.08	65.179,47	72.961,65	43.631,94	45.227,95	47.185,09
14	Kota Solok	4.041,639.82	4.251,89	4.793,15	2.835,75	2.936,82	3.071,87
15	Kota Sawahlunto	3.656,590.97	3.850,69	4.389,91	2.760,92	2.829,59	2.942,20
16	Kota Padang Panjang	3.473,230.92	3.651,11	4.086,54	2.543,40	2.631,51	2.747,10
17	Kota Bukittinggi	8.627,533.47	9.026,56	10.194,02	6.045,08	6.263,12	6.556,49
18	Kota Payakumbuh	6.827,094.79	7.303,10	8.250,30	4.414,29	4.572,89	4.779,54
19	Kota Pariaman	4.994,093.59	5.258,65	5.881,85	3.544,65	3.669,62	3.836,54
SUMATERA		169.426,61	175.000,50	182.629,54	241.894,12	253.101,27	285.378,63
NASIONAL		10.722.999,30	11.120.077,90	11.710.397,80	15.443.353,20	16.976.690,80	19.588.445,60

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Meskipun nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan dan Atas Dasar Harga Berlaku Sumatera Barat mengalami kenaikan yang cukup signifikan namun kontribusinya masih kecil jika dibandingkan dengan besaran persentase untuk Nasional dan Pulau Sumatera. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi di Sumatera Barat belum terlalu strategis di pulau Sumatera apalagi jika dibandingkan dengan Nasional. Laju pertumbuhan dan PRDB pulau Sumatera Barat didukung dengan Provinsi dengan jumlah

penduduk dan wilayah yang lebih besar antara lain Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan dan Lampung. Berdasarkan data BPS, bahwa PDRB ADHK Sumatera Barat pada tahun 2022 sebesar Rp.182.629,54 juta atau hanya sekitar 7,34% dari total PDRB ADHK pulau Sumatera atau hanya sekitar 0,0015% dari total PDB ADHK nasional. Begitupun jika dinilai dengan PDRB ADHB Sumatera Barat yang pada tahun 2022 sebesar Rp. 285.378,64 juta atau hanya sekitar 6,76% dari total PDRB ADHB pulau Sumatera atau hanya sekitar 0,0014% dari total PDB Nasional yang secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel Laju Pertumbuhan Ekonomi, PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2022.

No	Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi (%)	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Rp. Juta)	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Rp. Juta)
1	Aceh	4.21	140.947,64	211.750,02
2	Sumatera Utara	4.73	573.528,77	955.193,09
3	Sumatera Barat	4.36	182.629,54	285.378,64
4	Riau	4.55	529.532,98	991.589,59
5	Jambi	5.13	161.717,68	276.316,37
6	Sumatera Selatan	5.23	343.483,65	591.603,48
7	Bengkulu	4.31	49.916,06	90.111,95
8	Lampung	4.28	257.534,19	414.131,42
9	Kep.Bangka Belitung	4.40	57.803,20	95.285,43
10	Kep.Riau	5.09	190.163,70	308.842,68
Sumatera		4,6	2.487.257,41	4.220.202,67
Nasional		5,31	11.710.397.800	19.588.445.600

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022

Dari nilai PDRB baik ADHK maupun ADHB tersebut jika dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun maka dihasilkan nilai PDRB per kapita. Nilai ini menunjukkan tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk per kapita. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir nilai PDRB per kapita Provinsi Sumatera Barat jika dihitung berdasarkan Atas Dasar Harga Konstan relatif meningkat dari Rp. 30,47 juta pada tahun 2018 menjadi Rp. 31,42 juta pada tahun 2019, selanjutnya kondisi pandemi COVID-19 membuat pertumbuhan PDRB per kapita ADHK terkontraksi ke angka Rp. 30,69 juta dan pada tahun 2021 mencapai angka Rp.31,36 juta serta di tahun 2020 mencapai angka Rp.32,37 juta. Hal ini mengindikasikan bahwa pendapatan tiap penduduk Sumatera Barat secara rata-rata telah mencapai angka Rp. 32 juta lebih per tahunnya.

Jika mempertimbangkan adanya kenaikan harga produksi serta inflasi, maka yang digunakan adalah PDRB Atas Dasar Harga Berlaku, dengan tetap dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun maka PDRB per kapita Sumatera Barat berdasarkan ADHB pada tahun 2018 mencapai Rp.42,80 juta, pada tahun 2019 mencapai Rp.44,88 juta dan pada tahun 2022 mencapai 50,59 juta. Adapun perkembangan capaian PDRB per kapita di

Sumatera Barat berdasarkan ADHK dan ADHB Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel Perkembangan PDRB dan PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) di Sumatera Barat Tahun 2018-2022

RINCIAN	2018	2019	2020	2021	2022
PDRB ADHK (Rp. juta)	163.996.189,04	172.205.571,30	169.426.614,1	75.000.501,95	182.629.542,51
PDRB ADHB (Rp. juta)	230.367.222,04	245.949.737,1	41.894.127,68	53.101.276,47	285.378.639,98
Penduduk Pertengahan Tahun (jiwa)	5.382.077	5.479.491	5.519.463	5.580.232	5.640/629
PDRB Per Kapita ADHK (Rp.)	30.470.799,48	31.427.293,39	30.696.213,40	31.360.793,23	32.377.513,66
PDRB Per Kapita ADHB (Rp.)	42.802.661,88	44.885.508,01	43.825.663,42	45.356.765,90	50.593.407,22

Sumber : Sumatera Barat Dalam Angka Tahun 2023

Sedangkan PDRB Perkapita ADHB dan ADHK Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2018-2022 juga banyak didorong oleh wilayah administrasi Kota dibandingkan dengan Kabupaten. Pada tahun 2022, PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku dengan capaian tertinggi yakni pada Kota Bukittinggi sebesar Rp.74,24 juta sedangkan PDRB Atas Harga Konstan sebesar Rp.51,51 juta, dan capaian terendah untuk PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku dengan capaian terendah yakni pada Kabupaten Pesisir Selatan sebesar Rp.29,29 juta sedangkan PDRB Atas Harga Konstan sebesar Rp.19,21 juta. Secara lebih rinci capaian PDRB Perkapita Atas Harga Berlaku dan PDRB Atas Harga Konstan masing-masing Kabupaten/Kota Tahun 2018-2022 dapat terlihat pada table dibawah ini.

Tabel PDRB Perkapita Atas Harga Berlaku menurut Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat Tahun 2018-2022 (Juta Rupiah)

No	Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022
1	Kab. Kep. Mentawai	47,05	50,12	53,18	54,80	60,91
2	Kab. Pesisir Selatan	28,31	30,11	28,04	29,29	32,14
3	Kab. Solok	34,09	36,20	34,77	35,96	39,66
4	Kab. Sijunjung	36,30	38,15	38,99	40,31	44,39
5	Kab. Tanah Datar	35,12	37,53	35,09	36,36	40,01
6	Kab. Padang Pariaman	49,45	50,95	41,72	42,61	50,88
7	Kab. Agam	39,24	41,60	38,63	39,96	44,05
8	Kab. Lima Puluh Kota	38,27	40,60	40,59	41,96	46,09
9	Kab. Pasaman	29,87	31,46	30,02	31,12	33,79
10	Kab. Solok Selatan	30,96	32,24	30,54	31,25	34,08
11	Kab. Dharmasraya	40,14	41,17	44,98	46,51	52,12
12	Kab. Pasaman Barat	33,52	34,31	35,46	36,51	40,42
13	Kota Padang	61,23	65,13	68,50	71,35	79,37
14	Kota Solok	53,43	56,47	55,29	57,09	63,19
15	Kota Sawahlunto	55,00	58,61	56,29	58,62	66,10
16	Kota Padang Panjang	60,34	64,18	61,92	64,08	70,64
17	Kota Bukittinggi	62,20	65,89	71,39	74,23	83,34
18	Kota Payakumbuh	45,88	49,87	49,10	51,72	57,56
19	Kota Pariaman	52,67	56,12	53,20	55,18	60,81
Sumatera Barat		42,80	44,88	43,86	45,43	50,52
Nasional		55,99	59,31	57,27	62,23	71,03

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Tabel PDRB Perkapita Atas Harga Konstan menurut Kab/Kota se Sumatera Barat Tahun 2018-2022 (Juta Rupiah)

No	Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022
1	Kab. Kep. Mentawai	31,83	32,36	33,83	34,41	35,70
2	Kab. Pesisir Selatan	19,84	20,55	18,84	19,21	19,71
3	Kab. Solok	25,42	26,41	25,08	25,67	26,52
4	Kab. Sijunjung	27,58	28,18	28,52	29,05	29,81
5	Kab. Tanah Datar	26,56	27,76	25,81	26,47	27,39
6	Kab. Padang Pariaman	31,51	31,96	27,78	28,17	29,89
7	Kab. Agam	28,58	29,59	27,31	27,97	28,70
8	Kab. Lima Puluh Kota	28,08	29,09	28,90	29,64	30,62
9	Kab. Pasaman	21,17	21,82	20,49	20,88	21,43
10	Kab. Solok Selatan	22,53	23,01	21,69	21,96	22,38
11	Kab. Dharmasraya	29,83	30,08	32,74	33,34	34,25
12	Kab. Pasaman Barat	25,09	25,43	26,18	26,77	27,50
13	Kota Padang	44,82	46,39	48,07	49,51	35,70
14	Kota Solok	39,09	40,13	38,80	39,44	19,72
15	Kota Sawahlunto	42,91	44,55	42,50	43,08	26,53
16	Kota Padang Panjang	46,14	47,67	45,34	46,19	29,82
17	Kota Bukittinggi	45,14	46,62	50,02	51,51	27,40
18	Kota Payakumbuh	31,71	32,80	31,75	32,38	29,70
19	Kota Pariaman	38,94	40,27	37,76	38,51	28,80
Sumatera Barat		30,48	31,43	30,69	31,36	32,38
Nasional		39,34	40,84	39,77	40,78	42,46

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat

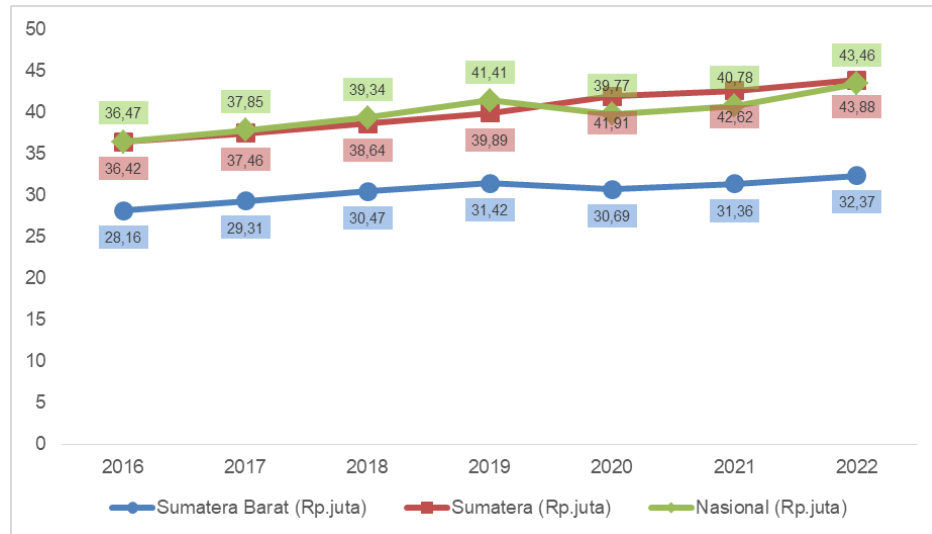
Angka capaian PDRB ADHK dan PDRB ADHB per kapita Sumatera Barat jika dibandingkan dengan rata-rata di regional Sumatera maupun Nasional masih relative rendah. PDRB Perkapita yang tertinggi di Provinsi Riau dengan capaian di tahun 2022 sebesar Rp.80,05 juta berdasarkan ADHK dan sebesar Rp.149,91 juta berdasarkan ADHB, PDRB per kapita terendah yakni di Provinsi Bengkulu dengan capaian di tahun 2022 berdasarkan ADHK sebesar Rp.24,23 juta dan berdasarkan ADHB mencapai Rp.43,74 juta. Secara lebih rinci perkembangan PDRB per kapita masing-masing Provinsi di Pulau Sumatera pada tahun 2020-2022 dapat terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan dan Atas Dasar Harga Berlaku masing-masing Provinsi di Pulau Sumatera dan perbandingan dengan Nasional Tahun 2020-2022

No	Provinsi	PDRB Perkapita (Rp.Ribu)					
		ADHK			ADHB		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	Aceh	25.018,28	25.357,70	26.063,50	31.633,38	34.680,92	39.156,01
2	Sumatera Utara	36.175,16	36.666,20	37.943,83	54.979,04	57.574,03	63.194,18
3	Sumatera Barat	30.696,21	31.360,79	32.377,51	43.825,66	45.356,77	50.593,41
4	Riau	76.884,74	77.995,51	80.057,79	114.166,90	129.205,64	149.914,13
5	Jambi	41.926,04	42.906,66	44.536,39	57.957,73	64.729,82	76.096,40
6	Sumatera Selatan	37.323,24	38.172,97	39.676,95	53.842,74	57.731,33	68.338,10
7	Bengkulu	23.105,92	23.539,17	24.230,02	36.552,50	39.156,38	43.741,71
8	Lampung	26.746,64	27.193,59	28.064,39	39.290,33	40.872,87	45.129,34
9	Kep.Bangka Belitung	36.307,61	37.585,50	38.674,15	52.023,40	58.351,43	63.752,24
10	Kep.Riau	85.012,58	85.425,89	87.238,26	123.464,79	130.118,86	141.682,65
Sumatera		41.919,64	42.620,40	43.886,28	60.773,65	65.777,81	74.159,82
Nasional		39.778,68	40.780,31	42.463,78	57.289,59	62.258,08	71.030,85

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Grafik Perkembangan PDRB ADHK per Kapita Provinsi Sumatera Barat, Pulau Sumatera, dan Nasional Tahun 2016-2022 (Rp. juta)



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat

Dilihat dari pola distribusi penggunaan tahun 2022, pengeluaran konsumsi rumah tangga di Provinsi Sumatera Barat masih merupakan penyumbang terbesar dalam pembentukan PDRB Provinsi Sumatera Barat sebesar 53,32%. Penyumbang kedua adalah pembentukan modal tetap bruto sebesar 29,22% dan pengeluaran konsumsi pemerintah 10,22%. Laju pertumbuhan dan distribusi menurut pengeluaran Tahun 2018-2022 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel Laju Pertumbuhan dan Distribusi Menurut Pengeluaran Tahun 2018-2022 (persen)

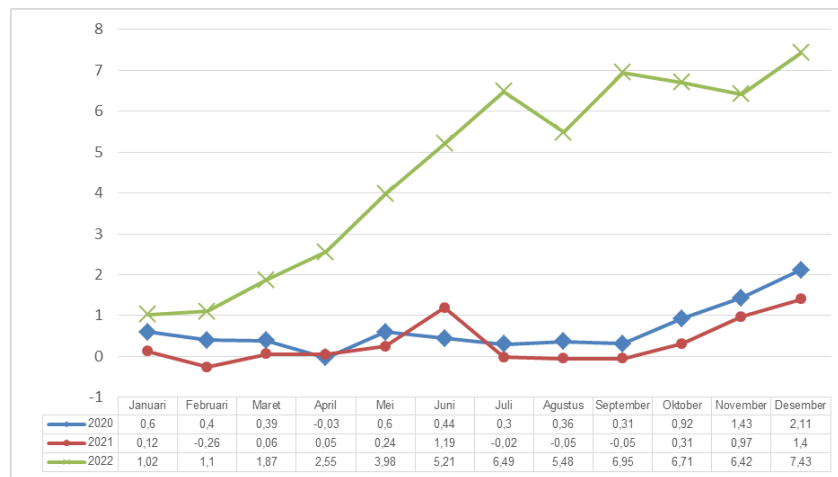
Komponen Pengeluaran	Laju Pertumbuhan Atas Dasar Harga Konstan 2010					Distribusi Atas Dasar Harga Berlaku				
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4,62	4,74	-2,47	1,97	4,12	53,23	54,41	54,11	53,80	53,32
Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit	6,54	11,85	-4,39	1,79	-0,53	1,06	1,14	1,12	1,10	1,03
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	4,40	5,00	-8,64	0,15	-3,13	12,59	12,58	11,80	11,65	10,22
Pembentukan Modal Tetap Bruto	3,52	5,16	-2,70	1,80	3,71	29,82	30,11	30,01	29,77	29,22
Perubahan Inventori	68,68	-60,75	261,03	0,91	121,21	0,11	0,04	0,15	0,14	0,30
Net Ekspor Barang & Jasa	16,56	6,12	18,31	20,49	13,31	3,19	1,72	2,82	3,53	5,91
PDRB SUMATERA BARAT	5,14	5,01	-1,60	3,29	4,36	100	100	100	100	100

Sumber : Sumatera Barat Dalam Angka, 2023

c. Laju Inflasi

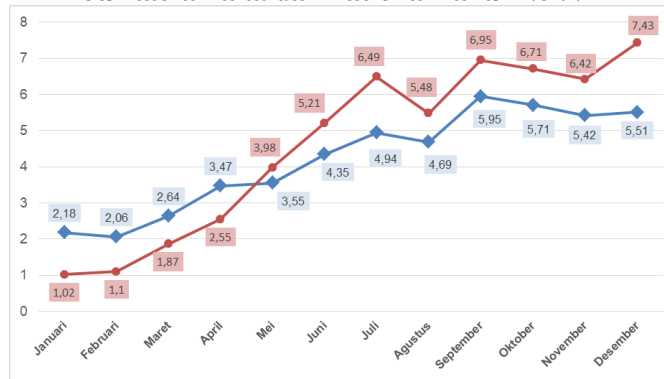
Inflasi merupakan suatu kecenderungan kenaikan harga-harga barang dan jasa secara umum pada suatu negara/daerah dalam kurun waktu yang terus-menerus (kontinu) disebabkan karena ketidakseimbangan arus uang dan barang sesuai dengan mekanisme pasar, yaitu oleh faktor permintaan (demand) dan penawaran (supply) barang yang beredar di pasaran. Berbagai faktor yang menyebabkan kenaikan harga secara menyeluruh antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, tingginya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi, atau ketidاكلancaran distribusi barang. Tingginya inflasi berdampak pada penurunan daya beli masyarakat yang pada akhirnya mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Tingkat inflasi di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2022 cenderung tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2020, tingkat Inflasi di Sumatera Barat terjaga sebesar 2,11, pada tahun 2021 sebesar 1,4 dan meningkat tajam pada tahun 2022 dengan capaian 7,43. Laju inflasi pun di tahun 2022 meningkat dari Bulan Januari yang sebesar 1,02 meningkat di Akhir Tahun pada bulan Desember 2022 menjadi 7,43. Berikut perkembangan Laju Inflasi Kalender 2022 di Sumatera Barat sebagaimana grafik dibawah ini.

Grafik Perkembangan Inflasi Year on Year
Gabungan 2 Kota di Sumatera Barat Tahun 2020 - 2022



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

Grafik Perkembangan Inflasi Year on Year Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2022



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan Berita Resmi Statistik bahwa pada Desember 2022, inflasi Year on Year (yoy) Kota Padang sebesar 7,38 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 114,70 dan Kota Bukittinggi sebesar 7,76 persen dengan IHK sebesar 114,86 sehingga secara agregat, inflasi Year on Year gabungan 2 kota sebesar 7,43 persen dengan IHK sebesar 114,72.

Inflasi yoy Gabungan 2 Kota terjadi karena adanya kenaikan IHK pada semua kelompok pengeluaran, yakni kelompok transportasi sebesar 16,65%; kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 9,39%; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 6,74%; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 5,98%; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 5,62 %; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 3,81%; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 2,97%; kelompok pendidikan sebesar 2,33% ; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 2,15%; kelompok kesehatan sebesar 2,09%; serta kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 2,07%, yang secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel Inflasi Gabungan 2 Kota Desember 2022, Tahun Kalender 2022, dan Year on Year menurut Kelompok Pengeluaran (2018=100)

No	Kelompok Pengeluaran	IHK Des 2020	IHK Des 2021	IHK Des 2022	Tingkat Inflasi Des 2022 (%)	Tingkat Inflasi Tahun Kalender 2022 (%)
1	Makanan, Minuman, Tembakau	107.85	108.80	119.02	1.94	9.39
2	Pakaian dan Alas Kaki	102.77	103.51	105.65	0.01	2.07
3	Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar	100.84	102.48	106.38	0.09	3.81
4	Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	105.46	108.61	115.93	0.06	6.74
5	Kesehatan	104.72	111.24	113.56	0.17	2.09
6	Transpotasi	104.58	106.19	123.87	1.39	16.65
7	Informasi, Komunikasi, dan	100.18	100.88	103.05	0.00	2.15

No	Kelompok Pengeluaran	IHK Des 2020	IHK Des 2021	IHK Des 2022	Tingkat Inflasi Des 2022 (%)	Tingkat Inflasi Tahun Kalender 2022 (%)
	Jasa Keuangan					
8	Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	112.95	119.92	123.48	1.05	2.97
9	Pendidikan	104.76	104.63	107.07	0.00	2.33
10	Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	105.42	106.87	112.88	0.23	5.62
11	Perawatan Pribadi dan jasa Lainnya	112.21	114.45	121.29	1.14	5.98
	Umum	105.32	106.79	114.72	0.94	7.43

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

Kelompok yang dominan memberikan andil inflasi yoy Gabungan 2 Kota di Sumatera Barat Desember 2022 adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 2,84 persen; diikuti kelompok transportasi sebesar 2,38%; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,56%; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,54%; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,36%; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,27%; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,14%; kelompok pendidikan sebesar 0,13%; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,11%; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,06%; dan kelompok kesehatan sebesar 0,04%.

Secara mtm, kelompok yang dominan memberikan andil inflasi Gabungan 2 Kota di Sumatera Barat Desember 2022 adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,59%; diikuti kelompok transportasi sebesar 0,22%; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,07%; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya serta kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran masing-masing sebesar 0,02%; dan kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,01%. Sementara itu, kelompok pakaian dan alas kaki; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga; kelompok kesehatan; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan; serta kelompok pendidikan memberikan andil yang tidak dominan.

Tabel Andil Inflasi/Deflasi menurut Kelompok Pengeluaran
Gabungan 2 Kota, Desember 2022 (2018=100)

No	Kelompok Pengeluaran	Andil Month to Month (Mtm) (%)	Andil Year on Year (yoy) (%)
1	Makanan, Minuman, Tembakau	0,59	2,84
2	Pakaian dan Alas Kaki	0,00	0,14
3	Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar	0,02	0,56
4	Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan	0,00	0,27

No	Kelompok Pengeluaran	Andil Month to Month (Mtm) (%)	Andil Year on Year (yoy) (%)
	Rutin Rumah Tangga		
5	Kesehatan	0,00	0,04
6	Transpotasi	0,22	2,38
7	Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	0,00	0,11
8	Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	0,02	0,06
9	Pendidikan	0,00	0,13
10	Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	0,02	0,54
11	Perawatan Pribadi dan jasa Lainnya	0,07	0,36
	Umum	0,94	7,43

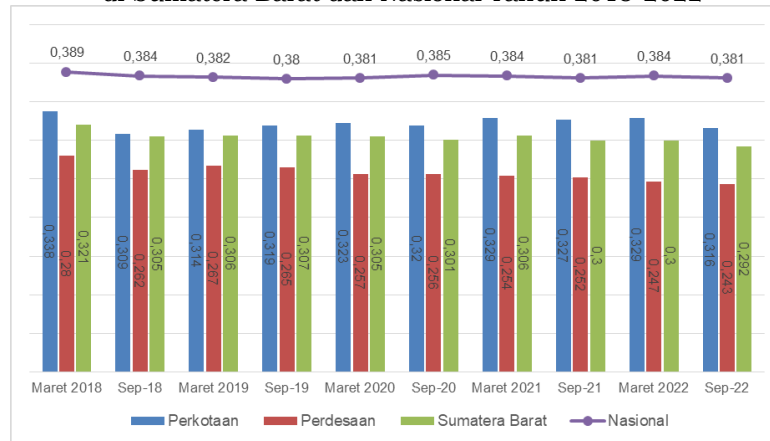
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

d. Gini Ratio / Ketimpangan Pendapatan

Gini Ratio merupakan salah satu alat yang mengukur tingkat kesenjangan pembagian pendapatan relatif antar penduduk suatu wilayah. Nilai gini ratio berada di antara 0 dan 1. Nilai 0 menunjukkan ketimpangan pendapatan merata sempurna, yaitu setiap orang memiliki jumlah penghasilan atau kekayaan yang sama persis. Nilai 1 menunjukkan distribusi yang timpang sempurna yaitu satu orang memiliki segalanya dan semua orang lain tidak memiliki apa-apa. Jika nilai Indeks Gini kurang dari 0,3 masuk dalam kategori ketimpangan “rendah”; nilainya antara 0,3 hingga 0,5 masuk dalam kategori ketimpangan “moderat”; dan jika nilainya lebih besar dari 0,5 dikatakan berada dalam ketimpangan “tinggi”.

Ketimpangan pendapatan di Provinsi Sumatera Barat terlihat mengalami penurunan dalam kurun waktu 2018 sampai dengan 2022 dan secara umum berada di bawah angka nasional. Jika dilihat dari angka capaian, baik Sumatera Barat maupun Indonesia berada dalam kategori moderat atau sedang. Pencapaian Gini Ratio Sumatera Barat pada tahun 2022 kondisi bulan Maret adalah sebesar 0.300 dan mengalami penurunan pada September 2022 menjadi 0,292, sedikit lebih baik sedikit dibandingkan capaian Gini Ratio pada tahun 2021 sebesar 0.306 (menurun sebesar 0.006 poin). Perkembangan Gini Ratio Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik Gini Ratio Menurut Daerah Tempat Tinggal di Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2018-2022



Sumber : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan daerah tempat tinggal, Gini Ratio di daerah perkotaan selalu lebih besar daripada daerah perdesaan. Hal ini menunjukkan tingkat ketimpangan di area perkotaan lebih tinggi dibandingkan daerah perdesaan. Pada Maret 2022, Gini Ratio perkotaan adalah 0,329 naik 0,002 poin dibandingkan periode September 2021 yang sebesar 0,327 namun pada September 2022 mengalami penurunan dengan capaian 3,316. Di daerah perdesaan, kondisi September 2022 merupakan capaian paling rendah yakni sebesar 0,243. Rendahnya ketimpangan di perdesaan salah satunya diakibatkan masih honogennya kegiatan perekonomian di pedesaan yang mayoritas masih bergerak pada sektor pertanian. Sedangkan di Perkotaan, dengan basis ekonomi yang di dominasi dengan Perdagangan dan jasa sehingga aktifitas ekonomi masyarakat cenderung variative sehingga juga mengakibatkan tingkat pendapatan antara penduduk juga akan sangat berbeda.

Salah satu upaya yang lain yang dapat dilakukan untuk menekan angka ketimpangan pendapatan (gini ratio), yakni belanja modal pemerintah dalam bentuk pembangunan infrastruktur agar tidak difokuskan pada wilayah perkotaan saja. Perlu ditingkatkan kordinasi antara Pemerintah Pusat dan pemda dalam perencanaan pembangunan infrastruktur tersebut agar dapat dilakukan secara merata di wilayah perkotaan dan perdesaan.

Jika dibandingkan dengan Provinsi lain di Kawasan Sumatera, Provinsi Sumatera Barat merupakan provinsi nomor 3 terendah dengan nilai Gini Ratio sebesar 0.292. Provinsi dengan nilai Gini Ratio paling rendah adalah Provinsi Kepulauan Belitung sebesar 0.255 dan diikuti dengan Aceh sebesar 0.291.

Tabel Gini Ratio Provinsi di Sumatera dan Indonesia
Tahun 2020-2022

NO	PROVINSI	2020		2021		2022	
		MARET	SEPT	MARET	SEPT	MARET	SEPT
1	Aceh	0.323	0.319	0.324	0.323	0.311	0.291
2	Sumatera Utara	0.316	0.314	0.314	0.313	0.312	0.326
3	Sumatera Barat	0.305	0.301	0.306	0.300	0.300	0.292
4	Riau	0.329	0.321	0.326	0.327	0.326	0.323
5	Jambi	0.320	0.316	0.321	0.315	0.320	0.335
6	Sumatera Selatan	0.339	0.338	0.341	0.340	0.339	0.330
7	Bengkulu	0.334	0.323	0.326	0.321	0.315	0.315
8	Lampung	0.327	0.320	0.323	0.314	0.314	0.313
9	Kep. Bangka Belitung	0.262	0.257	0.256	0.247	0.236	0.255
10	Kepulauan Riau	0.339	0.334	0.343	0.339	0.342	0.325
INDONESIA		0.381	0.385	0.384	0.381	0.384	0.381

Sumber : Badan Pusat Statistik

Gini Ratio di Kabupaten/Kota di Sumatera Barat hanya dapat diukur pada kondisi Bulan maret setiap tahunnya. Berdasarkan data BPS Provinsi Sumatera Barat, capaian gini ratio tertinggi pada tahun 2022 yakni di Kota Padang dengan capaian 0,354 dan juga Kota Bukittinggi dengan capaian 0.314, sedangkan capaian terendah yakni di Kabupaten Lima Puluh Kota dengan capaian 0.208 dan Kabupaten Pasaman dengan capaian 0,230. Adapun capaian Gini Ratio dari masing-masing Kabupaten/Kota dapat terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel Indeks Gini Ratio menurut Kab/Kota
se Sumatera Barat Tahun 2017-2022

No	KABUPATEN/KOTA	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Kab. Kep. Mentawai	0.319	0.306	0.306	0.305	0.321	0.233
2	Kab. Pesisir Selatan	0.299	0.255	0.336	0.273	0.253	0.246
3	Kab. Solok	0.294	0.303	0.246	0.264	0.246	0.243
4	Kab. Sijunjung	0.333	0.300	0.285	0.277	0.270	0.243
5	Kab. Tanah Datar	0.262	0.288	0.293	0.269	0.250	0.251
6	Kab. Padang Pariaman	0.280	0.296	0.278	0.273	0.269	0.245
7	Kab. Agam	0.279	0.257	0.297	0.257	0.272	0.298
8	Kab. Lima Puluh Kota	0.262	0.283	0.251	0.278	0.244	0.208
9	Kab. Pasaman	0.260	0.266	0.238	0.222	0.248	0.230
10	Kab. Solok Selatan	0.299	0.309	0.330	0.310	0.277	0.253
11	Kab. Dharmasraya	0.252	0.264	0.295	0.307	0.268	0.287
12	Kab. Pasaman Barat	0.286	0.290	0.278	0.280	0.261	0.277
13	Kota Padang	0.338	0.344	0.283	0.258	0.343	0.354
14	Kota Solok	0.299	0.296	0.312	0.312	0.277	0.288
15	Kota Sawahlunto	0.299	0.310	0.271	0.286	0.295	0.314
16	Kota Padang Panjang	0.300	0.290	0.289	0.300	0.306	0.296

No	KABUPATEN/KOTA	2017	2018	2019	2020	2021	2022
17	Kota Bukittinggi	0.313	0.337	0.322	0.394	0.286	0.317
18	Kota Payakumbuh	0.303	0.302	0.267	0.265	0.316	0.311
19	Kota Pariaman	0.301	0.316	0.276	0.325	0.301	0.272
	Sumatera Barat	0.318	0.321	0.306	0.305	0.306	0.300

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

e. Aspek Pelayanan Umum

Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1) Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah

Keberadaan koperasi di tengah-tengah masyarakat mampu memberikan nilai tambah terhadap pendapatan masyarakat khususnya anggota koperasi dari tahun ke tahun. Nilai tambah pendapatan masyarakat dalam bentuk PDRB koperasi tersebut berasal dari pendapatan koperasi yang berasal dari usaha yang dijalankan oleh koperasi, baik dari usaha simpan pinjam maupun usaha sektor rill seperti pengadaan saprodi pada koperasi produsen, waserda pada koperasi konsumen, pemasaran hasil produksi anggotanya pada koperasi pemasaran dan jasa biro pariwisata, travel pada koperasi jasa dan usaha-usaha lainnya yang sesuai dengan jenis koperasi serta jenis usaha yang tercantum di dalam anggaran dasar masing-masing koperasi.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan pilar utama perekonomian masyarakat Indonesia khususnya Sumatera Barat. Keberadaan UMKM diharapkan dapat menjadi daya ungkit bagi masyarakat Sumatera Barat yang memiliki jiwa berwirausaha. Aktivitas UMKM merupakan kegiatan ekonomi yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat dalam mencukupi kebutuhan hidup dan memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam aktivitasnya. Untuk itu dibutuhkan perhatian khusus bagi Pemerintah Daerah dalam mendorong tumbuh dan berkembangnya UMKM

Perkembangan jumlah koperasi di Sumatera Barat setiap tahunnya mengalami penurunan. Hal ini dapat disebabkan karena minat masyarakat kepada Koperasi yang konvensional semakin menurun dan lebih menyukai koperasi syariah sedangkan pertumbuhan koperasi syariah belumm teralu signifikan. Pada tahun 2020 dan 2021, dengan adanya pandemic covid maka banyak koperasi yang tidak menjalankan perannya sebagaimana mestinya dan tahun 2022 imbas dari pandemic covid masih terasa dengan masih banyaknya koperasi yang mulai tumbuh kembali. Secara lebih detail kinerja urusan Pemerntahan bidang Koperasi dan UMKM dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel Perkembangan Capaian dan Target Indikator
 Urusan Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah pada RPJMD Tahun 2021-2026

No	Indikator	Satuan	2021		2022		Target Kinerja			
			T	R	T	R	2023	2024	2025	2026
1	Persentase Koperasi yang berkualitas	%	16,43	2,65	17,94	17,98	20,49	24,39	29,21	35,01
2	Persentase Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	%	1,90	3,92	2	9,31	3	3,7	4,2	5

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat

Beberapa faktor pendorong dalam pencapaian target kinerja pada urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada tahun 2022 antara lain yakni adanya pendampingan yang dilakukan oleh Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) untuk mendampingi koperasi dalam melaksanakan RAT, adanya upaya memfasilitasi koperasi untuk dapat melakukan MoU dengan berbagai lembaga untuk mendukung permodalan koperasi, seperti dengan LPDB dan PIP, tersedianya beberapa program dari pemerintah untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian wirausaha serta adanya fasilitasi untuk wirausaha agar ikut andil dalam pelaksanaan beberapa even promosi seperti Bazar dan pameran.

Namun demikian, juga terdapat beberapa hal yang menjadi penghambat dalam pencapaiannya antara lain masalah kredit macet pada beberapa koperasi masih ada sehingga berdampak kepada penurunan volume usaha koperasi serta Koperasi terkendala dalam pengembangan usaha karena terbatasnya modal koperasi sehingga volume usaha koperasi tidak mengalami peningkatan.

2) Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Perkembangan realisasi investasi PMDN cukup berfluktuatif, dimana pada beberapa rentang waktu mengalami penurunan dan rentang waktu lainnya mengalami perbaikan atau peningkatan. Tahun 2020 dan 2021 merupakan tahun yang cukup berat bagi dunia investasi PMDN terutama PMA karena pada saat itu dengan Adanya pandemic covid megakibatkan beberapa dampak yang cukup signifikan terhadap masa depan perkembangan perekonomian yang tidak dapat di prediksi dengan baik.

Tahun 2022 merupakan tahun pemulihan ekonomi dan diharapkan beberapa investasi PMDN dan PMA mulai masuk kembali ke Sumatera Barat. Namun demikian persoalan investasi di Sumatera Barat meskipun iklim investasi semakin membaik masih terdapat beberapa permasalahan mendasar yang belum terselesaikan antara lain masih lemahnya dukungan infrastruktur menunjang potensi investasi serta

masih terdapat regulasi kebijakan di daerah belum sepenuhnya mendukung potensi investasi, adanya permasalahan lahan yang ada di Sumatera Barat yang dominan merupakan Tanah ulayat, Tanah kaum dan sebagainya sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk proses penyelesaian permasalahan lahan, terdapatnya permasalahan Tata Ruang atau Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) sehingga banyak pelaku usaha/Perusahaan PMA/PMDN tidak jadi melanjutkan rencana investasinya dikarenakan tidak ada kesesuaian tata ruang untuk investasi. Serta Sistem Perizinan Online Single Submissin (OSS) masih belum sempurna dalam pengembangan sehingga terdapat kendala dalam pelaksanaan perizinan di daerah.

Tabel Perkembangan Capaian dan Target Indikator
Urusan Wajib Penanaman Modal Provinsi Sumatera Barat
pada RPJMD Tahun 2021-2026

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	TARGET KINERJA							
	2021		2022		2023	2024	2025	2026
	T	R	T	R	T	T	T	T
Persentase peningkatan investasi di provinsi (%)	6,00	-16,69	6,00	0,51	8,00	9,50	10,50	11,50

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat

Urusan Pilihan

1) Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Capaian urusan pilihan Pariwisata pada tahun 2022 menunjukkan perubahan perbaikan yang cukup signifikan. Penurunan angka kunjungan wisatawan sebelum tahun 2022 diakibatkan oleh banyak factor.

Pada tahun 2018 terjadi penurunan kunjungan wisata yang disebabkan karena adanya bencana alam melanda Sumatera Barat. Selanjutnya pada tahun 2019 angka kunjungan wisata nusantara di Sumatera Barat masih tergolong rendah yang dipengaruhi oleh kenaikan harga tiket domestik sejak Januari 2019. Sedangkan pada tahun 2020 dan 2021 terjadi penurunan kunjungan wisatawan mancanegara yang sangat signifikan, yaitu hanya 10.875 orang wisman yang datang ke Sumatera Barat (-82,21%) di tahun 2020 dan 1.142 orang wisman di tahun 2021. Penyebab utama penurunan kunjungan wisatawan ke Sumatera Barat adalah pandemi covid-19 yang melanda dunia internasional termasuk Sumatera Barat sendiri. Tingginya angka penyebaran virus corona di Indonesia juga menyebabkan pemerintah mengeluarkan peraturan larangan warga negara asing masuk ke Indonesia selain itu adanya kebijakan Pemerintah yang cenderung

berubah-ubah serta tidak dapat diprediksikan karena sangat mempengaruhi serta menghambat mobilisasi serta aktifitas diluar ruang masyarakat sehingga berdampak pada sektor pariwisata.

Pada tahun 2021-2022, kunjungan wisatawan mengalami peningkatan yang cukup signifikan hal ini disebabkan karena beberapa upaya yang dilakukan Pemerintah provinsi Sumatera Barat bersama dengan pemerintah kabupaten/kota dalam melaksanakan berbagai event baik berskala local maupun nasional.

Pada tahun 2022 angka kunjungan wisatawan mengalami peningkatan yang sangat signifikan mencapai 5.129.988 orang wisatawan domestik (280,70%) dan 9.399 orang wisman (723,03) pada destinasi berbayar di Provinsi Sumatera Barat. Hal ini terjadi karena banyaknya dukungan even pariwisata yang diberikan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada kabupaten/kota, seperti Sawahlunto Internasional Carnival (SISSca) yang menghadirkan peserta carnival dari designer nasional. Pengembangan desa wisata (DEWI) yang cukup pesat di tahun 2022 juga turut mempengaruhi pariwisata di Sumatera Barat, yang dibuktikan diterimanya beberapa penghargaan ditahun 2022 ini, yaitu Rekor MURI Dunia desa wisata pertama yang memilih pewarna batik dari limbah kopi untuk Desa Wisata Pariangan Kabupaten Tanah Datar, Rekor MURI Dunia desa wisata pertama dengan batik beraroma kopi untuk Desa Wisata Pariangan Kabupaten Tanah Datar, Juara 1 untuk kategori 5 desa berkembang terbaik Indonesia untuk Desa Wisata Pariangan, juara harapan 1 untuk 5 terbaik kategori kelembagaan tingkat nasional untuk desa wisata GTP Ulakan Kabupaten Paddang Pariaman, dan juara harapan 1 untuk 5 terbaik kategori digital dan kreatif tingkat nasional untuk Desa Wisata Silokek Kabupaten Sijunjung. Selain itu peningkatan angka kunjungan wisata mancanegara juga didukung dengan telah dibukanya pintu penerbangan internasional di Bandara Internasional Minangkabau

Penentu keberhasilan lainnya adalah dengan kemenangan Sumatera Barat pada ajang World Halal Tourism Awards Tahun 2016 untuk dua kategori yaitu World's Best Halal Culinary Destination dan World's Best Halal Destination. Prestasi ini dilanjutkan dengan dapatnya penghargaan pada tahun 2018 sebagai sebagai 10 Destinasi Wisata Halal Unggulan pada acara Inaugural Report of Indonesia Muslim Travel Index (IMTI). Hal ini meningkatkan citra positif pariwisata Sumatera Barat baik di mata nasional maupun internasional.

Berikut ini tabel perkembangan capaian serta target indikator Urusan Pariwisata Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 sebagai berikut.

Tabel Perkembangan Capaian dan Target Indikator Urusan Pariwisata pada RPJMD Tahun 2021-2026

INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TARGET KINERJA							
	2021		2022		2023	2024	2025	2026
	T	R	T	R	T	T	T	T
1. Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan (%)	1	-100	1,5	4.142.005	1,5	1,5	1,5	1,5
2. Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke provinsi (%)	1,5	40,23	1,5	17,37	1,5	1,5	1,5	1,5
3. Tingkat hunian akomodasi (%)	25,87	40	30,80	48,38	40,32	50,30	55,25	58,67

Sumber : Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat

2) Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dijelaskan bahwa perdagangan merupakan tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa didalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. Sub Urusan Perdagangan sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdiri dari : perizinan dan pendaftaran perusahaan, sarana distribusi perdagangan, stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, pengembangan ekspor, standarisasi dan perlindungan konsumen.

Sektor perdagangan semenjak tahun 2016 hingga tahun 2022 merupakan sektor lapangan usaha yang cukup dominan setelah Sektor Pertanian dan juga memberikan kontribusi yang positif terhadap perekonomian di Sumatera Barat. Adapaun capaian urusan Perdagangan sebagai berikut.

Tabel Perkembangan Capaian dan Target Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan pada RPJMD Tahun 2021-2026

INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TARGET KINERJA							
	2021		2022		2023	2024	2025	2026
	T	R	T	R	T	T	T	T
1. Pertumbuhan Nilai Ekspor non migas (Rp. Juta)	1393,13	3.066,93	1420,99	2492,04 (Jan-Okt)	1449,41	1478,40	1507,97	1538,12
2. Persentase penanganan pengaduan konsumen (%)	88	91,4	88	90,63	89	89	90	90
3. Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku (%)	22,35	42,05	23	48,84	25	26	26	26,5
4. Tertib Usaha	60	0	63	38,30	64	67	68	70
5. Persentase kinerja realisasi pupuk (%)	28	25,89	28	27,78	27,5	27,5	27	27
6. Persentase barang beredar	70	88,10	72	95,21	74	76	78	80

INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TARGET KINERJA							
	2021		2022		2023	2024	2025	2026
	T	R	T	R	T	T	T	T
yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (%)								
7. Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok (%)	6	5,04	6	7,05	6	6	6	6
8. Nilai sektor perdagangan dalam PDRB (Rp. Triliun)	39,30	39,86	41,27	47,08	44,16	48,57	53,43	58,78

Sumber : Badan Pusat Statistik Sumatera Barat

Beberapa faktor pendorong pencapaian kinerja urusan perdagangan ini antara lain dibukanya kembali oleh pemerintah ekspor CPO dan turunannya, meningkatnya komoditas yang paling banyak diekspor pada Oktober 2022 adalah dari golongan minyak dan lemak hewan/nabati yakni Refined Palm Oil dan dari golongan karet dan barang karet yakni TSNR 20, masyarakat sudah mulai memahami proses pasca panen yang baik sehingga berpengaruh terhadap kualitas komoditi, telah dimilikinya labor pengujian mutu yang sudah diakreditasi, dilaksanakannya program pengawasan terhadap pelaku usaha minuman beralkohol serta pengawasan terhadap pupuk bersubsidi, semakin terkendalinya pandemi sehingga perekonomian di sektor perdagangan sudah mulai membaik, adanya kebijakan bersama pusat dan daerah dalam rangka menjaga stabilisasi ketersediaan dan harga bahan pokok di pasar seperti minyak goreng dan cabe, adanya program melakukan pembinaan kepada pengelola pasar, lomba pasar dan promosi produk, meningkatkan tertib usaha perdagangan melalui peningkatan pengawasan barang beredar yang sesuai ketentuan berlaku (SNI wajib dan barang K3L), Adaya operasi pasar/pasar murah dilaksanakan pada saat terjadi lonjakan harga, serta adanya pemantauan rutin harga di pasar terhadap 17 komoditas barang kebutuhan pokok.

Namun selain itu terdapat beberapa factor penghambat dalam pencapaian kinerja urusan perdagangan, antara lain yakni tingginya harga pupuk non subsidi sehingga banyak peminat pupuk bersubsidi, kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap hak dan kewajibannya, sehingga pelaku usaha merasa keberatan jika dilakukan pengawasan terhadap barang yang diperdagangkan, kurangnya pengetahuan masyarakat/pelaku usaha terhadap pentingnya berusaha sesuai peraturan yang berlaku terutama barang-barang yang wajib SNI, masyarakat pengumpul dan pedagang yang masih belum sepenuhnya memahami tentang standar mutu komoditi sesuai ketentuan berlaku, kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap hak dan kewajibannya

sehingga pelaku usaha merasa keberatan jika dilakukan pengawasan, petugas PPNS yang tidak cukup dalam melakukan penindakan apabila ditemukan pelanggaran oleh pelaku usaha, alokasi pupuk bersubsidi yang tidak seimbang dengan jumlah RDKK (rencana defenitif kebutuhan kelompok), peningkatan harga kebutuhan pokok yang fluktuatif salah satunya minyak goreng, cabe, operasi pasar/pasar murah yang dilaksanakan belum menjangkau seluruh kabupaten/kota.

3) Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dijelaskan bahwa perindustrian merupakan tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri. Sedangkan industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.

Peranan sektor industri terhadap perekonomian daerah dapat dilihat melalui indikator Kontribusi sektor industri terhadap PDRB dan laju pertumbuhan industri. Selama periode 2016-2022, sektor PDRB semakin menurun kontribusinya meskipun masih tetap dominan di Sumatera Barat. Secara lebih rinci capaian indikator kinerja urusan Pemerintahah Bidang Perindustrian dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel Perkembangan Capaian dan Target Indikator
Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian pada RPJMD Tahun 2021-2026

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	TARGET KINERJA							
	2021		2022		2023	2024	2025	2026
	T	R	T	R	T	T	T	T
1. Persentase pertambahan jumlah industri besar di provinsi (%)	0,41	1,33	0,41	1,3	0,41	0,41	0,41	0,41
2. Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP (%)	0,13	102	0,13	107,54	0,13	0,13	0,13	0,13
3. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait (%)	59	25,33	82	34,67	84	86	88	90
4. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin perluasan Industri (IPIU) bagi Industri Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait (%)	90	0	90	100	92	92	94	94
5. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha	90	100	90	100	90	90	90	90

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	TARGET KINERJA								
	2021		2022		2023	2024	2025	2026	
	T	R	T	R	T	T	T	T	
Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi yang dikeluarkan oleh instansi terkait (%)									
6. Persentase informasi industri yang tersedia secara lengkap dan terkini (%)	90	85,71	90	90	90	90	90	90	90
7. Nilai produksi Industri Kecil dan Menengah (IKM) (Rp.Triliun)	15,4	11,36	15,7	20,93	16	16,3	16,7	17	
8. Jumlah pelaku industri kecil dan menengah (unit usaha)	39.403	38.174	41.373	40.653	43.263	45.363	47.673	50.193	

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat

Beberapa faktor pendorong capaian kinerja urusan perindustrian antara lain yakni pelaksanaan perizinan Berbasis online sehingga memudahkan pelaku usaha untuk proses perizinan, hilirisasi dan diversifikasi produk industri terutama terhadap industri kecil menengah, melakukan upaya untuk meningkatkan standarisasi dan mutu produk melalui fasilitasi sertifikasi produk, menghimbau kabupaten/kota untuk melakukan penyusunan RPIK (rencana pembangunan industri kabupaten/kota) mengacu kepada RPIP, peningkatan teknologi industri melalui teknologi tepat guna dan bantuan peralatan/mesin

Beberapa factor penghambat antara lain yakni cukup lamanya proses pengurusan patok tanah untuk luas tanah diatas 1 hektar, pembebasan tanah ulayat yang relatif sulit, industri besar tidak melaporkan perkembangan usaha kepada dinas terkait, pemantauan belum dapat dilaksanakan secara maksimal, kurangnya informasi secara lengkap dan terkini dari industri kecil menengah, keterbatasan kualitas SDM pelaku IKM, belum optimalnya pengembangan industri sesuai potensi daerah.

Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1) Unsur Keuangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan negara. Kepala daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang

ditentukan oleh ketentuan peraturan perundangundangan untuk memperoleh persetujuan bersama. Berdasarkan pasal 312 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun.

Selanjutnya, rancangan Perda yang telah disetujui diajukan ke Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi bersama dengan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Dalam hal menteri menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda Kabupaten tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RKPD, KUA dan PPAS, serta RPJMD, gubernur menetapkan rancangan dimaksud menjadi Perda dan Peraturan Kepala Daerah. Namun bila menteri menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda Provinsi tentang APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RKPD, KUA dan PPAS, serta RPJMD, kepala daerah bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari dihitung sejak hasil evaluasi diterima.

Namun dalam pelaksanaan unsur keuangan tidak hanya sekedar memproses menjadi APBD namun juga terkait dengan penatausahaan, akuntansi, pelaporan serta terkait juga dengan asset dan pendapatan. Adapun ketercapaian unsur pendukung keuangan dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel Perkembangan Capaian dan Target Indikator
Unsur Keuangan pada RPJMD Tahun 2021-2026

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	TARGET KINERJA							
	2021		2022		2023	2024	2025	2026
	T	R	T	R	T	T	T	T
1. Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	8,59	7,21	8,51	8,48	8,43	8,35	8,27	8,19
2. Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	5	6,82	4,6	27,14	4,2	3,8	3,6	3
3. Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	3,6	2,37	3,58	-11,24	3,56	3,55	3,54	3,53
4. Manajemen Aset	100	100	100	100	100	100	100	100
5. Rasio anggaran SiLPA terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	3,68	8,96	3,64	17,35	3,61	3,57	3,53	3,50
6. Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	100	100	100	100	100	100	100	100
7. Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	86,53	-	87,01	63,63	87,05	87,24	87,55	88,61

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	TARGET KINERJA							
	2021		2022		2023	2024	2025	2026
	T	R	T	R	T	T	T	T
8. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
9. Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (%)	100	0	100	100	100	100	100	100
10. Rasio PAD terhadap PDRB (%)	1,81	1,02	1,83	1,92	1,85	1,85	1,88	1,89
11. Persentase Peningkatan PAD (%)	3,4	13,78	7,2	8,37	7,2	7,2	7,2	7,2

Sumber : BPKAD Provinsi Sumatera Barat dan Bapenda Provinsi Sumatera Barat

Beberapa faktor Pendorong dalam pencapaian kinerja unsur keuangan antara lain yakni adanya komitmen untuk merealisasi kegiatan sesuai target waktu yang sudah di tentukan, tersedianya regulasi yang memberikan kemudahan kepada sektor-sektor yang menyumbang pendapatan Daerah, sistem pengelolaan aset yang telah mulai tertata dengan baik, regulasi-regulasi yang mendukung manajemen aset lebih efektif dan efisien (Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata cara pelaksanaan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan BMD), maksimalnya komitmen dari seluruh Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk meningkatkan kualitas penataan Aset Daerah, pelaksanaan program kegiatan yang terealisasi sesuai perencanaan dan target yang telah di ditetapkan, terdapatnya dukungan Teknologi Informasi dalam mempublikasikan informasi keuangan daerah, sehingga dokumen informasi keuangan daerah yang dapat di akses oleh publik, terdapatnya kebijakan pajak (Pergub terkait pemutihan pajak dan Program 5 Untung).

Beberapa factor penghambat antara lain yakni terlambat realisasi belanja guru dan tenaga Kesehatan, tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang masih kurang, masih adanya aset-aset daerah yang belum terselesaikan karena masih tersangkut dengan berbagai pihak untuk penyelesaiannya, masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang tata cara mengakses informasi public, adanya kebijakan penundaan alokasi belanja transfer ke Daerah dari Pemerintah Pusat, Peraturan perundang-undangan, sistem, dan mekanisme tata kelola keuangan, yang meliputi penatausahaan, penganggaran dan pertanggungjawaban pelaporan keuangan, serta pengelolaan aset daerah yang belum dipahami secara menyeluruh oleh SKPD.

f. Aspek-aspek Penting Dalam Peningkatan Daya Saing

1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah terkait dengan daya saing daerah adalah kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik bagi pelaku ekonomi yang telah berada di dalam dan akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan nilai tambah bagi peningkatan daya saing daerah. Salah satu indikator yang dapat menggambarkan aspek kemampuan ekonomi daerah dalam peranannya sebagai pendorong daya saing daerah adalah indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita.

Pengeluaran riil per kapita atau angka konsumsi Rumah Tangga (RT) per kapita Sumatera Barat selama periode 2018 sampai dengan 2022 mengalami peningkatan. Pengeluaran riil perkapita Sumatera Barat tahun 2018 sebesar 10,638 juta rupiah per tahun dan pada tahun 2022 sebesar 11.130 juta rupiah per tahun. Sementara itu, menurut kabupaten/kota, pengeluaran riil per kapita Tahun 2022 terbesar berada di Kota Padang, yaitu sebesar 14,889 juta rupiah pertahun dan terendah berada di Kabupaten Kepulauan Mentawai, yaitu sebesar 6.567 juta rupiah pertahun yang tergambar dalam tabel sebagai berikut:

Tabel Pengeluaran Riil per Kapita yang disesuaikan
di Sumatera Barat 2018-2022

NO	Kabupaten/Kota	Pengeluaran Riil per Kapita(Ribu Rupiah)				
		2018	2019	2020	2021	2022
Kabupaten						
1	Kep. Mentawai	6.211	6.429	6.281	6.321	6.567
2	Pesisir Selatan	9.089	9.444	9.212	9.270	9.686
3	Solok	10.035	10.309	10.171	10.215	10.539
4	Sijunjung	10.277	10.395	10.361	10.389	10.582
5	Tanah Datar	10.417	10.709	10.588	10.616	10.695
6	Padang Pariaman	10.919	11.158	10.998	11.050	11.159
7	Agam	9.489	9.780	9.651	9.662	10.171
8	Lima Puluh Kota	9.500	9.842	9.596	9.668	10.035
9	Pasaman	8.238	8.599	8.425	8.440	8.619
10	Solok Selatan	10.199	10.505	10.325	10.367	10.560
11	Dharmasraya	11.189	11.431	11.273	11.324	11.650
12	Pasaman Barat	8.979	9.180	9.047	9.089	9.381
Kota						
13	Padang	14.312	14.728	14.481	14.540	14.889
14	Solok	11.968	12.337	12.117	12.168	12.515
15	Sawah Lunto	9.765	10.238	10.182	10.195	10.537
16	Padang Panjang	10.440	11.013	10.734	10.754	11.153
17	Bukittinggi	13.035	13.586	13.282	13.331	13.633
18	Payakumbuh	13.114	13.464	12.281	13.317	13.687
19	Pariaman	12.611	12.958	12.796	12.818	13.150
	Sumatera Barat	10.638	10.925	10.733	10.790	11.130

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat

2. Potensi Ekonomi Lain (Pariwisata, Perdagangan, Industri, UMKM, dll)

Otonomi daerah membuka peluang bagi pemerintah daerah mengembangkan dan mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi di daerahnya. Peranan pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan berbagai potensi daerahnya sebagai sumber pendapatan daerah akan sangat menentukan keberhasilan pembangunan di daerah tersebut.

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses pemerintah (daerah) dan masyarakatnya mengelola sumber daya alam yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja atau kesempatan kerja berdasarkan pertumbuhan ekonomi). Oleh karena itu kewajiban dari masing-masing daerah adalah memaksimalkan potensi ekonomi daerahnya untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan yang sudah direncanakan, termasuk penciptaan lapangan pekerjaan yang dibutuhkan oleh perekonomian tersebut. Keberadaan dari sektor-sektor yang memiliki pengaruh (multiplier effect) sangat diprioritaskan didalam usaha pembangunan mengingat jumlah penduduk di Provinsi Sumatera Barat dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan.

Melihat potensi dan geografis daerah yang ada, Sumatera Barat secara keseluruhan memiliki potensi sumber daya alam yang cukup baik, namun potensi ekonomi ini belum dikembangkan dengan baik. Sektor pertanian merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan. Sementara di pedesaan ada potensi wisata yang bisa dikembangkan sehingga menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi yang bisa menggerakkan perekonomian desa/nagari. Selain karena potensi pariwisata yang luar biasa, juga perilaku masyarakat yang sekarang ini didominasi generasi milenial, memiliki selera wisata terhadap keindahan alam, tempat-tempat yang instagramable menjadi daya tarik bagi kaum ini.

Pada sisi lain dengan adanya pandemi Covid-19 telah membuat masyarakat merasa jenuh. Hal ini menjadi peluang yang bisa dimanfaatkan bagi Provinsi Sumatera Barat. Untuk itu, berbagai elemen masyarakat termasuk pemerintah provinsi, kabupaten/kota sampai tingkat desa/nagari sudah waktunya untuk berbenah dalam menangkap peluang ini. Akan tetapi untuk bisa menjadikan pariwisata sebagai sumber ekonomi baru dibutuhkan sejumlah upaya agar angka kunjungan

wisatawan semakin meningkat. Caranya yakni dengan mengandalkan kekayaan alam saja tidak cukup tetapi juga perlu pengelolaan yang baik seperti fasilitas penunjang, kebersihan dan data yang harus diperhatikan. Pengelolaan wisata tingkat desa juga akan menunjang untuk lahirnya para entrepreneur milenial dan peran serta masyarakat sehingga dapat menggerakkan perekonomian masyarakat.

Sumber pertumbuhan ekonomi baru di Provinsi Sumatera Barat salah satunya dari sektor pariwisata. Potensi yang sangat besar ini membutuhkan intervensi dari berbagai stakeholder, salah satunya pemerintah. Penguatan peran pentahelix turut menjadi faktor kunci dalam pengembangan sektor pariwisata. Potensi sektor pariwisata meliputi wisata alam, wisata budaya maupun wisata religi dengan tema-tema yang dikembangkan antara lain wisata bahari, wisata agro/eko, geowisata, wisata kreatif, wisata kuliner, wisata sejarah dan budaya, wisata minat khusus, wisata pendidikan, wisata religi, wisata kota pada wilayah DPP, KSPP, dan KPPP. Potensi geowisata, Provinsi Sumatera Barat telah memiliki tiga geopark nasional (yaitu Geopark Sianok Maninjau, Geopark Sawahlunto, dan Geopark Ranah Minang Silokek), dan empat aspirasi geopark nasional (yaitu Geopark Singkarak, Geopark Harau, Geopark Solok Selatan, dan Geopark Talamau). Selain itu Provinsi Sumatera Barat telah memiliki 294 desa wisata tematik dan 50 desa wisata agro di tahun 2022.

Tabel Jumlah Desa Wisata Berdasarkan Klasifikasi dan Tematik Tahun 2022 di Provinsi Sumatera Barat

No	Kab/Kota	Klasifikasi				Tematik		
		Rintisan	Berkembang	Maju	Mandiri	Alam	Budaya	Buatan
1	Kab. Agam	17	10	3	-	16	11	8
2	Kab. Dharmasraya	3	7	12	-	10	8	6
3	Kab. Kep. Mentawai	8	-	1	-	2	1	1
4	Kab. Lima Puluh Kota	26	4	-	-	4	4	1
5	Kab. Pdg Pariaman	3	4	1	-	4	2	1
6	Kab. Pasaman	9	4	-	-	1	4	1
7	Kab. Pasaman Barat	6	-	-	-	3	2	1
8	Kab. Pesisir Selatan	28	2	0	-	3	0	2
9	Kab. Sijunjung	10	6	8	-	15	9	8
10	Kab. Solok	1	15	3	-	9	9	3
11	Kab. Solok Selatan	6	3		-	3	3	15
12	Kab. Tanah Datar	18	4	1	-	7	7	2
13	Kota Bukittinggi	-	3		-	-	3	-
14	Kota Padang	3	-	-	-	-	-	-
15	Kota Pdg Panjang	4	1	-	-	1	2	2

No	Kab/Kota	Klasifikasi				Tematik		
		Rintisan	Berkembang	Maju	Mandiri	Alam	Budaya	Buatan
16	Kota Pariaman	11	5	-	-	1	1	2
17	Kota Payakumbuh	1	1		-	-	-	-
18	Kota Sawahlunto	7	-	1	-	1	1	-
19	Kota Solok	2	2	-	-	1	1	-
JUMLAH		163	71	31	-	81	68	53

Sumber : Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat

Hal utama yang perlu dilakukan dalam pengembangan sektor pariwisata ini adalah pembenahan sarana dan prasarana pada destinasi wisata termasuk peningkatan aksesibilitas dan konektivitas ke kawasan wisata. Selain itu perlu dilakukan penyiapan masyarakat sekitar destinasi wisata dan peningkatan kapasitas pelaku wisata, serta branding promosi dan pemasaran.

Selain itu, merujuk pada program unggulan provinsi Sumatera Barat untuk 100.000 millennial, entrepreneur, dan woman entrepreneur, serta pelaku ekonomi kreatif, sektor lain yang juga memiliki potensi ekonomi yang besar adalah sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Potensi produk UMKM di Sumatera Barat relatif banyak namun mengalami kendala dalam pemasaran karena belum bersertifikasi dan belum memenuhi standar yang ditetapkan, Disamping itu juga terkendala karena terbatasnya akses terhadap pembiayaan serta masih rendahnya kapasitas pelaku UMKM.

Potensi ekonomi lainnya yang juga perlu mendapat perhatian adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Potensi produk UMKM di Sumatera Barat relatif banyak namun mengalami kendala dalam pemasaran karena belum bersertifikasi dan belum memenuhi standar yang ditetapkan, Disamping itu juga terkendala karena terbatasnya akses terhadap pembiayaan serta masih rendahnya kapasitas pelaku UMKM.

Usaha ekonomi kreatif di Sumatera Barat memiliki peran meningkatkan perekonomian secara global. Industri kreatif erat hubungannya dengan tingkat kreativitas manusia sebagai sumber daya utama penggerak roda perekonomian. Produk-produk ekonomi kreatif diklasifikasikan kedalam 17 subsektor, yaitu : (1) Arsitektur, (2) Musik, (3) Desain Interior, (4) Fesyen, (5) Desain, (6) Komunikasi Visual, (7) Aplikasi dan Game Developer, (8) Desain Produk, (9) Penerbitan, (10) Film, Animasi, dan Video, (11) Periklanan, (12) Fotografi, (13) Televisi dan Radio, (14) Kriya, (15) Seni Pertunjukan, (16) Kuliner dan (17) Seni Rupa.

Untuk pencapaian pertumbuhan usaha ekonomi kreatif yang semakin lebih baik kedepannya maka dilakukan berbagai kegiatan pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif melalui workshop untuk meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial pelaku ekonomi kreatif serta dukungan/fasiliatsi kepada pelaku ekonomi kreatif pada berbagai event pariwisata dan ekonomi kreatif.

g. Permasalahan Pembangunan Daerah

1) Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

- ❖ Prioritas Pembangunan 4 : Meningkatkan Usaha Perdagangan dan Industri Kecil Menengah serta Ekonomi Berbasis Digital

Terdapat 9 (sembilan) Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran pada Prioritas Pembangunan 4 yang difokuskan untuk meningkatkan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB sebagai salah satu sektor yang cukup dominan dalam struktur PDRB Sumatera Barat serta meningkatkan kualitas UMKM termasuk Industri Kecil dan Menengah serta penumbuhan entrepreneur, dengan pencapaian sebagaimana pada tabel dibawah ini.

Tabel Pencapaian terhadap Tujuan dan Sasaran Pembangunan Prioritas Meningkatkan Usaha Perdagangan dan Industri Kecil Menengah serta Ekonomi Berbasis Digital Tahun 2022

NO	INDIKATOR KINERJA	Satuan	2022		KINERJA EFEKTIVITAS PELAKSANAAN/ STATUS
			TARGET	REALISASI	
Prioritas Pembangunan 4 : Meningkatkan Usaha Perdagangan dan Industri Kecil Menengah serta Ekonomi Berbasis Digital					164,92%
1	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	16,25	16,50	101,54% / Tercapai
2	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	%	8,75	8,54	97,60% / Tidak Tercapai
3	Laju pertumbuhan sektor perdagangan	%	-1,1	5,60	600,00% / Tercapai
4	Jumlah sentra industri kecil dan menengah	Sentra	368	289	78,53% / Tidak Tercapai
5	Laju pertumbuhan ekonomi sub sektor koperasi	%	2,14	5,04	235,51% / Tercapai
6	Persentase peningkatan pendapatan pada usaha mikro dan kecil	%	2,40	1,6	66,67% / Tidak Tercapai
7	Jumlah enterpreneur baru tercipta	Orang	112.594	115.149	102,27% / Tercapai
8	Persentase peningkatan Investasi di provinsi	%	6,00	6	100,00% / Tercapai
9	Kontribusi Ekonomi Digital	%	6,44	6,68	102,14% / Tercapai

Sumber : Hasil evaluasi Bappeda Provinsi Sumatera Barat

Prioritas Pembangunan 4 yakni Meningkatkan Usaha Perdagangan dan Industri Kecil Menengah serta Ekonomi Berbasis Digital pada Tahun 2022 menunjukkan pencapaian kinerja efektifitas terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dengan nilai 164,92%. Dari 9 (sembilan) Indikator kinerja pada prioritas pembangunan 4, sebanyak 6 (enam) Indikator kinerja dapat tercapai yakni Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB dengan capaian 16,50%, Laju pertumbuhan sektor perdagangan sebesar 5,60%, Laju pertumbuhan ekonomi sub sektor koperasi dengan capaian sebesar 5,04%, Jumlah enterpreneur baru tercipta sebanyak 115.149 orang, Persentase peningkatan Investasi di provinsi sebesar 6%, dan Kontribusi Ekonomi Digital dengan capaian 6,68%.

Sedangkan terdapat 3 (tiga) indikator kinerja yang tidak tercapai yakni Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB dengan capaian 8,54%, Jumlah sentra industri kecil dan menengah sebanyak 289 sentra, dan Persentase peningkatan pendapatan pada usaha mikro dan kecil dengan capaian 1,6%.

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian Indikator kinerja Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB antara lain yakni adanya penurunan industri sawit karena kebijakan pemerintah untuk menghentikan ekspor sawit pada pertengahan hingga akhir tahun 2022, masih rendahnya kapasitas pelaku IKM meningkatkan kualitas nilai produk serta terbatasnya kapasitas pelaku IKM dalam memasarkan produk dalam digital marketing, belum terdapatnya pabrik/industri pengolahan yang mempunyai akses keluar (ekspor) seperti pemanfaatan produk turunan kelapa dan komoditas potensial lainnya, belum optimalnya akses pasar bagi pelaku industry, serta belum fokusnya masing-masing daerah untuk mengembangkan industri kecil dan menengah sesuai dengan potensi daerahnya masing-masing.

Permasalahan yang dihadapi dalam penurunan Jumlah sentra industri kecil dan menengah antara lain disebabkan terdampaknya beberapa sentra akibat terjadinya covid 19 sehingga banyak sentra yang sudah tidak aktif lagi serta mengalami kevakuman.

Sedangkan permasalahan dalam pencapaian peningkatan pendapatan pada usaha mikro dan kecil antara lain yakni

terbatasnya modal UMKM yang berdampak kepada pengembangan usaha, ash terbatasnya inovasi dari produk UMKM sehingga kurang diminati pasar, terbatasnya akses pembiayaan UMKM ke perbankan dan lembaga perbankan, terbatasnya kapasitas SDM UMKM dalam penguasaan teknologi untuk pemasaran produkserta terbatasnya promosi produk UMKM baik dalam dan luar daerah.

- ❖ Prioritas Pembangunan 5 : Meningkatkan Ekonomi Kreatif dan Daya Saing Kepariwisata

Terdapat 3 (tiga) Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran pada Prioritas Pembangunan 5 yang difokuskan untuk dunia pariwisata di Sumatera Barat yang didukung dengan peningkatan kontribusi ekonomi kreatif, dengan pencapaian sebagaimana pada tabel dibawah ini.

Tabel Pencapaian terhadap Tujuan dan Sasaran Pembangunan Prioritas Meningkatkan Ekonomi Kreatif dan Daya Saing Kepariwisata Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	2022		Kinerja Efektivitas Pelaksanaan/ Status
			Target	Realisasi	
Prioritas Pembangunan 5 : Meningkatkan Ekonomi Kreatif dan Daya Saing Kepariwisata					239,36%
1	Persentase Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat dari Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	%	12,62	15,80	125,20% / Tercapai
2	Persentase Kontribusi Pariwisata pada PDRB	%	1,24	1,35	108,87% / Tercapai
3	Persentase Kontribusi Ekonomi Kreatif pada PDRB	%	1,5	7,26	484,00% / Tercapai

Sumber : Hasil evaluasi Bappeda Provinsi Sumatera Barat

Prioritas Pembangunan 5 yakni Meningkatkan Ekonomi Kreatif dan Daya Saing Kepariwisata pada Tahun 2022 menunjukkan pencapaian kinerja efektifitas terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dengan nilai 239,36%. Dari 3 (tiga) Indikator kinerja pada prioritas pembangunan 5, maka seluruh Indikator kinerja dapat tercapai yakni Persentase Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat dari Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan capaian 15,80%, Persentase Kontribusi Pariwisata pada PDRB dengan capaian 1,35% dan Persentase Kontribusi Ekonomi Kreatif pada PDRB dengan capaian 7,26%.

Namun demikian, meskipun keseluruhan target dapat tercapai pada prioritas ini, pelaksanaan priorotas ini pun juga menghadapi beberapa permasalahan antara lain yakni Provinsi Sumatera Barat merupakan daerah rawan bencana sehingga secara

tidak langsung berdampak kepada aksesibilitas pada objek-objek wisata, masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan sapta pesona (aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, kenangan), destinasi wisata belum dikelola dengan baik antara lain dengan terbatasnya sarana dan prasarana yang mendukung kenyamanan pengunjung seperti sarana toilet dan air bersih serta tempat ibasah yang representatif, serta masih banyaknya destinasi wisata lainnya terutama destinasi wisata alam yang belum terpublikasikan dengan baik, dan akses sarana dan prasarana yang belum optimal untuk mendukung peningkatan pariwisata.

Hal mendasar lainnya yang menjadi permasalahan yakni belum berdayanya masyarakat sekitar lokasi wisata, masyarakat justru cenderung menjadi penghalang kemajuan pariwisata di lokasi tempat tinggalnya dengan adanya pemalakan baik berbentuk pungutan liar, parkir liar serta tindakan criminal lainnya yang mengakibatkan ancaman keamanan bagi pengunjung, hal lainnya yang tak kalah meresahkan adalah sikap tidak menjaga lingkungan dengan mendirikan bangunan liar serta membuang sampah sembarangan dan tidak menjaga lingkungan dengan baik yang mengakibatkan pariwisata yang berjalan tersebut akan terhenti dengan sendirinya.

Selain itu, dalam perkembangan ekonomi kreatif belum didukung sepenuhnya oleh komitmen masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota, pengembangan ekonomi kreatif belum sepenuhnya didasarkan sesuai dengan potensi daerah yang dimiliki, kualitas produk ekonomi kreatif belum mampu berdaya saing dan belum bernilai tinggi, harga produk ekonomi kreatif masih sangat bervariasi serta relatif tinggi dan kurangnya inovasi terhadap produk ekonomi kreatif yang dihasilkan serta juga minim informasi terkait dengan minat pasar akan suatu produk yang dibutuhkan.

- 2) Permasalahan daerah yang berhubungan dengan Urusan Pemerintahan Daerah

Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar

- ❖ Urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
 - a) Berubahnya kewenangan koperasi provinsi dalam pengelolaan UMKM
 - b) Banyak koperasi tidak melaksanakan RAT karena Pandemi Covid-19

- c) Permasalahan Akses Internet dan masih banyak anggota koperasi yang tidak bisa memanfaatkan teknologi informasi
 - d) Dampak pandemic menyebabkan volume usaha turun
 - e) Terbatasnya SDM pengelola koperasi terutama dari sisi kualitas
 - f) Terbatasnya sarana dan prasarana koperasi dalam menjalankan usaha
 - g) Terbatasnya inovasi Produk yang dihasilkan oleh Koperasi dan UKM yang belum dapat bersaing di pasar
 - h) Terbatasnya akses koperasi ke pasar dan permodalan
 - i) Sebaran UMKM yang cukup luas sehingga tidak keseluruhan terjangkau dan terpantau oleh Pemerintah
 - j) Belum adanya sanksi yang tegas bagi koperasi yang tidak mengurus izin usaha
 - k) SDM koperasi masih kurang memahami tentang kelengkapan kelembagaan koperasi
 - l) kurangnya minat pengurus koperasi untuk mengikuti pelatihan dan meningkatkan kapasitas diri
 - m) Masih rendahnya nilai tambah dan daya saing dari produk produk UMKM
 - n) terbatasnya sertifikat halal dan merk yang bisa diberikan secara gratis
- ❖ Urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal
- a) Data terkait dengan potensi investasi dan realisasi investasi yang sudah atau sedang berjalan belum tersedia dengan lengkap oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
 - b) Regulasi dan aturan yang mengatur tentang investasi cenderung berubah – ubah sehingga mengakibatkan ketidakpastian dalam proses pelaksanaan pekerjaannya antara lain dengan adanya peralihan dengan adanya perubahan regulasi berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis Risiko serta Peraturan Kementerian/Lembaga (NSPK) terkait yang menjadi dasar penerbitan perizinan dengan menggunakan portal OSS yang masih dalam tahap pengembangan dan penyempurnaan dari Kementerian Investasi / BKPM RI

- c) Status kepemilikan lahan di Sumatera Barat yang Sebagian besar di kuasai kamu atau tanah ulayat menjadi penyebab ketidakpastian pelaksanaan investasi
- d) Kurangnya koordinasi antar instansi di Pemerintah Kabupaten/ Kota dengan provinsi dan Pusat dalam penyelenggaraan Investasi
- e) Adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam pelaksanaan even even promosi potensi investasi daera sehingga mengakibatkan rendahnya tingkat kehadiran investor
- f) Materi promosi yang disiapkan belum maksimal dalam memenuhi kebutuhan informasi bagi investor
- g) Terbatasnya keikutsertaan Sumatera Barat dalam even promosi investasi tingkat Nasional dan Internasional (pameran dan temu bisnis)
- h) Masih adanya beberapa perizinan dan non perizinan bersifat yang diproses secara manual di PTSP
- i) Masih terdapatnya jangka waktu pelayanan PTSP yang melewati Standar Pelayanan Publik yang telah ditetapkan Gubernur
- j) Masih terdapat jenis perizinan yang belum dipetakan
- k) Masih terdapat perizinan yang belum dapat dilaksanakan antara lain perizinan berusaha usaha menunjang kegiatan usaha (PB UMKU) dan KBLI yang belum ada pengampu pada Kementerian/Lembaga terkait.
- l) Banyaknya pelaku usaha/masyarakat yang belum memahami teknologi atau perizinan secara elektronik atau berbasis web.
- m) Keterbatasan jumlah aparatur penyelenggara perizinan
- n) Keterbatasan pelaku usaha atas perizinan secara online melalui OSS dan aplikasi perizinan berbasis web
- o) Masih rendahnya pemahaman OPD teknis dalam penerapan aplikasi perizinan OSS berbasis teknologi informasi dalam rangka penyelenggaraan perizinan terintegrasi.
- p) Adanya permasalahan Tata Ruang atau Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) sehingga banyak pelaku usaha/Perusahaan PMA/PMDN tidak jadi melanjutkan rencana investasinya dikarenakan tidak ada kesesuaian tata ruang untuk investasi
- q) Sistem Perizinan Online Single Submissin (OSS) masih belum sempurna dalam pengembangan sehingga terdapat kendala dalam pelaksanaan perizinan di daerah.

- r) Perubahan sistem pelaporan Ke OSS-RBA sehingga banyak perusahaan yang belum memahami ttg pelaporan kegiatan penanaman Modal perusahaan.
- s) SDM perusahaan yang banyak berhenti karena dampak covid sehingga tidak bisa melaporkan dengan sistem yg ada
- t) SDM di OPD yang berada di Kab/Kota banyak yang belum memahami tentang sistem Pelaporan OSS-RBA untuk melakukan verifikasi laporan yang masuk dari perusahaan
- u) Perusahaan yang sudah berjalan namun belum mengantongi izin karena terkendala dalam pengurusan izin teknis dengan berlakunya sistem OSS-RBA (RTRW, RDTR, Izin Lingkungan, PKKPR, SIMBG, dll)
- v) Belum adanya Data Calon Investor Baru yang serius akan berinvestasi di Sumatera Barat
- w) Adanya Pembatasan Pelaporan Investasi (LKPM), dimana Nilai Investasi s.d 1 M tidak dilaporkan
- x) Tidak adanya investasi baru yang tumbuh selama tahun 2022 dan kegiatan proyek sebelumnya sudah selesai tahun 2021
- y) Tidak jalannya progress Proyek Jalan Tol yang tidak sesuai dengan perencanaan Investasi di Sumatera Barat yang merupakan salah satu pertimbangan dalam penetapan target investasi
- z) Masalah RTRW di Kab/Kota yang masih belum mengakomodir potensi investasi

Urusan Pilihan

- ❖ Urusan pemerintahan bidang Pariwisata
 - a) Belum optimalnya pengembangan sarana dan prasarana pariwisata
 - b) Belum maksimalnya ikon wisata dan paket yang komprehensif
 - c) Belum optimalnya pengelolaan destinasi pariwisata
 - d) Belum memadainya fasilitas pendukung kepariwisataan
 - e) Belum melembaganya sadar wisata baik pada masyarakat lokal, pelaku pariwisata maupun wisatawan
 - f) Belum berkembangnya ekonomi kreatif.
 - g) Terbatasnya kegiatan pembinaan SDM pada Daerah Tujuan Wisata (DTW) unggulan
 - h) Masih terbatasnya kerjasama antar instansi, stakeholder dan masyarakat sekitar dalam mendukung pengembangan DTW unggulan
 - i) Masih terdapat SDM yang belum memenuhi kriteria kompetensi.
 - j) Terbatasnya produk ekraf yang memiliki sertifikat HKI

- k) Pengembangan DTW membutuhkan anggaran yang besar
 - l) Kapasitas Sumber Daya Manusia bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkualitas masih belum memadai.
 - m) Mapping destinasi belum dilakukan (inventarisasi dan sarana pra sarana dimiliki) sehingga belum memiliki pola perjalanan dengan berbagai pilihan seperti wisata budaya, wisata belanja, wisata alam, wisata minat khusus, wisata edukasi, agro dan ekowisata.
 - n) Koordinasi Lintas Sektoral (Lembaga) belum berjalan maksimal, hal ini sangat penting mengingat Pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif membutuhkan koordinasi dan kerja bersama-sama pihak-pihak terkait: (pemerintah: instansi pariwisata dan ekonomi kreatif, instansi pekerjaan umum, instansi perhubungan, instansi pertanian, instansi perindustrian perdagangan); (2) swasta; (3) BUMN/BUMD; (4) masyarakat di objek wisata.
 - o) Masih kurangnya keterlibatan masyarakat dalam industri pariwisata dan ekonomi kreatif
 - p) Terbatasnya kewenangan pemerintah provinsi dalam pengembangan objek wisata didaerah
 - q) Masih perlunya dukungan dari berbagai pihak untuk penguatan Sumatera Barat dalam penyelenggaraan wisata halal
- ❖ Urusan pemerintahan bidang Perdagangan
- a) Mayoritas produk komoditas di Sumatera Barat masih bertumpu pada primary produk (bahan mentah) dan teknologi belum terlalu canggih sehingga peningkatan nilai tambah belum terlalu mendongkrak nilai ekspor
 - b) Harga ditentukan oleh pasar internasional
 - c) Belum berkembangnya hilirisasi produk di Sumatera Barat
 - d) Ada beberapa kasus di BPSK di tarik kembali oleh pelapor, sehingga tidak dapat diproses, sedangkan kasus tersebut sudah tercatat dalam kasus pengaduan konsumen
 - e) Kurangnya tenaga/SDM yang melakukan pengujian mutu barang sudah banyak pensiun dan belum ada penggantinya
 - f) Terbatasnya SDM PPNS
 - g) Minuman beralkohol sangat riskan untuk dilakukan pengawasan
 - h) Realisasi pupuk yang diluncurkan Pemerintah pusat lebih rendah dibandingkan dengan RDKK (rencana defenitif kebutuhan kelompok)

- i) Sering terjadi keterlambatan hasil pengujian terhadap hasil produk dari pihak ketiga
 - j) Peningkatan harga kebutuhan pokok yang fluktuatif salah satunya minyak goreng dan cabe
 - k) Operasi pasar/pasar murah yang dilaksanakan belum menjangkau seluruh kabupaten/kota
 - l) Masih terjadinya pandemi covid 19 sehingga kegiatan dalam bentuk pameran belum terlaksana secara optimal
 - m) Melakukan pembinaan kepada pengelola pasar, lomba pasar dan promosi produk
 - n) Masih kurangnya kesadaran pelaku usaha dan masyarakat di pasar kab/kota dalam menerapkan perda No. 6/2020 dengan etap menerapkan 3 M yakni memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan air mengalir serta menjaga jarak
 - o) Masyarakat petani, pengumpul, dan pedagang yang masih belum sepenuhnya memahami tentang standar mutu komoditi sesuai ketentuan berlaku
 - p) Kurangnya tenaga/SDM penguji mutu barang karena telah memasuki masa pensiun
 - q) Terdapatnya beberapa mesin pendukung pengujian mutu yang perlu diperbarui
 - r) Belum semua masyarakat tahu tentang peran BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) sehingga perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat
 - s) Keberpihakan masyarakat dalam menggunakan produk dalam negeri masih kurang
- ❖ Urusan pemerintahan bidang Perindustrian
- a) Daya saing produk IKM yang dihasilkan masih relatif rendah dari sisi kemasan, standar dan mutu produk.
 - b) Inovasi dan diversifikasi produk industri kecil menengah masih rendah
 - c) Keakuratan data industri dari kabupaten/kota masih lemah
 - d) Belum optimalnya pengembangan industri sesuai potensi daerah
 - e) Mayoritas produk komoditas di sumbar masih bertumpu pada primary produk (bahan mentah) dan teknologi yang digunakan belum terlalu canggih sehingga belum mendorong peningkatan nilai tambah
 - f) Pembebasan tanah ulayat yang relatif sulit

- g) Masih terjadi COVID19 sehingga mempengaruhi perekonomian
- h) Industri besar tidak melaporkan perkembangan usaha kepada dinas terkait
- i) Pemantauan belum dapat dilaksanakan secara maksimal
- j) Masih terjadinya pandemi covid 19
- k) Kurangnya kemampuan SDM di kabupaten/kota dalam memperoleh informasi secara lengkap dan terkini dari industri kecil menengah
- l) Kurangnya sosialisasi kepada pelaku usaha tentang pentingnya data industri
- m) Daya saing produk yang masih rendah
- n) Penguasaan teknologi yang masih rendah
- o) Keterbatasan kualitas SDM pelaku IKM
- p) Belum optimalnya pengembangan industri sesuai potensi daerah
- q) Daya saing produk yang masih rendah
- r) Penguasaan teknologi yang masih rendah
- s) Keterbatasan kualitas SDM pelaku IKM
- t) Belum optimalnya pengembangan industri sesuai potensi daerah
- u) Industri besar tidak melaporkan perkembangan usaha kepada dinas terkait maupun dalam aplikasi SIInas secara berkala
- v) Pemantauan belum dapat dilaksanakan secara maksimal

Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

❖ Biro Perekonomian

- a) Koordinasi pengendalian inflasi daerah belum berjalan secara optimal, karena belum terjalannya kerjasama daerah dengan baik akibat dari belum adanya pemetaan potensi produksi sumber pangan di kabupaten/kota se Sumatera Barat.
- b) Belum optimalnya kinerja BUMD dan penyertaan modal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terlihat dari besaran deviden yang diterima sebagai PAD
- c) Kelangkaan BBM bersubsidi (solar) dan LPG 3 Kg yang selalu terjadi setiap tahun di masyarakat yang disebabkan dualisme aturan, penimbunan dan penyelewengan alokasi pendistribusian oleh oknum tertentu. Termasuk pelaksanaan BBM satu harga di Kepulauan Mentawai yang disinyalir masih banyak penyelewengan
- d) Belum optimalnya koordinasi pendistribusian pupuk bersubsidi karena adanya kebijakan baru tentang implementasi Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK)

- e) Koordinasi pembinaan lembaga keuangan mikro di Sumatera Barat belum berjalan dengan baik
- f) Belum seluruh perusahaan yang berkontribusi dalam Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP)/CSR dan ada beberapa perusahaan yang belum masuk Forum TJSLP bentukan Pemerintah Prov. Sumatera Barat

Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

❖ Unsur Keuangan

- a) Pelaksanaan peyerapan anggaran sebagian besar menumpuk di akhir tahun anggaran
- b) Masih terdapat Perangkat Daerah yang mengirim laporan belum valid
- c) Terbatasnya SDM pengelola asset
- d) Masih terdapat asset yang telah ditempati / digunakan oleh Pemerintah Provinsi yang belum tercatat dan bersertifikat
- e) Terdatanya SPM yang tidak cair sampai dengan akhir Tahun Anggaran, karena terlambat disampaikan
- f) Adanya penyederhanaan struktur organisasi pada BPKAD dengan Tipe B yang tidak sesuai dengan beban kerja
- g) Dampak Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan kondisi perekonomian masyarakat yang menurun sehingga mempengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat.
- h) Terbatasnya gambaran penetapan target terutama pada pajak rokok masih bersifat 'given' dari Pemerintah Pusat/Kementerian Keuangan
- i) Terbatasnya sumber pendapatan asli daerah untuk dikembangkan sesuai aturan
- j) Belum optimalnya penerimaan dari retribusi
- k) Adanya regulasi yang berubah yang menyebabkan belum dibolehkan melakukan pemungutan sebelum dibuat aturan oleh daerah.
- l) Sarana dan prasarana serta kompetensi SDM pengelolaan keuangan daerah yang terbatas dan belum memadai
- m) Komponen belanja pegawai yang cukup besar dikarenakan adanya pengalihan kewenangan Pendidikan Menengah dan Luar Biasa ke Provinsi yang cukup besar menyedot anggaran belanja pembangunan
- n) rendahnya Realisasi Belanja SKPD
- o) Masih adanya aset-aset daerah yang belum terselesaikan karena masih tersangkut dengan berbagai pihak untuk penyelesaiannya

- p) Masih banyak kegiatan yang belum terealisasi sampai dengan waktu yang telah di tentukan
- q) Masih banyak kegiatan masuk di pertengahan tahun anggaran sehingga tidak cukup waktu untuk menyelesaikan
- r) Informasi Keuangan yang belum terpublikasi secara lengkap
- s) Masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang tata cara mengakses informasi public
- t) Masih adanya egosektoral dalam meberikan data yang akan di publikasikan ke masyarakat/publik
- u) Penundaan alokasi belanja transfer ke Daerah

II. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Tahun 2024

Dengan mempertimbangkan potensi, capaian pembangunan daerah satu tahun sebelumnya, kondisi saat ini, permasalahan, isu strategis, tantangan dan peluang serta kondisi sosial budaya masyarakat Sumatera Barat dimaksud, maka tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2024 mengacu kepada Visi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yaitu:

“Terwujudnya Sumatera Barat Madani, Unggul dan Berkelanjutan”

Dalam mewujudkan Visi melalui pelaksanaan Misi yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, maka untuk kerangka perencanaan pembangunan daerah tahun 2022 diperlukan kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang dijalankan, memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud.

Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi diuraikan dalam matrik tabel berikut:

Tabel Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

VISI		
Terwujudnya Sumatera Barat Madani, Unggul dan Berkelanjutan		
MISI	TUJUAN	SASARAN
Misi 1: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat,	Mewujudkan Sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
		Menurunnya prevalensi stunting
		Meningkatnya Kualitas Pendidikan

VISI		
Terwujudnya Sumatera Barat Madani, Unggul dan Berkelanjutan		
MISI	TUJUAN	SASARAN
Berpengetahuan, Terampil & Berdaya Saing		Meningkatnya Daya Saing Masyarakat
Misi 2: Meningkatkan Tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan Falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	Mewujudkan ABS SBK sebagai falsafah kehidupan masyarakat	Meningkatnya Ketahanan sosial Budaya masyarakat yang berlandaskan ASB-SBK
		Meningkatnya Budaya Literasi
		Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
Misi 3: Meningkatkan Nilai tambah dan Produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Meningkatkan kesejahteraan petani	Meningkatnya pendapatan petani pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Kelautan dan Perikanan)
		Meningkatnya ketahanan dan keamanan pangan
		Meningkatnya pendapatan Petani Hutan
Misi 4: Meningkatkan usaha perdagangan dan industry kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital	Mewujudkan perdagangan dan industri kecil/Menengah serta ekonomi digital yang tangguh dan berdaya saing	Sumatera barat sebagai pusat perdagangan
		Sumatera Barat sebagai pusat industri kecil dan menengah
		Terwujudnya pelaku koperasi dan UKM yang sejahtera
		Terciptanya 100.000 enterpreneur dari berbagai sektor
		Meningkatnya pertumbuhan investasi
Misi 5: Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya Saing kepariwisataan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	Meningkatnya kontribusi pariwisata dalam perekonomian Sumatera Barat
		Meningkatnya kontribusi ekonomi kreatif dalam perekonomian Sumatera Barat
Misi 6: Meningkatkan pengembangan infrastruktur yang berkeadilan berkelanjutan	Terwujudnya Infrastruktur yang handal dan merata	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur yang terintegasi
		Meningkatkan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana
		Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas
		Meningkatkan infrastruktur pelayanan dasar, bangunan strategis dan pertanian
		Meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang yang baik dan berkelanjutan
Misi 7: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dengan aparatur yang melayani	Terwujudnya kualitas tata Kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel

VISI		
Terwujudnya Sumatera Barat Madani, Unggul dan Berkelanjutan		
MISI	TUJUAN	SASARAN
dan Pelayanan Publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas		Meningkatnya kapabilitas birokrasi
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Sumber : RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

Tujuan dan sasaran Misi Pertama, **“Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil & Berdaya Saing”** terkait dengan isu strategis Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dari aspek Pendidikan dan Kesehatan yang tetap mengedepankan karakter yang madani, serta berpengetahuan dan memiliki keterampilan untuk mampu berdaya saing serta tangguh dan memiliki nilai kompetisi yang tinggi.

Tujuan dan sasaran Misi Kedua, **“Mewujudkan Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah sebagai falsafah Kehidupan Masyarakat”** terkait dengan isu strategis Peningkatan Pengamalan Nilai-Nilai Agama dan Adat ditengah-tengah masyarakat yang diwujudkan dengan sikap toleransi, saling menghormati, patuh terhadap norma-norma agama, adat dan hukum positif, serta karakter masyarakat yang santun dan berkontribusi positif dalam pelaksanaan pembangunan, dan juga mengedepankan kesetaraan gender dan perlindungan anak serta merupakan implementasi dari prinsip Pembangunan Tujuan Berkelanjutan yakni *no one left behind*. Tujuan ini juga terkait dengan pemajuan kebudayaan sebagai wujud implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Tujuan dan sasaran Misi Ketiga, **“Mewujudkan Kesejahteraan Petani”** terkait dengan isu meningkatkan pendapatan petani yang berada di sektor pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan dan kehutanan melalui peningkatan nilai tambah terhadap produk pertanian serta pengembangan terhadap hilirasi pertanian secara terpadu dan berkualitas.

Tujuan dan sasaran Misi Keempat, **“Mewujudkan Perdagangan dan Industri Kecil/Menengah serta Ekonomi Digital yang Tangguh dan Berdaya Saing”** terkait dengan isu strategis menjadikan Sumatera Barat sebagai pusat UMKM dan industri kecil dan menengah yang kedepan menjadi penggerak perekonomian Sumatera Barat yang tahan terhadap guncangan ekonomi serta mampu bersaing ditingkat global.

Tujuan dan sasaran Misi Kelima, **“Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Terhadap Perekonomian Sumatera Barat”** terkait dengan isu strategis menjadikan pariwisata sebagai etalase Sumatera Barat yang efektif sebagai sektor yang memberikan efek positif pada semua sektor untuk menstimulus pergerakan dan laju pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat.

Tujuan dan sasaran Misi Keenam, **“Terwujudnya Infrastruktur yang Handal dan Merata”** terkait dengan isu strategis dukungan infrastruktur yang berkualitas dan mengedepankan pemerataan wilayah dalam mendukung layanan dasar kepada masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, membangun ketahanan terhadap bencana serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan dukungan penyelenggaraan penataan ruang yang baik dan berkelanjutan.

Tujuan dan sasaran Misi Ketujuh, **“Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas”** terkait dengan isu strategis Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, efektif, efisien, akuntabel dan transparan yang diwujudkan dengan implementasi reformasi birokrasi yang maksimal pada semua aspek dan bidang penyelenggaraan pemerintahan.

Sejalan dengan arah pembangunan dalam RPJMD, dengan memperhatikan dampak dari kontraksi ekonomi serta pelambatan pertumbuhan ekonomi nasional dan Sumatera Barat sejak tahun 2020 hingga 2022, serta upaya yang dilakukan secara terus menerus dalam rangka menggerakkan ekonomi yang sehat dan merata dengan disertai dengan sikap kebijakan dan strategi yang waspada terhadap isu resesi ekonomi yang sebagian besar diakibatkan pada krisis energi dan krisis pangan dan bertumpu pada kemampuan ekonomi di Sumatera Barat dan dukungan terhadap pencapaian Tema Pembangunan RKP Tahun 2024, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengintegrasikan menjadi Tema Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 yakni:

“Transformasi Sektor Strategis yang inklusif dan berkelanjutan”

Adapun narasi penjelasan Tema Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Transformasi ekonomi difokuskan pada 3 (tiga) sektor strategis Sumatera Barat dengan distribusi PDRB terbesar yakni Sektor Pertanian, Sektor

Perdagangan dan Industri serta sektor bagi penumbuhan ekonomi baru di Sumatera Barat yakni sektor Pariwisata.

2. Transformasi ekonomi yakni menggeser struktur ekonomi yang semula berbasis komoditas, menjadi ekonomi berbasis investasi, produksi, dan pelayanan yang memiliki nilai tambah tinggi guna meningkatkan daya saing perekonomian daerah serta peningkatan kualitas hidup masyarakat.
3. Transformasi ekonomi diarahkan untuk peningkatan produktivitas, terutama dalam peningkatan nilai tambah di dalam dan antarsektor ekonomi, dan pergeseran tenaga kerja dari sektor informal yang bernilai tambah relatif rendah menuju sektor formal yang bernilai tambah tinggi sehingga mendorong peningkatan pertumbuhan potensial jangka panjang.
4. Transformasi ekonomi merupakan prasyarat dari peningkatan dan kesinambungan pertumbuhan serta penanggulangan kemiskinan, sekaligus pendukung bagi keberlanjutan pembangunan.
5. Pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan diarahkan pada :
 - a. Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, yang menjadi landasan fundamental untuk menciptakan dan memperluas kesempatan ekonomi dan kesempatan kerja
 - b. Pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan yang memastikan bahwa ekonomi yang tumbuh juga merata dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat
 - c. Perluasan Akses dan Kesempatan yang memastikan bahwa seluruh masyarakat mendapatkan kemudahan akses terhadap Pelayanan Dasar Minimal guna peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.

Pemilihan tema Pembangunan Tahun 2024 merupakan pemilihan terhadap fokus prioritas pembangunan yang akan dilakukan pada tahun 2024, dengan tetap tidak mengabaikan upaya pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib dipenuhi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan pada Pasal 18 dan pasal 298 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun proyeksi Target Indikator Makro Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 sebagaimana tabel berikut.

Tabel Proyeksi Indikator Makro Daerah
Tahun 2024

No	Indikator Makro Pembangunan	2024		
		RPJMD	RKP	RKPD
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,57	5,0 – 5,4	4,76
2	PDRB ADHK Per Kapita (Rp. Juta)	32,97	-	34,85
3	PDRB ADHB Per Kapita (Rp. Juta)	50,60	-	59,88

No	Indikator Makro Pembangunan	2024		
		RPJMD	RKP	RKPD
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,45	5,03 – 5,73	5,70
5	IPM	73,23	-	74,25
	- Usia Harapan Hidup (Tahun)	69,98	-	70,20
	- Harapan Lama Sekolah (Tahun)	14,06	-	14,41
	- Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	9,28	-	9,36
	- Pengeluaran per Kapita (Rp. Ribu)	11.108	-	11.455
6	Tingkat Kemiskinan (%)	6,16	4,0 – 4,5	5,62
7	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	353,68	-	324,71
8	Gini Rasio	0,296	-	0,290
9	Indeks Williamson	0,309	-	0,309

Sumber : RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026, dan hasil analisa Bappeda Provinsi Sumatera Barat

Target Indikator Makro Pembangunan pada dokumen RKPD Tahun 2024 dilakukan penyesuaian jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, hal ini dengan memperhatikan evaluasi capaian tahun 2022, perkiraan capaian tahun 2023, perkembangan ekonomi yang sedang berlangsung, serta menyesuaikan dengan target Provinsi pada RKP Tahun 2024.

2. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Provinsi Tahun 2024

❖ Prioritas Pembangunan 4 : Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital

Prioritas pembangunan ini untuk menjadikan Sumatera Barat sebagai pusat perdagangan dan Industri Kecil di Sumatera Barat. Secara struktur ekonomi Sumatera Barat juga di dominasi oleh Perdagangan dan juga Industri Pengolahan, meskipun tidak sebesar Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, namun sektor perdagangan dan industri kedepan harus dikembangkan sebagai sektor yang diyakini mampu meningkatkan tingkat pendapatan masyarakat sehingga Sumatera Barat dapat keluar dari middle income trap.

Sumatera Barat memiliki potensi untuk mengoptimalkan aktivitas di sektor perdagangan sebagai salah satu sektor utama yang menggerakkan perekonomian masyarakat. Pelabuhan Teluk Bayur yang berada di pesisir barat pusal Sumatera merupakan potensi untuk memajukan perdagangan internasional melalui peningkatan volume ekspor, terutama ke negara yang tergabung dalam Indian Ocean Rim Association (IORA). Misi ini diharapkan mampu meningkatkan kontribusi sektor perdagangan dan ekonomi kreatif terhadap PDRB Sumatera Barat.

Sasaran dan indikator kinerja pada Prioritas Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas meningkatkan Usaha Perdagangan Dan industri kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital Tahun 2024

No	SASARAN / INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024
1	Sumatera Barat sebagai pusat perdagangan	
	Laju pertumbuhan sektor perdagangan (%)	1,00
2	Sumatera Barat sebagai pusat industri kecil dan menengah	
	Jumlah sentra industri kecil dan menengah (sentra)	390
3	Terwujudnya pelaku koperasi dan UKM yang sejahtera	
	Laju pertumbuhan ekonomi sub sektor koperasi (%)	2,23
	Persentase peningkatan pendapatan pada usaha mikro dan kecil	3,8
4	Terciptanya 100.000 entrepreneur dari berbagai sektor	
	Jumlah entrepreneur baru tercipta (orang)	150.658
5	Meningkatnya pertumbuhan investasi	
	Persentase peningkatan Investasi di provinsi (%)	9,50
6	Meningkatnya peran ekonomi digital	
	Kontribusi Ekonomi Digital (%)	7,10

Sumber : RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan tersebut pada Tahun 2024 difokuskan pada:

1. Mengembangkan UMKM di sekitar Kawasan ekowisata secara masif sesuai potensi masing-masing daerah.
2. Menjaga tingkat inflasi tetap pada batas wajar.
3. Penciptaan iklim investasi dan kemudahan berinvestasi.
4. Memperbaiki tata kelola BUMD dan mendirikan BUMD profesional di bidang pertanian
5. Mencetak 100 ribu millennial entrepreneur dan women entrepreneur serta pelaku ekonomi kreatif.
6. Meningkatkan akses keuangan perbankan dan non perbankan bagi UMKM dan pengusaha pemula.
7. Meningkatkan metode pemasaran produk UMKM melalui digitalisasi dengan memanfaatkan e-commerce yang telah ada.
8. Meningkatkan keahlian dan keterampilan bagi pelaku UMKM dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan bisnis dan perdagangan digital

Pencapaian sasaran Prioritas Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital, dilakukan dengan beberapa Program Pembangunan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel Program Pembangunan mendukung
Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah
Serta Ekonomi Berbasis Digital Tahun 2024

NO	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA			PERANGKAT DAERAH
		INDIKATOR	SATUAN	TARGET	
Prioritas 4 : Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/ menengah serta ekonomi berbasis digital					
1	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Peningkatan omset pedagang pasar rakyat yang sudah direvitalisasi	%	6,2	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2	Program Pengembangan Ekspor	Nilai ekspor	juta US\$	1.478,4	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase barang beredar dan jasa yang diawasi	%	76	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Persentase komoditi potensial yang sesuai ketentuan berlaku	%	26	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Persentase pengaduan konsumen yang diselesaikan	%	89	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Peningkatan transaksi pada kegiatan pameran	%	5	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
5	Program Penyelenggaraan Jalan	Rasio Kemantapan Jalan	%	79	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
6	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Jumlah sentra industri yang diberi perkuatan	Sentra	25	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
7	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah IUI dan IPU	%	76	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
8	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang kompeten	%	36,04	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
9	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase koperasi yang memiliki izin usaha simpan pinjam	%	3,25	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
10	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi yang menindaklanjuti rekomendasi pengawasan	%	65	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
11	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Jumlah SDM KUKM yang dilatih	orang	1.500	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

NO	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA			PERANGKAT DAERAH
		INDIKATOR	SATUAN	TARGET	
12	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Jumlah koperasi modern	koperasi	70	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
13	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Jumlah produk UKM yang terstandarisasi	produk	125	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
14	Program Pengembangan UMKM	Persentase usaha kecil yang menjadi wirausaha	%	3,5	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
15	Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Persentase organisasi pemuda yang memiliki kontribusi aktif dalam pembangunan	%	17	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Jumlah wirausaha muda baru	orang	348	Dinas Pemuda dan Olahraga
16	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang kompeten	%	36,04	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
17	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Indeks pembangunan keluarga	indeks	63,46	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
18	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Jumlah SDM KUKM yang dilatih	orang	1.500	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
19	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Jumlah produk UKM yang terstandarisasi	produk	125	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
20	Program Pengembangan UMKM	Persentase usaha kecil yang menjadi wirausaha	%	3,5	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
21	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase organisasi Pemuda yang memiliki kontribusi aktif dalam pembangunan	%	17	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Jumlah wirausaha muda baru	orang	348	Dinas Pemuda dan Olahraga
22	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase peningkatan produksi ikan olahan dan pemasaran hasil perikanan	%	7,95	Dinas Kelautan dan Perikanan

NO	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA			PERANGKAT DAERAH
		INDIKATOR	SATUAN	TARGET	
		Jumlah produksi olahan hasil perikanan	ton	19.280	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Tingkat konsumsi ikan	Kg/kap /th	41,6	Dinas Kelautan dan Perikanan
23	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Peningkatan Jumlah SDM Pariwisata yang bersertifikat	Orang	496	Dinas Pariwisata
		Persentase pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif	%	8	Dinas Pariwisata
24	Program Perizinan Usaha Pertanian	Peningkatan klasifikasi kelas kebun usaha pertanian	%	8	Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Holtikultura
25	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Unit Usaha dan UPTD sub urusan peternakan yang diawasi	%	3	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
26	Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	hektar	50.000	Dinas Kehutanan
27	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Peningkatan transaksi pada kegiatan pameran	%	5	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
28	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Jumlah sentra industri yang diberi perkuatan	Sentra	25	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
29	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah IUI dan IPU	%	76	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
30	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Regulasi Penanaman Modal	%	100	Dinas Penanaman Modal Provinsi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
31	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Pernyataan Minat	dokumen pernyataan minat	5	Dinas Penanaman Modal Provinsi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
32	Program Pelayanan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai/Rasio	82,90 / 3,43	Dinas Penanaman Modal Provinsi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA			PERANGKAT DAERAH
		INDIKATOR	SATUAN	TARGET	
		Persentase Perizinan yang Diterbitkan Tepat Waktu	%	86,38	Dinas Penanaman Modal Provinsi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
33	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Nilai Realisasi Investasi (PMA dan PMDN)	Rp (triliun)	6,1	Dinas Penanaman Modal Provinsi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
34	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Ketersediaan Data Penanaman Modal Penanaman Modal Berbasis Teknologi Informasi	%	60	Dinas Penanaman Modal Provinsi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
35	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Indeks SPBE (Skala 1-5)	indeks	3,4	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
36	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Jumlah produk UKM yang terstandarisasi	produk	125	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
37	Program Pengembangan UMKM	Persentase usaha kecil yang menjadi wirausaha	%	3,5	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Sumber : RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

Dalam rangka meningkatkan nilai tambah serta daya saing produk UMKM kedepannya maka salah satu inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi UMKM (PLUT KUMKM) Sumatera Barat yakni menyediakan layanan mobile melalui inovasi Mobil Klinik Koperasi UMKM (MoNik KUMKM) dengan target utama yakni pelaku UMKM millennial, sesuai dengan Program Unggulan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang tertuang dalam RPJMD tahun 2021-2026, yaitu terciptanya 100.000 millennial entrepreneur, woman entrepreneur, dan pelaku ekonomi kreatif lainnya.

Dengan inovasi MoNik KUMKM ini maka PLUT KUMKM Provinsi Sumatera Barat meraih juara 2 PLUT Ter-Hebat dari 74 PLUT se-Indonesia yang dapat memberdayakan pelaku UMKM dalam kemudahan berusaha. MoNik KUMKM menjangkau UMKM untuk mengatasi beberapa permasalahan antara lain belum mempunyai legalitas usaha (Nomor Induk Berusaha/NIB), izin edar produk (SPPIRT, MD MBPOM, PKRT), sertifikasi halal, keterbatasan modal, kemasan produk yang tidak menarik, distribusi

produk, pemasaran terbatas, manajemen keuangan dan SDM belum dikelola dengan baik.

Legalitas usaha NIB merupakan pintu masuk untuk pengurusan perizinan lainnya, berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Dinas Koperasi UKM Provinsi Sumatera Barat kepada 807 pelaku UMKM di wilayah perkotaan pada tahun 2022, sebanyak 642 UMKM (79,5 %) sudah memiliki NIB, sedangkan sebanyak 165 UMKM (20,5 %) belum memiliki NIB, sedangkan untuk wilayah pedesaan, berdasarkan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Penumbuhan Millennial Entrepreneur dan bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Kewirausahaan yang berlokasi di Kabupaten, terdapat bahwa lebih dari 70 % peserta belum memiliki NIB.

Kahadiran MoNik KUMKM selain memfasilitasi penerbitan NIB juga memberikan konsultasi bisnis bagi UMKM yang masih membutuhkan bimbingan tentang legalitas usaha dan pengembangan bisnisnya. MoNik KUMKM ini merupakan suatu bentuk keseriusan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam memberikan pelayanan kepada KUMKM. Pelayanan difokuskan kepada hasil pemetaan Nagari-Nagari yang berada cukup jauh dari perkotaan yang belum terjangkau dengan layanan konsultasi bisnis oleh instansi terkait di kabupaten/kota.

❖ **Prioritas Pembangunan 5 : Meningkatkan Ekonomi Kreatif Dan Berdaya Saing Kepariwisata**

Pariwisata termasuk sektor penting dalam pembangunan ekonomi Sumatera Barat yang diharapkan menjadi industri dan salah satu basis pembangunan Sumatera Barat untuk kedepannya disamping pertanian. Sehingga prioritas ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan pariwisata yang nyaman dan berkesan salah satunya adalah meningkatkan kompetensi pihak pengelola sumberdaya wisata atau sumberdaya penunjang wisata agar dapat mewujudkan pariwisata yang nyaman dan berkesan.

Pariwisata yang nyaman dan berkesan ditandai dengan kepuasan dan kenikmatan berwisata yang dirasakan wisatawan, baik wisatawan domestik maupun mancanegara. Beberapa tahun terakhir Sumatera Barat mengalami kemajuan ekonomi dari sektor pariwisata, untuk itu hal ini harus selalu diperkuat melalui pembangunan pariwisata berbasis Pariwisata Halal dan MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition), dengan membenahi destinasi wisata baik kelas lokal, nasional dan internasional dengan cara meningkatkan atraksi, aksesibilitas dan amenities di Destinasi

Wisata sekaligus meningkatkan pembinaan kepada masyarakat terutama di wilayah-wilayah destinasi wisata.

Perekonomian Sumatera Barat cenderung tumbuh melambat setiap tahunnya seiring kinerja lapangan usaha utama daerah pada sektor pertanian yang dalam tren menurun. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, Sumatera Barat perlu mengembangkan sumber pertumbuhan ekonomi baru sebagai lokomotif perekonomian ke depan, disamping terus memperkuat dan mengoptimalkan kinerja pertanian dan industri pengolahan yang telah lama menjadi tulang punggung perekonomian Sumatera Barat.

Pariwisata dapat menjadi lokomotif baru perekonomian Sumatera Barat karena memiliki multiplier effect yang luas dan keseluruhan. Kedatangan wisatawan memiliki dampak yang luar biasa dalam menggerakkan begitu banyak kegiatan sektor lain, seperti perhotelan dan restoran, transportasi, produk kerajinan dan industri olahan makan/minum, dan jasa-jasa.

Pariwisata Sumatera Barat terbukti sangat potensial untuk menjadi lokomotif baru perekonomian daerah ke depan, hal ini didukung dengan Sumatera Barat menjadi salah satu dari 10 besar destinasi favorit wisatawan nusantara di Indonesia serta merupakan 3 (tiga) besar destinasi favorit wisatawan di Sumatera. Hal lainnya yakni keberadaan potensi wisata di Sumatera Barat juga diakui secara Global dan Nasional antara lain sebagai Provinsi dengan desa wisata terbanyak dan empat desa wisata masuk 50 besar terbaik se-Indonesia pada Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2021; Memiliki 11 Geopark, 3 sudah diakui Nasional; Rendang didaulat sebagai masakan terlezat di dunia versi CNN Travels pada tahun 2017); Sumatera Barat ditetapkan sebagai Juara World's Best Halal Culinary Destination dan World's Best Halal Destination pada anugerah World Halal Tourism Award Abu Dhabi pada tahun 2016); Gulungan ombak Mentawai masuk dalam jajaran ombak terbaik di dunia berdasarkan Surfer Magazine di tahun 2013; serta Desa Pariangan terpilih menjadi desa terindah di dunia versi Travel Budget pada tahun 2012. Berdasarkan pengakuan Global dan nasional tersebut maka Sumatera Barat memiliki kekuatan pariwisata dari keindahan alam (nature), keberagaman budaya (culture), serta kuliner yang lezat (culinary).

Selain itu, Bank Indonesia Kantor Perwakilan Sumatera Barat bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah

mencanangkan tahun kunjungan wisata “Visit Beautiful West Sumatera”. Langkah ini merupakan upaya untuk membangkitkan kembali gairah sektor pariwisata dan ekonomi kreatif Sumatera Barat dari keterpurukan ekonomi selama masa pandemic Covid 19.

Dalam pengembangan sektor pariwisata, Sumatera Barat mengambil langkah pengembangan pariwisata berbasis komunitas atau Community Based Tourism (CBT) yang berarti memberikan pemberdayaan yang lebih demokratis dengan memberikan kesempatan atau akses kepada masyarakat setempat dalam mengelola dan mengembangkan pariwisata serta menikmati hasilnya secara lebih adil dan merata.

Pariwisata berbasis komunitas atau Community Based Tourism (CBT) juga memiliki tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat lokal atau sebagai upaya untuk mengelola sumber daya setempat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Syarat-syarat dari pariwisata berbasis komunitas - Community Based Tourism (CBT) adalah memberdayakan dan melibatkan masyarakat untuk memastikan kepemilikan dan transparansi dalam pengelolaan, membangun kemitraan dengan pemangku kepentingan, dapatkan posisi yang valid dengan otoritas terkait, meningkatkan martabat manusia dan kesejahteraan sosial, mekanisme pembagian manfaat yang adil dan transparan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional, menghormati warisan budaya lokal, berpartisipasi aktif dalam konservasi sumber daya alam, meningkatkan kualitas pengalaman wisatawan dengan meningkatkan kualitas interaksi dan bertujuan untuk membentuk kemandirian masyarakat.

Pariwisata berbasis komunitas - Community Based Tourism (CBT) sebagai pendekatan pembangunan yaitu: 1) bentuk pariwisata yang memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal untuk mengontrol dan terlibat dalam manajemen dan pembangunan pariwisata, 2) masyarakat yang tidak terlibat langsung dalam usaha-usaha pariwisata juga mendapat keuntungan, 3) menuntut pemberdayaan secara politis dan demokratisasi dan distribusi keuntungan kepada komunitas yang kurang beruntung di pedesaan.

Untuk mengatasi kendala dalam penerapan pariwisata berbasis komunitas - Community Based Tourism (CBT) perlu adanya kebijakan dan pemberdayaan pengiat/pelaku-pelaku pariwisata dari kalangan masyarakat yang telah berhasil dan dijadikan sebagai inspirator bagi calon-calon pelaku pariwisata di daerah-daerah yang berpotensi dikembangkan untuk

diterapkannya pariwisata berbasis komunitas - Community Based Tourism (CBT). Pelaku/pengiat pariwisata yang telah berhasil dari kalangan masyarakat lokal setempat dikenal dengan istilah local champion yang dalam pengertiannya adalah seseorang yang memiliki inisiatif, kemampuan dan kapabilitas untuk mendorong proses perubahan dalam suatu masyarakat, instansi atau Lembaga.

Inovasi yang dikembangkan pada tahun-tahun kedepan yakni membentuk Tim Satuan Tenaga Konselor Kepariwisataan Sumatera Barat, yang disebut Tim Sanak Pariwisata Sumatera Barat. Tim Sanak Pariwisata Sumatera Barat terdiri dari para pelaku pariwisata yang dinilai telah berhasil mengembangkan pariwisata berbasis komunitas yang tersebar pada Kabupaten/Kota di Sumatera Barat dan telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat Nomor : 90/Dispar-Sekrt/II-2021 tanggal 2021 tentang Tim Satuan Tenaga Konselor Kepariwisataan Sumatera Barat, yang disebut Tim Sanak Kepariwisataan Sumatera Barat.

Adapun sasaran dan indikator kinerja pada Prioritas Meningkatkan Ekonomi Kreatif Dan Berdaya Saing Kepariwisataan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas
Meningkatkan Ekonomi Kreatif dan Berdaya Saing Kepariwisataan Tahun 2024

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024
1	Meningkatnya kontribusi pariwisata dalam perekonomian Sumatera Barat	Persentase Kontribusi Pariwisata pada PDRB (%)	1,25
2	Meningkatnya kontribusi ekonomi kreatif dalam perekonomian Sumatera Barat	Persentase Kontribusi Ekonomi Kreatif pada PDRB (%)	6,10

Sumber : RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan tersebut pada Tahun 2024 difokuskan pada :

1. Membangun industri pariwisata melalui peningkatan kualitas sarana dan prasarana destinasi wisata unggulan
2. Meningkatkan atraksi seni dan budaya serta membangun suasana festival yang meriah pada pusat keramaian dan obyek wisata unggulan
3. Meningkatkan kunjungan wisatawan terutama wisatawan domestic
4. Penguatan *Brand Image Pariwisata di Sumatera Barat*
5. Memperjelas segmentasi Wisatawan pada masing-masing daerah

6. Melakukan Strategi promosi efektif yang terpadu melalui *public campaign* dan promosi besar-besaran untuk membangun *awareness* masyarakat
7. Mendorong semua pelaku usaha pariwisata Sumbar (terutama obyek wisata unggulan) agar segera memenuhi sertifikasi CHSE, sertifikasi Halal serta sertifikasi/ standar internasional lainnya
8. Meningkatkan investasi pada bidang Pariwisata
9. Pengembangan Kawasan pariwisata secara terintegrasi, terpadu dan menyeluruh
10. Pemberdayaan para pelaku ekonomi kreatif sesuai dengan potensi daerah

Pencapaian sasaran Prioritas Meningkatkan Ekonomi Kreatif dan Berdaya Saing Kepariwisataan dilakukan dengan beberapa Program Pembangunan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel Program Pembangunan mendukung Prioritas Meningkatkan Ekonomi Kreatif dan Berdaya Saing Kepariwisataan Tahun 2024

No	Program Pembangunan Daerah	Kinerja			Perangkat daerah
		Indikator	Satuan	Target	
Prioritas 5 : Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan					
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase volume tampungan sumber-sumber air	%	56,78	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi
		Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi	%	73,48	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi
		Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air	%	70,03	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi
2	Program Penyelenggaraan Jalan	Rasio Kemantapan Jalan	%	79	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
3	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase pengelolaan sampah di Sumatera Barat	%	70	Dinas Lingkungan Hidup
4	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah intervensi pada destinasi internasional kawasan gunung talang	kali	12	Dinas Pariwisata
		Jumlah DTW Unggulan Provinsi yang diintervensi pengembangannya	DTW	19	Dinas Pariwisata
5	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara	%	5,5	Dinas Pariwisata
		Persentase peningkatan kunjungan wisatawan nusantara	%	6	Dinas Pariwisata
		Rata-rata lama tinggal wisman	hari	3,25	Dinas Pariwisata
		Rata-rata lama tinggal wisnus	hari	1,76	Dinas Pariwisata

No	Program Pembangunan Daerah	Kinerja			Perangkat daerah
		Indikator	Satuan	Target	
6	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Peningkatan Jumlah SDM Pariwisata yang bersertifikat	Orang	496	Dinas Pariwisata
		Persentase pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif	%	8	Dinas Pariwisata
7	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Jumlah produk UKM yang terstandarisasi	produk	125	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
8	Program Pengembangan UMKM	Persentase usaha kecil yang menjadi wirausaha	%	3,5	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
9	Program Pengembangan Kebudayaan	Jumlah Karya Budaya yang Dilestarikan	Karya Budaya	8	Dinas Kebudayaan
10	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah produk Ekonomi Kreatif yang terdaftar HKI	produk	150	Dinas Pariwisata
11	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Peningkatan Jumlah SDM Pariwisata yang bersertifikat	Orang	496	Dinas Pariwisata
		Persentase pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif	%	8	Dinas Pariwisata
12	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Jumlah sentra industri yang diberi perkuatan	Sentra	25	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Sumber : RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

III. Program Unggulan Provinsi Sumatera Barat

Dalam dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, terdapat beberapa program unggulan yang mendukung pencapaian visi misi telah direncanakan dan telah dilaksanakan sejak tahun 2022 sebagai tahun pertama pelaksanaan RPJMD dan kemudian dilanjutkan pada tahun 2023 hingga 2026.

Dalam rangka mendukung proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian hingga pelaporan dan evaluasi maka telah ditetapkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 050 – 47 – 2022 Tentang Penetapan Kinerja Program Unggulan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026. Adapun sasaran dan target masing-masing Program Unggulan di Tahun 2024 yakni sebagai tabel berikut.

Tabel Target Kinerja Program Unggulan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

PROGRAM UNGGULAN/DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	SKPD/SUB KEGIATAN
1	2	3	4
SUMBAR SEJAHTERA			
I. Mencetak 100 ribu <i>millennial entrepreneur</i> dan <i>women entrepreneur</i> serta pelaku ekonomi kreatif			
Definisi operasional : 1. Memfasilitasi tumbuhnya 100 ribu milenial entrepreneur dan woman entrepreneur yang direncanakan akan dilaksanakan dalam 5 tahun dengan proporsi 20 ribu setiap tahunnya dari tahun 2022 sampai dengan 2026 2. 100 ribu milenial tersebut tersebar pada beberapa sector, baik pertanian, peternakan, perikanan, industry, UMKM, pariwisata, ekonomi kreatif dan sector potensial lainnya 3. Untuk pencapaian target 100 ribu milenial tersebut perlu pembagian secara proporsional dengan kabupaten/kota 4. Definisi terkait dengan entrepreneur yakni : a. Telah menerima Pendidikan kewirausahaan dan atau b. Sudah memulai usaha 5. Bekerjasama dengan akselarator 6. Penanggung jawab progul Dinas Koperasi dan UKM	1. Jumlah entrepreneur baru tercipta (orang)	20.000	
	a. Jumlah entrepreneur baru tercipta urusan Pemuda dan Olahraga (orang)	528	Dinas Pemuda dan Olahraga Sub kegiatan : 1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi 2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi
	b. Jumlah entrepreneur baru tercipta urusan Tenaga Kerja (orang)	6797	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sub kegiatan : 1. Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi 2. Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja 3. Perluasan Kesempatan Kerja
	c. Jumlah entrepreneur baru tercipta urusan Koperasi dan UMKM (orang)	2000	Dinas Koperasi dan UMKM Sub kegiatan : 1. Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan 2. Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi
	d. Jumlah entrepreneur baru tercipta urusan Pertanian (sub urusan Perkebunan, Tanaman pangan dan Hortikultura) (orang)	300	Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan hortikultura Sub kegiatan : 1. Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani
	e. Jumlah entrepreneur baru tercipta urusan Pertanian (sub	5.246	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sub kegiatan :

PROGRAM UNGGULAN/DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	SKPD/SUB KEGIATAN
1	2	3	4
	urusan Peternakan dan Kesehatan Hewan) (orang)		1. Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian
	f. Jumlah enterpreneur baru urusan Kehutanan (orang)	500	Dinas Kehutanan Sub kegiatan : 1. Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan 2. Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan 3. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan 4. Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan 5. Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial
	g. Jumlah enterpreneur baru tercipta urusan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (orang)	2.664	Dinas Pariwisata Sub kegiatan : 1. Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan 2. Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata 3. Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan 4. Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata 5. Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA) 6. Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif 7. Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif 8. Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif
	h. Jumlah enterpreneur baru	1.500	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

PROGRAM UNGGULAN/DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	SKPD/SUB KEGIATAN
1	2	3	4
	tercipta urusan Perindustrian dan Perdagangan (orang)		Sub kegiatan : 1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 2. Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi
	i. Jumlah entrepreneur baru tercipta urusan Sosial (orang)	412	Dinas Sosial Sub kegiatan : 1. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial (Panti Anak terlantar) 2. Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari (Panti Tuna Netra) 3. Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari (Panti PMKS Lainnya)
	j. Jumlah entrepreneur baru tercipta urusan Kebudayaan (orang)	280	Dinas Kebudayaan Sub kegiatan : 1. Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
	k. Jumlah entrepreneur baru tercipta urusan Kelautan dan perikanan (orang)	450	Dinas Kelautan dan Perikanan Sub kegiatan : 1. Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar 2. Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 3. Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing 4. Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber

PROGRAM UNGGULAN/DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	SKPD/SUB KEGIATAN
1	2	3	4
			Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
	l. Jumlah enterpreneur baru tercipta urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana (orang)	725	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Sub kegiatan : 1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi 2. Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi
	m. Jumlah enterpreneur baru tercipta urusan Penanaman Modal (orang)	100	Dinas Penanaman Modal Provinsi Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sub kegiatan : 1. Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi
	n. Jumlah enterpreneur baru tercipta urusan Pangan (orang)	112	Dinas Pangan Sub kegiatan : 1. Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
	o. Jumlah enterpreneur baru tercipta urusan Pemberdayaan Masyarakat Pangan (orang)	1.400	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sub kegiatan : 1. Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa 2. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
II. Meningkatkan akses keuangan perbankan dan non perbankan bagi UMKM dan pengusaha pemula			
Definisi operasional : 1. Peningkatan akses keuangan perbankan dan non perbankan bagi UMKM dan pengusaha	1. Jumlah UMKM yang difasilitasi pada akses keuangan perbankan dan non perbankan	540	Dinas Koperasi dan UMKM Sub kegiatan : 1. Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi

PROGRAM UNGGULAN/DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	SKPD/SUB KEGIATAN
1	2	3	4
<p>pemula yang dilakukan melalui Fasilitasi, peningkatan pemahaman terkait akses pembiayaan</p> <p>2. Bentuk fasilitasi antara lain mempertemukan kelompok UMKM dengan perbankan</p> <p>3. Target capaian yakni UMKM yang mendapatkan permodalan dari perbankan</p> <p>4. Edukasi terhadap non perbankan seperti CSR, fin-tech, dana dari lembaga keuangan social islam</p> <p>5. Penanggungjawab progul adalah Dinas Koperasi dan UMKM</p>	(Lembaga)		<p>Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan</p>
	2. Jumlah Pengusaha pemula yang difasilitasi pada akses keuangan perbankan dan non perbankan (orang)	200	
	3. Jumlah Pelaku UMKM yang mendapatkan permodalan dari Lembaga perbankan dan non perbankan (orang)	400	
	4. Jumlah Pengusaha pemula yang mendapatkan permodalan dari Lembaga perbankan dan non perbankan (orang)	150	
	5. Jumlah Lembaga perbankan yang memberikan permodalan pada UMKM dan pengusaha pemula (Lembaga)	4	
	6. Jumlah Lembaga non perbankan yang memberikan permodalan pada UMKM dan pengusaha pemula (Lembaga)	5	
<p>III. Meningkatkan keahlian dan keterampilan bagi pelaku UMKM dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan bisnis dan perdagangan digital</p>			
<p>Definisi operasional :</p> <p>1. Peningkatan keahlian dan keterampilan bagi pelaku UMKM melalui pelatihan, workshop dan sosialisasi dengan tema difokuskan pada penguasaan Teknologi Informasi untuk perluasan jejaring pemasaran dan kerjasama</p> <p>2. Penanggungjawab progul adalah Dinas Koperasi dan UMKM</p>	<p>1. Jumlah Pelaku UMKM yang mendapatkan peningkatan keahlian dan keterampilan pada penguasaan teknologi informasi guna perluasan jejaring pemasaran (orang)</p>	180	<p>Dinas Koperasi dan UMKM</p> <p>Sub kegiatan :</p> <p>1. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDMUkM</p> <p>2. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi</p> <p>3. Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan</p> <p>4. Produksi dan Pengolahan, Pemasaran,</p>

PROGRAM UNGGULAN/DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	SKPD/SUB KEGIATAN
1	2	3	4
			Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi
	2. Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan fasilitasi marketing digital (orang)	500	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sub kegiatan : 1. Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi 2. Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi
IV. Membangun industri pariwisata melalui 1 destinasi wisata berkelas dunia dan 19 destinasi wisata unggulan			
Definisi operasional : 1. Penetapan 1 destinasi wisata berkelas dunia (rencana Kawasan Gunung Talang yang merupakan salah satu geosite Kawasan Geopark Ranah Minang, meliputi 7 Kab/Kota, menuju UNESCO global geopark) dan 19 destinasi wisata unggulan (masing-masing 1 di setiap kabupaten/Kota) yang telah disepakati pada rakor pariwisata di Mentawai 2. Terkait dengan kewenangan, maka pola pendanaan untuk destinasi yang merupakan kewenangan kabupaten/kota melalui sharing pendanaan antara provinsi dan kabupaten/kota. 3. Proporsi persentase sharing pendanaan diputuskan pada rapat TAPD dengan melibatkan Dinas Pariwisata Provinsi dan Biro Kerjasama , Pembangunan Dan Rantau. 4. Membangun Pusat Inkubasi Ekonomi Kreatif (Sumbar Kreatif Hub), yang berlokasi di bekas Bengkel PT Dinamika di Nipah, Padang direncanakan akan dikelola oleh salah satu BUMD 5. Penanggung jawab progul Dinas Pariwisata dan Biro Perekonomian	1. Jumlah destinasi wisata unggulan (Kab/Kota)	19	Dinas Pariwisata Sub kegiatan : 1. Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi 2. Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi 3. Penetapan Destinasi Pariwisata Provinsi 4. Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi 5. Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi 6. Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi
	2. Jumlah destinasi wisata kelas dunia (lokasi)	1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian Dinas Pariwisata Sub kegiatan : Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi
	3. Jumlah Pusat Inkubasi Ekonomi Kreatif yang terbangun dan terkelola (unit)	-	

PROGRAM UNGGULAN/DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	SKPD/SUB KEGIATAN
1	2	3	4
			Daerah Provinsi
V. Membangun 3 pusat pertunjukan seni dan budaya bertaraf Internasional			
Definisi operasional : 1. Pusat pertunjukan seni yang direncanakan adalah: a. Gedung Kebudayaan (lokasi di Padang), b. Amphiteatre (lokasi di panorama view ngarai sianok Bukittinggi) c. Amphiteatre (lokasi di Kawasan talang dengan view 3 danau) 2. Peran provinsi yakni membangun amphiteatre (pastikan terkait kepemilikan asset) serta berkoordinasi untuk mengisi aktivitas seni dan budaya dengan sanggar-sanggar seni yang berada di kabupaten/kota tersebut 3. Penanggungjawab progul Dinas Kebudayaan dan Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan tata Ruang	1. Jumlah pusat pertunjukan seni dan budaya (amphiteatre) bertaraf internasional yang terbangun (lokasi) Lokasi Amphiteatre : a. Gedung Kebudayaan b. Panorama view ngarai sianok Bukittinggi c. Kawasan talang dengan view 3 danau	-	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Sub kegiatan : 1. Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi Catatan: 1. Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang hanya melaksanakan pengawasan terkait dengan pembangunan Amphiteatre oleh pemerintah kabupaten/kota melalui dana BKK dari APBD provinsi 2. Amphiteatre di Bukittinggi dan di Kab Solok di bangun melalui mekanisme Bantuan Keuangan Khusus, dengan sub kegiatan yang berada pada unsur penunjang Keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yakni : a. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
	2. Jumlah aktifitas seni dan budaya di lokasi amphiteatre (kali)	9	Dinas Kebudayaan Sub kegiatan : 1. Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional 2. Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor 3. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Sumber : Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 050 - 47 - 2022 Tentang Penetapan Kinerja Program Unggulan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

IV. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

1. Indikator Kinerja Makro

Indikator Makro merupakan indikator gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi maupun sosial di Sumatera Barat yang terdiri dari Pertumbuhan Ekonomi, PDRB ADHK2 Per Kapita, PDRB (ADHB) per kapita, Indeks Gini, Indeks Williamson (Indeks Ketimpangan Regional), Tingkat Kemiskinan, Penduduk Miskin, Tingkat pengangguran terbuka, dan Indeks Pembangunan Manusia.

Pertumbuhan ekonomi adalah indikator utama yang sangat penting untuk menjamin kesinambungan untuk menggerakkan pembangunan di daerah namun demikian pertumbuhan ekonomi yang berkualitas juga diiringi dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia, penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka serta penurunan Tingkat Kemiskinan. Adapun proyeksi indikator kinerja makro Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024-2025 sebagaimana dilihat pada tabel dibawah ini. Proyeksi indikator kinerja makro disusun mempertimbangkan hasil evaluasi terhadap capaian tahun 2022 dan perkiraan capaian tahun 2023 serta memperhatikan target Sumatera Barat dalam RKP tahun 2024, sehingga dalam penetapan target indikator kinerja makro tahun 2024 perlu dilakukan penyesuaian jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.

Tabel Indikator Kinerja Makro Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024-2025

No	Indikator Kinerja Makro	Sumber Data	TARGET KINERJA		
			2024		2025
			RPJMD	RKPD	RPJMD
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Data diolah	4,60	4,76	4,70
2	PDRB ADHK per Kapita (Rp. Juta)	Data diolah	34,09	34,85	35,29
3	PDRB ADHB per kapita (Rp. Juta)	Data diolah	53,69	59,88	56,13
4	Indeks Gini (Ratio)	Data diolah	0,293	0,290	0,289
5	Indeks Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)	Data diolah	0,308	0,316	0,307
6	Tingkat Kemiskinan (%)	Data diolah	6,03	5,62	5,90
7	Penduduk Miskin (ribu jiwa)	Data diolah	350,62	324,71	347,27
8	Tingkat pengangguran terbuka (%)	Data diolah	6,31	5,70	6,13
9	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Data diolah	73,70	74,25	74,16
	a. Angka Harapan Hidup (Tahun)	Data diolah	70,17	70,20	70,35
	b. Harapan Lama Sekolah (Tahun)	Data diolah	14,08	14,41	14,09
	c. Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	Data diolah	9,38	9,36	9,47
	d. Pengeluaran per Kapita (Ribu/Kapita/Tahun)	Data diolah	11.342	11.455	11.592

Sumber : RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dan hasil Analisa Bappeda 2023

2. Indikator Kinerja Utama

Pengukuran keberhasilan rencana pembangunan tahunan terutama dalam bingkai rencana pembangunan jangka menengah daerah dalam pencapaian Visi dan Misi RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2021-2026 tercermin

dari capaian indikator kinerja utama yang ditetapkan. Untuk mengukur keberhasilan program pembangunan yang telah ditentukan maka dipilih Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target capaian selama lima tahun ke depan menurut tujuan dan sasaran pada setiap misi yang disajikan, berikut target Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk tahun 2024-2025 dalam tabel berikut :

Tabel Indikator Kinerja Utama Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 dan 2025

No	INDIKATOR	TARGET	
		2024	2025
Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			
1	Indeks Pembangunan manusia (IPM)	74,25	74,16
2	Angka Harapan Hidup (AHH)	70,20	70,35
3	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	14,00	12,50
4	Rata-rata lama sekolah	9,36	9,47
5	Harapan Lama Sekolah	14,41	14,09
6	Persentase Angkatan kerja berpendidikan menengah keatas	49,80	49,85
Misi 2 : Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah AdaiK Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah			
1	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	62,70	63,10
2	Indeks Ketahanan Sosial Budaya (Dimensi IPK BPS)	62,80	62,90
3	Indeks Pembangunan Literasi masyarakat	15	16
4	Indeks Pembangunan keluarga	63,46	65,54
5	Indek Pembangunan Gender (IPG)	94,60	95,00
6	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	61,20	61,75
7	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	66,05	66,15
Misi 3 : Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			
1	Persentase Peningkatan Pendapatan Petani (%)	5	5
2	Nilai Tukar Petani (NTP)	101,40	101,60
3	Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)	104,50	105,03
4	Pendapatan pembudidaya ikan (Rp. Jt)	50.048	51.549
5	Pendapatan nelayan (Rp. Jt)	42.443	43.292
6	Pendapatan Peternak (Rp. Jt)	52.779	55.418
7	Pendapatan petani tanaman pangan dan hortikultura (%)	5	5
8	Indeks Ketahanan Pangan	81,60	82,05
9	Peningkatan Pendapatan Petani Hutan (%)	5	5
Misi 4 : Meningkatkan usaha perdagangan dan industrikecil/ menengah serta ekonomi berbasis digital			
1	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	17,35	17,65
2	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (%)	9,02	9,15
3	Laju pertumbuhan sektor perdagangan (%)	1	1,01
4	Jumlah sentra industri kecil dan menengah (sentra)	390	401
5	Laju pertumbuhan ekonomi sub sektor koperasi (%)	2,23	2,28

No	INDIKATOR	TARGET	
		2024	2025
6	Persentase peningkatan pendapatan pada usaha mikro dan kecil	3,8	4,5
7	Jumlah enterpreneur baru tercipta (orang)	150.658	173.711
8	Persentase peningkatan Investasi di provinsi (%)	9,50	10,50
9	Kontribusi Ekonomi Digital (%)	7,10	7,25
Misi 5 : Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan			
1	Persentase Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat dari Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	15,25	16,85
2	Persentase Kontribusi Pariwisata pada PDRB (%)	1,25	1,26
3	Persentase Kontribusi Ekonomi Kreatif pada PDRB (%)	6,10	6,18
Misi 6 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			
1	Indeks Kinerja Infrastruktur	0,756	0,786
2	Rasio Konektivitas (Rasio)	0,684	0,691
3	Kemantapan Jalan (%)	79,00	81,00
4	Indeks Ketahanan Daerah (Indeks)	0,64	0,65
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks)	78,41	78,81
6	Akses Air Minum (%)	86,00	88,00
7	Akses Sanitasi Layak (%)	86,00	88,00
8	Persentase Bangunan Strategis Terbangun (%)	66,67	83,33
9	Peresentase pemenuhan kebutuhan air irigasi (%)	73,48	75,04
10	Persentase Volume tampungan sumber-sumber air (%)	56,78	58,28
11	Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air (%)	70,03	71,79
12	Persentase Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW (%)	88,00	89,00
Misi 7 : Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas			
1	Indeks reformasi birokrasi	70,50	71,00
2	Nilai SAKIP (predikat)	BB	BB
		(78,50)	(79,00)
3	Nilai EPPD (skor)	3,003	3,004
4	Opini laporan keuangan (opini)	WTP	WTP
5	Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	39,56	40,75
6	Indeks SPBE (indeks)	3,40	3,50
7	Indeks Profesionalitas ASN (indeks)	78,00	80,00
8	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (indeks)	87	88

Sumber : RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

3. Indikator Kinerja Daerah

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah khususnya dalam pemenuhan kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan umum dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari

akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcome) atau komposisinya (impact). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode 2021-2026 yang telah direncanakan. Ukuran keberhasilan/pencapaian suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja dimaksud juga diperlukan publik dalam rangka perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Selanjutnya, indikator kinerja daerah dibagi menjadi 3 (tiga) aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah. Aspek kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator makro yang merupakan indikator gabungan dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi sosial. Aspek Pelayanan Umum merupakan segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan atau urusan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti infrastruktur dasar baik secara fisik maupun sosial. Aspek Daya Saing Daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

Indikator Kinerja Daerah Provinsi Sumatera Barat tersebut secara rinci disajikan pada tabel berikut :

Tabel Indikator Kinerja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 dan 2025

No	Indikator Kinerja Kunci	Sumber Data	TARGET	
			2024	2025
II.	URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
17.	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			
	a. Persentase Koperasi yang berkualitas	Dinas Koperasi dan UKM	24,39	29,21
	b. Persentase Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	Dinas Koperasi dan UKM	3,7	4,2
18.	Urusan Penanaman Modal			
	Persentase peningkatan investasi di provinsi (%)	DPMPSTP	9,5	10,5

No	Indikator Kinerja Kunci	Sumber Data	TARGET	
			2024	2025
III.	URUSAN PILIHAN			
26.	Urusan Pariwisata			
	a. Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan (%)	Dinas Pariwisata	1,5	1,5
	b. Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke provinsi (%)	Dinas Pariwisata	1,5	1,5
	c. Tingkat hunian akomodasi (%)	Dinas Pariwisata	50,3	55,25
V	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
36	Unsur Keuangan			
	a. Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	BPKAD	8,35	8,27
	b. Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	BPKAD	3,8	3,6
	c. Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	BPKAD	3,55	3,54
	d. Manajemen Aset	BPKAD	100	100
	e. Rasio anggaran SiLPA terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	BPKAD	3,57	3,53
	f. Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	BPKAD	100	100
	g. Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	BPKAD	87,24	87,55
	h. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	BPKAD	WTP	WTP
	i. Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (%)	BPKAD	100	100
	j. Rasio PAD terhadap PDRB (%)	Bapenda	1,85	1,88
	k. Persentase Peningkatan PAD (%)	Bapenda	7,2	7,2

Sumber : RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

2. 2. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2023

1. Pendahuluan

a. Latar Belakang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023 yang sedang dilaksanakan merupakan hasil dari proyeksi ke depan dengan asumsi-asumsi yang diperkirakan akan terjadi. Sejalan dengan pelaksanaan APBD Tahun 2023 tersebut, ditemui beberapa hal yang sudah tidak sejalan lagi dengan asumsi-asumsi yang melatarbelakangi penyusunannya. Hal ini apabila tetap dilanjutkan, dapat menimbulkan ketidaksinkronan program, kegiatan dan sub kegiatan dengan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

Untuk melakukan perubahan pada APBD Tahun 2023, perlu dilakukan perubahan terlebih dulu terhadap RKPD Tahun 2023 yang menjadi acuan dalam penyusunan APBD. Hal ini diatur lebih lanjut pada Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 343 Permendagri 86 Tahun 2017 menyatakan bahwa Perubahan RKPD dan Perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi :

- perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan;
- keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Namun berdasarkan pasal 343 ayat 4 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tersebut juga menyatakan bahwa perubahan RKPD dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, kebijakan Pemerintah Daerah, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan.

Berdasarkan hasil evaluasi tahun berjalan, maka Perubahan RKPD 2023 dilakukan dengan alasan :

- a) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah

Berdasarkan capaian tahun 2022 serta memperhatikan capaian perkembangan pelaksanaan pembangunan, maka terdapat beberapa target yang telah tercapai sehingga perlu dilakukan penyesuaian target. Hal ini untuk menjaga optimisme pelaksanaan pembangunan serta meningkatkan kualitas hasil pembangunan.

- b) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah
Beberapa indikator makro kinerja pembangunan Daerah pada tahun berjalan yakni tahun 2023 telah dirilis dengan kondisi Triwulan I oleh BPS antara lain Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran. Sehingga berdasarkan capaian tahun berjalan tersebut akan merubah asumsi

target indikator makro pembangunan hingga akhir tahun 2023 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2023

- c) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi keuangan daerah

Antara lain yakni perkembangan capaian Pendapatan Asli Daerah yang diproyeksikan tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada APBD 2023 serta meningkatnya kebutuhan belanja daerah yang bersifat mengikat dan wajib yang belum dianggarkan sepenuhnya pada APBD 2023 serta adanya kebutuhan mendesak yang merupakan prioritas nasional salah satunya dengan telah dimulainya tahapan persiapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024.

- d) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan

Berdasarkan hasil evaluasi hasil RKPD Tahun 2023 Triwulan II terdapat beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan yang capaiannya masih rendah dan diprediksikan tidak dapat tercapai secara maksimal hingga akhir tahun serta terdapat beberapa sub kegiatan yang juga dengan capaian yang sangat tinggi dan terdapat beberapa sub kegiatan yang tidak tercapai sama sekali karena tidak dianggarkan pada APBD Tahun 2023. Terhadap hal tersebut maka perlu disesuaikan kembali asumsi rencana yang telah disusun agar pada akhir tahun seluruh target yang direncanakan dapat tercapai secara maksimal dan efektif serta efisien.

Selain itu, terdapat belanja yang sifatnya wajib dan mengikat yang pada APBD 2023 belum dianggarkan secara maksimal 12 bulan, sehingga perlu untuk dilakukan penyesuaian anggaran antar sub kegiatan kembali.

Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan

Berdasarkan hasil audit BPK RI terhadap Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022 bahwa terdapat selisih SILPA dari yang diproyeksikan pada APBD 2023, sehingga terhadap hal ini perlu dilakukan penyesuaian pada Perubahan RKPD 2023.

Pada APBD 2023, diproyeksikan SILPA Tahun 2022 yang dapat digunakan pada tahun 203 sebesar Rp.350.000.000.000, namun berdasarkan hasil audit BPK RI, SILPA Tahun Anggaran 2022 hanya sebesar Rp. 289.279.692.879, sehingga terdapat selisih defisit sebesar Rp.60.720.307.121. mengingat SILPA yang didapatkan lebih kecil dari proyeksi APBD 2023 maka tentunya akan terjadi rasionalisasi dan penyesuaian belanja, hal ini guna meminimalkan serta menghindari kemungkinan pelaksanaan pekerjaan/kegiatan yang gagal bayar dikarenakan tidak tersedianya anggaran pada Kas Daerah.

- e) Adanya kebijakan nasional, kebijakan pemerintah daerah, keadaan darurat, keadaan luar biasa dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Setelah penetapan RKPD Tahun 2023, terdapat beberapa kebijakan nasional, kebijakan pemerintah daerah, keadaan darurat dan luar biasa serta perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD Tahun 2023 ditetapkan, yang keluar dan harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang berdampak pada terjadinya perubahan asumsi rencana pelaksanaan kegiatan dan keuangan daerah, antara lain yakni :

- Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 212/PMK.07/2022, tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya, maka Dana Alokasi Umum yang semula secara prinsip dasar seluruh alokasi Dana Alokasi Umum dapat bebas digunakan peruntukannya oleh Pemerintah Daerah dirubah menjadi Dana Alukasi Umum yang ditentukan penggunaannya dan Dana Alokasi Umum yang tidak ditentukan penggunaannya, hal ini sesuai mandat dari Pasal 130 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah serta Pasal 11 ayat (13) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023
- Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kab/Kota, mengakibatkan terjadinya perubahan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat dan Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sehingga perlu dilakukan penyesuaian pengalihan alokasi anggaran beberapa sub kegiatan.
- adanya penyesuaian penganggaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat serta tindak lanjut hasil rapat koordinasi diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri tanggal 9 Februari 2023 yang memerintahkan percepatan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai.

- ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2023 yang mengakibatkan perubahan sub kegiatan yang mengakomodir Dana Alokasi Khusus.
- Surat dari Markas Besar TNI Nomor B/72-12/07/86/AKD perihal Dukungan Fasilitas Pada Rangkaian Kegiatan Latsitarda Nusantara XLIII/2023, yang menunjuk Provinsi Sumatera Barat sebagai Tuan Rumah pelaksanaan Latsitardanus Tahun 2023, sehingga mengakibatkan pergeseran anggaran dari Bantuan Tidak Terduga kepada Belanja mendukung Program dan Kegiatan yang diletakkan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik guna memfasilitasi Upacara Penerimaan dan Pelepasan/Perpisahan Peserta Latsitardanus, hal ini dilakukan karena penunjukkan tersebut baru disampaikan oleh Markas Besar TNI pada awal Tahun 2023 setelah penetapan APBD Tahun 2023.
- Adanya pelaksanaan peringatan Hari Koperasi Nasional Tingkat Provinsi Sumatera Barat, yang pada APBD Tahun 2023 belum dianggarkan sehingga mengakibatkan dilakukannya perubahan penjabaran APBD Tahun 2023.

Sehingga arah kebijakan perubahan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 yakni :

- 1) Penyesuaian target kinerja indikator pembangunan daerah tahun 2023.
- 2) Pergeseran, penghapusan, penambahan anggaran dan kegiatan, perubahan lokasi pelaksanaan kegiatan, target kinerja kegiatan, serta manfaat atau hasil daripada kegiatan.
- 3) Penyesuaian pendapatan baik dana transfer maupun PAD, pemanfaatan Silpa berdasarkan hasil audit laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 oleh BPK.
- 4) Mengakomodir kewajiban kebijakan anggaran yang belum terpenuhi pada penyusunan APBD Tahun 2023 sebagai tindak lanjut dengan adanya beberapa regulasi dari Pemerintah.
- 5) Pelaksanaan even – even nasional yang dilaksanakan di daerah.
- 6) Meningkatkan Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan kelas jabatan dengan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
- 7) Evaluasi pelaksanaan RKPD triwulan II Tahun 2023.

b. Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 bertujuan sebagai berikut:

1. Penjabaran sasaran dan prioritas pembangunan jangka menengah daerah dalam mendukung pencapaian Visi, Misi dan Program Unggulan yang telah tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.
 2. Pedoman bagi Perubahan APBD Tahun 2023.
 3. Pedoman Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023.
 4. Integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintahan.
 5. Keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan.
2. Evaluasi Hasil RKPD Sampai Dengan Triwulan II
- A. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

Tahun 2023 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan RPJMD Provinsi Sumatera Tahun 2021-2026 sehingga evaluasi terhadap pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, bertujuan guna menjaga kelangsungan serta konsistensi pelaksanaan pembangunan sampai dengan tahun 2026.

Penyusunan Perubahan RKPD 2023 salah satunya berpedoman pada hasil evaluasi terhadap pencapaian target-target tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang di dokumen RPJMD tahun 2021-2026. Evaluasi pencapaian target pada tahun berjalan (2023) yang dilaksanakan bertujuan salah satunya untuk dapat memastikan bahwa hingga akhir tahun 2023 tingkat ketercapaian target dapat maksimal.

Evaluasi pada tahun berjalan yakni tahun 2023 (hingga triwulan II) mencakup evaluasi terhadap proyeksi ketercapaian target hingga akhir tahun 2023 sasaran dan target Pembangunan yang telah ditetapkan pada dokumen RPJMD Tahun 2021-2026. Evaluasi kinerja pada tahun berjalan digunakan sebagai salah satu dasar perumusan permasalahan pembangunan yang nanti juga menjadi pertimbangan dalam perumusan arah kebijakan serta strategi dan sasaran pembangunan untuk penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2023. Namun mengingat capaian pada setiap Indikator Kinerja yang digunakan pada masing-masing Prioritas bersifat tahunan maka evaluasi yang dilakukan hanya

melakukan prediksi/proyeksi kemungkinan ketercapaian hingga akhir tahun 2023, sebagai berikut.

Tabel Pencapaian Prioritas Pembangunan Daerah Triwulan II Tahun 2023

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja		
		Jumlah	Dapat Tercapai	Perlu Perhatian Khusus
1	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil, dan Berdaya Saing	6	5	1
2	Meningkatkan Tata Kehidupan Sosial Kemasyarakatan berdasarkan Falsafah Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah	7	3	4
3	Meningkatkan Nilai Tambah dan Produktivitas Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan	9	9	0
4	Meningkatkan Usaha Perdagangan dan Industri Kecil Menengah serta Ekonomi Berbasis Digital	9	6	3
5	Meningkatkan Ekonomi Kreatif dan Daya Saing Kepariwisata	3	3	0
6	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkeadilan dan Berkelanjutan	12	6	6
7	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	8	6	2
TOTAL PENCAPAIAN KINERJA		54	38	16

Sumber : Hasil Evaluasi Bappeda Provinsi Sumatera Barat

1) Prioritas Pembangunan 4 : Meningkatkan Usaha Perdagangan dan Industri Kecil Menengah serta Ekonomi Berbasis Digital

Terdapat 9 (sembilan) Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran pada Prioritas Pembangunan 4 yang difokuskan untuk meningkatkan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB sebagai salah satu sektor yang cukup dominan dalam struktur PDRB Sumatera Barat serta meningkatkan kualitas UMKM termasuk Industri Kecil dan Menengah serta penumbuhan entrepreneur, dengan pencapaian sebagaimana pada tabel dibawah ini.

Tabel Pencapaian terhadap Tujuan dan Sasaran Pembangunan Prioritas Meningkatkan Usaha Perdagangan dan Industri Kecil Menengah serta Ekonomi Berbasis Digital Pada Triwulan II Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2023	PROYEKSI KETERCAPIAN
Prioritas Pembangunan 4 : Meningkatkan Usaha Perdagangan dan Industri Kecil Menengah serta Ekonomi Berbasis Digital				
1	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	16,70	Dapat tercapai
2	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	%	8,88	Perlu perhatian khusus
3	Laju pertumbuhan sektor perdagangan	%	-1,00	Dapat tercapai
4	Jumlah sentra industri kecil dan menengah	Sentra	379	Perlu perhatian khusus
5	Laju pertumbuhan ekonomi sub sektor koperasi	%	2,18	Dapat tercapai
6	Persentase peningkatan pendapatan pada usaha mikro dan kecil	%	3,1	Perlu perhatian khusus
7	Jumlah enterpreneur baru tercipta	Orang	130.482	Dapat tercapai
8	Persentase peningkatan Investasi di provinsi	%	8,00	Dapat tercapai
9	Kontribusi Ekonomi Digital	%	6,70	Dapat tercapai

Sumber : Hasil evaluasi Bappeda Provinsi Sumatera Barat

Prioritas Pembangunan 4 yakni Meningkatkan Usaha Perdagangan dan Industri Kecil Menengah serta Ekonomi Berbasis Digital pada capaian hingga triwulan II Tahun 2023 dari 9 (sembilan) Indikator kinerja pada prioritas pembangunan 4, sebanyak 6 (enam) Indikator kinerja di proyeksikan mencapai target hingga akhir tahun 2023 yakni Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB, Laju pertumbuhan sektor perdagangan, Laju pertumbuhan ekonomi sub sektor koperasi, Jumlah enterpreneur baru tercipta, Persentase peningkatan Investasi di provinsi, dan Kontribusi Ekonomi Digital.

Sedangkan terdapat 3 (tiga) indikator kinerja lainnya memerlukan perhatian khusus yakni Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB, Jumlah sentra industri kecil dan menengah, dan Persentase peningkatan pendapatan pada usaha mikro dan kecil.

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian Indikator kinerja Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB antara lain yakni adanya penurunan industri sawit karena kebijakan pemerintah untuk menghentikan ekspor sawit pada beberapa waktu tertentu, masih rendahnya kapasitas pelaku IKM meningkatkan kualitas nilai produk serta terbatasnya kapasitas pelaku IKM dalam memasarkan produk dalam digital marketing, belum terdapatnya pabrik/industri pengolahan yang mempunyai akses keluar (ekspor) seperti pemanfaatan produk turunan kelapa dan komoditas potensial lainnya, belum optimalnya akses pasar bagi pelaku industry, serta belum fokusnya masing-masing daerah untuk mengembangkan industri kecil dan menengah sesuai dengan potensi daerahnya masing-masing.

Permasalahan yang dihadapi dalam penurunan Jumlah sentra industri kecil dan menengah antara lain disebabkan terdampaknya beberapa sentra akibat terjadinya covid 19 sehingga banyak sentra yang sudah tidak aktif lagi serta mengalami kevakuman.

Sedangkan permasalahan dalam pencapaian peningkatan pendapatan pada usaha mikro dan kecil antara lain yakni terbatasnya modal UMKM yang berdampak kepada pengembangan usaha, ash terbatasnya inovasi dari produk UMKM sehingga kurang diminati pasar, terbatasnya akses pembiayaan UMKM ke perbankan dan lembaga perbankan, terbatasnya kapasitas SDM UMKM dalam penguasaan teknologi untuk pemasaran produkserta terbatasnya promosi produk UMKM baik dalam dan luar daerah.

2) Prioritas Pembangunan 5 : Meningkatkan Ekonomi Kreatif dan Daya Saing Kepariwisata

Terdapat 3 (tiga) Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran pada Prioritas Pembangunan 5 yang difokuskan untuk dunia pariwisata di Sumatera Barat yang

didukung dengan peningkatan kontribusi ekonomi kreatif, dengan pencapaian sebagaimana pada tabel berikut

Tabel Pencapaian terhadap Tujuan dan Sasaran Pembangunan Prioritas Meningkatkan Ekonomi Kreatif dan Daya Saing Kepariwisataaan Pada Triwulan II Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2023	PROYEKSI KETERCAPIAN
Prioritas Pembangunan 5 : Meningkatkan Ekonomi Kreatif dan Daya Saing Kepariwisataaan				
1	Persentase Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat dari Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	%	13,89	Dapat tercapai
2	Persentase Kontribusi Pariwisata pada PDRB	%	1,24	Dapat tercapai
3	Persentase Kontribusi Ekonomi Kreatif pada PDRB	%	6,02	Dapat tercapai

Sumber : Hasil evaluasi Bappeda Provinsi Sumatera Barat

Prioritas Pembangunan 5 yakni Meningkatkan Ekonomi Kreatif dan Daya Saing Kepariwisataaan hingga triwulan II Tahun 2023 diproyeksikan pada seluruh Indikator Kinerja dapat mencapai target hingga akhir tahun 2023 yakni Persentase Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat dari Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Persentase Kontribusi Pariwisata pada PDRB dan Persentase Persentase Kontribusi Ekonomi Kreatif pada PDRB.

Namun demikian, meskipun keseluruhan target diproyeksikan dapat tercapai pada prioritas ini, pelaksanaan prioritas ini pun juga menghadapi beberapa permasalahan antara lain yakni Provinsi Sumatera Barat merupakan daerah rawan bencana sehingga secara tidak langsung berdampak kepada aksesibilitas pada objek-objek wisata, masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan sapta pesona (aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, kenangan), destinasi wisata belum dikelola dengan baik antara lain dengan terbatasnya sarana dan prasarana yang mendukung kenyamanan pengunjung seperti sarana toilet dan air bersih serta tempat ibasah yang representatif, serta masih banyaknya destinasi wisata lainnya terutama destinasi wisata alam yang belum terpublikasikan dengan baik, dan akses sarana dan prasarana yang belum optimal untuk mendukung peningkatan pariwisata.

Hal mendasar lainnya yang menjadi permasalahan yakni belum berdayanya masyarakat sekitar lokasi wisata, masyarakat justru cenderung menjadi penghalang kemajuan pariwisata di lokasi tempat tinggalnya dengan adanya pemalakan baik berbentuk pungutan liar, parkir liar serta tindakan kriminal lainnya yang mengakibatkan ancaman keamanan bagi pengunjung, hal lainnya yang tak kalah meresahkan adalah sikap tidak menjaga lingkungan dengan mendirikan bangunan liar serta membuang sampah sembarangan dan tidak menjaga lingkungan dengan baik yang mengakibatkan pariwisata yang berjalan tersebut akan terhenti dengan sendirinya.

Selain itu, dalam perkembangan ekonomi kreatif belum di dukung sepenuhnya oleh komitmen masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota, pengembangan ekonomi kreatif belum sepenuhnya didasarkan sesuai dengan potensi daerah yang dimiliki, kualitas produk ekonomi kreatif belum mampu berdaya saing dan belum bernilai tinggi, harga produk ekonomi kreatif masih sangat bervariasi serta relatif tinggi dan kurangnya inovasi terhadap produk ekonomi kreatif yang dihasilkan serta juga minim informasi terkait dengan minat pasar akan suatu produk yang dibutuhkan.

a. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan Urusan Pemerintahan Daerah

1) Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar

a) Urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

- ✚ Berubahnya kewenangan koperasi provinsi dalam pengelolaan UMKM
- ✚ Banyak koperasi tidak melaksanakan RAT karena Pandemi Covid-19
- ✚ Permasalahan Akses Internet dan masih banyak anggota koperasi yang tidak bisa memanfaatkan teknologi informasi
- ✚ Dampak pandemic menyebabkan volume usaha turun
- ✚ Terbatasnya SDM pengelola koperasi terutama dari sisi kualitas
- ✚ Terbatasnya sarana dan prasarana koperasi dalam menjalankan usaha
- ✚ Terbatasnya inovasi Produk yang dihasilkan oleh Koperasi dan UKM yang belum dapat bersaing di pasar
- ✚ Terbatasnya akses koperasi ke pasar dan permodalan
- ✚ Sebaran UMKM yang cukup luas sehingga tidak keseluruhan terjangkau dan terpantau oleh Pemerintah
- ✚ Belum adanya sanksi yang tegas bagi koperasi yang tidak mengurus izin usaha
- ✚ SDM koperasi masih kurang memahami tentang kelengkapan kelembagaan koperasi
- ✚ kurangnya minat pengurus koperasi untuk mengikuti pelatihan dan meningkatkan kapasitas diri
- ✚ Masih rendahnya nilai tambah dan daya saing dari produk produk UMKM
- ✚ terbatasnya sertifikat halal dan merk yang bisa diberikan secara gratis

b) Urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal

- ✚ Data terkait dengan potensi investasi dan realisasi investasi yang sudah atau sedang berjalan belum tersedia dengan lengkap oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
- ✚ Regulasi dan aturan yang mengatur tentang investasi cenderung berubah – ubah sehingga mengakibatkan ketidakpastian dalam proses pelaksanaan pekerjaannya antara lain dengan adanya peralihan dengan adanya

perubahan regulasi berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis Risiko serta Peraturan Kementerian/Lembaga (NSPK) terkait yang menjadi dasar penerbitan perizinan dengan menggunakan portal OSS yang masih dalam tahap pengembangan dan penyempurnaan dari Kementerian Investasi / BKPM RI

- ✦ Status kepemilikan lahan di Sumatera Barat yang Sebagian besar di kuasai kamu atau tanah ulayat menjadi penyebab ketidakpastian pelaksanaan investasi
- ✦ Kurangnya koordinasi antar instansi di Pemerintah Kabupaten/ Kota dengan provinsi dan Pusat dalam penyelenggaraan Investasi
- ✦ Adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam pelaksanaan even even promosi potensi investasi daera sehingga mengakibatkan rendahnya tingkat kehadiran investor
- ✦ Materi promosi yang disiapkan belum maksimal dalam memenuhi kebutuhan informasi bagi investor
- ✦ Terbatasnya keikutsertaan Sumatera Barat dalam even promosi investasi tingkat Nasional dan Internasional (pameran dan temu bisnis)
- ✦ Masih adanya beberapa perizinan dan non perizinan bersifat yang diproses secara manual di PTSP
- ✦ Masih terdapatnya jangka waktu pelayanan PTSP yang melewati Standar Pelayanan Publik yang telah ditetapkan Gubernur
- ✦ Masih terdapat jenis perizinan yang belum dipetakan
- ✦ Masih terdapat perizinan yang belum dapat dilaksanakan antara lain perizinan berusaha usaha menunjang kegiatan usaha (PB UMKU) dan KBLI yang belum ada pengampu pada Kementerian/Lembaga terkait.
- ✦ Banyaknya pelaku usaha/masyarakat yang belum memahami teknologi atau perizinan secara elektronik atau berbasis web.
- ✦ Keterbatasan jumlah aparatur penyelenggara perizinan
- ✦ Keterbatasan pelaku usaha atas perizinan secara online melalui OSS dan aplikasi perizinan berbasis web
- ✦ Masih rendahnya pemahaman OPD teknis dalam penerapan aplikasi perizinan OSS berbasis teknologi informasi dalam rangka penyelenggaraan perizinan terintegrasi.
- ✦ Adanya permasalahan Tata Ruang atau Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) sehingga banyak pelaku usaha/Perusahaan PMA/PMDN tidak jadi melanjutkan rencana investasinya dikarenakan tidak ada kesesuaian tata ruang untuk investasi

- ✦ Sistem Perizinan Online Single Submissin (OSS) masih belum sempurna dalam pengembangan sehingga terdapat kendala dalam pelaksanaan perizinan di daerah.
- ✦ Perubahan sistem pelaporan Ke OSS-RBA sehingga banyak perusahaan yang belum memahami ttg pelaporan kegiatan penanaman Modal perusahaan.
- ✦ SDM perusahaan yang banyak berhenti karena dampak covid sehingga tidak bisa melaporkan dengan sistem yg ada
- ✦ SDM di OPD yang berada di Kab/Kota banyak yang belum memahami tentang sistem Pelaporan OSS-RBA untuk melakukan verifikasi laporan yang masuk dari perusahaan
- ✦ Perusahaan yang sudah berjalan namun belum mengantongi izin karena terkendala dalam pengurusan izin teknis dengan berlakunya sistem OSS-RBA (RTRW,RDTR, Izin Lingkungan, PKKPR,SIMBG,dll)
- ✦ Belum adanya Data Calon Investor Baru yang serius akan berinvestasi di Sumatera Barat
- ✦ Adanya Pembatasan Pelaporan Investasi (LKPM), dimana Nilai Investasi s.d 1 M tidak dilaporkan
- ✦ Tidak adanya investasi baru yang tumbuh selama tahun 2022 dan kegiatan proyek sebelumnya sudah selesai tahun 2021
- ✦ Tidak jalannya progress Proyek Jalan Tol yang tidak sesuai dengan perencanaan Investasi di Sumatera Barat yang merupakan salah satu pertimbangan dalam penetapan target investasi
- ✦ Masalah RTRW di Kab/Kota yang masih belum mengakomodir potensi investasi

2) Urusan Pilihan

a) Urusan pemerintahan bidang Pariwisata

- ✦ Belum optimalnya pengembangan sarana dan prasarana pariwisata
- ✦ Belum maksimalnya ikon wisata dan paket yang komprehensif
- ✦ Belum optimalnya pengelolaan destinasi pariwisata
- ✦ Belum memadainya fasilitas pendukung kepariwisataan
- ✦ Belum melembaganya sadar wisata baik pada masyarakat lokal, pelaku pariwisata maupun wisatawan
- ✦ Belum berkembangnya ekonomi kreatif.
- ✦ Terbatasnya kegiatan pembinaan SDM pada Daerah Tujuan Wisata (DTW) unggulan
- ✦ Masih terbatasnya kerjasama antar instansi, stakeholder dan masyarakat sekitar dalam mendukung pengembangan DTW unggulan

- ✚ Masih terdapat SDM yang belum memenuhi kriteria kompetensi.
 - ✚ Terbatasnya produk ekraf yang memiliki sertifikat HKI
 - ✚ Pengembangan DTW membutuhkan anggaran yang besar
 - ✚ Kapasitas Sumber Daya Manusia bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkualitas masih belum memadai.
 - ✚ Mapping destinasi belum dilakukan (inventarisasi dan sarana pra sarana dimiliki) sehingga belum memiliki pola perjalanan dengan berbagai pilihan seperti wisata budaya, wisata belanja, wisata alam, wisata minat khusus, wisata edukasi, agro dan ekowisata.
 - ✚ Koordinasi Lintas Sektoral (Lembaga) belum berjalan maksimal, hal ini sangat penting mengingat Pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif membutuhkan koordinasi dan kerja bersama-sama pihak-pihak terkait: (pemerintah: instansi pariwisata dan ekonomi kreatif, instansi pekerjaan umum, instansi perhubungan, instansi pertanian, instansi perindustrian perdagangan); (2) swasta; (3) BUMN/BUMD; (4) masyarakat di objek wisata.
 - ✚ Masih kurangnya keterlibatan masyarakat dalam industri pariwisata dan ekonomi kreatif
 - ✚ Terbatasnya kewenangan pemerintah provinsi dalam pengembangan objek wisata di daerah
 - ✚ Masih perlunya dukungan dari berbagai pihak untuk penguatan Sumatera Barat dalam penyelenggaraan wisata halal
- b) Urusan pemerintahan bidang Perdagangan
- ✚ Mayoritas produk komoditas di Sumatera Barat masih bertumpu pada primary produk (bahan mentah) dan teknologi belum terlalu canggih sehingga peningkatan nilai tambah belum terlalu mendongkrak nilai ekspor
 - ✚ Harga ditentukan oleh pasar internasional
 - ✚ Belum berkembangnya hilirisasi produk di Sumatera Barat
 - ✚ Ada beberapa kasus di BPSK di tarik kembali oleh pelapor, sehingga tidak dapat diproses, sedangkan kasus tersebut sudah tercatat dalam kasus pengaduan konsumen
 - ✚ Kurangnya tenaga/SDM yang melakukan pengujian mutu barang sudah banyak pensiun dan belum ada penggantinya
 - ✚ Terbatasnya SDM PPNS
 - ✚ Minuman beralkohol sangat riskan untuk dilakukan pengawasan
 - ✚ Realisasi pupuk yang diluncurkan Pemerintah pusat lebih rendah dibandingkan dengan RDKK (rencana defenitif kebutuhan kelompok)
 - ✚ Sering terjadi keterlambatan hasil pengujian terhadap hasil produk dari pihak ketiga

- ✚ Peningkatan harga kebutuhan pokok yang fluktuatif salah satunya minyak goreng dan cabe
 - ✚ Operasi pasar/pasar murah yang dilaksanakan belum menjangkau seluruh kabupaten/kota
 - ✚ Masih terjadinya pandemi covid 19 sehingga kegiatan dalam bentuk pameran belum terlaksana secara optimal
 - ✚ Melakukan pembinaan kepada pengelola pasar, lomba pasar dan promosi produk
 - ✚ Masih kurangnya kesadaran pelaku usaha dan masyarakat di pasar kab/kota dalam menerapkan perda No. 6/2020 dengan etap menerapkan 3 M yakni memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan air mengalir serta menjaga jarak
 - ✚ Masyarakat petani, pengumpul, dan pedagang yang masih belum sepenuhnya memahami tentang standar mutu komoditi sesuai ketentuan berlaku
 - ✚ Kurangnya tenaga/SDM penguji mutu barang karena telah memasuki masa pensiun
 - ✚ Terdapatnya beberapa mesin pendukung pengujian mutu yang perlu diperbarui
 - ✚ Belum semua masyarakat tahu tentang peran BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) sehingga perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat
 - ✚ Keberpihakan masyarakat dalam menggunakan produk dalam negeri masih kurang
- c) Urusan pemerintahan bidang Perindustrian
- ✚ Daya saing produk IKM yang dihasilkan masih relatif rendah dari sisi kemasan, standar dan mutu produk.
 - ✚ Inovasi dan diversifikasi produk industri kecil menengah masih rendah
 - ✚ Keakuratan data industri dari kabupaten/kota masih lemah
 - ✚ Belum optimalnya pengembangan industri sesuai potensi daerah
 - ✚ Mayoritas produk komoditas di sumbar masih bertumpu pada primary produk (bahan mentah) dan teknologi yang digunakan belum terlalu canggih sehingga belum mendongkrak peningkatan nilai tambah
 - ✚ Pembebasan tanah ulayat yang relatif sulit
 - ✚ Masih terjadi COVID19 sehingga mempengaruhi perekonomian
 - ✚ Industri besar tidak melaporkan perkembangan usaha kepada dinas terkait
 - ✚ Pemantauan belum dapat dilaksanakan secara maksimal
 - ✚ Masih terjadinya pandemi covid 19

- ✚ Kurangnya kemampuan SDM di kabupaten/kota dalam memperoleh informasi secara lengkap dan terkini dari industri kecil menengah
- ✚ Kurangnya sosialisasi kepada pelaku usaha tentang pentingnya data industri
- ✚ Daya saing produk yang masih rendah
- ✚ Penguasaan teknologi yang masih rendah
- ✚ Keterbatasan kualitas SDM pelaku IKM
- ✚ Belum optimalnya pengembangan industri sesuai potensi daerah
- ✚ Daya saing produk yang masih rendah
- ✚ Penguasaan teknologi yang masih rendah
- ✚ Keterbatasan kualitas SDM pelaku IKM
- ✚ Belum optimalnya pengembangan industri sesuai potensi daerah
- ✚ Industri besar tidak melaporkan perkembangan usaha kepada dinas terkait maupun dalam aplikasi SIIInas secara berkala
- ✚ Pemantauan belum dapat dilaksanakan secara maksimal

3) Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

a) Biro Perekonomian

- ✚ Koordinasi pengendalian inflasi daerah belum berjalan secara optimal, karena belum terjalinnya kerjasama daerah dengan baik akibat dari belum adanya pemetaan potensi produksi sumber pangan di kabupaten/kota se Sumatera Barat.
- ✚ Belum optimalnya kinerja BUMD dan penyertaan modal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terlihat dari besaran deviden yang diterima sebagai PAD
- ✚ Kelangkaan BBM bersubsidi (solar) dan LPG 3 Kg yang selalu terjadi setiap tahun di masyarakat yang disebabkan dualisme aturan, penimbunan dan penyelewengan alokasi pendistribusian oleh oknum tertentu. Termasuk pelaksanaan BBM satu harga di Kepulauan Mentawai yang disinyalir masih banyak penyelewengan
- ✚ Belum optimalnya koordinasi pendistribusian pupuk bersubsidi karena adanya kebijakan baru tentang implementasi Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK)
- ✚ Koordinasi pembinaan lembaga keuangan mikro di Sumatera Barat belum berjalan dengan baik
- ✚ Belum seluruh perusahaan yang berkontribusi dalam Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP)/CSR dan ada beberapa perusahaan yang belum masuk Forum TJSLP bentukan Pemerintah Prov. Sumatera Barat

4) Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

a) Unsur Keuangan

- ✚ Pelaksanaan peyerapan anggaran sebagian besar menumpuk di akhir tahun anggaran
- ✚ Masih terdapat Perangkat Daerah yang mengirim laporan belum valid
- ✚ Terbatasnya SDM pengelola asset
- ✚ Masih terdapat asset yang telah ditempati / digunakan oleh Pemerintah Provinsi yang belum tercatat dan bersertifikat
- ✚ Terdatanya SPM yang tidak cair sampai dengan akhir Tahun Anggaran, karena terlambat disampaikan
- ✚ Adanya penyederhanaan struktur organisasi pada BPKAD dengan Tipe B yang tidak sesuai dengan beban kerja
- ✚ Dampak Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan kondisi perekonomian masyarakat yang menurun sehingga mempengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat.
- ✚ Terbatasnya gambaran penetapan target terutama pada pajak rokok masih bersifat 'given' dari Pemerintah Pusat/Kementerian Keuangan
- ✚ Terbatasnya sumber pendapatan asli daerah untuk dikembangkan sesuai aturan
- ✚ Belum optimalnya penerimaan dari retribusi
- ✚ Adanya regulasi yang berubah yang menyebabkan belum dibolehkan melakukan pemungutan sebelum dibuat aturan oleh daerah.
- ✚ Sarana dan prasarana serta kompetensi SDM pengelolaan keuangan daerah yang terbatas dan belum memadai
- ✚ Komponen belanja pegawai yang cukup besar dikarenakan adanya pengalihan kewenangan Pendidikan Menengah dan Luar Biasa ke Provinsi yang cukup besar menyedot anggaran belanja pembangunan
- ✚ rendahnya Realisasi Belanja SKPD
- ✚ Masih adanya aset-aset daerah yang belum terselesaikan karena masih tersangkut dengan berbagai pihak untuk penyelesaiannya
- ✚ Masih banyak kegiatan yang belum terealisasi sampai dengan waktu yang telah di tentukan
- ✚ Masih banyak kegiatan masuk di pertengahan tahun anggaran sehingga tidak cukup waktu untuk menyelesaikan
- ✚ Informasi Keuangan yang belum terpublikasi secara lengkap
- ✚ Masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang tata cara mengakses informasi public
- ✚ Masih adanya egosektoral dalam meberikan data yang akan di publikasikan ke masyarakat/publik

- ✚ Penundaan alokasi belanja transfer ke Daerah

B. Permasalahan dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada tahun berjalan 2023 hingga triwulan II di Sumatera Barat

Pencapaian target indikator pada RAD TPB/SDGs sampai dengan triwulan II tahun 2023 didukung oleh program dan kegiatan baik dari pemerintrah daerah maupun nonpemerintah. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang menunjang pencapaian 17 Tujuan TPB diidentifikasi beberapa permasalahan yang secara umum dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

- ✚ Berubahnya kewenangan koperasi provinsi dalam pengelolaan UMKM
- ✚ banyak koperasi tidak melaksanakan RAT karena Pandemi Covid-19
- ✚ Permasalahan Akses Internet dan masih banyak anggota koperasi yang tidak bisa memanfaatkan teknologi informasi
- ✚ Dampak pandemic menyebabkan volume usaha turun
- ✚ Terbatasnya SDM pengelola koperasi terutama dari sisi kualitas
- ✚ Terbatasnya sarana dan prasarana koperasi dalam menjalankan usaha
- ✚ Terbatasnya inovasi Produk yang dihasilkan oleh Koperasi dan UKM yang belum dapat bersaing di pasar
- ✚ Terbatasnya akses koperasi ke pasar dan permodalan
- ✚ Sebaran UMKM yang cukup luas sehingga tidak keseluruhan terjangkau dan terpantau oleh Pemerintah
- ✚ Belum adanya sanksi yang tegas bagi koperasi yang tidak mengurus izin usaha
- ✚ SDM koperasi masih kurang memahami tentang kelengkapan kelembagaan koperasi
- ✚ Kurangnya minat pengurus koperasi untuk mengikuti pelatihan dan meningkatkan kapasitas diri
- ✚ Terbatasnya sertifikat halal dan merk yang bisa diberikan secara gratis

3. Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah

a. Arah kebijakan ekonomi Sumatera Barat

Beberapa arah kebijakan pembangunan ekonomi Sumatera Barat ke depannya dapat dirumuskan sebagai berikut:

- ❖ Pertumbuhan ekonomi tahun 2024 akan sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan aktivitas ekonomi masyarakat di beberapa pusat kegiatan nasional dan wilayah.
- ❖ Transformasi struktural ekonomi daerah menjadi titik krusial dalam rangka meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat secara nasional. Ketergantungan terhadap sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur

dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi menjadi prasyarat penting agar tidak terjebak dalam middle income trap. Berkaca pada sektor industri pengolahan yang tidak menjadi sektor ekonomi unggulan di Sumatera Barat, maka penting bagi Pemerintah Daerah untuk bertumpu pada sektor pariwisata yang memiliki backward dan forward linkage yang besar.

- ❖ Tingkat inflasi akan terjaga pada level yang sama dalam 5 tahun terakhir. Beberapa program pengendalian inflasi selama pandemi COVID-19 terbukti mampu menahan laju inflasi. Kenaikan tingkat inflasi di tahun 2022 akan terus ditekan hingga kembali ke level sebelum pandemi. Program pemulihan ekonomi ini akan berlanjut di tahun 2023 dan 2024 untuk menjaga tingkat inflasi tetap stabil.
- ❖ Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas diarahkan untuk meningkatkan nilai IPM dan menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran serta menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan dan wilayah.

b. Arah kebijakan keuangan daerah 2024

Berdasarkan arah dan kebijakan peningkatan Pendapatan Daerah pada Tahun 2024, maka proyeksi keuangan daerah dan kerangka Pendanaan (RPJMD Tahun 2021-2026) diasumsikan sebagai berikut :

- (1) Pendapatan Asli Daerah harus mempertimbangkan kondisi perekonomian nasional pasca Covid-19 (pemberlakuan aktivitas PPKM) yang pada Tahun 2023 kondisi Covid-19 sudah semakin melandai sehingga perputaran roda perekonomian pada Tahun 2023 juga diharapkan tumbuh secara positif. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat yang anjlok pada -1,60 % pada Tahun 2020 sudah kembali berada pada pertumbuhan yang positif sejak Tahun 2021 yakni tumbuh sebesar 3,29 %. Kondisi ini pertumbuhan ekonomi yang positif ini semakin membaik pada Tahun 2022 yakni tumbuh sebesar 3,64 % pada Triwulan I, 5,08 % pada Triwulan II dan 4,54 % pada Triwulan III Tahun 2022. Dengan membaiknya kondisi ekonomi masyarakat diharapkan target rata-rata pertumbuhan PAD Tahun 2021-2026 sebesar 7,2 % dapat terwujud. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp. 2.875.219.000.000,-
- (2) Pendapatan Transfer merupakan pendapatan yang terdiri dari transfer Pemerintah Pusat dan transfer antar daerah. Pendapatan transfer tersebut berupa Dana Bagi Hasil , DAU, Dana Alokasi Khusus dan dana-dana transfer lainnya. Sesuai dengan RPJMD maka pendapatan transfer diproyeksikan tumbuh 1,63 % sehingga pada Tahun 2024 pendapatan dana transfer di proyeksikan sebesar Rp.4.360.283.000.000,-. Proyeksi penerimaan dana transfer tidak dapat dipastikan terealisasi sesuai RPJMD tetapi realisasinya mengacu kepada penetapan alokasi oleh Pemerintah Pusat setiap tahunnya.

Lain-lain Pendapatan Yang Sah yang juga merupakan Pendapatan dari Dana Hibah dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat/sejenis. Perlambatan pertumbuhan ekonomi dan kemampuan keuangan Pemerintah Pusat, organisasi dan swasta sangat berpengaruh terhadap penerimaan pendapatan. Sesuai RPJMD pertumbuhan penerimaan pada komponen ini pada Tahun 2024 diharapkan tumbuh 1,36%.

c. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Hasil Analisis Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024 merupakan penghitungan kapasitas keuangan daerah dan kerangka pendanaan pada dasarnya dilakukan dengan menganalisis sejauh mana kebijakan pengelolaan keuangan daerah dan analisis kerangka pendanaan yang telah dibuat dalam RPJMD Tahun 2021-2026 masih relevan atau dapat dipakai pada tahun rencana.

**Tabel Perhitungan Kapasitas Keuangan Daerah
RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024**

No.	Uraian	Proyeksi RPJMD Tahun 2024 (Rp Juta)
1	Pendapatan Asli Daerah	2.875.219
2	Pendapatan Transfer	4.360.283
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	96.189
	Jumlah Pendapatan Daerah	7.331.691

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan arah dan kebijakan peningkatan pendapatan daerah yang telah ditetapkan melalui RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 - 2026, maka proyeksi pendapatan daerah pada RKPD Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp.7.331.691.000.000,- yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.2.875.219.000.00,- ,Pendapatan Transfer sebesar Rp. 4.360.283.000.000,- dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp.96.189.000.000,-

Dari ke-3 (ketiga) komponen Pendapatan Daerah tergambar bahwa Pendapatan Transfer merupakan komponen utama pendapatan daerah (59 %), selanjutnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) berkontribusi sebesar 39 % dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berkontribusi sebesar 1 % terhadap pendapatan daerah Tahun 2024.

Proyeksi pendapatan daerah pada tahun 2024 dapat digambarkan pada tabel berikut :

Tabel Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat

Uraian	Proyeksi Tahun 2024 (Rp. Juta)
PENDAPATAN	6.519.705
Pendapatan Asli Daerah	3.118.105
Pendapatan Transfer	3.385.028
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	16.572

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat

Memperhatikan target Pendapatan Daerah Tahun 2024 yang tertuang pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 serta realisasi pendapatan daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022, maka pendapatan daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 diproyeksikan meningkat melebihi target RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 dan realisasi pendapatan daerah tahun sebelumnya (Tahun 2022). Hal ini penting dilakukan dalam rangka mendorong tercapainya Visi dan Misi Gubernur Sumatera Barat yaitu “Terwujudnya Sumbar Madani yang unggul dan berkelanjutan”.

Untuk terwujudnya hal diatas, maka pendapatan daerah Sumatera Barat diproyeksikan meningkat melebihi realiasi pendapatan daerah tahun 2022 dan proyeksi RKPD pada RPJMD 2021-2026. Peningkatan pendapatan daerah tahun 2024 yang diharapkan dapat ditingkatkan adalah komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 8% dari target RPJMD atau peningkatan sebesar Rp. 242.886.000.000,-. Sedangkan peningkatan PAD Tahun 2024 terhadap realisasi 2022 adalah sebesar 9% atau sebesar Rp. 269.858.000,-

Untuk pendapatan transfer Tahun 2024 diproyeksikan minimal sama dengan Tahun 2023 dan tentunya kita berharap realisasi pertumbuhan ekonomi negara Republik Indonesia akan semakin tumbuh secara positif sehingga akan berkontribusi terhadap proyeksi pendapatan negara pada Tahun 2024.

Secara akumulatif proyeksi pendapatan daerah Tahun 2024 terjadi peningkatan sebesar Rp.397.347.000.000 dari realisasi penerimaan Tahun 2022 atau meningkat sebesar 6%. Proyeksi/target penerimaan daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, dapat digambarkan pada tabel berikut :

**Tabel Proyeksi/ Target Penerimaan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024
(dalam Rp. Ribu)**

Uraian	Proyeksi RPJMD Tahun 2024 (Rp)	Proyeksi RKPD Tahun 2024 (Rp)	Selisih (Rp)	Ket
PENDAPATAN	7.331.691	6.519.705	811.986	
Pendapatan Asli Daerah	2.875.219	3.118.105	-242.886	
Pendapatan Transfer	4.360.283	3.385.028	975.255	
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	96.189	16.572	79.617	

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat

Tabel Penghitungan Kebutuhan Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

Uraian	Proyeksi RPJMD Tahun 2024 (Rp Juta)	Proyeksi RKPD Tahun 2024 (Rp Juta)	Selisih (Rp Juta)	Ket
BELANJA OPERASI	5.335.934	4.508.865	(827.069)	
Belanja Pegawai	2.581.956	2.332.542	(249.414)	
Belanja Barang dan Jasa	1.847.292	2.055.030	207.738	
Belanja Subsidi	6.900	6.500.	(400)	
Belanja Hibah	899.786	114.793	(784.993)	
BELANJA MODAL	1.029.422	1.046.939	17.517	
BELANJA TIDAK TERDUGA	50.000	70.000	20.000	
BELANJA TRANSFER	937.659	1.135.657	197.998	
TOTAL BELANJA DAERAH	7.353.015	6.761.461	(591.554)	
PEMBIAYAAN				
Pengeluaran Pembiayaan	20.000	20.000	0	

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat

Memperhatikan tabel di atas secara total proyeksi belanja daerah tahun 2024 sebesar Rp.6.761.461 juta mengalami penurunan sebesar Rp.591.554 juta atau 8,05% dari belanja daerah yang diprediksi dalam RPJMD untuk Tahun 2024 sebesar Rp.7.353.015 juta. Penurunan ini dipengaruhi oleh penurunan Belanja Hiba sebesar 87,24% dimana pada RPJM sudah diproyeksikan sebesar Rp.899.786 juta sedangkan dalam proyeksi Tahun 2024 sebesar Rp.114.793 juta. Hal ini sebagai salah satu upaya Pemerintah Daerah dalam upaya memenuhi belanja Infrastruktur 40% dari total belanja daerah dan belanja Earmak lainnya yang menjadi kewajiban Pemerintah Provinsi. Kenaikan belanja tidak terduga sebesar Rp.20.000 juta atau 40,00% gunaantisipasi dalam menghadapi keadaan darurat mendesak baik disebabkan bencana alam, bencana non alam maupun keadaan yang tidak direncanakan lainnya. Disamping itu kenaikan belanja transfer sebesar Rp.197.998 juta atau 21,12% disebabkan meningkatnya bagi hasil pajak kepada kabupaten/kota seiring dengan peningkatan pajak daerah yang direncanakan tahun 2024.

Untuk Pengeluaran pembiayaan sendiri Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tidak memiliki Hutang Jangka Panjang sehingga tidak ada Pengeluaran untuk

pembayaran pokok pinjaman setiap tahunnya. Pengeluaran Utama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat hanya berupa penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah yang sehat, dan untuk tahun 2024 ini direncanakan seperti juga tahun sebelumnya yakni berupa penyertaan modal kepada Bank Nagari sebesar Rp.20.000 Juta.

4. Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023

a. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Tahun 2024

Dengan mempertimbangkan potensi, capaian pembangunan daerah satu tahun sebelumnya, kondisi saat ini, permasalahan, isu strategis, tantangan dan peluang serta kondisi sosial budaya masyarakat Sumatera Barat dimaksud, maka tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2024 mengacu kepada Visi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yaitu:

“Terwujudnya Sumatera Barat Madani, Unggul dan Berkelanjutan”

Dalam mewujudkan Visi melalui pelaksanaan Misi yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, maka untuk kerangka perencanaan pembangunan daerah tahun 2022 diperlukan kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang dijalankan, memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud.

Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi diuraikan dalam matrik tabel berikut:

Tabel Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

VISI		
Terwujudnya Sumatera Barat Madani, Unggul dan Berkelanjutan		
MISI	TUJUAN	SASARAN
Misi 1: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil & Berdaya Saing	Mewujudkan Sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
		Menurunnya prevalensi stunting
		Meningkatnya Kualitas Pendidikan
		Meningkatnya Daya Saing Masyarakat
Misi 2: Meningkatkan Tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan Falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	Mewujudkan ABS SBK sebagai falsafah kehidupan masyarakat	Meningkatnya Ketahanan sosial Budaya masyarakat yang berlandaskan ASB-SBK
		Meningkatnya Budaya Literasi
		Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga,

VISI		
Terwujudnya Sumatera Barat Madani, Unggul dan Berkelanjutan		
MISI	TUJUAN	SASARAN
		pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
Misi 3: Meningkatkan Nilai tambah dan Produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Meningkatkan kesejahteraan petani	Meningkatnya pendapatan petani pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Kelautan dan Perikanan)
		Meningkatnya ketahanan dan keamanan pangan
		Meningkatnya pendapatan Petani Hutan
Misi 4: Meningkatkan usaha perdagangan dan industry kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital	Mewujudkan perdagangan dan industri kecil/Menengah serta ekonomi digital yang tangguh dan berdaya saing	Sumatera barat sebagai pusat perdagangan
		Sumatera Barat sebagai pusat industri kecil dan menengah
		Terwujudnya pelaku koperasi dan UKM yang sejahtera
		Terciptanya 100.000 enterpreneur dari berbagai sektor
		Meningkatnya pertumbuhan investasi
Misi 5: Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya Saing kepariwisataan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	Meningkatnya kontribusi pariwisata dalam perekonomian Sumatera Barat
		Meningkatnya kontribusi ekonomi kreatif dalam perekonomian Sumatera Barat
Misi 6: Meningkatkan pengembangan infrastruktur yang berkeadilan berkelanjutan	Terwujudnya Infrastruktur yang handal dan merata	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur yang terintegasi
		Meningkatkan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana
		Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas
		Meningkatkan infrastruktur pelayanan dasar, bangunan strategis dan pertanian
		Meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang yang baik dan berkelanjutan
Misi 7: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dengan aparatur yang melayani	Terwujudnya kualitas tata Kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel
		Meningkatnya kapabilitas birokrasi
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Sumber : RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

Tujuan dan sasaran Misi Pertama, “Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil & Berdaya Saing” terkait dengan

isu strategis Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dari aspek Pendidikan dan Kesehatan yang tetap mengedepankan karakter yang madani, serta berpengetahuan dan memiliki keterampilan untuk mampu berdaya saing serta tangguh dan memiliki nilai kompetisi yang tinggi.

Tujuan dan sasaran Misi Kedua, “Mewujudkan Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah Sebagai falsafah Kehidupan Masyarakat” terkait dengan isu strategis Peningkatan Pengamalan Nilai-Nilai Agama dan Adat ditengah-tengah masyarakat yang diwujudkan dengan sikap toleransi, saling menghormati, patuh terhadap norma-norma agama, adat dan hukum positif, serta karakter masyarakat yang santun dan berkontribusi positif dalam pelaksanaan pembangunan, dan juga mengedepankan kesetaraan gender dan perlindungan anak serta merupakan implementasi dari prinsip Pembangunan Tujuan Berkelanjutan yakni no one left behind. Tujuan ini juga terkait dengan pemajuan kebudayaan sebagai wujud implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Tujuan dan sasaran Misi Ketiga, “Mewujudkan Kesejahteraan Petani” terkait dengan isu meningkatkan pendapatan petani yang berada di sektor pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan dan kehutanan melalui peningkatan nilai tambah terhadap produk pertanian serta pengembangan terhadap hilirisasi pertanian secara terpadu dan berkualitas.

Tujuan dan sasaran Misi Keempat, “Mewujudkan Perdagangan dan Industri Kecil/Menengah serta Ekonomi Digital yang Tangguh dan Berdaya Saing” terkait dengan isu strategis menjadikan Sumatera Barat sebagai pusat UMKM dan industri kecil dan menengah yang kedepan menjadi penggerak perekonomian Sumatera Barat yang tahan terhadap guncangan ekonomi serta mampu bersaing ditingkat global.

Tujuan dan sasaran Misi Kelima, “Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Terhadap Perekonomian Sumatera Barat” terkait dengan isu strategis menjadikan pariwisata sebagai etalase Sumatera Barat yang efektif sebagai sektor yang memberikan efek positif pada semua sektor untuk menstimulus pergerakan dan laju pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat.

Tujuan dan sasaran Misi Keenam, “Terwujudnya Infrastruktur yang Handal dan Merata” terkait dengan isu strategis dukungan infrastruktur yang berkualitas dan mengedepankan pemerataan wilayah dalam mendukung layanan dasar kepada masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, membangun ketahanan terhadap bencana serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan dukungan penyelenggaraan penataan ruang yang baik dan berkelanjutan.

Tujuan dan sasaran Misi Ketujuh, “Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas” terkait dengan isu strategis Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, efektif, efisien, akuntabel dan transparan yang diwujudkan dengan implementasi reformasi birokrasi yang maksimal pada semua aspek dan bidang penyelenggaraan pemerintahan.

Sejalan dengan arah pembangunan dalam RPJMD, dengan memperhatikan dampak dari kontraksi ekonomi serta pelambatan pertumbuhan ekonomi nasional dan Sumatera Barat sejak tahun 2020 hingga 2022, serta upaya yang dilakukan secara terus menerus dalam rangka menggerakkan ekonomi yang sehat dan merata dengan disertai dengan sikap kebijakan dan strategi yang waspada terhadap isu resesi ekonomi yang sebagian besar diakibatkan pada krisis energi dan krisis pangan dan bertumpu pada kemampuan ekonomi di Sumatera Barat dan dukungan terhadap pencapaian Tema Pembangunan RKP Tahun 2024, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengintegrasikan menjadi Tema Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 yakni:

“Transformasi Sektor Strategis yang inklusif dan berkelanjutan”

Adapun narasi penjelasan Tema Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- a) Transformasi ekonomi difokuskan pada 3 (tiga) sektor strategis Sumatera Barat dengan distribusi PDRB terbesar yakni Sektor Pertanian, Sektor Perdagangan dan Industri serta Sektor bagi penumbuhan ekonomi baru di Sumatera Barat yakni sektor Pariwisata.
 - b) Transformasi ekonomi yakni menggeser struktur ekonomi yang semula berbasis komoditas, menjadi ekonomi berbasis investasi, produksi, dan pelayanan yang memiliki nilai tambah tinggi guna meningkatkan daya saing perekonomian daerah serta peningkatan kualitas hidup masyarakat.
 - c) Transformasi ekonomi diarahkan untuk peningkatan produktivitas, terutama dalam peningkatan nilai tambah di dalam dan antarsektor ekonomi, dan pergeseran tenaga kerja dari sektor informal yang bernilai tambah relatif rendah menuju sektor formal yang bernilai tambah tinggi sehingga mendorong peningkatan pertumbuhan potensial jangka panjang.
 - d) Transformasi ekonomi merupakan prasyarat dari peningkatan dan kesinambungan pertumbuhan serta penanggulangan kemiskinan, sekaligus pendukung bagi keberlanjutan pembangunan.
 - e) Pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan diarahkan pada :
- d. Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, yang menjadi landasan fundamental untuk menciptakan dan memperluas kesempatan ekonomi dan kesempatan kerja

- e. Pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan yang memastikan bahwa ekonomi yang tumbuh juga merata dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat
- f. Perluasan Akses dan Kesempatan yang memastikan bahwa seluruh masyarakat mendapatkan kemudahan akses terhadap Pelayanan Dasar Minimal guna peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.

Pemilihan tema Pembangunan Tahun 2024 merupakan pemilihan terhadap fokus prioritas pembangunan yang akan dilakukan pada tahun 2024, dengan tetap tidak mengabaikan upaya pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib dipenuhi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan pada Pasal 18 dan pasal 298 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun proyeksi Target Indikator Makro Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 sebagaimana tabel berikut.

Tabel Proyeksi Indikator Makro Daerah Tahun 2024

No	Indikator Makro Pembangunan	2024		
		RPJMD	RKP	RKPD
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,57	5,0 – 45,4	4,76
2	PDRB ADHK Per Kapita (Rp. Juta)	32,97	-	34,85
3	PDRB ADHB Per Kapita (Rp. Juta)	50,60	-	59,88
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,45	5,03 – 5,73	5,70
5	IPM	73,23	-	74,25
	- Usia Harapan Hidup (Tahun)	69,98	-	70,20
	- Harapan Lama Sekolah (Tahun)	14,06	-	14,41
	- Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	9,28	-	9,36
	- Pengeluaran per Kapita (Rp. Ribu)	11.108	-	11.455
6	Tingkat Kemiskinan (%)	6,16	4,0 – 4,5	5,62
7	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	353,68	-	324,71
8	Gini Rasio	0,296	-	0,290
9	Indeks Williamson	0,309	-	0,309

Sumber : RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026, dan hasil analisa Bappeda Provinsi Sumatera Barat

Target Indikator Makro Pembangunan pada dokumen RKPD Tahun 2024 dilakukan penyesuaian jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, hal ini dengan memperhatikan evaluasi capaian tahun 2022, perkiraan capaian tahun 2023, perkembangan ekonomi yang sedang berlangsung, serta menyesuaikan dengan target Provinsi pada RKP Tahun 2024.

- b. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Provinsi Tahun 2024

Tahun 2024 merupakan tahun ketiga pencapaian RPJMD tahun 2021-2026 sehingga hasil evaluasi pelaksanaan tahun kedua (2022) digunakan untuk menetapkan langkah-langkah percepatan pencapaian target yang belum dapat direalisasikan dan melakukan penyesuaian kebijakan pembangunan daerah bila diperlukan.

Arah kebijakan pembangunan tahun 2024 disesuaikan dengan Visi dan Misi RPJMD 2021-2026 yang tetap difokuskan kepada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia sebagai hasil akhir pelaksanaan Visi RPJMD 2021-2026, namun demikian arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah tahun 2024 juga responsif dan tanggap terhadap ketidakpastian perkembangan ekonomi global, regional dan lokal serta guna mendukung pencapaian Tema RKP, yang juga menjadi penekanan dalam penentuan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah tahun 2024.

Arah kebijakan serta sasaran pembangunan daerah tahun 2024 akan difokuskan pada pencapaian Tema Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 yakni “Transformasi Sektor Strategis yang inklusif dan berkelanjutan”, yakni :

1. Transformasi ekonomi difokuskan pada 3 sektor strategis Sumatera Barat dengan distribusi PDRB terbesar yakni Sektor Pertanian, Sektor Perdagangan dan Industri serta Sektor bagi penumbuhan ekonomi baru di Sumatera Barat yakni sektor Pariwisata, yang di tandai dengan indikator kinerja yakni :
 - a. Nilai Tukar Petani (NTP), dengan target sebesar 101.40
 - b. Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP), dengan target sebesar 104,50
 - c. Pendapatan pembudidaya ikan, dengan target sebesar Rp. 50,048 juta
 - d. Pendapatan nelayan, dengan target sebesar Rp. 42.443 juta
 - e. Pendapatan Peternak, dengan target sebesar Rp. 52.779 juta
 - f. Peningkatan Pendapatan petani tanaman pangan dan hortikultura dibandingkan tahun sebelumnya dengan target sebesar 5%
 - g. Peningkatan Pendapatan Petani Hutan dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan target sebesar 5%
 - h. Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB, dengan target sebesar 17,35%
 - i. Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB, dengan target sebesar 9,02%
 - j. Jumlah enterpreneur baru tercipta, dengan target sebanyak 150.658 orang
 - k. Persentase Kontribusi Pariwisata pada PDRB, dengan target sebesar 1,25%
 - l. Persentase Kontribusi Ekonomi Kreatif pada PDRB, dengan target sebesar 6,10%.
2. Pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan diarahkan pada :

- a. Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, yang menjadi landasan fundamental untuk menciptakan dan memperluas kesempatan ekonomi dan kesempatan kerja, yang ditandai dengan indikator kinerja yakni :
 - Laju Pertumbuhan Ekonomi, dengan target sebesar 4,76%
 - PDRB ADHK Per Kapita, dengan target sebesar Rp.34,85 juta
 - PDRB ADHB Per Kapita, dengan target sebesar Rp.59,88 juta
 - Tingkat Penganggura Terbuka, dengan target 5,70%.
- b. Pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan yang memastikan bahwa ekonomi yang tumbuh juga merata dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat, yang di tandai dengan indicator kinerja yakni :
 - Rasio Gini, dengan target sebesar 0,290
 - Persentase Sumbangan Pendapatan Perempuan, dengan target 37,8%
 - Tingkat Kemiskinan, dengan target sebesar 5,62%
 - Pengeluaran Riil Perkapita, dengan target sebesar Rp. 11.455 ribu
- c. Perluasan Akses dan Kesempatan yang memastikan bahwa seluruh masyarakat mendapatkan kemudahan akses terhadap Pelayanan Dasar Minimal guna peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, yang di tandai dengan indicator kinerja yakni :
 - Indeks Pembangunan Manusia, dengan target sebesar 74,25
 - Akses Rumah Tangga terhadap Sumber Air Minum yang layak, dengan target sebesar 86,00%
 - Akses Rumah Tangga terhadap Sanitasi yang layak, dengan target sebesar 86,00%
 - Persentase Balita yang mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap, dengan target sebesar 90%
 - Persentase Penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan, dengan target sebesar 92,4%.

Namun demikian, tema pembangunan RKPD Tahun 2024 tetap dilaksanakan dalam bingkai Prioritas Pembangunan yang merupakan penterjemahan Misi sesuai dengan RPMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026. Prioritas pembangunan pada tahun 2024 merupakan prioritas yang sama pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2026, hal ini agar terjadinya konsistensi pelaksanaan pembangunan setiap tahunnya serta menjaga agar arah pembangunan RPJMD tetap terjaga, sehingga hasil akhir di tahun 2026 dapat terwujud sesuai dengan target yang telah di tetapkan.

Adapun Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2024 dan arah kebijakan pembangunan pada masing-masing Prioritas yakni sebagai berikut.

(1) Prioritas Pembangunan 4 : Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital

Prioritas pembangunan ini untuk menjadikan Sumatera Barat sebagai pusat perdagangan dan Industri Kecil di Sumatera Barat. Secara struktur ekonomi Sumatera Barat juga di dominasi oleh Perdagangan dan juga Industri Pengolahan, meskipun tidak sebesar Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, namun sektor perdagangan dan industri kedepan harus dikembangkan sebagai sektor yang diyakini mampu meningkatkan tingkat pendapatan masyarakat sehingga Sumatera Barat dapat keluar dari middle income trap.

Sumatera Barat memiliki potensi untuk mengoptimalkan aktivitas di sektor perdagangan sebagai salah satu sektor utama yang menggerakkan perekonomian masyarakat. Pelabuhan Teluk Bayur yang berada di pesisir barat pual Sumatera merupakan potensi untuk memajukan perdagangan internasional melalui peningkatan volume ekspor, terutama ke negara yang tergabung dalam Indian Ocean Rim Association (IORA). Misi ini diharapkan mampu meningkatkan kontribusi sektor perdagangan dan ekonomi kreatif terhadap PDRB Sumatera Barat.

Sasaran dan indikator kinerja pada Prioritas Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas meningkatkan usaha perdagangan Dan industri kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital Tahun 2024

No	SASARAN / INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024
1	Sumatera Barat sebagai pusat perdagangan	
	Laju pertumbuhan sektor perdagangan (%)	1,00
2	Sumatera Barat sebagai pusat industri kecil dan menengah	
	Jumlah sentra industri kecil dan menengah (sentra)	390
3	Terwujudnya pelaku koperasi dan UKM yang sejahtera	
	Laju pertumbuhan ekonomi sub sektor koperasi (%)	2,23
	Persentase peningkatan pendapatan pada usaha mikro dan kecil	3,8
4	Terciptanya 100.000 entrepreneur dari berbagai sektor	
	Jumlah entrepreneur baru tercipta (orang)	150.658
5	Meningkatnya pertumbuhan investasi	
	Persentase peningkatan Investasi di provinsi (%)	9,50
6	Meningkatnya peran ekonomi digital	
	Kontribusi Ekonomi Digital (%)	7,10

Sumber : RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan tersebut pada Tahun 2024 difokuskan pada:

- a) Mengembangkan UMKM di sekitar Kawasan ekowisata secara masif sesuai potensi masing-masing daerah.
- b) Menjaga tingkat inflasi tetap pada batas wajar.
- c) Penciptaan iklim investasi dan kemudahan berinvestasi.
- d) Memperbaiki tata kelola BUMD dan mendirikan BUMD profesional di bidang pertanian
- e) Mencetak 100 ribu millennial entrepreneur dan women entrepreneur serta pelaku ekonomi kreatif.
- f) Meningkatkan akses keuangan perbankan dan non perbankan bagi UMKM dan pengusaha pemula.
- g) Meningkatkan metode pemasaran produk UMKM melalui digitalisasi dengan memanfaatkan e-commerce yang telah ada.
- h) Meningkatkan keahlian dan keterampilan bagi pelaku UMKM dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan bisnis dan perdagangan digital

Pencapaian sasaran Prioritas Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital, dilakukan dengan beberapa Program Pembangunan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel Program Pembangunan mendukung
Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah
Serta Ekonomi Berbasis Digital Tahun 2024

NO	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA			PERANGKAT DAERAH
		INDIKATOR	SATUAN	TARGET	
Prioritas 4 : Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/ menengah serta ekonomi berbasis digital					
1	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Peningkatan omset pedagang pasar rakyat yang sudah direvitalisasi	%	6,2	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2	Program Pengembangan Ekspor	Nilai ekspor	juta US\$	1.478,4	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase barang beredar dan jasa yang diawasi	%	76	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Persentase komoditi potensial yang sesuai ketentuan berlaku	%	26	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Persentase pengaduan konsumen yang diselesaikan	%	89	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

NO	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA			PERANGKAT DAERAH
		INDIKATOR	SATUAN	TARGET	
4	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Peningkatan transaksi pada kegiatan pameran	%	5	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
5	Program Penyelenggaraan Jalan	Rasio Kemantapan Jalan	%	79	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
6	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Jumlah sentra industri yang diberi perkuatan	Sentra	25	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
7	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah IUI dan IPU	%	76	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
8	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang kompeten	%	36,04	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
9	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase koperasi yang memiliki izin usaha simpan pinjam	%	3,25	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
10	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi yang menindaklanjuti rekomendasi pengawasan	%	65	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
11	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Jumlah SDM KUKM yang dilatih	orang	1.500	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
12	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Jumlah koperasi modern	koperasi	70	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
13	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Jumlah produk UKM yang terstandarisasi	produk	125	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
14	Program Pengembangan UMKM	Persentase usaha kecil yang menjadi wirausaha	%	3,5	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
15	Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Persentase organisasi pemuda yang memiliki kontribusi aktif dalam pembangunan	%	17	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Jumlah wirausaha muda baru	orang	348	Dinas Pemuda dan Olahraga

NO	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA			PERANGKAT DAERAH
		INDIKATOR	SATUAN	TARGET	
16	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang kompeten	%	36,04	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
17	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Indeks pembangunan keluarga	indeks	63,46	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
18	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Jumlah SDM KUKM yang dilatih	orang	1.500	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
19	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Jumlah produk UKM yang terstandarisasi	produk	125	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
20	Program Pengembangan UMKM	Persentase usaha kecil yang menjadi wirausaha	%	3,5	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
21	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase organisasi Pemuda yang memiliki kontribusi aktif dalam pembangunan	%	17	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Jumlah wirausaha muda baru	orang	348	Dinas Pemuda dan Olahraga
22	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase peningkatan produksi ikan olahan dan pemasaran hasil perikanan	%	7,95	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Jumlah produksi olahan hasil perikanan	ton	19.280	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Tingkat konsumsi ikan	Kg/kap/th	41,6	Dinas Kelautan dan Perikanan
23	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Peningkatan Jumlah SDM Pariwisata yang bersertifikat	Orang	496	Dinas Pariwisata
		Persentase pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif	%	8	Dinas Pariwisata
24	Program Perizinan Usaha Pertanian	Peningkatan klasifikasi kelas kebun usaha pertanian	%	8	Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Holtikultura

NO	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA			PERANGKAT DAERAH
		INDIKATOR	SATUAN	TARGET	
25	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Unit Usaha dan UPTD sub urusan peternakan yang diawasi	%	3	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
26	Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	hektar	50.000	Dinas Kehutanan
27	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Peningkatan transaksi pada kegiatan pameran	%	5	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
28	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Jumlah sentra industri yang diberi perkuatan	Sentra	25	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
29	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah IUI dan IPU	%	76	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
30	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Regulasi Penanaman Modal	%	100	Dinas Penanaman Modal Provinsi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
31	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Pernyataan Minat	dokumen pernyataan minat	5	Dinas Penanaman Modal Provinsi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
32	Program Pelayanan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai/Rasio	82,90 / 3,43	Dinas Penanaman Modal Provinsi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Persentase Perizinan yang Diterbitkan Tepat Waktu	%	86,38	Dinas Penanaman Modal Provinsi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
33	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Nilai Realisasi Investasi (PMA dan PMDN)	Rp (triliun)	6,1	Dinas Penanaman Modal Provinsi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
34	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Ketersediaan Data Penanaman Modal Penanaman Modal Berbasis Teknologi Informasi	%	60	Dinas Penanaman Modal Provinsi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA			PERANGKAT DAERAH
		INDIKATOR	SATUAN	TARGET	
35	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Indeks SPBE (Skala 1-5)	indeks	3,4	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
36	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Jumlah produk UKM yang terstandarisasi	produk	125	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
37	Program Pengembangan UMKM	Persentase usaha kecil yang menjadi wirausaha	%	3,5	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Sumber : RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

(2) Prioritas Pembangunan 5 : Meningkatkan Ekonomi Kreatif Dan Berdaya Saing Kepariwisata

Pariwisata termasuk sektor penting dalam pembangunan ekonomi Sumatera Barat yang diharapkan menjadi industri dan salah satu basis pembangunan Sumatera Barat untuk kedepannya disamping pertanian. Sehingga proritas ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan pariwisata yang nyaman dan berkesan salah satunya adalah meningkatkan kompetensi pihak pengelola sumberdaya wisata atau sumberdaya penunjang wisata agar dapat mewujudkan pariwisata yang nyaman dan berkesan.

Pariwisata yang nyaman dan berkesan ditandai dengan kepuasan dan kenikmatan berwisata yang dirasakan wisatawan, baik wisatawan domestik maupun mancanegara. Bberapa tahun terakhir Sumatera Barat mengalami kemajuan ekonomi dari sektor pariwisata, untuk itu hal ini harus selalu diperkuat melalui pembangunan pariwisata berbasis Pariwisata Halal dan MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition), dengan pembenahan destinasi wisata baik kelas lokal, nasional dan internasional dengan cara meningkatkan atraksi, aksesibilitas dan amenitas di Destinasi Wisata sekaligus meningkatkan pembinaan kepada masyarakat terutama di wilayah-wilayah destinasi wisata.

Perekonomian Sumatera Barat cenderung tumbuh melambat setiap tahunnya seiring kinerja lapangan usaha utama daerah pada sektor pertanian yang dalam tren menurun. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, Sumatera Barat perlu mengembangkan sumber pertumbuhan ekonomi baru sebagai lokomotif perekonomian ke depan, disamping terus memperkuat dan mengoptimalkan kinerja pertanian dan industri pengolahan yang telah lama menjadi tulang punggung perekonomian Sumatera Barat.

Pariwisata dapat menjadi lokomotif baru perekonomian Sumatera Barat karena memiliki multiplier effect yang luas dan keseluruhan. Kedatangan wisatawan memiliki dampak yang luar biasa dalam menggerakkan begitu banyak kegiatan sektor lain, seperti perhotelan dan restoran, transportasi, produk kerajinan dan industri olahan makan/minum, dan jasa-jasa.

Pariwisata Sumatera Barat terbukti sangat potensial untuk menjadi lokomotif baru perekonomian daerah ke depan, hal ini didukung dengan Sumatera Barat menjadi salah satu dari 10 besar destinasi favorit wisatawan nusantara di Indonesia serta merupakan 3 (tiga) besar destinasi favorit wisatawan di Sumatera. Hal lainnya yakni keberadaan potensi wisata di Sumatera Barat juga diakui secara Global dan Nasional antara lain sebagai Provinsi dengan desa wisata terbanyak dan empat desa wisata masuk 50 besar terbaik se-Indonesia pada Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2021; Memiliki 11 Geopark, 3 sudah diakui Nasional; Rendang didaulat sebagai masakan terlezat di dunia versi CNN Travels pada tahun 2017); Sumatera Barat ditetapkan sebagai Juara World's Best Halal Culinary Destination dan World's Best Halal Destination pada anugerah World Halal Tourism Award Abu Dhabi pada tahun 2016); Gulungan ombak Mentawai masuk dalam jajaran ombak terbaik di dunia berdasarkan Surfer Magazine di tahun 2013; serta Desa Pariangan terpilih menjadi desa terindah di dunia versi Travel Budget pada tahun 2012. Berdasarkan pengakuan Global dan nasional tersebut maka Sumatera Barat memiliki kekuatan pariwisata dari keindahan alam (nature), keberagaman budaya (culture), serta kuliner yang lezat (culinary).

Selain itu, Bank Indonesia Kantor Perwakilan Sumatera Barat bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah mencanangkan tahun kunjungan wisata "Visit Beautiful West Sumatera". Langkah ini merupakan upaya untuk membangkitkan kembali gairah sektor pariwisata dan ekonomi kreatif Sumatera Barat dari keterpurukan ekonomi selama masa pandemic Covid 19.

Sasaran dan indikator kinerja pada Prioritas Meningkatkan Ekonomi Kreatif Dan Berdaya Saing Kepariwisata Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Meningkatkan Ekonomi Kreatif dan Berdaya Saing Kepariwisata Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2024
1	Meningkatnya kontribusi pariwisata dalam perekonomian Sumatera Barat	Persentase Kontribusi Pariwisata pada PDRB (%)	1,25
2	Meningkatnya kontribusi ekonomi kreatif dalam perekonomian Sumatera Barat	Persentase Kontribusi Ekonomi Kreatif pada PDRB (%)	6,10

Sumber : RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan tersebut pada Tahun 2024 difokuskan pada :

- a) Membangun industri pariwisata melalui peningkatan kualitas sarana dan prasarana destinasi wisata unggulan
- b) Meningkatkan atraksi seni dan budaya serta membangun suasana festival yang meriah pada pusat keramaian dan obyek wisata unggulan
- c) Meningkatkan kunjungan wisatawan terutama wisatawan domestic
- d) Penguatan Brand Image Pariwisata di Sumatera Barat
- e) Memperjelas segmentasi Wisatawan pada masing-masing daerah
- f) Melakukan Strategi promosi efektif yang terpadu melalui public campaign dan promosi besar-besaran untuk membangun awareness masyarakat
- g) Mendorong semua pelaku usaha pariwisata Sumbar (terutama obyek wisata unggulan) agar segera memenuhi sertifikasi CHSE, sertifikasi Halal serta sertifikasi/ standar internasional lainnya
- h) Meningkatkan investasi pada bidang Pariwisata
- i) Pengembangan Kawasan pariwisata secara terintegrasi, terpadu dan menyeluruh
- j) Pemberdayaan para pelaku ekonomi kreatif sesuai dengan potensi daerah

Pencapaian sasaran Prioritas Meningkatkan Ekonomi Kreatif dan Berdaya Saing Kepariwisata dilakukan dengan beberapa Program Pembangunan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel Program Pembangunan mendukung Prioritas Meningkatkan Ekonomi Kreatif dan Berdaya Saing Kepariwisata Tahun 2024

No	Program Pembangunan Daerah	Kinerja			Perangkat Daerah
		Indikator	Satuan	Target	
Prioritas 5 : Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan					
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase volume tampungan sumber-sumber air	%	56,78	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi
		Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi	%	73,48	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi

No	Program Pembangunan Daerah	Kinerja			Perangkat Daerah
		Indikator	Satuan	Target	
		Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air	%	70,03	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi
2	Program Penyelenggaraan Jalan	Rasio Kemantapan Jalan	%	79	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
3	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase pengelolaan sampah di Sumatera Barat	%	70	Dinas Lingkungan Hidup
4	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah intervensi pada destinasi internasional kawasan gunung talang	kali	12	Dinas Pariwisata
		Jumlah DTW Unggulan Provinsi yang diintervensi pengembangannya	DTW	19	Dinas Pariwisata
5	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara	%	5,5	Dinas Pariwisata
		Persentase peningkatan kunjungan wisatawan nusantara	%	6	Dinas Pariwisata
		Rata-rata lama tinggal wisman	hari	3,25	Dinas Pariwisata
		Rata-rata lama tinggal wisnus	hari	1,76	Dinas Pariwisata
6	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Peningkatan Jumlah SDM Pariwisata yang bersertifikat	Orang	496	Dinas Pariwisata
		Persentase pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif	%	8	Dinas Pariwisata
7	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Jumlah produk UKM yang terstandarisasi	produk	125	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
8	Program Pengembangan UMKM	Persentase usaha kecil yang menjadi wirausaha	%	3,5	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
9	Program Pengembangan Kebudayaan	Jumlah Karya Budaya yang Dilestarikan	Karya Budaya	8	Dinas Kebudayaan

No	Program Pembangunan Daerah	Kinerja			Perangkat Daerah
		Indikator	Satuan	Target	
10	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah produk Ekonomi Kreatif yang terdaftar HKI	produk	150	Dinas Pariwisata
11	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Peningkatan Jumlah SDM Pariwisata yang bersertifikat	Orang	496	Dinas Pariwisata
		Persentase pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif	%	8	Dinas Pariwisata
12	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Jumlah sentra industri yang diberi perkuatan	Sentra	25	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Sumber : RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

c. Program Unggulan Provinsi Sumatera Barat

Dalam dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, terdapat beberapa program unggulan yang mendukung pencapaian visi misi telah direncanakan dan telah dilaksanakan sejak tahun 2022 sebagai tahun pertama pelaksanaan RPJMD dan kemudian dilanjutkan pada tahun 2023 hingga 2026.

Dalam rangka mendukung proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian hingga pelaporan dan evaluasi maka telah ditetapkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 050 – 47 – 2022 Tentang Penetapan Kinerja Program Unggulan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026. Adapun sasaran dan target masing-masing Program Unggulan di Bidang Perekonomian Tahun 2024 yakni sebagai tabel berikut:

Tabel Target Kinerja Program Unggulan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

Program Unggulan/Definisi Operasional	Indikator Kinerja	Target 2024	SKPD/Sub Kegiatan
1	2	3	4
SUMBAR SEHAT DAN CERDAS			
I. Menyediakan sanitasi layak di sekolah dan fasilitas umum lainnya serta peningkatan kesadaran masyarakat untuk mendukung Adaptasi Kebiasaan Baru			
Definisi Operasional 1. Menyediakan air bersih, toilet terpisah laki-laki dan perempuan, tempat cuci tangan, tempat sampah,	1. Jumlah sanitasi layak di Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi (lokasi)		Dinas Pariwisata Sub kegiatan : 1. Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi

Program Unggulan/Definisi Operasional	Indikator Kinerja	Target 2024	SKPD/Sub Kegiatan
1	2	3	4
saluran pembuangan air kotor serta penyediaan air minum yang layak ditempat-tempat umum			2. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi Pengembangan Kawasan Strategis Wisata Provinsi
2. Fasilitas umum yang dimaksud adalah Kawasan wisata, desa wisata, tempat pelayanan publik yang menjadi kewenangan provinsi (UKPP), terminal milik provinsi dan rest area kewenangan provinsi	a. Jumlah Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi dengan toilet laki-laki dan Perempuan yang layak (lokasi)	16	
3. Mekanisme penganggarannya dapat melalui hibah kepada kelompok masyarakat seperti Pokdarwis atau kelompok lainnya	b. Jumlah Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi dengan sarana cuci tangan yang layak sesuai dengan CHSE (lokasi)	19	
4. Penanggung jawab Progul Biro Organisasi untuk UKPP, Dinas Pariwisata, Dinas Perhubungan	c. Jumlah Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi dengan sarana air bersih yang layak (lokasi)	16	
	d. Jumlah Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi dengan sarana air minum yang layak (lokasi)	19	
SUMBAR SEJAHTERA			
VI. Memperbaiki tata kelola BUMD dan mendirikan BUMD profesional di bidang pertanian			
Definisi operasional :			
1. Mengevaluasi kinerja BUMD yang ada	1. Jumlah BUMD Agro yang terbentuk baru (unit usaha)	-	Biro Perekonomian Sub kegiatan : 1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD
2. Mengoptimalkan pemanfaatan BUMD yang ada	2. Jumlah BUMD dengan kategori Sehat (unit usaha)	3	Biro Perekonomian Sub kegiatan : 1. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha
3. Membentuk BUMD baru dibidang agro	a. PT. Bank Nagari (perbankan)		
4. Ukuran tata Kelola BUM yang baik adalah adalah kategori BUMD yang sehat	b. PT. Jamkrida (penjaminan kredit)		
5. Penanggung jawab Progul Biro Perekonomian	c. BUMD Agro		
VII. Mencetak 100 ribu <i>millennial entrepreneur</i> dan <i>women entrepreneur</i> serta pelaku ekonomi kreatif			
Definisi operasional :			
7. Memfasilitasi tumbuhnya	1. Jumlah enterpreneur baru tercipta (orang)	20.000	

Program Unggulan/Definisi Operasional	Indikator Kinerja	Target 2024	SKPD/Sub Kegiatan
1	2	3	4
100 ribu milenial entrepreneur dan woman entrepreneur yang direncanakan akan dilaksanakan dalam 5 tahun dengan proporsi 20 ribu setiap tahunnya dari tahun 2022 sampai dengan 2026	a. Jumlah entrepreneur baru tercipta urusan Pemuda dan Olahraga (orang)	528	Dinas Pemuda dan Olahraga Sub kegiatan : 1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi 2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi
8. 100 ribu milenial tersebut tersebar pada beberapa sector, baik pertanian, peternakan, perikanan, industry, UMKM, pariwisata, ekonomi kreatif dan sector potensial lainnya	b. Jumlah entrepreneur baru tercipta urusan Tenaga Kerja (orang)	6797	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sub kegiatan : 1. Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi 2. Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja 3. Perluasan Kesempatan Kerja
9. Untuk pencapaian target 100 ribu milenial tersebut perlu pembagian secara proporsional dengan kabupaten/kota	c. Jumlah entrepreneur baru tercipta urusan Koperasi dan UMKM (orang)	2000	Dinas Koperasi dan UMKM Sub kegiatan : 1. Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan 2. Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi
10. Definisi terkait dengan entrepreneur yakni : a. Telah menerima Pendidikan kewirausahaan dan atau b. Sudah memulai usaha	d. Jumlah entrepreneur baru tercipta urusan Pertanian (sub urusan Perkebunan, Tanaman	300	Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan hortikultura Sub kegiatan :
11. Bekerjasama dengan akselarator			
12. Penanggung jawab progul Dinas Koperasi dan UKM			

Program Unggulan/Definisi Operasional	Indikator Kinerja	Target 2024	SKPD/Sub Kegiatan
1	2	3	4
	pangan dan Hortikultura) (orang)		1. Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani
	e. Jumlah enterprenur baru tercipta urusan Pertanian (sub urusan Peternakan dan Kesehatan Hewan) (orang)	5.246	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sub kegiatan : 1. Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian
	f. Jumlah enterprenur baru urusan Kehutanan (orang)	500	Dinas Kehutanan Sub kegiatan : 1. Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan 2. Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan 3. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan 4. Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan 5. Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial
	g. Jumlah enterprenur baru tercipta urusan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (orang)	2.664	Dinas Pariwisata Sub kegiatan : 1. Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan 2. Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata 3. Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan 4. Fasilitasi Sertifikasi

Program Unggulan/Definisi Operasional	Indikator Kinerja	Target 2024	SKPD/Sub Kegiatan
1	2	3	4
			<p>Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata</p> <p>5. Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA)</p> <p>6. Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif</p> <p>7. Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif</p> <p>8. Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif</p>
	h. Jumlah entrepreneur baru tercipta urusan Perindustrian dan Perdagangan (orang)	1.500	<p>Dinas Perindustrian dan Perdagangan</p> <p>Sub kegiatan :</p> <p>1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat</p> <p>2. Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi</p>
	i. Jumlah entrepreneur baru tercipta urusan Sosial (orang)	412	<p>Dinas Sosial</p> <p>Sub kegiatan :</p> <p>4. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial (Panti Anak terlantar)</p> <p>5. Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari (Panti Tuna Netra)</p> <p>6. Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari (Panti PMKS Lainnya)</p>
	j. Jumlah entrepreneur baru tercipta urusan Kebudayaan (orang)	280	<p>Dinas Kebudayaan</p> <p>Sub kegiatan :</p> <p>1. Pelindungan, Pengembangan,</p>

Program Unggulan/Definisi Operasional	Indikator Kinerja	Target 2024	SKPD/Sub Kegiatan
1	2	3	4
			Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
	k. Jumlah entrepreneur baru tercipta urusan Kelautan dan perikanan (orang)	450	<p>Dinas Kelautan dan Perikanan</p> <p>Sub kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar 2. Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 3. Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing 4. Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
	l. Jumlah entrepreneur baru tercipta urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana (orang)	725	<p>Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana</p> <p>Sub kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi

Program Unggulan/Definisi Operasional	Indikator Kinerja	Target 2024	SKPD/Sub Kegiatan
1	2	3	4
			Kewenangan Provinsi 2. Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi
	m. Jumlah entrepreneur baru tercipta urusan Penanaman Modal (orang)	100	Dinas Penanaman Modal Provinsi Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sub kegiatan : 1. Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi
	n. Jumlah entrepreneur baru tercipta urusan Pangan (orang)	112	Dinas Pangan Sub kegiatan : 1. Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
	o. Jumlah entrepreneur baru tercipta urusan Pemberdayaan Masyarakat Pangan (orang)	1.400	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sub kegiatan : 1. Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa 2. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
VIII.Meningkatkan akses keuangan perbankan dan non perbankan bagi UMKM dan pengusaha pemula			
Definisi operasional : 1. Peningkatan akses keuangan perbankan dan non perbankan bagi UMKM dan pengusaha pemula yang dilakukan melalui Fasilitasi, peningkatan pemahaman terkait akses pembiayaan 2. Bentuk fasilitasi antara lain mempertemukan kelompok UMKM dengan perbankan 3. Target capaian yakni UMKM yang mendapatkan	7. Jumlah UMKM yang difasilitasi pada akses keuangan perbankan dan non perbankan (Lembaga)	540	Dinas Koperasi dan UMKM Sub kegiatan : 2. Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan
	8. Jumlah Pengusaha pemula yang difasilitasi pada akses keuangan perbankan dan non perbankan (orang)	200	
	9. Jumlah Pelaku UMKM yang mendapatkan	400	

Program Unggulan/Definisi Operasional	Indikator Kinerja	Target 2024	SKPD/Sub Kegiatan
1	2	3	4
<p>permodalan dari perbankan</p> <p>4. Edukasi terhadap non perbankan seperti CSR, fin-tech, dana dari lembaga keuangan social islam</p> <p>5. Penanggungjawab progul adalah Dinas Koperasi dan UMKM</p>	permodalan dari Lembaga perbankan dan non perbankan (orang)		
	10. Jumlah Pengusaha pemula yang mendapatkan permodalan dari Lembaga perbankan dan non perbankan (orang)	150	
	11. Jumlah Lembaga perbankan yang memberikan permodalan pada UMKM dan pengusaha pemula (Lembaga)	4	
	12. Jumlah Lembaga non perbankan yang memberikan permodalan pada UMKM dan pengusaha pemula (Lembaga)	5	
IX. Meningkatkan keahlian dan keterampilan bagi pelaku UMKM dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan bisnis dan perdagangan digital			
<p>Definisi operasional :</p> <p>3. Peningkatan keahlian dan keterampilan bagi pelaku UMKM melalui pelatihan, workshop dan sosialisasi dengan tema difokuskan pada penguasaan Teknologi Informasi untuk perluasan jejaring pemasaran dan kerjasama</p> <p>4. Penanggungjawab progul adalah Dinas Koperasi dan UMKM</p>	1. Jumlah Pelaku UMKM yang mendapatkan peningkatan keahlian dan keterampilan pada penguasaan teknologi informasi guna perluasan jejaring pemasaran (orang)	180	<p>Dinas Koperasi dan UMKM</p> <p>Sub kegiatan :</p> <p>1. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDMU KM</p> <p>2. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan dan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi</p> <p>3. Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan</p>

Program Unggulan/Definisi Operasional	Indikator Kinerja	Target 2024	SKPD/Sub Kegiatan
1	2	3	4
			Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan 4. Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi
	2. Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan fasilitasi marketing digital (orang)	500	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sub kegiatan : 1. Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi 2. Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi
X. Membangun industri pariwisata melalui 1 destinasi wisata berkelas dunia dan 19 destinasi wisata unggulan			
Definisi operasional : 6. Penetapan 1 destinasi wisata berkelas dunia (rencana Kawasan Gunung Talang yang merupakan salah satu geosite Kawasan Geopark Ranah Minang, meliputi 7 Kab/Kota, menuju UNESCO global geopark) dan 19 destinasi wisata unggulan (masing-masing 1 di setiap kabupaten/Kota) yang telah disepakati pada rakor pariwisata di Mentawai 7. Terkait dengan kewenangan, maka pola pendanaan untuk destinasi yang merupakan kewenangan kabupaten/kota melalui sharing pendanaan antara provinsi dan kabupaten/kota. 8. Proporsi persentase sharing pendanaan diputuskan pada rapat TAPD dengan melibatkan Dinas Pariwisata Provinsi dan Biro Kerjasama	1. Jumlah destinasi wisata unggulan (Kab/Kota)	19	Dinas Pariwisata Sub kegiatan : 1. Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi 2. Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi 3. Penetapan Destinasi Pariwisata Provinsi 4. Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi 5. Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi 6. Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi
	2. Jumlah destinasi wisata kelas dunia (lokasi)	1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Kegiatan :

Program Unggulan/Definisi Operasional	Indikator Kinerja	Target 2024	SKPD/Sub Kegiatan
1	2	3	4
<p>, Pembangunan Dan Rantau.</p> <p>9. Membangun Pusat Inkubasi Ekonomi Kreatif (Sumbar Kreatif Hub), yang berlokasi di bekas Bengkel PT Dinamika di Nipah, Padang direncanakan akan dikelola oleh salah satu BUMD</p> <p>10. Penanggung jawab progul Dinas Pariwisata dan Biro Perekonomian</p>			<p>Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian</p> <p>Dinas Pariwisata Sub kegiatan : Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi</p>
	<p>3. Jumlah Pusat Inkubasi Ekonomi Kreatif yang terbangun dan terkelola (unit)</p>	-	<p>Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Sub kegiatan : 2. Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi</p>

Sumber : Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 050 – 47 – 2022 Tentang Penetapan Kinerja Program Unggulan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

d. Penyelarasan dan Dukungan RKPD Provinsi Terhadap RKP Tahun 2024

Sebagai bagian dari Perencanaan Pembangunan Nasional, maka penyusunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 memperhatikan 7 (tujuh) Agenda/Prioritas Nasional yang diturunkan menjadi Program Prioritas dan di detailkan dengan Kegiatan Prioritas.

Hal ini bertujuan akan selarasnya Prioritas dan program pembangunan daerah dengan Prioritas dan Program Nasional sehingga target capaian Nasional yang merupakan akumulasi dari pencapaian target masing-masing Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat tercapai.

Penyelarasan juga membuktikan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Barat turut mengambil bagian penting dari proses pelaksanaan pembangunan yang menuju kepada tujuan pembangunan nasional.

Adapun penyelarasan dan dukungan RKPD Provinsi terhadap RKP Tahun 2024 padabidang perekonomian sebagai berikut.

Tabel Dukungan RKPDP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Terhadap Prioritas Nasional
Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas Dan Berkeadilan
Bidang Perekonomian

No	RKP 2024		RKPDP 2024	
	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
1	Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)	Akselerasi pengembangan pembangkit energi terbarukan	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Berkembang, Terpencil dan Perdesaan	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
2	Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)	Peningkatan pasokan bahan bakar nabati	Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
3	Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)	Peningkatan pelaksanaan konservasi dan efisiensi energi	Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
4	Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)	Peningkatan pemenuhan energi domestik	Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
5	Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)	Pengembangan industri pendukung EBT	Bimbingan Teknis Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
6	Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi	Pemantapan Kawasan berfungsi Lindung (kumulatif)	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Dinas Kehutanan
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	Dinas Kehutanan
			Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Lindung	Dinas Kehutanan
7	Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi	Pengelolaan hutan berkelanjutan	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Dinas Kehutanan

No	RKP 2024		RKPD 2024	
	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Dinas Kehutanan
			Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi	Dinas Kehutanan
8	Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi	Penyediaan air untuk pertanian	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi
			Rehabilitasi Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi
9	Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi	Penyediaan air baku untuk kawasan prioritas;	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS	Dinas Kehutanan
			Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Dinas Kehutanan
			Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS	Dinas Kehutanan
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Dinas Kehutanan
			Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	Dinas Kehutanan
			Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS	Dinas Kehutanan
10	Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi	Pemeliharaan, pemulihan, dan konservasi sumber daya air dan ekosistemnya termasuk revitalisasi danau dan infrastruktur hijau; dan	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kelautan Dan Perikanan

No	RKP 2024		RKP 2024	
	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
			Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kelautan Dan Perikanan
			Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya	Dinas Kelautan Dan Perikanan
			Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan Kewenangannya	Dinas Kelautan Dan Perikanan
			Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan
			Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan

No	RKP 2024		RKPD 2024	
	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
			Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan
11	Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi	Pengembangan waduk multiguna	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi
12	Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan	Peningkatan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi pangan	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi	Dinas Pangan
			Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pangan
			Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pangan
			Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pangan
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Dinas Pangan
13	Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan	Peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian, perikanan dan pangan hasil laut secara berkelanjutan;	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	Dinas Pangan
			Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dinas Pangan

No	RKP 2024		RKPD 2024	
	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
			Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan
			Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan
			Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan
14	Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan	Peningkatan produktivitas, kesejahteraan sumber daya manusia (SDM) pertanian, perikanan dan kepastian pasar;	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Dinas Kelautan Dan Perikanan
			Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Dinas Kelautan Dan Perikanan
			Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan Dan Holtikultura
			Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan Dan Holtikultura
			Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan Dan Holtikultura
			Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan Dan Holtikultura
			Pembentukan dan Penyelenggaraan	Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan

No	RKP 2024		RKPDP 2024	
	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
			Sekolah Lapang Kelompok Tani	Dan Holtikultura
			Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani	Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan Dan Holtikultura
15	Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan	Peningkatan keberlanjutan produktivitas sumber daya pertanian, dan digitalisasi pertanian; dan	Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan
			Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan
			Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan
			Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan Dan Holtikultura
			Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan Dan Holtikultura
			Pendampingan Manajemen Korporasi Petani	Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan Dan Holtikultura
			Pendampingan Manajemen Korporasi Petani	Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan Dan Holtikultura
			Penilaian Kelayakan dan Standarisasi Manajemen Korporasi Petani	Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan Dan Holtikultura
			Penilaian Kelayakan dan Standarisasi Manajemen Korporasi Petani	Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan Dan Holtikultura
16	Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan	Peningkatan tata kelola sistem pangan nasional	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Dinas Pangan

No	RKP 2024		RKPD 2024	
	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
			Lainnya	
			Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Dinas Pangan
			Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Dinas Pangan
			Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Dinas Pangan
			Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Dinas Pangan
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Dinas Pangan
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Dinas Pangan
			Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Dinas Pangan
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi	Dinas Pangan
			Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Dinas Pangan
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Dinas Pangan
			Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Dinas Pangan
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Dinas Pangan

No	RKP 2024		RKPD 2024	
	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
			Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Dinas Pangan
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Dinas Pangan
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Dinas Pangan
17	Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan	Peningkatan pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir serta pengelolaan ruang laut	Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Dinas Kelautan Dan Perikanan
			Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Dinas Kelautan Dan Perikanan
			Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Dinas Kelautan Dan Perikanan
			Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Dinas Kelautan Dan Perikanan
			Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Dinas Kelautan Dan Perikanan
			Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Dinas Kelautan Dan Perikanan

No	RKP 2024		RKPDP 2024	
	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
			Pelaksanaan Fasilitasi Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional	Dinas Kelautan Dan Perikanan
			Penerbitan Rekomendasi Izin Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir	Dinas Kelautan Dan Perikanan
			Pencatatan dan Pengadministrasian Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut	Dinas Kelautan Dan Perikanan
			Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Dinas Kelautan Dan Perikanan
			Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Dinas Kelautan Dan Perikanan
			Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Dinas Kelautan Dan Perikanan
			Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Dinas Kelautan Dan Perikanan
			Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Dinas Kelautan Dan Perikanan
			Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Dinas Kelautan Dan Perikanan

No	RKP 2024		RKPD 2024	
	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
			Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	Dinas Kelautan Dan Perikanan
			Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Dinas Kelautan Dan Perikanan
18	Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan	Peningkatan ekosistem kelautan dan pemanfaatan jasa kelautan	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Dinas Kelautan Dan Perikanan
			Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Dinas Kelautan Dan Perikanan
			Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Dinas Kelautan Dan Perikanan
			Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Dinas Kelautan Dan Perikanan
			Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Dinas Kelautan Dan Perikanan
19	Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan	Peningkatan produksi, produktivitas, standarisasi mutu dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kelautan Dan Perikanan
			Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Dinas Kelautan Dan Perikanan

No	RKP 2024		RKPDP 2024	
	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
			Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kelautan Dan Perikanan
			Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Dinas Kelautan Dan Perikanan
			Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kelautan Dan Perikanan
			Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan
			Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan
			Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan
20	Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan	Peningkatan fasilitasi usaha, pembiayaan, dan akses perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil serta akses terhadap pengelolaan sumber daya	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Dinas Kelautan Dan Perikanan
			Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan	Dinas Kelautan Dan Perikanan

No	RKP 2024		RKPD 2024	
	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
			Ikan	
			Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan	Dinas Kelautan Dan Perikanan
			Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Dinas Kelautan Dan Perikanan
			Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Dinas Kelautan Dan Perikanan
21	Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan	Peningkatan SDM dan riset kemaritiman dan kelautan serta database kelautan dan perikanan	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Dinas Kelautan Dan Perikanan
			Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Dinas Kelautan Dan Perikanan
22	Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan koperasi	Peningkatan kemitraan usaha antara Usaha Mikro Kecil dan	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
23	Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan koperasi	Usaha Menengah Besar	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah

No	RKP 2024		RKP 2024	
	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
			Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	
			Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
24	Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan koperasi	Peningkatan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha	Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
			Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
25	Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan koperasi	Peningkatan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi	Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
			Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
26	Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan koperasi	Peningkatan penciptaan start-up dan peluang usaha.	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah

No	RKP 2024		RKPD 2024	
	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
			Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	Dinas Pariwisata
27	Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	Peningkatan industri pengolahan berbasis pertanian kemaritiman, dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir	Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Dinas Pangan
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Dinas Pangan
			Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Dinas Kelautan Dan Perikanan
			Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Dinas Kelautan Dan Perikanan
			Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Dinas Kelautan Dan Perikanan
			Penetapan Persyaratan dan Prosedur Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Dinas Kelautan Dan Perikanan

No	RKP 2024		RKPDP 2024	
	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
			Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Dinas Kelautan Dan Perikanan
			Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Dinas Kelautan Dan Perikanan
			Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT?	Dinas Kelautan Dan Perikanan
			Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kelautan Dan Perikanan
28	Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	Peningkatan industrialisasi berbasis hilirisasi sumber daya alam, termasuk melalui pengembangan smelter dan kawasan industri terutama di luar Jawa	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
			Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

No	RKP 2024		RKPD 2024	
	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
			Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
			Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
29	Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	Peningkatan daya saing destinasi dan industri pengolahan pariwisata, termasuk wisata alam, yang didukung penguatan rantai pasok	Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dinas Pariwisata
			Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Dinas Pariwisata
			Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	Dinas Pariwisata
			Dukungan Fasilitas Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	Dinas Pariwisata
30	Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
31	Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	Perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi, termasuk reformasi ketenagakerjaan	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal Provinsi Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
32	Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor	Pengembangan industri halal.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

No	RKP 2024		RKPDP 2024	
	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
	riil, dan industrialisasi		Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	
33	Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)	Peningkatan Diversifikasi, Nilai Tambah, dan Daya Saing Produk Ekspor dan Jasa	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
			Peningkatan Citra Produk Ekspor	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
			Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
34	Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)	Peningkatan akses dan pendalaman pasar ekspor	Pameran Dagang Internasional/Nasional	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
			Peningkatan Citra Produk Ekspor	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
			Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
35	Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)	Pengelolaan Impor	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
			Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
36	Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)	Peningkatan Kandungan dan Penggunaan Produk Dalam Negeri termasuk Melalui Pengadaan Pemerintah yang Efektif	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
			Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
37	Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)	Peningkatan Partisipasi dalam Jaringan Produksi Global	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
38	Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri	Peningkatan Citra dan Diversifikasi Pemasaran Destinasi Pariwisata Prioritas	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam	Dinas Pariwisata

No	RKP 2024		RKPDP 2024	
	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
	(TKDN)	dan Destinasi Branding, dan Produk Kreatif	dan Luar Negeri Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pengembangan Sistem Pemasaran	Dinas Pariwisata Dinas Pariwisata
39	Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)	Peningkatan efektivitas Preferential Trade Agreement (PTA)/Free Trade Agreement (FTA)/Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dan diplomasi ekonomi.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
40	Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi	Peningkatan Pendalaman Sektor Keuangan	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Biro Perekonomian
41	Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi	Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Digital dan Industry 4.0	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
42	Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi	Peningkatan Sistem Logistik dan Stabilitas Harga	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Dinas Pangan

No	RKP 2024		RKPDP 2024	
	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Dinas Pangan
			Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Dinas Pangan
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi	Dinas Pangan
			Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Dinas Pangan
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Dinas Pangan
			Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Dinas Pangan
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Dinas Pangan
			Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Biro Perekonomian
			Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Biro Perekonomian
43	Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi	Peningkatan Penerapan Praktik Berkelanjutan di Industri Pengolahan dan Pariwisata	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Dinas Pariwisata
			Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Dinas Pariwisata
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

No	RKP 2024		RKPDP 2024	
	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
			Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
			Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
			Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
			Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

No	RKP 2024		RKPDP 2024	
	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
			Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
44	Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi	Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Data dan Informasi Perkembangan Ekonomi, Terutama Pangan, Kemaritiman, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital.	Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Dinas Pangan
			Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Dinas Pangan
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Dinas Pangan
			Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Dinas Pangan
			Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Dinas Kelautan Dan Perikanan
			Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Dinas Kelautan Dan Perikanan
			Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Dinas Kelautan Dan Perikanan
			Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Dinas Kelautan Dan Perikanan

No	RKP 2024		RKP 2024	
	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
			Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kelautan Dan Perikanan
			Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan
			Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan
			Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	Dinas Pariwisata
			Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	Dinas Pariwisata

5. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota

A. Arah Kebijakan Pembangunan Bidang Ekonomi

Merujuk kepada tema RPKD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 yang menekankan pada transformasi sektor strategis yang inklusif dan berkelanjutan maka kebijakan pembangunan ekonomi menasar pada sektor ekonomi strategis sesuai dengan program unggulan Kepala dan Wakil Kepala Daerah, yaitu pertanian, wirausaha dan usaha kecil menengah, serta pariwisata yang bertransformasi dari sektor primer ke sekunder dan tersier.

Proses pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19 telah menunjukkan progres yang cukup signifikan. Angka kemiskinan yang sempat meningkat berhasil ditekan ke angka 6,04% di kondisi September tahun 2022. Pencapaian ini lebih baik dari angka sebelum pandemi Covid-19 di 2019. Untuk itu Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan berfokus pada penurunan angka kemiskinan melalui pengembangan sektor pertanian yang terpadu serta penurunan angka pengangguran dengan penciptaan wirausahawan baru di berbagai sektor ekonomi khususnya di perkotaan dengan upaya

pembinaan dan kemudahan akses keuangan untuk menurunkan angka pengangguran di kawasan perkotaan. Sementara itu secara umum sektor pariwisata khususnya wisata kuliner diharapkan mampu mengungkit pertumbuhan ekonomi sektor-sektor lainnya di seluruh wilayah Sumatera Barat.

Berdasarkan kebijakan di atas, maka arah kebijakan pembangunan ekonomi adalah untuk kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

1. Kabupaten-kabupaten diharapkan mampu meningkatkan produksi dan produktivitas di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan yang menunjukkan resistensinya terhadap pandemi COVID-19. Diperlukan terobosan-terobosan dan inovasi baru dalam meningkatkan nilai tambah produk di sektor pertanian baik dari segi manajemen pengelolaan maupun dari sisi teknis pertanian secara luas. Beberapa terobosan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Pengimplementasikan skema corporate farming bisa menjadi pilihan yang pada prinsipnya hampir sama dengan Koperasi Unit Desa (KUD) yang tidak begitu terlihat lagi perannya. Bentuk lain yang mungkin jadi pilihan adalah penguatan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) sebagai motor bagi masyarakat petani untuk meningkatkan posisi tawar di pasar pangan yang didominasi oleh tengkulak.
- b. Perlunya implementasi pertanian organik pada kawasan sentra pertanian dan pemanfaatan hasil pertanian organik.
- c. Gerakan untuk mengajak generasi muda untuk bertani bisa juga menjadi pilihan lain dengan fakta adanya bonus demografi dimana penduduk usia produktif lebih banyak berusia muda dengan median age 31 tahun.
- d. Sektor pariwisata di perdesaan juga bisa berkembang dengan mengawinkan kegiatan bertani dengan pengalaman wisata melalui pengembangan desa wisata di berbagai tempat. Selain itu pemanfaatan kawasan hutan produksi dengan mekanisme perhutanan sosial dapat juga menjadi alternatif skema ecowisata di kawasan perhutanan sosial.

Beberapa kebijakan di atas diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita daerah yang relatif berada di bawah rata-rata provinsi seperti Kabupaten Padang Pariaman, Kepulauan Mentawai, Sijunjung, Solok, Tanah Datar, Agam, Lima Puluh Kota, Solok Selatan, Dharmasraya, Pasaman Barat, Kota Solok, dan Kota Sawahlunto.

2. Kabupaten/Kota diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sektor industri dan perdagangan. Diperlukan terobosan-terobosan dan inovasi baru dalam meningkatkan nilai tambah produk di sektor industri dan perdagangan baik dari segi manajemen pengelolaan maupun dari sisi teknis secara luas. Beberapa terobosan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan standar mutu komoditas potensial dan diversifikasi komoditas perdagangan terutama komoditas ekspor. Hal ini perlu ditunjang dengan

perluasan implementasi digitalisasi perdagangan melalui penataan, pembinaan, dan pengembangan pasar digital.

- b. Meningkatkan dukungan sarana dan prasarana untuk sentra IKM serta penguatan SDM bagi pelaku IKM dan UMKM pada komoditas potensial. Hal ini perlu ditunjang oleh fasilitasi kemudahan investasi bagi investor lokal, nasional, maupun investor luar negeri.
- c. Penumbuhan wirausaha terutama wirausaha muda dan woman entrepreneur untuk dapat membuka lapangan usaha di komoditas potensial di sektor-sektor strategis.

Beberapa kebijakan di atas diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penurunan tingkat pengangguran daerah yang relatif berada di bawah rata-rata provinsi seperti Kabupaten Padang Pariaman, Kepulauan Mentawai, Sijunjung, Solok, Tanah Datar, Agam, Pasaman, Dharmasraya, Pasaman Barat, Kota Padang, Kota Sawahlunto, Kota Payakumbuh, dan Kota Pariaman.

3. Kabupaten/Kota diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sektor pariwisata dengan terobosan-terobosan dan inovasi baru dalam meningkatkan nilai tambah produk di sektor pariwisata baik dari segi manajemen pengelolaan maupun dari sisi teknis secara luas. Beberapa terobosan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:
 - a. Membangun dan mengembangkan industri pariwisata halal dengan peningkatan kualitas destinasi yang memenuhi aspek amenities, aksesibilitas, dan atraksi dengan penekanan pada manajemen pengelolaan destinasi yang bertumpu pada komunitas seperti desa wisata.
 - b. Meningkatkan kompetensi SDM pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif dalam rangka peningkatan kualitas produk pariwisata dan ekonomi kreatif.
 - c. Meningkatkan promosi pariwisata dan ekonomi kreatif dengan pemanfaatan teknologi Informasi serta memperkuat kemitraan Hexahelix.

Beberapa kebijakan di atas diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penurunan tingkat kemiskinan semua daerah yang relatif berada di bawah rata-rata provinsi.

6. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

A. Indikator Kinerja Makro

Indikator Makro merupakan indikator gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi maupun sosial di Sumatera Barat yang terdiri dari Pertumbuhan Ekonomi, PDRB ADHK2 Per Kapita, PDRB (ADHB) per kapita, Indeks Gini, Indeks Williamson (Indeks Ketimpangan Regional), Tingkat Kemiskinan, Penduduk Miskin, Tingkat pengangguran terbuka, dan Indeks Pembangunan Manusia.

Pertumbuhan ekonomi adalah indikator utama yang sangat penting untuk menjamin kesinambungan untuk menggerakkan pembangunan didaerah namun demikian pertumbuhan ekonomi yang berkualitas juga diiringi dengan peningkatan Indeks Membangun Manusia, penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka serta penurunan Tingkat Kemiskinan. Adapaun proyeksi indikator kinerja makro Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024-2025 sebagaimana dilihat pada tabel dibawah ini. Proyeksi indikator kinerja makro disusun mempertimbangkan hasil evaluasi terhadap capaian tahun 2022 dan perkiraan capaian tahun 2023 serta memperhatikan target Sumatera Barat dalam RKP tahun 2024, sehingga dalam penetapan target indikator kinerja makro tahun 2024 perlu dilakukan penyesuaian jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.

Tabel Indikator Kinerja Makro Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024-2025

No	Indikator Kinerja Makro	Sumber Data	TARGET KINERJA		
			2024		2025
			RPJMD	RKPD	RPJMD
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Data diolah	4,60	4,76	4,70
2	PDRB ADHK per Kapita (Rp. Juta)	Data diolah	34,09	34,85	35,29
3	PDRB ADHB per kapita (Rp. Juta)	Data diolah	53,69	59,88	56,13
4	Indeks Gini (Ratio)	Data diolah	0,293	0,290	0,289
5	Indeks Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)	Data diolah	0,308	0,316	0,307
6	Tingkat Kemiskinan (%)	Data diolah	6,03	5,62	5,90
7	Penduduk Miskin (ribu jiwa)	Data diolah	350,62	324,71	347,27
8	Tingkat pengangguran terbuka (%)	Data diolah	6,31	5,70	6,13
9	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Data diolah	73,70	74,25	74,16
	a. Angka Harapan Hidup (Tahun)	Data diolah	70,17	70,20	70,35
	b. Harapan Lama Sekolah (Tahun)	Data diolah	14,08	14,41	14,09
	c. Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	Data diolah	9,38	9,36	9,47
	d. Pengeluaran per Kapita (Ribu/Kapita/Tahun)	Data diolah	11.342	11.455	11.592

Sumber : RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dan hasil Analisa Bappeda 2023

B. Indikator Kinerja Utama

Pengukuran keberhasilan rencana pembangunan tahunan terutama dalam bingkai rencana pembangunan jangka menengah daerah dalam pencapaian Visi dan Misi RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2021-2026 tercermin dari capaian indikator kinerja utama yang ditetapkan. Untuk mengukur keberhasilan program pembangunan yang telah ditentukan maka dipilih Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target capaian selama lima tahun ke depan menurut tujuan dan sasaran pada setiap misi yang disajikan, berikut target Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk tahun 2024-2025 dalam tabel berikut :

Tabel Indikator Kinerja Utama Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 dan 2025

No	INDIKATOR	TARGET	
		2024	2025
Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			
1	Indeks Pembangunan manusia (IPM)	74,25	74,16
2	Angka Harapan Hidup (AHH)	70,20	70,35
3	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	14,00	12,50
4	Rata-rata lama sekolah	9,36	9,47
5	Harapan Lama Sekolah	14,41	14,09
6	Persentase Angkatan kerja berpendidikan menengah keatas	49,80	49,85
Misi 2 : Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adai Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah			
1	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	62,70	63,10
2	Indeks Ketahanan Sosial Budaya (Dimensi IPK BPS)	62,80	62,90
3	Indeks Pembangunan Literasi masyarakat	15	16
4	Indeks Pembangunan keluarga	63,46	65,54
5	Indek Pembangunan Gender (IPG)	94,60	95,00
6	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	61,20	61,75
7	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	66,05	66,15
Misi 3 : Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			
1	Persentase Peningkatan Pendapatan Petani (%)	5	5
2	Nilai Tukar Petani (NTP)	101,40	101,60
3	Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)	104,50	105,03
4	Pendapatan pembudidaya ikan (Rp. Jt)	50.048	51.549
5	Pendapatan nelayan (Rp. Jt)	42.443	43.292
6	Pendapatan Peternak (Rp. Jt)	52.779	55.418
7	Pendapatan petani tanaman pangan dan hortikultura (%)	5	5
8	Indeks Ketahanan Pangan	81,60	82,05
9	Peningkatan Pendapatan Petani Hutan (%)	5	5
Misi 4 : Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/ menengah serta ekonomi berbasis digital			
1	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	17,35	17,65
2	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (%)	9,02	9,15
3	Laju pertumbuhan sektor perdagangan (%)	1	1,01
4	Jumlah sentra industri kecil dan menengah (sentra)	390	401
5	Laju pertumbuhan ekonomi sub sektor koperasi (%)	2,23	2,28
6	Persentase peningkatan pendapatan pada usaha mikro dan kecil	3,8	4,5
7	Jumlah entrepreneur baru tercipta (orang)	150.658	173.711
8	Persentase peningkatan Investasi di provinsi (%)	9,50	10,50
9	Kontribusi Ekonomi Digital (%)	7,10	7,25

No	INDIKATOR	TARGET	
		2024	2025
Misi 5 : Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan			
1	Persentase Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat dari Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	15,25	16,85
2	Persentase Kontribusi Pariwisata pada PDRB (%)	1,25	1,26
3	Persentase Kontribusi Ekonomi Kreatif pada PDRB (%)	6,10	6,18
Misi 6 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			
1	Indeks Kinerja Infrastruktur	0,756	0,786
2	Rasio Konektivitas (Rasio)	0,684	0,691
3	Kemantapan Jalan (%)	79,00	81,00
4	Indeks Ketahanan Daerah (Indeks)	0,64	0,65
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks)	78,41	78,81
6	Akses Air Minum (%)	86,00	88,00
7	Akses Sanitasi Layak (%)	86,00	88,00
8	Persentase Bangunan Strategis Terbangun (%)	66,67	83,33
9	Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi (%)	73,48	75,04
10	Persentase Volume tampungan sumber-sumber air (%)	56,78	58,28
11	Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air (%)	70,03	71,79
12	Persentase Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW (%)	88,00	89,00
Misi 7 : Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas			
1	Indeks reformasi birokrasi	70,50	71,00
2	Nilai SAKIP (predikat)	BB	BB
		(78,50)	(79,00)
3	Nilai EPPD (skor)	3,003	3,004
4	Opini laporan keuangan (opini)	WTP	WTP
5	Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	39,56	40,75
6	Indeks SPBE (indeks)	3,40	3,50
7	Indeks Profesionalitas ASN (indeks)	78,00	80,00
8	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (indeks)	87	88

Sumber : RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

C. Indikator Kinerja Daerah

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah khususnya dalam pemenuhan kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan umum dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang

bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcome) atau komposisinya (impact). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode 2021-2026 yang telah direncanakan. Ukuran keberhasilan/pencapaian suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja dimaksud juga diperlukan publik dalam rangka perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Selanjutnya, indikator kinerja daerah dibagi menjadi 3 (tiga) aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah. Aspek kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator makro yang merupakan indikator gabungan dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi sosial. Aspek Pelayanan Umum merupakan segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan atau urusan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti infrastruktur dasar baik secara fisik maupun sosial. Aspek Daya Saing Daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

Indikator Kinerja Daerah Provinsi Sumatera Barat Bidang Perekonomian tersebut secara rinci disajikan pada tabel berikut :

**Tabel Indikator Kinerja Daerah Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2024 dan 2025 Bidang Perekonomian**

No	Indikator Kinerja Kunci	Sumber Data	Target	
			2024	2025
I.	URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
17.	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			
	a. Persentase Koperasi yang berkualitas	Dinas Koperasi dan UKM	24,39	29,21
	b. Persentase Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	Dinas Koperasi dan UKM	3,7	4,2
18.	Urusan Penanaman Modal			

No	Indikator Kinerja Kunci	Sumber Data	Target	
			2024	2025
	Persentase peningkatan investasi di provinsi (%)	DPMPSTSP	9,5	10,5
III.	URUSAN PILIHAN			
26.	Urusan Pariwisata			
	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan (%)	Dinas Pariwisata	1,5	1,5
	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke provinsi (%)	Dinas Pariwisata	1,5	1,5
	Tingkat hunian akomodasi (%)	Dinas Pariwisata	50,3	55,25
30.	Urusan Perdagangan			
	Pertumbuhan Nilai Ekspor non migas (Rp. Juta)	Dinas Perindag	1478,4	1507,97
	Persentase penanganan pengaduan konsumen (%)	Dinas Perindag	89	90
	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku (%)	Dinas Perindag	26	26
	Tertib Usaha	Dinas Perindag	67	68
	Persentase kinerja realisasi pupuk (%)	Dinas Perindag	27,5	27
	Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (%)	Dinas Perindag	76	78
	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok (%)	Dinas Perindag	6	6
31.	Urusan Perindustrian			
	Persentase pertambahan jumlah industri besar di provinsi (%)	Dinas Perindag	0,41	0,41
	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP (%)	Dinas Perindag	0,13	0,13
	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait (%)	Dinas Perindag	86	88
	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin perluasan Industri (IPI) bagi Industri Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait (%)	Dinas Perindag	92	94
	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perindag	90	90

No	Indikator Kinerja Kunci	Sumber Data	Target	
			2024	2025
	dalam 1 (satu) Provinsi yang dikeluarkan oleh instansi terkait (%)			
	Persentase informasi industri yang tersedia secara lengkap dan terkini (%)	Dinas Perindag	90	90
	Nilai produksi Industri Kecil dan Menengah (IKM) (Rp.Triliun)	Dinas Perindag	16,3	16,7
	Jumlah pelaku industri kecil dan menengah (unit usaha)	Dinas Perindag	45.363	47.673
IV	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			
33.	Unsur Sekretariat Daerah			
	Jumlah rumusan kebijakan perekonomian yang ditetapkan (dokumen)	Biro Perekonomian	7	7
	Persentase Kebijakan perekonomian pusat yang diimplementasikan oleh pemprov (%)	Biro Perekonomian	93	94
	Persentase Kebijakan perekonomian pusat dan pemprov yang diimplementasikan oleh pemerintah kabupaten/kota (%)	Biro Perekonomian	93	94
V	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
35	Unsur Perencanaan			
	Indeks kualitas perencanaan	Bappeda	81	85
36	Unsur Keuangan			
	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	BPKAD	8,35	8,27
	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	BPKAD	3,8	3,6
	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	BPKAD	3,55	3,54
	Manajemen Aset	BPKAD	100	100
	Rasio anggaran SiLPA terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	BPKAD	3,57	3,53
	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	BPKAD	100	100
	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	BPKAD	87,24	87,55
	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	BPKAD	WTP	WTP
	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (%)	BPKAD	100	100
	Rasio PAD terhadap PDRB (%)	Bapenda	1,85	1,88
	Persentase Peningkatan PAD (%)	Bapenda	7,2	7,2

Sumber : RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

2.3. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 (Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 20 tahun 2023)

1. Pendahuluan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023 yang sedang dilaksanakan merupakan hasil dari proyeksi ke depan dengan asumsi-asumsi yang diperkirakan akan terjadi. Sejalan dengan pelaksanaan APBD Tahun 2023 tersebut, ditemui beberapa hal yang sudah tidak sejalan lagi dengan asumsi-asumsi yang melatarbelakangi penyusunannya. Hal ini apabila tetap dilanjutkan, dapat menimbulkan ketidaksinkronan program, kegiatan dan sub kegiatan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

Untuk melakukan perubahan pada APBD Tahun 2023, perlu dilakukan perubahan terlebih dulu terhadap RKPD Tahun 2023 yang menjadi acuan dalam penyusunan APBD. Hal ini diatur lebih lanjut pada Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 343 Permendagri 86 Tahun 2017 menyatakan bahwa Perubahan RKPD dan Perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi :

1. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan;
2. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Namun berdasarkan pasal 343 ayat 4 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tersebut juga menyatakan bahwa perubahan RKPD dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, kebijakan Pemerintah Daerah, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan.

Berdasarkan hasil evaluasi tahun berjalan, maka Perubahan RKPD 2023 dilakukan dengan alasan :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah

- Berdasarkan capaian tahun 2022 serta memperhatikan capaian perkembangan pelaksanaan pembangunan, maka terdapat beberapa target yang telah tercapai sehingga perlu dilakukan penyesuaian target. Hal ini untuk menjaga optimisme pelaksanaan pembangunan serta meningkatkan kualitas hasil pembangunan.
2. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah
Beberapa indikator makro kinerja pembangunan Daerah pada tahun berjalan yakni tahun 2023 telah dirilis dengan kondisi Triwulan I oleh BPS antara lain Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran. Sehingga berdasarkan capaian tahun berjalan tersebut akan merubah asumsi target indicator makro pembangunan hingga akhir tahun 2023 sebagaimana yang telah di tetapkan dalam RKPD Tahun 2023
 3. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi keuangan daerah
Antara lain yakni perkembangan capaian Pendapatan Asli Daerah yang di proyeksikan tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada APBD 2023 serta meningkatnya kebutuhan belanja daerah yang bersifat mengikat dan wajib yang belum dianggarkan sepenuhnya pada APBD 2023 serta adanya kebutuhan mendesak yang merupakan prioritas nasional salah satunya dengan telah dimulainya tahapan persiapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024.
 4. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan
Berdasarkan hasil evaluasi hasil RKPD Tahun 2023 Triwulan II terdapat beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan yang capaiannya masih rendah dan diprediksikan tidak dapat tercapai secara maksimal hingga akhir tahun serta terdapat beberapa sub kegiatan yang juga dengan capaian yang sangat tinggi dan terdapat beberapa sub kegiatan yang tidak tercapai sama sekali karena tidak dianggarkan pada APBD Tahun 2023. Terhadap hal tersebut maka perlu disesuaikan kembali asumsi rencana yang telah disusun agar pada akhir tahun seluruh target yang direncanakan dapat tercapai secara maksimal dan efektif serta efisien.
Selian itu, terdapat belanja yang sifatnya wajib dan mengikat yang pada APBD 2023 belum dianggarkan secara maksimal 12 bulan, sehingga perlu untuk dilakukan penyesuaian anggaran antar sub kegiatan kembali.
 5. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan
Berdasarkan hasil audit BPK RI terhadap Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022 bahwa terdapat selisih SILPA dari yang diproyeksikan pada APBD 2023, sehingga terhadap hal ini perlu dilakukan penyesuaian pada Perubahan RKPD 2023.

Pada APBD 2023, diproyeksikan SILPA Tahun 2022 yang dapat digunakan pada tahun 203 sebesar Rp.350.000.000.000, namun berdasarkan hasil audit BPK RI, SILPA Tahun Anggaran 2022 hanya sebesar Rp. 289.279.692.879, sehingga terdapat selisih defisit sebesar Rp.60.720.307.121. mengingat SILPA yang didapatkan lebih kecil dari proyeksi APBD 2023 maka tentunya akan terjadi rasionalisasi dan penyesuaian belanja, hal ini guna meminimalkan serta menghindari kemungkinan pelaksanaan pekerjaan/kegiatan yang gagal bayar dikarenakan tidak tersedianya anggaran pada Kas Daerah.

6. Adanya kebijakan nasional, kebijakan pemerintah daerah, keadaan darurat, keadaan luar biasa dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Setelah penetapan RKPD Tahun 2023, terdapat beberapa kebijakan nasional, kebijakan pemerintah daerah, keadaan darurat dan luar biasa serta perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD Tahun 2023 ditetapkan, yang keluar dan harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang berdampak pada terjadinya perubahan asumsi rencana pelaksanaan kegiatan dan keuangan daerah, antara lain yakni :

- a. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 212/PMK.07/2022, tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya, maka Dana Alokasi Umum yang semula secara prinsip dasar seluruh alokasi Dana Alokasi Umum dapat bebas digunakannya oleh Pemerintah Daerah dirubah menjadi Dana Alukasi Umum yang ditentukan penggunaannya dan Dana Alokasi Umum yang tidak ditentukan penggunaannya, hal ini sesuai mandat dari Pasal 130 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah serta Pasal 11 ayat (13) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023
- b. Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kab/Kota, mengakibatkan terjadinya perubahan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat dan Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sehingga perlu dilakukan penyesuaian pengalihan alokasi anggaran beberapa sub kegiatan.
- c. adanya penyesuaian penganggaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera

Barat dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat serta tindak lanjut hasil rapat koordinasi diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri tanggal 9 Februari 2023 yang memerintahkan percepatan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai.

- d. ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2023 yang mengakibatkan perubahan sub kegiatan yang mengakomodir Dana Alokasi Khusus.
- e. Surat dari Markas Besar TNI Nomor B/72-12/07/86/AKD perihal Dukungan Fasilitasi Pada Rangkaian Kegiatan Latsitarda Nusantara XLIII/2023, yang menunjuk Provinsi Sumatera Barat sebagai Tuan Rumah pelaksanaan Latsitardanus Tahun 2023, sehingga mengakibatkan pergeseran anggaran dari Bantuan Tidak Terduga kepada Belanja mendukung Program dan Kegiatan yang diletakkan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik guna memfasilitasi Upacara Penerimaan dan Pelepasan/Perpisahan Peserta Latsitardanus, hal ini dilakukan karena penunjukkan tersebut baru disampaikan oleh Markas Besar TNI pada awal Tahun 2023 setelah penetapan APBD Tahun 2023.
- f. Adanya pelaksanaan peringatan Hari Koperasi Nasional Tingkat Provinsi Sumatera Barat, yang pada APBD Tahun 2023 belum dianggarkan sehingga mengakibatkan dilakukannya perubahan penjabaran APBD Tahun 2023.

Sehingga arah kebijakan perubahan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 yakni :

1. Penyesuaian target kinerja indikator pembangunan daerah tahun 2023.
2. Pergeseran, penghapusan, penambahan anggaran dan kegiatan, perubahan lokasi pelaksanaan kegiatan, target kinerja kegiatan, serta manfaat atau hasil daripada kegiatan.
3. Penyesuaian pendapatan baik dana transfer maupun PAD, pemanfaatan Silpa berdasarkan hasil audit laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 oleh BPK.
4. Mengakomodir kewajiban kebijakan anggaran yang belum terpenuhi pada penyusunan APBD Tahun 2023 sebagai tindak lanjut dengan adanya beberapa regulasi dari Pemerintah.
5. Pelaksanaan even – even nasional yang dilaksanakan di daerah.
6. Meningkatkan Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan kelas jabatan dengan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.

7. Evaluasi pelaksanaan RKPD triwulan II Tahun 2023.

2. Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun 2023

a. Capaian Indikator Makro sampai Triwulan II Tahun 2023

Indikator makro pada Tahun 2023 merupakan indikator kinerja utama Gubernur yang menjadi alat ukur ketercapaian visi dan misi sebagai periode kedua RPJMD Tahun 2021-2026. Capaian indikator makro pembangunan Sumatera Barat sampai dengan Triwulan I-2023 menggambarkan kinerja aspek pembangunan manusia yang diwakili oleh indikator Indeks Pembangunan Manusia dan aspek Pembangunan Ekonomi yang diwakili oleh indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Gini, dan Tingkat Kemiskinan sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel Target dan Realisasi Indikator Makro sampai Triwulan II Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2023		Realisasi 2023 Triwulan II
		RPJMD	RKPD	
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,57	4,65	4,80 (Mei 2023)
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,45	5,72	5,90 (Feb 2023)
3	Indeks Pembangunan Manusia (Poin)	73,23	73,46	73,26 (2022)
4	Kemiskinan (%)	6,16	5,37	5,95
5	Gini Ratio (Poin)	0,296	0,296	0,280

Sumber: Perda No 6 Tahun 2021 tentang RPJMD 2021-2026, Pergub No 18 Tahun 2022 tentang RKPD 2023 dan Publikasi BPS Sumatera Barat Tahun 2022 dan 2023.

Ekonomi Sumatera Barat triwulan I-2023 dibanding triwulan I-2022 (y-on-y) mengalami pertumbuhan sebesar 4,80 persen. Pertumbuhan terjadi hampir pada semua lapangan usaha kecuali dua lapangan usaha yang mengalami kontraksi yaitu lapangan usaha Pertambangan dan Pengalihan terkontraksi sebesar 0,90 persen dan Pengadaan Air terkontraksi 1,47 persen. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah Jasa Lainnya sebesar 9,98 persen, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 9,70 persen dan Informasi dan Komunikasi sebesar 7,96 persen.

Sementara itu, Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang memiliki peran dominan juga mengalami pertumbuhan sebesar 4,85 persen. Struktur PDRB Sumatera Barat menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku triwulan I 2023 tidak menunjukkan perbedaan yang mencolok. Perekonomian Sumatera Barat masih didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 20,97 persen; diikuti oleh Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 16,63 persen; Transportasi dan Pergudangan

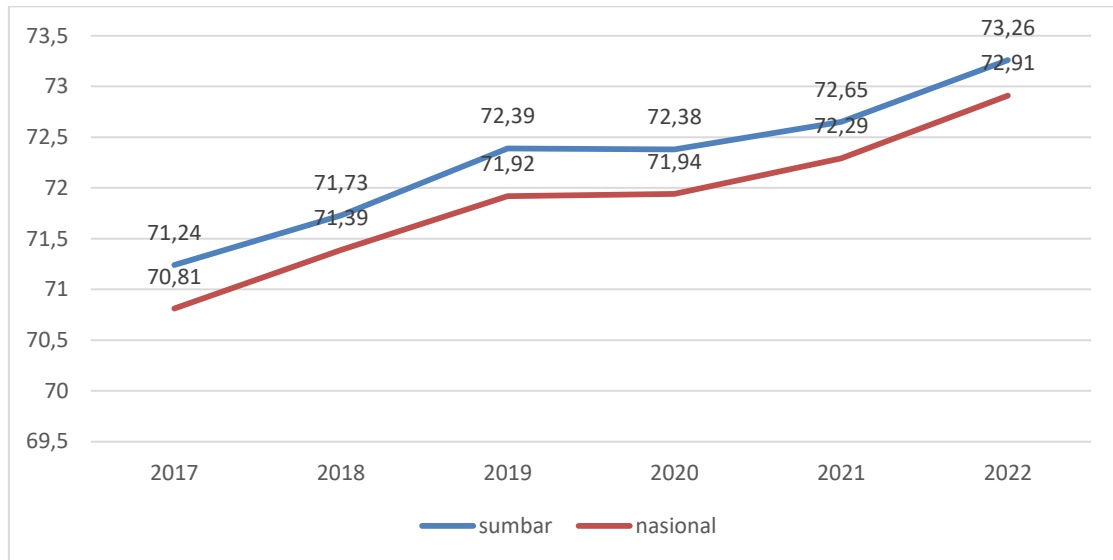
sebesar 11,22 persen; Konstruksi sebesar 10,05 persen; dan Industri Pengolahan 8,41 persen. Peranan kelima lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Sumatera Barat mencapai 67,29 persen.

Dari sisi pengeluaran, Pertumbuhan tersebut didukung oleh seluruh komponen pengeluaran. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 7,97 persen; diikuti oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 7,83 persen; Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 7,08 persen; Komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT (PK-LNPRT) sebesar 4,10 persen; dan Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 3,40 persen. Perlu digaris bawahi, meskipun Komponen Impor Barang dan Jasa tumbuh sebesar 9,55 persen, namun komponen ini merupakan faktor pengurang dalam PDRB menurut pengeluaran, sehingga tidak dapat disebut sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi.

Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sumatera Barat pada Trwulan II tahun 2023 tidak tersedia di BPS, hal ini dikarenakan pengurangan capaian IPM hanya menggunakan periode tahunan, sehingga masih menggunakan data capaian tahun 2022 yang mencapai 73,26, yang meningkat 0,61 poin (0,84 persen) dibandingkan capaian tahun sebelumnya yakni 2021 sebesar 72,6). Data dari tahun 2016 hingga tahun 2022 menunjukkan bahwa IPM Provinsi Sumatera Barat relatif meningkat dari tahun ke tahun dan selalu berada di atas rata-rata Nasional.

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021, maka peningkatan IPM 2022 terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada tahun 2022 memiliki harapan untuk hidup hingga 69,90 tahun, lebih lama 0,31 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Pada dimensi pendidikan, penduduk berusia 7 tahun memiliki harapan lama sekolah selama 14,10 tahun. Angka ini meningkat 0,01 tahun dibandingkan tahun 2021 yang mencapai 14,09 tahun. Sementara itu, rata-rata lama sekolah penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat 0,11 tahun, dari 9,07 tahun menjadi 9,18 tahun pada tahun 2022. Pada dimensi hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita (yang disesuaikan) meningkat dari 10,79 juta tahun 2021 menjadi 11,13 juta pada tahun 2022.

Perkembangan Indikator IPM Provinsi Sumatera Barat juga menunjukkan hasil menggembirakan jika disandingkan dengan capaian Nasional, dimana selalu meningkat dari tahun ke tahun diatas rata-rata nasional. Perbandingan IPM Sumatera Barat dan Nasional dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Grafik Perbandingan IPM Provinsi Sumatera Barat dengan Nasional Tahun 2017-2022

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

Penduduk usia kerja merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja mengalami tren yang cenderung meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk di Sumatera Barat. Penduduk usia kerja pada Februari 2023 sebanyak 4,29 juta orang, naik sebanyak 64,71 ribu orang dibanding Februari 2022. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja sebanyak hampir 3 juta orang (69,96 persen), sisanya termasuk bukan angkatan kerja.

Komposisi angkatan kerja pada Februari 2023 terdiri dari 2,82 juta orang penduduk yang bekerja dan 176,97 ribu orang pengangguran. Apabila dibandingkan Februari 2022 jumlah angkatan kerja meningkat sebanyak 127,69 ribu orang. Penduduk bekerja naik sebanyak 127,94 ribu orang dan pengangguran turun sebanyak 0,25 ribu orang.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah. TPAK Sumatera Barat pada Februari 2023 sebesar 69,96 persen, naik 1,95 persen poin dibanding Februari 2022.

Komposisi penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama dapat menggambarkan struktur tenaga kerja di pasar kerja. Berdasarkan hasil Sakernas Februari 2023, tiga lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga kerja paling banyak di Sumatera Barat adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yaitu sebesar 28,36 persen; Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 19,83 persen; dan

Industri Pengolahan sebesar 9,42 persen. Pola lapangan pekerjaan dalam menyerap tenaga kerja ini masih sama dengan Februari 2022.

Tiga kategori lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan penyerapan tenaga kerja terbesar jika dibandingkan dengan Februari 2022 adalah Akomodasi dan Makan Minum (1,38 persen poin); Jasa Keuangan, Asuransi, dan Real Estate (0,88 persen poin); dan Jasa Pendidikan (0,87 persen poin). Sementara tiga lapangan pekerjaan yang mengalami penurunan penyerapan tenaga kerja terbesar adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (3,56 persen poin); Perdagangan Besar dan Eceran (2,37 persen poin); dan Informasi dan Komunikasi (0,43 persen poin).

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT Sumatera Barat hasil Sakernas Februari 2023 sebesar 5,90 persen. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar enam orang penganggur. Pada Februari 2023, TPT mengalami penurunan sebesar 0,27 persen poin dibandingkan Februari 2022.

Tabel Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama Tahun 2020-2023

Jenis Kegiatan Utama	Satuan	2020		2021		2022		2023
		Feb	Agt	Feb	Agt	Feb	Agt	Feb
1. Penduduk Usia Kerja	Ribu Org	3.986,24	4.016,78	4.047,44	4.077,63	4.222,98	4.138,95	4.287,70
2. Angkatan Kerja	Ribu Org	2.900,09	2.772,13	2.768,67	2.761,39	2.871,63	2.868,27	2.999,51
• Bekerja	Ribu Org	2.747,82	2.581,52	2.584,12	2.581,44	2.694,60	2.688,16	2.822,54
• Pengangguran	Ribu Org	152,27	190,61	184,56	179,95	177,21	180,11	176,97
3. Bukan Angkatan Kerja	Ribu Org	1.086,16	1.244,64	1.278,77	1.316,24	1.351,35	1.270,68	1.288,19
4. Tingkat Pengangguran terbuka (TPT)	%	5,25	6,88	6,67	6,52	6,17	6,28	5,90
• Perkotaan	%	6,45	9,27	9,81	8,65	8,27	9,54	8,00
• Perdesaan	%	4,14	4,71	3,80	4,50	4,23	3,26	4,01
5. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	68,41	69,01	68,41	67,72	68,00	69,30	69,96
• Laki-laki	%	83,58	82,08	81,25	80,67	80,55	82,58	81,34
• Perempuan	%	62,19	56,24	55,85	55,04	55,43	56,28	58,52

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat 2023

Terdapat 39,74 ribu orang (0,93 persen) penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19. Terdiri dari pengangguran karena COVID-19 (7,85 ribu orang), Bukan

Angkatan Kerja (BAK) karena COVID-19 (6,33 ribu orang), dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19 (25,56 ribu orang). Selain itu, tercatat sudah tidak ada penduduk yang sementara tidak bekerja karena COVID-19.

Sementara itu Indikator ketimpangan yang ditunjukkan dengan capaian Gini Ratio pada kondisi Maret tahun 2023 terpantau membaik dibandingkan tahun 2022 kondisi September. Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Sumatera Barat yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,280. Angka ini menurun jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,292. Sementara jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 (0,300), tercatat penurunan sebesar 0,020 poin.

Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,305, turun sebesar 0,011 poin dibandingkan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,316. Dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022, tercatat turun 0,024 poin dimana Gini Ratio Maret 2022 sebesar 0,329.

Sementara itu, Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,232, atau turun sebesar 0,011 poin dibanding angka September 2022 sebesar 0,243, dan turun sebesar 0,015 poin terhadap Gini Ratio Maret 2022 yang tercatat sebesar 0,247. Pada Maret 2023, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 23,73 persen.

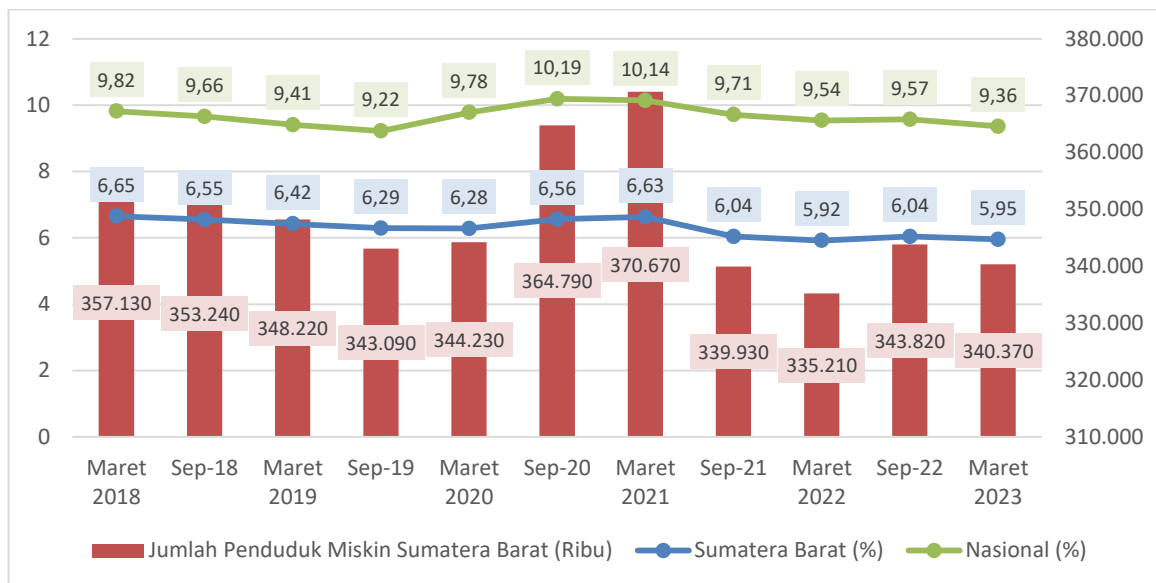
Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 22,48 persen, sedangkan perdesaan mencatat angka yang lebih tinggi, yaitu sebesar 25,90 persen. Artinya, baik di daerah perkotaan maupun perdesaan di Sumatera Barat termasuk dalam kategori ketimpangan rendah.

Berdasarkan data BPS Provinsi Sumatera Barat, bahwa pada bulan Maret 2023, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Sumatera Barat mencapai 340,37 ribu orang (5,95 persen), berkurang sebesar 3,45 ribu orang dibandingkan dengan kondisi September 2022 yang sebesar 343,82 ribu orang.

Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2022 sebesar 4,90 persen turun menjadi 4,67 persen pada Maret 2023. Sementara persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada September 2022 sebesar 7,20 persen naik menjadi 7,23 persen pada Maret 2023. Selama periode September 2022 - Maret 2023, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan turun sebanyak 6,54 ribu orang (dari 140,33 ribu orang pada September 2022 menjadi 133,79 ribu orang pada Maret 2023), sementara pada periode yang sama jumlah penduduk miskin di perdesaan naik sebanyak 3,08 ribu orang (dari 203,49 ribu orang pada September 2022 menjadi 206,57 ribu orang pada Maret 2023).

Peranan komoditas makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditas bukan makanan. Sumbangan Garis Kemiskinan Makanan terhadap Garis Kemiskinan pada Maret 2023 tercatat sebesar 75,91 persen. Tiga jenis komoditas makanan yang berpengaruh paling besar terhadap nilai Garis Kemiskinan adalah beras, rokok kretek filter, cabe merah (di perkotaan dan di perdesaan). Sementara itu lima komoditas bukan makanan yang paling dominan adalah biaya perumahan, bensin, listrik, pendidikan, dan perlengkapan mandi.

**Grafik Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin di Provinsi Sumatera Barat
Maret 2018 – Maret 2023 (tambahkan capaian Sept 2022 dan Maret 2023)**



Sumber : Badan Pusat Statistik

3. Kerangka Ekonomi Dan Keuangan Daerah

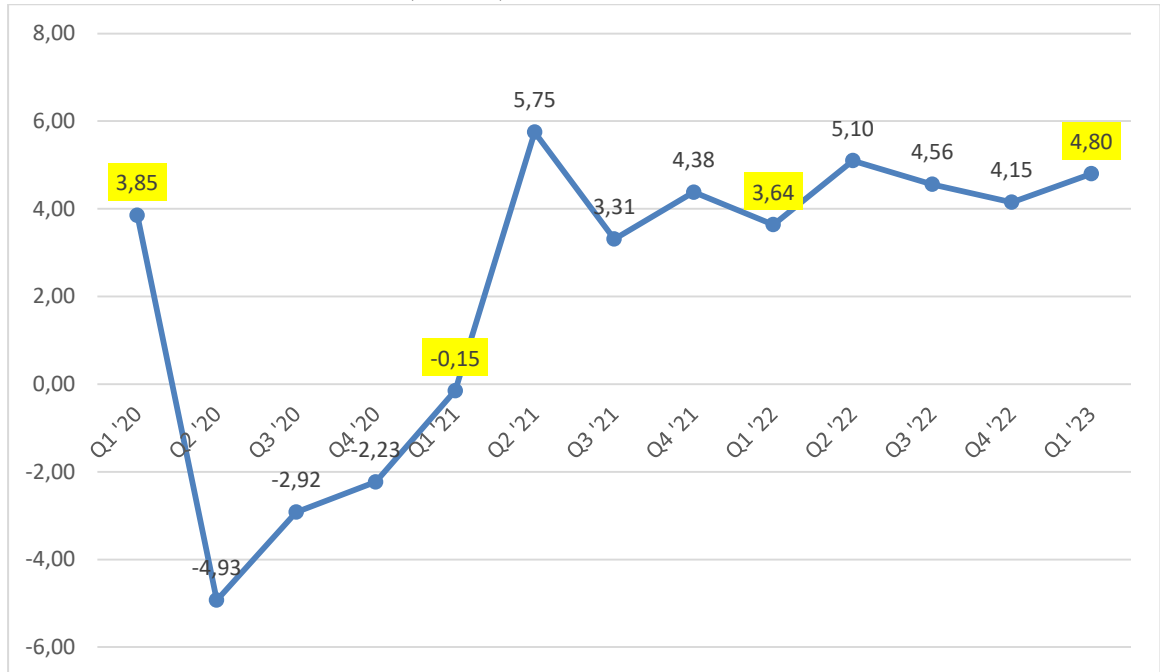
a. Arah Kebijakan Kerangka Ekonomi

❖ Pertumbuhan Ekonomi

Kondisi perekonomian Provinsi Sumatera Barat dilihat berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku untuk triwulan I tahun 2023 mencapai Rp. 76,28 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp. 46,66 triliun. Ekonomi Sumatera Barat triwulan I-2023 tumbuh 4,80 persen (y-on-y) dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya sebesar 3,64 persen. Pertumbuhan yang terjadi terutama disebabkan oleh peningkatan aktivitas perekonomian masyarakat pasca pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 yang meluas sepanjang tahun 2020 hingga tahun 2022 menekan laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat. Perekonomian

Sumatera Barat pada triwulan I 2023 berkembang lebih pesat dibandingkan triwulan sebelumnya berupa pada level 4,15% (y-on-y).

**Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat
Triwulanan (Y-on-Y) Tahun 2020-2023**

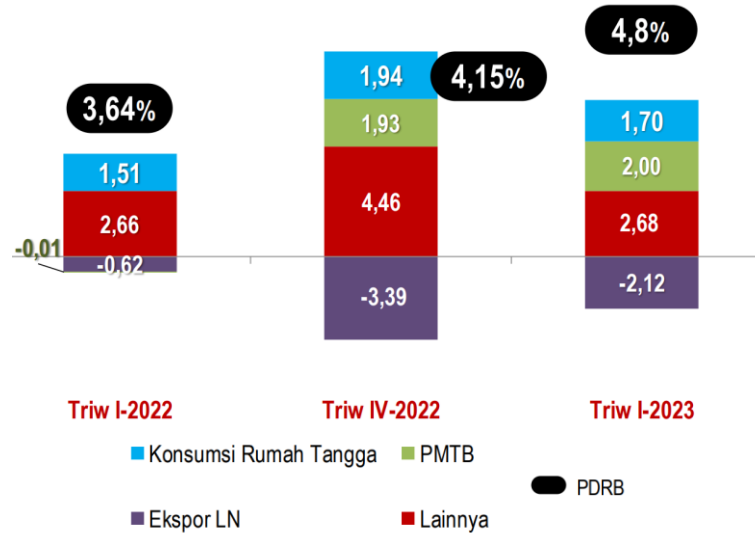


Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan pengeluaran, pertumbuhan PDRB dari sisi pengeluaran tertinggi triwulan I-2023 (y-o-y) berada pada komponen pengeluaran pemerintah yang tumbuh 7,97% disusul oleh komponen komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang tumbuh 7,08%. Sementara untuk komponen ekspor terkontraksi pada triwulan I-2023 hingga 13,97%. Untuk triwulan I-2023 sumber pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat tertinggi dari sisi pengeluaran yaitu komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga yang mencapai angka 1,70% (y-o-y), disusul oleh komponen PMTB sebesar 2,00%.

Perlambatan pertumbuhan ekonomi dari komponen ekspor terjadi akibat penurunan volume pada sebagian besar komoditi ekspor utama yaitu lemak dan minyak hewan, garam belerang dan kapur, kopi teh dan rempah-rempah, serta sari bahan samak dan celup.

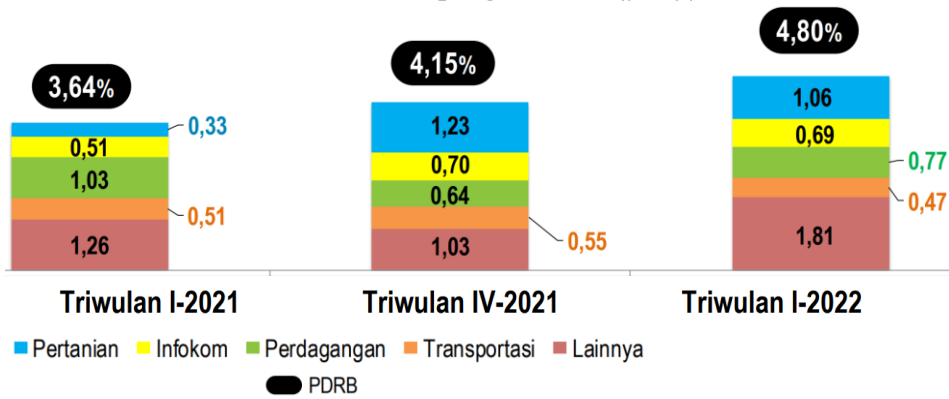
Gambar Sumber Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat menurut Pengeluaran Triwulan I 2023 (y-o-y)



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat

Dari sisi Lapangan Usaha (LU), pertumbuhan ekonomi ditopang oleh pertumbuhan pada tiga sektor penopang utama, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, sektor informasi dan komunikasi, sektor perdagangan besar dan eceran, dan sektor transportasi dan pergudangan. Pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 4,85% (y-o-y) ditopang oleh produksi pertanian diantaranya produksi tanaman sayur-sayuran, perkebunan, peternakan dan perikanan. Pertumbuhan sektor Informasi dan komunikasi sebesar 7,96% (y-o-y) disebabkan oleh meningkatnya aktivitas perekonomian di sosial media (konten kreator, e-commerce, dll). Pertumbuhan sektor perdagangan sebesar 4,58% (y-o-y) ini disebabkan oleh peningkatan volume pembelian kendaraan baru baik mobil maupun sepeda motor serta peningkatan aktivitas Persiapan ramadhan dan lebaran meningkatkan aktivitas perekonomian pada berbagai sektor ekonomi untuk menyambut diaspora Sumatera Barat. LU transportasi dan pergudangan tumbuh 4,46% (y-o-y), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,40% (y-o-y). Hal ini diakibatkan oleh peningkatan aktivitas pergerakan masyarakat terutama pada angkutan udara. Sektor ekonomi yang berkontraksi tinggi pada triwulan I-2023 ini diantaranya sektor pertambangan sebesar -0,90% (y-o-y) dan sektor pengadaan air sebesar -1,47% (y-o-y).

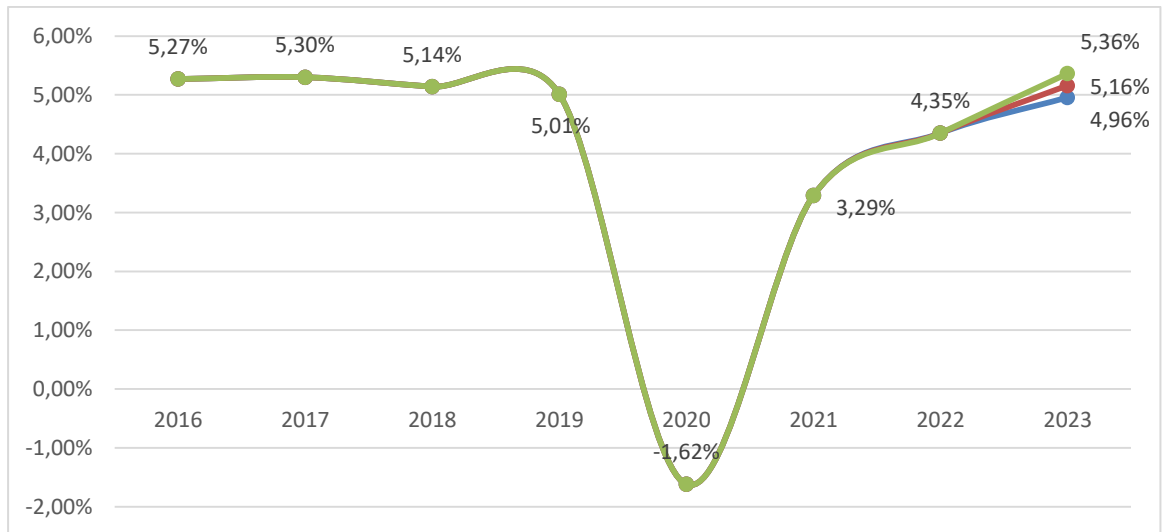
Gambar Sumber Pertumbuhan PDRB Triwulanan Menurut Lapangan Usaha (y-o-y)



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat

Pada triwulan II 2023, ekonomi Sumatera Barat diperkirakan akan kembali tumbuh lebih tinggi menjadi sebesar 4,9 - 5,1% (y-o-y) akibat peningkatan aktivitas masyarakat terutama puasa bulan Ramadhan hingga perayaan hari besar keagamaan yaitu Idul Fitri dalam bentuk aktivitas mudik yang akan lebih meningkat dengan status pandemi COVID-19 yang sudah dicabut. Di sisi permintaan domestik, konsumsi diperkirakan akan meningkat dipengaruhi peningkatan pendapatan masyarakat dan keyakinan konsumen. Investasi turut meningkat seiring dengan berjalannya beberapa proyek strategis nasional. Dari sisi ekspor perlu mendapat perhatian khusus mengingat pertumbuhan komponen ekspor dari triwulan I tahun 2022 hingga triwulan I tahun 2023 selalu berkontraksi secara year on year. Dari sisi sektoral, kinerja sektor pariwisata (LU perdagangan besar dan eceran, LU transportasi dan pergudangan, dan LU penyediaan akomodasi dan makan minum) diperkirakan akan meningkat seiring dengan pencabutan status pandemi COVID-19 oleh WHO. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat triwulan II 2023 diperkirakan berada pada kisaran 4,9% - 5,1% (y-o-y) lebih tinggi dari realisasi pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 2023 sebesar 4,80%, dan berada pada kisaran yang sama pada periode yang sama tahun 2022 sebesar 5,1% (y-o-y).

**Grafik Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2016-2022 dan Prediksi Tahun 2023**



Secara keseluruhan, perekonomian Sumatera Barat diperkirakan akan tumbuh pada rentang 4,96% - 5,36% (y-o-y) di tahun 2023 meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2022 sebesar 4,35% (y-o-y). Secara umum, peningkatan pertumbuhan ekonomi 2023 didorong oleh bounce back effect akibat pandemi COVID-19. Peningkatan dari sisi permintaan terutama terjadi pada peningkatan konsumsi rumah tangga, peningkatan investasi dan permintaan impor.

b. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

❖ Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah sebagai salah satu sumber pembiayaan dalam pembangunan daerah, akan sangat menentukan berhasil atau tidaknya setiap program dan kegiatan pembangunan yang sudah di rencanakan oleh pemerintah daerah. Untuk menyikapi hal ini diperlukan berbagai upaya kebijakan agar pendapatan bisa meningkat dan likuiditas keuangan daerah tetap terjamin sehingga kegiatan pembanguan daerah dapat terus berjalan. Kebijakan sebagaimana dimaksud adalah kebijakan untuk Peningkatan Kualitas Pengelolaan Pendapatan Daerah Yang Bersih dan Akuntabel. Dengan demikian, arah kebijakan Pendapatan Daerah dalam APBD-P 2023 adalah:

1. Mengoptimalkan kinerja Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT)
2. Mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan Retribusi Jasa Umum, Jasa Usaha dan Perizinan Tertentu pada seluruh OPD Dinas/Instansi pengelola pelayanan Retribusi.
3. Meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan pada kantor OPD Dinas/Instansi pelayanan Retribusi dengan melengkapi sarana dan prasarana pelayanan,

- melakukan pemeliharaan dan perbaikan kantor secara berkala, dan bertahap dan melengkapi seluruh peralatan sistem pelayanan.
4. Mengoptimalkan aset-aset pemerintah daerah yg masih idle dan berpotensi sebagai sumber penerimaan dengan cara kerjasama pemanfaatan dengan pihak lain sehingga memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.
 5. Meningkatkan kinerja dan pelayanan seluruh OPD Dinas/Instansi yang berkaitan dengan penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terutama OPD Dinas/Instansi Pengelola BLUD, Pengelola Keuangan dan Kas Daerah, Pengelola Pelayanan Persampahan dan Limbah B3, Pengelola Pendidikan dan Pelatihan, Pengelola Pertanian dan Peternakan dan lain-lain sehingga dapat meningkatkan penerimaan dan berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
 6. Meningkatkan koordinasi, konfirmasi dan rekonsiliasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka peningkatan penerimaan dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.
 7. Meningkatkan Koordinasi dan konfirmasi dengan Pemerintah Pusat dan Pihak Swasta dalam rangka peningkatan penerimaan DID, IPDMIP, PHJD, Hibah dan lainnya serta sumbangan Pihak Ketiga.

**Tabel Proyeksi Target Perubahan Pendapatan
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 (juta rupiah)**

Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)	
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
PENDAPATAN DAERAH				
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	3.030.460.024.217	3.030.460.024.217	0	0%
Pajak Daerah	2.407.806.737.844	2.407.806.737.844	0	0%
Retribusi Daerah	22.691.509.656	22.691.509.656	0	0%
Hasil Pengelolaan Kekayaa Daerah yang Dipisahkan	115.937.386.402	115.937.386.402	0	0%
Lain-lain PAD yang Sah	484.024.390.315	484.024.390.315	0	0%
Pendapatan Transfer	3.412.828.601.000	3.412.828.601.000	0	0%
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.384.896.381.000	3.384.896.381.000	0	0%
Pendapatan Transfer Antar Daerah	27.932.220.000	27.932.220.000	0	0%
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	15.972.060.000	15.972.060.000	0	0%
Pendapatan Hibah	15.972.060.000	15.972.060.000	0	0%
JUMLAH PENDAPATAN	6.49.260.685.217	6.49.260.685.217	0	0%

Sumber : Bapenda Provinsi Sumatera Barat

❖ Arah Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan pasal 55 dan 56 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer, dengan penjelasan yakni :

1. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberikan manfaat jangka pendek yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja hibah, belanja subsidi, pada perubahan tahun 2023, kebijakan Belanja yang dilakukan antara lain :
 - a. Belanja Pegawai
Merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji, tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang secara rinci diperuntukkan untuk Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, meningkatkan Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan kelas jabatan dengan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya, Tambahan Penghasilan, Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus Guru PNSD, Penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Gaji dan Tunjangan dan Biaya Operasional DPRD, Tunjangan komunikasi insentif DPRD, Gaji ASN P3K, Gaji CPNS, Biaya insentif pemungutan pajak dan Biaya insentif pemungutan retribusi.
 - b. Belanja Barang dan Jasa
Kebijakan pengalokasikan Belanja Barang dan Jasa diarahkan untuk mendanai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib (yang terkait dengan pelayanan dasar dan tidak terkait Pelayanan Dasar) dan urusan pemerintahan serta mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, dan unsur pemerintahan umum. Kebijakan tersebut disesuaikan dengan prioritas pembangunan daerah Tahun 2022 yang disesuaikan dengan 7 (tujuh) Misi sebagaimana tercantum dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021. Selain mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan prioritas pembangunan sesuai dengan RPJMD Tahun 2021-2026 juga diarahkan dengan mempedomani nawacita yang terdapat dalam RPJM Nasional yang tersebar pada urusan pokok dan urusan pilihan.
 - c. Belanja Hibah
Adapun dengan kebijakan Belanja hibah pada Perubahan Tahun 2023 antara lain:
 - Penganggaran Belanja Hibah dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan kebutuhan belanja untuk urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

- Belanja hibah secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas serta ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
 - Peruntukan belanja hibah diarahkan untuk menunjang pencapaian sasaran program pemerintah daerah sebagaimana yang diatur oleh ketentuan yang berlaku.
 - Belanja hibah dialokasikan kepada Badan/Lembaga yang wajib sebagaimana telah diatur oleh undang-undang, seperti KONI, Pramuka, PMI serta Badan/Lembaga yang telah memenuhi mekanisme penganggaran hibah sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Teknis Keuangan Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah.
 - Belanja Hibah BOS
 - Belanja Bantuan Keuangan (Hibah) kepada partai politik merupakan kewajiban bagi Pemerintah Daerah sesuai amanat Permendagri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2023, dan berpedoman pada PP No. 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 1 tahun 2018.
2. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi yang lebih diarahkan juga untuk mendukung pelayanan dasar dan pelayanan publik kepada masyarakat, termasuk juga mengalokasikan anggaran untuk penyelesaian pembangunan gedung-gedung strategis daerah.
 3. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah.
 4. Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/ atau dari Pemerintah Daerah ke Pemerintah Desa yang terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

**Tabel Proyeksi Target Perubahan Belanja
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023**

Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)	
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
BELANJA				
BELANJA OPERASI	4.549.768.272.549	4.555.326.689.239	5.558.416.690	0%
Belanja Pegawai	2.324.767.027.090	2.324.767.027.090	0	0%
Belanja Barang dan Jasa	2.036.514.739.480	2.042.073.156.170	5.558.416.690	0%
Belanja Subsidi	6.500.000.000	6.500.000.000	0	0%
Belanja Hibah	181.986.505.979	181.986.505.979	0	0%
BELANJA MODAL	1.037.235.695.015	1.037.235.695.015	26.930.000.000	3%
Belanja Modal Tanah	7.480.496.294	7.480.496.294	0	0%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	286.222.499.944	319.926.955.696	33.704.455.752	12%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	365.891.682.880	359.117.227.128	(6.774.455.752)	2%
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	334.316.832.897	334.316.832.897	0	0%
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	43.324.183.000	43.324.183.000	0	0%
BELANJA TIDAK TERDUGA	70.000.000.000	64.441.583.310	(5.558.416.690)	8%
Belanja Tidak Terduga	70.000.000.000	64.441.583.310	(5.558.416.690)	8%
BELANJA TRANSFER	1.132.256.717.653	1.132.256.717.653	0	0%
Belanja Bagi Hasil	1.091.477.739.821	1.091.477.739.821	0	0%
Belanja Bantuan Keuangan	40.778.977.832	40.778.977.832	0	0%
Jumlah Belanja	6.789.260.685.217	6.816.190.685.217	26.930.000.000	0%
Total Surplus/(Defisi)	(330.000.000.000)	(356.930.000.000)	(26.930.000.000)	-8%

Sumber : BPKAD Provinsi Sumatera Barat

❖ Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah dalam hal ini meliputi penerimaan pembiayaan yang terdiri dari Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu (Silpa) serta pengeluaran pembiayaan terdiri dari penyertaan modal kepada BUMD, dan pada Bank Nagari. Arah kebijakan pembiayaan daerah adalah:

- Mengakomodir penerimaan pembiayaan terutama dari Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Sebelumnya (Tahun 2022).
- Terhadap penyertaan modal kepada BUMD dilaksanakan seefektif mungkin tergantung kebutuhan sedangkan penyertaan modal kepada Bank Nagari adalah dalam rangka memenuhi car ratio perbankan yang harus dipenuhi setiap tahunnya.
- Untuk pos pembayaran pokok hutang tahun depan dihindari sehingga tidak perlu dianggarkan.

Proyeksi/target penerimaan daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, dapat digambarkan pada tabel berikut :

**Tabel Proyeksi Target Perubahan Penerimaan Daerah
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 (dalam Rp. Ribu)**

Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)	
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
PEMBIAYAAN				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	350.000.000.000	289.279.692.879	(60.720.307.121)	(17%)
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	350.000.000.000	289.279.692.879	(60.720.307.121)	(17%)
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	350.000.000.000	289.279.692.879	(60.720.307.121)	(17%)
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	20.000.000.000	20.000.000.000	0	0%
Penyertaan Modal Daerah	20.000.000.000	20.000.000.000	0	0%
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000.000	20.000.000.000	0	0%
Pembiayaan Netto	330.000.000.000	269.279.692.879	(60.720.307.121)	(17%)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0		0	0%

Sumber : BPKAD Provinsi Sumatera Barat

4. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

a. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Tahun 2023

Dengan mempertimbangkan potensi, capaian pembangunan daerah satu tahun sebelumnya, hasil evaluasi tahun berjalan serta kondisi saat ini, permasalahan, isu strategis, tantangan dan peluang serta kondisi sosial budaya masyarakat Sumatera Barat dimaksud, maka tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2023 mengacu kepada Visi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yaitu:

“Terwujudnya Sumatera Barat Madani, Unggul dan Berkelanjutan”

Dalam mewujudkan Visi melalui pelaksanaan Misi yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, maka untuk kerangka perencanaan pembangunan daerah tahun 2022 diperlukan kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang dijalankan, memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud.

Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi diuraikan dalam matrik tabel berikut:

**Tabel Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Provinsi Sumatera Barat**

VISI Terwujudnya Sumatera Barat Madani, Unggul dan Berkelanjutan		
MISI	TUJUAN	SASARAN
Misi 1: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil & Berdaya Saing	Mewujudkan Sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
		Menurunnya prevalensi stunting
		Meningkatnya Kualitas Pendidikan
		Meningkatnya Daya Saing Masyarakat
Misi 2: Meningkatkan Tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan Falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	Mewujudkan ABS SBK sebagai falsafah kehidupan masyarakat	Meningkatnya Ketahanan sosial Budaya masyarakat yang berlandaskan ASB-SBK
		Meningkatnya Budaya Literasi
		Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
Misi 3: Meningkatkan Nilai tambah dan Produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Meningkatkan kesejahteraan petani	Meningkatnya pendapatan petani pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Kelautan dan Perikanan)
		Meningkatnya ketahanan dan keamanan pangan
		Meningkatnya pendapatan Petani Hutan
Misi 4: Meningkatkan usaha perdagangan dan industry kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital	Mewujudkan perdagangan dan industri kecil/Menengah serta ekonomi digital yang tangguh dan berdaya saing	Sumatera barat sebagai pusat perdagangan
		Sumatera Barat sebagai pusat industri kecil dan menengah
		Terwujudnya pelaku koperasi dan UKM yang sejahtera
		Terciptanya 100.000 entrepreneur dari berbagai sektor
		Meningkatnya pertumbuhan investasi
Misi 5: Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya Saing kepariwisataan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	Meningkatnya kontribusi pariwisata dalam perekonomian Sumatera Barat
		Meningkatnya kontribusi ekonomi kreatif dalam perekonomian Sumatera Barat
		Meningkatnya peran ekonomi digital
Misi 6: Meningkatkan pengembangan infrastruktur yang berkeadilan berkelanjutan	Terwujudnya Infrastruktur yang handal dan merata	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur yang terintegasi
		Meningkatkan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana
		Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas
		Meningkatkan infrastruktur pelayanan dasar, bangunan strategis

MISI	TUJUAN	SASARAN
		dan pertanian
		Meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang yang baik dan berkelanjutan
Misi 7: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dengan aparatur yang melayani	Terwujudnya kualitas tata Kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel
		Meningkatnya kapabilitas birokrasi
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Tujuan dan sasaran Misi Pertama, **“Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil & Berdaya Saing”** terkait dengan isu strategis Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dari aspek Pendidikan dan Kesehatan yang tetap mengedepankan karakter yang madani, serta berpengetahuan dan memiliki keterampilan untuk mampu berdaya saing serta tangguh dan memiliki nilai kompetisi yang tinggi.

Tujuan dan sasaran Misi Kedua, **“Mewujudkan Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah Sebagai falsafah Kehidupan Masyarakat”** terkait dengan isu strategis Peningkatan Pengamalan Nilai-Nilai Agama dan Adat ditengah-tengah masyarakat yang diwujudkan dengan sikap toleransi, saling menghormati, patuh terhadap norma-norma agama, adat dan hukum positif, serta karakter masyarakat yang santun dan berkontribusi positif dalam pelaksanaan pembangunan, selain itu isu strategis dalam tujuan ini adalah terkait dengan pemajuan kebudayaan sebagai wujud implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Tujuan dan sasaran Misi Ketiga, **“Mewujudkan Kesejahteraan Petani”** terkait dengan isu meningkatkan pendapatan petani yang berada di sektor pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan dan kehutanan melalui peningkatan nilai tambah terhadap produk pertanian serta pengembangan terhadap hilirasi pertanian secara terpadu dan berkualitas.

Tujuan dan sasaran Misi Keempat, **“Mewujudkan Perdagangan dan Industri Kecil/Menengah serta Ekonomi Digital yang Tangguh dan Berdaya Saing”** terkait dengan isu strategis menjadikan Sumatera Barat sebagai pusat UMKM dan industri kecil dan menengah yang kedepan menjadi penggerak perekonomian Sumatera Barat yang tahan terhadap guncangan ekonomi serta mampu bersaing ditingkat global.

Tujuan dan sasaran Misi Kelima, **“Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Terhadap Perekonomian Sumatera Barat”** terkait dengan isu strategis menjadikan pariwisata sebagai etalase Sumatera Barat

yang efektif sebagai sektor yang memberikan efek positif pada semua sektor untuk menstimulus pergerakan dan laju pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat.

Tujuan dan sasaran Misi Keenam, **“Terwujudnya Infrastruktur yang Handal dan Merata”** terkait dengan isu strategis dukungan infrastruktur yang berkualitas dalam mendukung layanan dasar kepada masyarakat dan penggerak ekonomi daerah, membangun ketahanan bencana serta kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan yang dapat dipertanggungjawab kepada generasi selanjutnya.

Tujuan dan sasaran Misi Ketujuh, **“Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas”** terkait dengan isu strategis Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, efektif, efisien, akuntabel dan transparan yang diwujudkan dengan implementasi reformasi birokrasi yang maksimal pada semua aspek dan bidang penyelenggaraan pemerintahan.

Sejalan dengan arah pembangunan dalam RPJMD, dengan memperhatikan dampak dari pandemic COVID-19 yang mengakibatkan pelemahan ekonomi nasional dan Sumatera Barat yang mengalami kontraksi di Tahun 2020, sehingga perlu tetap dilakukan upaya secara terus menerus untuk pemulihan ekonomi hingga mampu kembali kepada kondisi sebelum pandemi terjadi serta juga perlu dimulai reformasi struktural ekonomi di Sumatera Barat dengan mengurangi ketergantungan kepada Sumber Daya Alam beralih secara perlahan kepada sektor industri dan jasa, serta dukungan terhadap pencapaian Tema Pembangunan RKP Tahun 2023, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengintegrasikan menjadi Tema Provinsi Sumatera Barat yakni:

“PENINGKATAN PRODUKTIVITAS SEKTOR STRATEGIS MENUJU TRANSFORMASI EKONOMI”

Peningkatan produktivitas melalui sektor strategis daerah ini yang juga merupakan bagian dari kebijakan pemulihan ekonomi yang disesuaikan dengan kondisi struktur ekonomi dan potensi ekonomi di Sumatera Barat diarahkan kepada sektor pertanian (lima sub sektor pertanian), industri pengolahan (Perdagangan, UMKM dan Industri Kecil Menengah), dan akomodasi makan-minum (pariwisata). Perhitungan asumsi peningkatan produktivitas pada 3 (tiga) sektor strategis tersebut di tahun 2023 yakni :

1. Sektor Pertanian, diharapkan tumbuh 5,86%
2. Sektor Industri pengolahan, diharapkan tumbuh 12,46%
3. Sektor akomodasi dan makan minum, diharapkan tumbuh 5,80%.

Ketiga sektor ini termasuk 5 (lima) besar lapangan usaha yang peningkatan produktivitasnya tertinggi tahun 2021 lalu, dibawah sektor pertambangan dan

pengagalian serta sektor jasa lainnya. Secara keseluruhan, produktivitas total di sumbar meningkat 4,45% dari 93,74 juta menjadi 97,91 juta.

Selanjutnya ketiga sektor strategis dimaksud juga merupakan sektor unggulan yang didukung dengan berbagai program unggulan yang sudah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, dan sangat perlu dijaga peningkatan momentum produktivitasnya, sehingga diharapkan peningkatan produktivitas sektor strategis ini berbanding lurus dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi sektor tersebut sehingga upaya pemulihan ekonomi dapat selalu dilaksanakan sesuai dengan potensi daerah.

Sehingga dengan demikian prioritas pembangunan yang akan dilakukan hingga akhir tahun 2023 akan tepa lebih difokuskan pada ketiga sektor diatas serta dalam upaya pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib dipenuhi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana diamanat pada Pasal 18 dan pasal 298 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun proyeksi Target Indikator Makro Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 sebagaimana tabel berikut.

Tabel Proyeksi Indikator Makro Daerah Tahun 2023

NO	INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN	PROYEKSI TAHUN 2023			KET
		RPJMD	RKPD	PERUBAHAN RKPD	
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,57	4,65	4,94 – 5,36	Disesuaikan
2	PDRB ADHK Per Kapita (Rp. Juta)	32,97	33,58	33,58	Tetap
3	PDRB ADHB Per Kapita (Rp. Juta)	50,60	48,86	48,86	Tetap
4	TPT (%)	6,45	5,72	5,82 – 6,13	Disesuaikan
5	IPM	73,23	73,46	73,46	Tetap
	- Usia Harapan Hidup (Tahun)	69,98	69,97	69,97	
	- Harapan Lama Sekolah (Tahun)	14,06	14,43	14,43	
	- Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	9,28	9,25	9,25	
	- Pengeluaran per Kapita (Rp. Ribu)	11.108	10.997	10.997	
6	Kemiskinan (%)	6,16	5,37	5,71 – 5,93	Disesuaikan
7	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	353,68	306,71	306,71	Tetap
8	Gini Rasio	0,296	0,296	0,296	Tetap
9	Indeks Williamson	0,309	0,213	0,213	Tetap

Sumber : RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026, dan hasil analisa Bappeda Provinsi Sumatera Barat

Target Indikator Makro Pembangunan pada dokumen perubahan RKPD Tahun 2023 dilakukan penyesuaian jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, hal ini dengan memperhatikan

evaluasi capaian tahun 2023 hingga triwulan II, dan perkiraan capaian hingga akhir tahun 2023.

b. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Provinsi Tahun 2023

❖ **Prioritas Pembangunan 4 : Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital**

Prioritas pembangunan ini untuk menjadikan Sumatera Barat sebagai pusat perdagangan dan Industri Kecil di Sumatera Barat. Secara struktur ekonomi Sumatera Barat juga di dominasi oleh Perdagangan dan juga Industri Pengolahan, meskipun tidak sebesar Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, namun sektor perdagangan dan industri kedepan harus dikembangkan sebagai sektor yang diyakini mampu meningkatkan tingkat pendapatan masyarakat sehingga Sumatera Barat dapat keluar dari middle income trap.

Sumatera Barat memiliki potensi untuk mengoptimalkan aktivitas di sektor perdagangan sebagai salah satu sektor utama yang menggerakkan perekonomian masyarakat. Pelabuhan Teluk Bayur yang berada di pesisir barat pusat Sumatera merupakan potensi untuk memajukan perdagangan internasional melalui peningkatan volume ekspor, terutama ke negara yang tergabung dalam Indian Ocean Rim Association (IORA). Misi ini diharapkan mampu meningkatkan kontribusi sektor perdagangan dan ekonomi kreatif terhadap PDRB Sumatera Barat.

Sasaran dan indikator kinerja pada Prioritas Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas meningkatkan usaha perdagangan Dan industri kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital Tahun 2023

No	SASARAN / INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023
1	Sumatera Barat sebagai pusat perdagangan	
	Laju pertumbuhan sektor perdagangan (%)	-1,00
2	Sumatera Barat sebagai pusat industri kecil dan menengah	
	Jumlah sentra industri kecil dan menengah (sentra)	379
3	Terwujudnya pelaku koperasi dan UKM yang sejahtera	
	Laju pertumbuhan ekonomi sub sektor koperasi (%)	2,18
	Persentase peningkatan pendapatan pada usaha mikro dan kecil	3,1
4	Terciptanya 100.000 entrepreneur dari berbagai sektor	
	Jumlah entrepreneur baru tercipta (orang)	130.482
5	Meningkatnya pertumbuhan investasi	
	Persentase peningkatan Investasi di provinsi (%)	8,00
6	Meningkatnya peran ekonomi digital	
	Kontribusi Ekonomi Digital (%)	6,70

Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan tersebut pada Tahun 2023 difokuskan pada:

1. Menjaga tingkat inflasi tetap pada batas wajar.

2. Penciptaan iklim investasi dan kemudahan berinvestasi yang diberikan oleh pemerintah untuk pelaku usaha PMA dan dan PMDN dalam mendapatkan perizinan dan non perizinan.
3. Fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi pelaku usaha PMA dan PMDN dengan tujuan agar permasalahan yang dihadapi pelaku usaha PMA dan PMDN dapat diselesaikan dan perusahaan dapat merealisasikan investasinya .
4. Pemberian isentif-insentif dari pemerintah kepada pelaku usaha untuk menumbuhkan minat investasi baru seperti kemudahan pajak/pembebasan pajak.
5. Tersedianya data yang akurat terkait dengan potensi investasi, proses perizinan dan kemudahan berusaha.
6. Memperbaiki tata kelola BUMD dan mendirikan BUMD profesional di bidang pertanian.
7. Mencetak 100 ribu millennial entrepreneur dan women entrepreneur serta pelaku ekonomi kreatif.
8. Meningkatkan akses keuangan perbankan dan non perbankan bagi UMKM dan pengusaha pemula.
9. Mendorong Koperasi untuk konversi ke koperasi syariah.
10. Meningkatkan keahlian dan keterampilan bagi pelaku UMKM dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan bisnis dan perdagangan digital

Pencapaian sasaran Prioritas Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital, dilakukan dengan beberapa Program Pembangunan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel Program Pembangunan mendukung
Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah
Serta Ekonomi Berbasis Digital Tahun 2023**

NO	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA			PERANGKAT DAERAH
		INDIKATOR	SATUAN	TARGET	
Prioritas 4 : Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/ menengah serta ekonomi berbasis digital					
1	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Peningkatan omset pedagang pasar rakyat yang sudah direvitalisasi	%	5,8	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2	Program Pengembangan Ekspor	Nilai ekspor	juta US\$	1.449,41	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

NO	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA			PERANGKAT DAERAH
		INDIKATOR	SATUAN	TARGET	
3	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase barang beredar dan jasa yang diawasi	%	74	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Persentase komoditi potensial yang sesuai ketentuan berlaku	%	25	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Persentase pengaduan konsumen yang diselesaikan	%	89	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Peningkatan transaksi pada kegiatan pameran	%	5	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
5	Program Penyelenggaraan Jalan	Rasio Kemantapan Jalan	%	77	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
6	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Jumlah sentra industri yang diberi perkuatan	Sentra	20	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
7	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah IUI dan IPUI	%	74	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
8	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang kompeten	%	35,72	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
9	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase koperasi yang memiliki izin usaha simpan pinjam	%	2,58	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
10	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi yang menindaklanjuti rekomendasi pengawasan	%	63	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
11	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Jumlah SDM KUKM yang dilatih	orang	1.250	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
12	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Jumlah koperasi modern	koperasi	60	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
13	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Jumlah produk UKM yang terstandarisasi	produk	120	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
14	Program Pengembangan UMKM	Persentase usaha kecil yang menjadi wirausaha	%	3	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
15	Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Persentase organisasi pemuda yang memiliki kontribusi aktif dalam pembangunan	%	16	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Jumlah wirausaha muda baru	orang	348	Dinas Pemuda dan Olahraga

NO	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA			PERANGKAT DAERAH
		INDIKATOR	SATUAN	TARGET	
16	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang kompeten	%	35,72	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
17	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Indeks pembangunan keluarga	indeks	61,38	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
18	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Jumlah SDM KUKM yang dilatih	orang	1.250	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
19	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Jumlah produk UKM yang terstandarisasi	produk	120	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
20	Program Pengembangan UMKM	Persentase usaha kecil yang menjadi wirausaha	%	3	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
21	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase organisasi Pemuda yang memiliki kontribusi aktif dalam pembangunan	%	16	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Jumlah wirausaha muda baru	orang	348	Dinas Pemuda dan Olahraga
22	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase peningkatan produksi ikan olahan dan pemasaran hasil perikanan	%	7,26	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Jumlah produksi olahan hasil perikanan	ton	17.861	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Tingkat konsumsi ikan	Kg/kap/th	40,5	Dinas Kelautan dan Perikanan
23	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Peningkatan Jumlah SDM Pariwisata yang bersertifikat	Orang	396	Dinas Pariwisata
		Persentase pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif	%	6	Dinas Pariwisata
24	Program Perizinan Usaha Pertanian	Peningkatan klasifikasi kelas kebun usaha pertanian	%	7	Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Holtikultura
25	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Unit Usaha dan UPTD sub urusan peternakan yang diawasi	%	3	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

NO	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA			PERANGKAT DAERAH
		INDIKATOR	SATUAN	TARGET	
26	Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	hektar	50.000	Dinas Kehutanan
27	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Peningkatan transaksi pada kegiatan pameran	%	5	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
28	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Jumlah sentra industri yang diberi perkuatan	Sentra	20	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
29	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah IUI dan IPU	%	74	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
30	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Regulasi Penanaman Modal	%	100	Dinas Penanaman Modal Provinsi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
31	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Pernyataan Minat	dokumen pernyataan minat	4	Dinas Penanaman Modal Provinsi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
32	Program Pelayanan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai/Rasio	82,75 / 3,41	Dinas Penanaman Modal Provinsi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Persentase Perizinan yang Diterbitkan Tepat Waktu	%	85,52	Dinas Penanaman Modal Provinsi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
33	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Nilai Realisasi Investasi (PMA dan PMDN)	Rp (triliun)	5,6	Dinas Penanaman Modal Provinsi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
34	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Ketersediaan Data Penanaman Modal Berbasis Teknologi Informasi	%	40	Dinas Penanaman Modal Provinsi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
35	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Indeks SPBE (Skala 1-5)	indeks	3,3	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
36	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Jumlah produk UKM yang terstandarisasi	produk	120	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
37	Program Pengembangan UMKM	Persentase usaha kecil yang menjadi wirausaha	%	3	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

❖ Prioritas Pembangunan 5 : Meningkatkan Ekonomi Kreatif Dan Berdaya Saing Kepariwisata

Pariwisata termasuk sektor penting dalam pembangunan ekonomi Sumatera Barat yang diharapkan menjadi industri dan salah satu basis pembangunan Sumatera Barat untuk kedepannya disamping pertanian. Sehingga prioritas ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan pariwisata yang nyaman dan berkesan salah satunya adalah meningkatkan kompetensi pihak pengelola sumberdaya wisata atau sumberdaya penunjang wisata agar dapat mewujudkan pariwisata yang nyaman dan berkesan.

Pariwisata yang nyaman dan berkesan ditandai dengan kepuasan dan kenikmatan berwisata yang dirasakan wisatawan, baik wisatawan domestik maupun mancanegara. Beberapa tahun terakhir Sumatera Barat mengalami kemajuan ekonomi dari sektor pariwisata, untuk itu hal ini harus selalu diperkuat melalui pembangunan pariwisata berbasis Pariwisata Halal dan MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition), dengan pembenahan destinasi wisata baik kelas lokal, nasional dan internasional dengan cara meningkatkan atraksi, aksesibilitas dan amenities di Destinasi Wisata sekaligus meningkatkan pembinaan kepada masyarakat terutama di wilayah-wilayah destinasi wisata.

Perekonomian Sumatera Barat cenderung tumbuh melambat setiap tahunnya seiring kinerja lapangan usaha utama daerah pada sektor pertanian yang dalam tren menurun. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, Sumatera Barat perlu mengembangkan sumber pertumbuhan ekonomi baru sebagai lokomotif perekonomian ke depan, disamping terus memperkuat dan mengoptimalkan kinerja pertanian dan industri pengolahan yang telah lama menjadi tulang punggung perekonomian Sumatera Barat.

Pariwisata dapat menjadi lokomotif baru perekonomian Sumatera Barat karena memiliki multiplier effect yang luas dan keseluruhan. Kedatangan wisatawan memiliki dampak yang luar biasa dalam menggerakkan begitu banyak kegiatan sektor lain, seperti perhotelan dan restoran, transportasi, produk kerajinan dan industri olahan makan/minum, dan jasa-jasa.

Pariwisata Sumatera Barat terbukti sangat potensial untuk menjadi lokomotif baru perekonomian daerah ke depan, hal ini didukung dengan Sumatera Barat menjadi salah satu dari 10 besar destinasi favorit wisatawan nusantara di Indonesia serta merupakan 3 (tiga) besar destinasi favorit wisatawan di Sumatera. Hal lainnya yakni keberadaan potensi wisata di Sumatera Barat juga diakui secara Global dan Nasional antara lain sebagai Provinsi dengan desa wisata terbanyak dan empat desa wisata masuk 50 besar terbaik se-Indonesia pada Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2021; Memiliki 11 Geopark, 3 sudah diakui Nasional; Rendang didaulat sebagai masakan terlezat di dunia versi CNN Travels pada tahun 2017); Sumatera

Barat ditetapkan sebagai Juara World's Best Halal Culinary Destination dan World's Best Halal Destination pada anugerah World Halal Tourism Award Abu Dhabi pada tahun 2016); Gulungan ombak Mentawai masuk dalam jajaran ombak terbaik di dunia berdasarkan Surfer Magazine di tahun 2013; serta Desa Pariangan terpilih menjadi desa terindah di dunia versi Travel Budget pada tahun 2012. Berdasarkan pengakuan Global dan nasional tersebut maka Sumatera Barat memiliki kekuatan pariwisata dari keindahan alam (nature), keberagaman budaya (culture), serta kuliner yang lezat (culinary).

Sejak tanggal 9 Desember 2021, Bank Indonesia Kantor Perwakilan Sumatera Barat bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah mencanangkan tahun kunjungan wisata "Visit Beautiful West Sumatera 2023". Langkah ini merupakan upaya untuk membangkitkan kembali gairah sektor pariwisata dan ekonomi kreatif Sumatera Barat dari keterpurukan ekonomi selama masa pandemic Covid 19.

Sasaran dan indikator kinerja pada Prioritas Meningkatkan Ekonomi Kreatif Dan Berdaya Saing Kepariwisata Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Meningkatkan Ekonomi Kreatif dan Berdaya Saing Kepariwisata Tahun 2023

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023
1	Meningkatnya kontribusi pariwisata dalam perekonomian Sumatera Barat	Persentase Kontribusi Pariwisata pada PDRB (%)	1,24
2	Meningkatnya kontribusi ekonomi kreatif dalam perekonomian Sumatera Barat	Persentase Kontribusi Ekonomi Kreatif pada PDRB (%)	6,02

Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan tersebut pada Tahun 2023 difokuskan pada :

1. Membangun industri pariwisata melalui 1 destinasi wisata berkelas dunia dan 19 destinasi wisata unggulan
2. Membangun 3 pusat pertunjukan seni dan budaya bertaraf Internasional
3. Meningkatkan fasilitas dan sarana prasarana pada destinasi wisata terutama air bersih dan sanitasi
4. Meningkatkan atraksi seni dan budaya serta membangun suasana festival yang meriah pada pusat keramaian dan obyek wisata unggulan
5. Meningkatkan kunjungan wisatawan terutama wisatawan domestic
6. Penguatan Brand Image Pariwisata di Sumatera Barat
7. Memperjelas segmentasi Wisatawan pada masing-masing daerah
8. Melakukan Strategi promosi efektif yang terpadu melalui public campaign dan promosi besar-besaran untuk membangun awareness masyarakat

9. Mendorong semua pelaku usaha pariwisata Sumbar (terutama obyek wisata unggulan) agar segera memenuhi sertifikasi CHSE, sertifikasi Halal serta sertifikasi/ standar internasional lainnya

Pencapaian sasaran Prioritas Meningkatkan Ekonomi Kreatif dan Berdaya Saing Kepariwisata dilakukan dengan beberapa Program Pembangunan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel Program Pembangunan mendukung Prioritas Meningkatkan Ekonomi Kreatif dan Berdaya Saing Kepariwisata Tahun 2023

NO	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA			PERANGKAT DAERAH
		INDIKATOR	SATUAN	TARGET	
Prioritas 5 : Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan					
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase volume tampungan sumber-sumber air	%	55,28	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi
		Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi	%	71,92	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi
		Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air	%	68,27	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi
2	Program Penyelenggaraan Jalan	Rasio Kemantapan Jalan	%	77	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
3	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase pengelolaan sampah di Sumatera Barat	%	65	Dinas Lingkungan Hidup
4	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah intervensi pada destinasi internasional kawasan gunung talang	kali	10	Dinas Pariwisata
		Jumlah DTW Unggulan Provinsi yang diintervensi pengembangannya	DTW	19	Dinas Pariwisata
5	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara	%	4	Dinas Pariwisata
		Persentase peningkatan kunjungan wisatawan nusantara	%	4,5	Dinas Pariwisata
		Rata-rata lama tinggal wisman	hari	3,23	Dinas Pariwisata
		Rata-rata lama tinggal wisnus	hari	1,7	Dinas Pariwisata
6	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Peningkatan Jumlah SDM Pariwisata yang bersertifikat	Orang	396	Dinas Pariwisata
		Persentase pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif	%	6	Dinas Pariwisata
7	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Jumlah produk UKM yang terstandarisasi	produk	120	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
8	Program Pengembangan UMKM	Persentase usaha kecil yang menjadi wirausaha	%	3	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

NO	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA			PERANGKAT DAERAH
		INDIKATOR	SATUAN	TARGET	
9	Program Pengembangan Kebudayaan	Jumlah Karya Budaya yang Dilestarikan	Karya Budaya	8	Dinas Kebudayaan
10	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah produk Ekonomi Kreatif yang terdaftar HKI	produk	100	Dinas Pariwisata
11	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Peningkatan Jumlah SDM Pariwisata yang bersertifikat	Orang	396	Dinas Pariwisata
		Persentase pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif	%	6	Dinas Pariwisata
12	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Jumlah sentra industri yang diberi perkuatan	Sentra	20	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

c. Program Unggulan Provinsi Sumatera Barat

Dalam dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, terdapat beberapa program unggulan yang mendukung pencapaian visi misi telah direncanakan dan sedang dilaksanakan sejak tahun 2022 sebagai tahun pertama pelaksanaan RPJMD dan kemudian akan dilanjutkan pada tahun 2023 hingga 2026.

Dalam rangka mendukung proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian hingga pelaporan dan evaluasi maka telah ditetapkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 050 – 47 – 2022 Tentang Penetapan Kinerja Program Unggulan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026. Adapun sasaran dan target masing-masing Program Unggulan di Tahun 2023 yakni sebagai tabel berikut.

Tabel Target Kinerja Program Unggulan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

PROGRAM UNGGULAN/DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	SKPD/SUB KEGIATAN
1	2	3	4
SUMBAR SEJAHTERA			
I. Memperbaiki tata kelola BUMD dan mendirikan BUMD profesional di bidang pertanian			
Definisi operasional : 1. Mengevaluasi kinerja BUMD yang ada 2. Mengoptimalkan pemanfaatan BUMD yang ada 3. Membentuk BUMD baru dibidang agro 4. Ukuran tata Kelola BUM yang baik adalah adalah kategori BUMD yang sehat 5. Penanggung jawab Progul Biro Perekonomian	1. Jumlah BUMD Agro yang terbentuk baru (unit usaha)	-	Biro Perekonomian Sub kegiatan : 1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD
	2. Jumlah BUMD dengan kategori Sehat (unit usaha) a. PT. Bank Nagari (perbankan) b. PT. Jamkrida (penjaminan kredit) c. BUMD Agro	3	Biro Perekonomian Sub kegiatan : 1. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha
II. Mencetak 100 ribu <i>millennial entrepreneur</i> dan <i>women entrepreneur</i> serta pelaku ekonomi kreatif			

PROGRAM UNGGULAN/DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	SKPD/SUB KEGIATAN
1	2	3	4
<p>Definisi operasional :</p> <ol style="list-style-type: none"> Memfasilitasi tumbuhnya 100 ribu milenial entrepreneur dan woman entrepreneur yang direncanakan akan dilaksanakan dalam 5 tahun dengan proporsi 20 ribu setiap tahunnya dari tahun 2022 sampai dengan 2026 100 ribu milenial tersebut tersebar pada beberapa sector, baik pertanian, peternakan, perikanan, industry, UMKM, pariwisata, ekonomi kreatif dan sector potensial lainnya Untuk pencapaian target 100 ribu milenial tersebut perlu pembagian secara proporsional dengan kabupaten/kota Definisi terkait dengan entrepreneur yakni : <ol style="list-style-type: none"> Telah menerima Pendidikan kewirausahaan dan atau Sudah memulai usaha Bekerjasama dengan akselarator Penanggung jawab progul Dinas Koperasi dan UKM 	1. Jumlah entrepreneur baru tercipta (orang)	20.000	
	a. Jumlah entrepreneur baru tercipta urusan Pemuda dan Olahraga (orang)	528	<p>Dinas Pemuda dan Olahraga Sub kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi
	b. Jumlah entrepreneur baru tercipta urusan Tenaga Kerja (orang)	6742	<p>Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sub kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Perluasan Kesempatan Kerja
	c. Jumlah entrepreneur baru tercipta urusan Koperasi dan UMKM (orang)	2000	<p>Dinas Koperasi dan UMKM Sub kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi
	d. Jumlah entrepreneur baru tercipta urusan Pertanian (sub urusan Perkebunan, Tanaman pangan dan Hortikultura) (orang)	300	<p>Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan hortikultura Sub kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani
	e. Jumlah entrepreneur baru tercipta urusan Pertanian (sub urusan Peternakan dan Kesehatan Hewan) (orang)	4.997	<p>Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sub kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian
	f. Jumlah entrepreneur baru urusan Kehutanan (orang)	500	<p>Dinas Kehutanan Sub kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan

PROGRAM UNGGULAN/DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	SKPD/SUB KEGIATAN
1	2	3	4
			3. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan 4. Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan 5. Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial
	g. Jumlah enterpreneur baru tercipta urusan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (orang)	2.220	Dinas Pariwisata Sub kegiatan : 1. Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan 2. Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata 3. Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan 4. Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata 5. Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA) 6. Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif 7. Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif 8. Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif
	h. Jumlah enterpreneur baru tercipta urusan Perindustrian dan Perdagangan (orang)	1.355	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sub kegiatan : 1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 2. Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi
	i. Jumlah enterpreneur baru tercipta urusan Sosial (orang)	412	Dinas Sosial Sub kegiatan : 1. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial (Panti Anak terlantar) 2. Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari (Panti Tuna Netra) 3. Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari (Panti PMKS Lainnya)

PROGRAM UNGGULAN/DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	SKPD/SUB KEGIATAN
1	2	3	4
	j. Jumlah enterpreneur baru tercipta urusan Kebudayaan (orang)	240	Dinas Kebudayaan Sub kegiatan : 1. Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
	k. Jumlah enterpreneur baru tercipta urusan Kelautan dan perikanan (orang)	400	Dinas Kelautan dan Perikanan Sub kegiatan : Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar
	l. Jumlah enterpreneur baru tercipta urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana (orang)	700	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Sub kegiatan : 1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi 2. Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi
	m. Jumlah enterpreneur baru tercipta urusan Penanaman Modal (orang)	100	Dinas Penanaman Modal Provinsi Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sub kegiatan : 1. Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi
	n. Jumlah enterpreneur baru tercipta urusan Pangan (orang)	112	Dinas Pangan Sub kegiatan : 1. Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
	o. Jumlah enterpreneur baru tercipta urusan Pemberdayaan Masyarakat Pangan (orang)	1.200	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sub kegiatan : 1. Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa 2. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
III. Meningkatkan akses keuangan perbankan dan non perbankan bagi UMKM dan pengusaha pemula			
Definisi operasional : 1. Peningkatan akses keuangan perbankan dan non perbankan bagi UMKM dan pengusaha pemula yang dilakukan melalui Fasilitasi, peningkatan	1. Jumlah UMKM yang difasilitasi pada akses keuangan perbankan dan non perbankan (Lembaga)	540	Dinas Koperasi dan UMKM Sub kegiatan : 1. Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat
	2. Jumlah Pengusaha pemula yang difasilitasi	200	

PROGRAM UNGGULAN/DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	SKPD/SUB KEGIATAN
1	2	3	4
<p>pemahaman terkait akses pembiayaan</p> <p>2. Bentuk fasilitasi antara lain mempertemukan kelompok UMKM dengan perbankan</p> <p>3. Target capaian yakni UMKM yang mendapatkan permodalan dari perbankan</p> <p>4. Edukasi terhadap non perbankan seperti CSR, fin-tech, dana dari lembaga keuangan social islam</p> <p>5. Penanggungjawab progul adalah Dinas Koperasi dan UMKM</p>	<p>pada akses keuangan perbankan dan non perbankan (orang)</p>		<p>Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan</p>
	3. Jumlah Pelaku UMKM yang mendapatkan permodalan dari Lembaga perbankan dan non perbankan (orang)	400	
	4. Jumlah Pengusaha pemula yang mendapatkan permodalan dari Lembaga perbankan dan non perbankan (orang)	150	
	5. Jumlah Lembaga perbankan yang memberikan permodalan pada UMKM dan pengusaha pemula (Lembaga)	4	
	6. Jumlah Lembaga non perbankan yang memberikan permodalan pada UMKM dan pengusaha pemula (Lembaga)	5	
	IV. Meningkatkan keahlian dan keterampilan bagi pelaku UMKM dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan bisnis dan perdagangan digital		
<p>Definisi operasional :</p> <p>1. Peningkatan keahlian dan keterampilan bagi pelaku UMKM melalui pelatihan, workshop dan sosialisasi dengan tema difokuskan pada penguasaan Teknologi Informasi untuk perluasan jejaring pemasaran dan kerjasama</p> <p>2. Penanggungjawab progul adalah Dinas Koperasi dan UMKM</p>	1. Jumlah Pelaku UMKM yang mendapatkan peningkatan keahlian dan keterampilan pada penguasaan teknologi informasi guna perluasan jejaring pemasaran (orang)	150	<p>Dinas Koperasi dan UMKM</p> <p>Sub kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDMUUMK Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi
	2. Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan fasilitasi marketing digital (orang)	500	<p>Dinas Perindustrian dan Perdagangan</p> <p>Sub kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi

PROGRAM UNGGULAN/DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	SKPD/SUB KEGIATAN
1	2	3	4
			2. Fasilitas Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi
V. Membangun industri pariwisata melalui 1 destinasi wisata berkelas dunia dan 19 destinasi wisata unggulan			
Definisi operasional : 1. Penetapan 1 destinasi wisata berkelas dunia (rencana Kawasan Gunung Talang yang merupakan salah satu geosite Kawasan Geopark Ranah Minang, meliputi 7 Kab/Kota, menuju UNESCO global geopark) dan 19 destinasi wisata unggulan (masing-masing 1 di setiap kabupaten/Kota) yang telah disepakati pada rakor pariwisata di Mentawai 2. Terkait dengan kewenangan, maka pola pendanaan untuk destinasi yang merupakan kewenangan kabupaten/kota melalui sharing pendanaan antara provinsi dan kabupaten/kota. 3. Proporsi persentase sharing pendanaan diputuskan pada rapat TAPD dengan melibatkan Dinas Pariwisata Provinsi dan Biro Kerjasama , Pembangunan Dan Rantau. 4. Membangun Pusat Inkubasi Ekonomi Kreatif (Sumbar Kreatif Hub), yang berlokasi di bekas Bengkel PT Dinamika di Nipah, Padang direncanakan akan dikelola oleh salah satu BUMD 5. Penanggung jawab progul Dinas Pariwisata dan Biro Perekonomian	1. Jumlah destinasi wisata unggulan (Kab/Kota)	19	Dinas Pariwisata Sub kegiatan : 1. Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi 2. Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi 3. Penetapan Destinasi Pariwisata Provinsi 4. Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi 5. Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi 6. Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi
	2. Jumlah destinasi wisata kelas dunia (lokasi)	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian Dinas Pariwisata Sub kegiatan : Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi
	3. Jumlah Pusat Inkubasi Ekonomi Kreatif yang terbangun dan terkelola (unit)	1 unit	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Sub kegiatan : 1. Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi

d. Arah Kebijakan dan Strategi Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Dalam pencapaian target-target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan serta dalam mengatasi kendala dan permasalahan maka terdapat arah kebijakan dan strategi yang dilakukan antara lain :

A. Tujuan 1: Tanpa Kemiskinan

Upaya untuk mencapai Tujuan 1 TPB/SDGs, yakni Tanpa Kemiskinan, yaitu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya daerah untuk pembangunan ekonomi yang semakin terbuka di bidang pertanian, pariwisata, industri kelautan

dan komunikasi serta energi dan potensi lainnya yang belum dimanfaatkan secara optimal.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut dijabarkan dalam strategi dan arah kebijakan secara umum dan sektoral pada bidang perekonomian sebagai berikut :

1. Strategi Peningkatan daya saing produk IKM, dengan Arah Kebijakan :
 - a) Peningkatan sarana dan prasarana pengolahan produk
 - b) Peningkatan kualitas, kontinuitas produksi, dan sertifikasi produk
 - c) Peningkatan promosi dan pemasaran produk
 - d) Peningkatan kapasitas pelaku IKM
2. Strategi Pengembangan sentra Industri Kecil dan Menengah, dengan Arah Kebijakan :
 - e) Peningkatan sarana dan prasarana untuk sentra IKM
 - f) Peningkatan Kerjasama pengembangan sentra IKM
 - g) Pendampingan dan fasilitasi sentra IKM
3. Strategi dan arah kebijakan urusan Koperasi dan UMKM, antara lain yakni :
 - h) Peningkatan kualitas sumber daya manusia
 - i) Peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan
 - j) Peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran
 - k) Kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha
 - l) Meningkatkan produktivitas dan nilai tambah UMKM dan koperasi sehingga mampu tumbuh ke skala yang lebih besar (naik kelas) dan berdaya saing
 - m) Peningkatan penyuluhan, pendampingan, diklat serta pengawasan
 - n) Peningkatan penyelenggaraan diklat, pendampingan, fasilitasi standarisasi produk, akses permodalan, promosi, kemitraan serta pemasaran produk UKM
4. Strategi dan arah kebijakan urusan Pariwisata, antara lain yakni :
 - a) Meningkatkan daya saing destinasi pariwisata berbasis aglomerasi
 - b) Meningkatkan pemasaran dan promosi pariwisata
 - c) Meningkatkan daya saing Sumber Daya Manusia Pariwisata
 - d) Membangun industri pariwisata melalui 1 (satu) destinasi wisata berkelas internasional dan 19 (sembilan belas) destinasi wisata unggulan
 - e) Memfasilitasi peningkatan destinasi wisata yang memenuhi aspek 3A (Amenitas, Aksesibilitas, Atraksi) dan 2P (Pemasaran dan Pertumbuhan Ekonomi Wilayah)
 - f) Mengembangkan daya tarik wisata tematik berbasis alam, budaya dan buatan (Agrowisata, Ekowisata, eopark, OCMH, Desa Wisata, dan Wisata Halal)
 - g) Memfasilitasi pengusulan KEK pariwisata
 - h) Mendorong dan meningkatkan standarisasi dan sertifikasi usaha pariwisata

- i) Mengintensifkan penerapan protokol kesehatan berbasis CHSE (Cleanliness, Healthy, Safety, Environment Sustainability)
- j) Meningkatkan sinergi promosi di bidang pariwisata dengan sektor terkait di dalam dan luar negeri
- k) Meningkatkan efektivitas dan kualitas pemasaran dan promosi pariwisata melalui pemanfaatan teknologi dan sistem informasi
- l) Memberdayakan potensi dan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan kepariwisataan
- m) Meningkatkan kompetensi dan sertifikasi SDM pelaku wisata

B. Tujuan 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

Upaya untuk mencapai Tujuan 8 TPB/SDGs, yakni Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi yaitu Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya daerah untuk pembangunan ekonomi yang semakin terbuka di bidang pertanian, pariwisata, industri kelautan dan komunikasi serta energi dan potensi lainnya yang belum dimanfaatkan secara optimal.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut dijabarkan dalam strategi dan arah kebijakan secara umum dan sektoral pada bidang peteonomian sebagai berikut :

1. Strategi dan arah kebijakan urusan Koperasi dan UMKM, antara lain yakni :
 - a) Peningkatan kualitas sumber daya manusia
 - b) Peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan
 - c) Peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran
 - d) Kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha
 - e) Meningkatkan produktifiitas dan nilai tambah UMKM dan koperasi sehingga mampu tumbuh ke skala yang lebih besar (naik kelas) dan berdaya saing
 - f) Peningkatan penyuluhan, pendampingan, diklat serta pengawasan
 - g) Peningkatan penyelenggaraan diklat, pendampingan, fasilitasi standarisasi produk, akses permodalan, promosi, kemitraan serta pemasaran produk UKM
2. Strategi dan arah kebijakan urusan Pariwisata, antara lain yakni :
 - a) Meningkatkan daya saing destinasi pariwisata berbasis aglomerasi
 - b) Meningkatkan pemasaran dan promosi pariwisata
 - c) Meningkatkan daya saing Sumber Daya Manusia Pariwisata
 - d) Membangun industri ariwisata melalui 1 (satu) destinasi wisata berkelas internasional dan 19 (sembilan belas) destinasi wisata unggulan
 - e) Memfasilitasi peningkatan destinasi wisata yang emenuhi aspek 3A (Amenitas, Asesibilitas, Atraksi) dan 2P Pemasaran dan Pertumbuhan Ekonomi Wilayah)

- f) Mengembangkan daya tarik wisata tematik berbasis alam, budaya dan buatan Agrowisata, Ekowisata, eopark, OCMH, Desa Wisata, dan Wisata Halal)
- g) Memfasilitasi pengusulan KEK pariwisata
- h) Mendorong dan meningkatkan standarisasi dan sertifikasi usaha pariwisata
- i) Mengintensifkan penerapan protokol kesehatan berbasis CHSE (Cleanliness, Healthy, Safety, Environment Sustainability)
- j) Meningkatkan sinergi promosi di bidang pariwisata dengan sektor terkait di dalam dan luar negeri
- k) Meningkatkan efektivitas dan kualitas pemasaran dan promosi pariwisata melalui pemanfaatan teknologi dan sistem informasi
- l) Memberdayakan potensi dan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan kepariwisataan
- m) Meningkatkan kompetensi dan sertifikasi SDM pelaku wisata

C. Tujuan 10: Berkurangnya Kesenjangan

Upaya untuk mencapai Tujuan 10 TPB/SDGs, yakni Berkurangnya Kesenjangan yaitu Meningkatkan pembangunan kualitas sumberdaya manusia untuk mendukung pembangunan pada semua aspek kehidupan, baik sebagai pelaku maupun sebagai penerima manfaat atau tujuan pembangunan yang dilakukan.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut dijabarkan dalam strategi dan arah kebijakan secara umum dan sektoral pada bidang perekonomian sebagai berikut :

1. Strategi Penciptaan iklim investasi, dengan Arah Kebijakan :
 - a) Kemudahan dan fasilitas investasi serta pengembangan layanan investasi berbasis teknologi informasi
 - b) Pengembangan layanan investasi yang memberikan kemudahan, kepastian dan transparansi proses perizinan bagi investor dan pengusaha
 - c) Penyusunan regulasi peningkatan layanan investasi yang lebih efisien, transparan dan akuntabel

D. Tujuan 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

Upaya untuk mencapai Tujuan 17 TPB/SDGs, yaitu mendayagunakan nilai-nilai gotong royong dan kerjasama yang melibatkan semua komponen masyarakat baik di daerah maupun di rantau dengan pendekatan pembangunan terpadu yang bersifat holistik dan integratif.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut dijabarkan dalam strategi dan arah kebijakan secara umum dan sektoral sebagai berikut :

1. Strategi Penumbuhan dan Peningkatan SDM entrepreneur, dengan Arah Kebijakan:

- a) Penumbuhan dan Peningkatan kualitas SDM entrepreneur
 - b) Peningkatan pemberdayaan dan pendampingan enterpreneur
2. Strategi Peningkatan fasilitasi enterpreneur, dengan Arah Kebijakan :
- a) Peningkatan kolaborasi melalui sinergisitas dalam rangka pemberdayaan entrepreneur
 - b) Peningkatan fasilitasi akses pembiayaan dan akses pasar bagi entrepreneur
 - c) Peningkatan inovasi, branding dan sertifikasi produk
 - d) Peningkatan digitalisasi produk bagi pelaku enterpreneur
3. Strategi Meningkatkan Realisasi Investasi di Sumatera Barat, dengan Arah Kebijakan :
- a) Peningkatan Data Potensi dan Peluang Investasi
 - b) Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
 - c) Peningkatan Upaya Promosi Investasi
4. Strategi Meningkatkan kontribusi ekonomi digital, dengan Arah Kebijakan :
- a) Peningkatan industri kecil dan menengah, UMKM yang berkompeten dan melek teknologi digital
 - b) Penumbuhan dan pengembangan marketplace
 - c) Fasilitasi penumbuhan pelaku e-commerce

BAB III

PELAKSANAAN KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

1. Fokus Group Discusssion (FGD) Permasalahan dan Isu Startegis Pembangunan disetiap sektor Perekonomian

Dasar Pelaksanaan	:	Undangan Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat nomor : 050/36/II/EKO/Bappeda-2023 tanggal 17 february 2023
Hari / Tanggal	:	Rabu 22 Februari 2023
Tempat	:	Ruang Rapat Lt. I Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Acara	:	Fokus Group Discusssion (FGD) Permasalahan dan Isu Startegis Pembangunan disetiap sektor Perekonomian
Peserta Rapat	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi 2. Dinas Pariwisata Provinsi 3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi 4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi 5. Badan Keuangan Daerah Provinsi 6. Badan Pendapatan Daerah Provinsi 7. Biro Perekonomian Sekretariat Daerah 8. Fungsional Perencana Bid EKO dan SDA 9. Staf Bidang EKO dan SDA

Isi Rapat :

Rapat dipimpin oleh Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Bappeda Provinsi Sumatera Barat.

Bappeda

- Penjabaran permasalahan dan isu strategis dalam Pencapaian target 2024 lingkup Perekonomian.
 1. Terdapatnya ketimpangan kualitas sumber daya manusia antar wilayah
 2. Layanan infrastruktur dasar masih terbatas dan belum menyeluruh
 3. Daya saing nilai tambah dan produktifitas UMKM dan kegiatan pariwisata relative rendah

4. Daya saing dan nilai tambah komoditas unggulan pertanian dan perkebunan relative rendah
 - Sudah mulai menyusun rancangan awal tahun 2024 pada OPD masing masing sesuai dengan surat edaran Gubernur
 - Menetapkan tema dan isu di masing masing OPD sesuai dengan Dikementerian masing-masing OPD yang menjadi isu strategis didaerah
 - Perkembangan perkembangan diluar internal yang perlu dikendalikan
 - Tingkat kemiskinan terendah adalah dikepulauan Mentawai, diharapkan upaya upaya OPD bersama-sama untuk mendukung pengurangan angka kemiskinan di Mentawai dengan pengalokasian kegiatan di kepulauan mentawai
 - Mohon Data realisasi Target kinerja tahun 2022 kondisi terakhir untuk dapat dilakukan proyeksi
 - Ada aplikasi Dushboard dimana Bapak Gubernur dapat memantau capaian realisasi fisik maupun keuangan kegiatan di OPD

Perindag

- 7 isu strategis yakni :
 1. Tren tumbuh cepatnya perdagangan elektronik melalui aplikasi belanja daring dengan berbagai aplikasi untuk daya saing sektor perdagangan dan UKM Sumatera Barat
 2. Adopsi teknologi informasi dan komunikasi oleh pelaku usaha perdagangan
 3. Akses permodalan dalam meningkatkan skala ekonomi usaha perdagangan
 4. Dukungan bagi peningkatan kemampuan manajerial melalui pelatihan, pembinaan, dan pendampingan usaha
 5. Keterbatasan lapangan pekerjaan dan tumbuhnya semangat wirausaha dikalangan milenial dalam berbagai jenis usaha termasuk ekonomi kreatif
 6. Perlunya hilirisasi indstri agriculture, pariwisata dan perikanan untuk menciptakan produk agriculture dan industry yg memiliki nilai tambah
 7. Peningkatan kerjasama regional diharapkan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Sumatera barat
- Dinas perindag sudah melakukan pelatihan yang sudah dikeluarkan perizinan,
- Dinas Perindag sudah punya Data pasar dan data ekspor nanti akan di sampaikan kebidang Eko-SDA
- Untuk sasaran daerah pariwisata dari perindag adalah Kota Bukittinggi dan Pesisir Selatan kegiatannya yakni (pengujian mutu makanan)
- Dana Dekon untuk tahun 2024 langsung ke Kabupaten Kota

Dinas Pariwisata

Tetap mengaju pada perda rencana Induk Pariwisata yakni ada 4 isu strategis

- Dinas Pariwisata baru mempersiapkan pariwisata menuju destinasi setara berkelas dunia karena terkendala dengan masalah kewenangan.
- Program untuk desa wisata tetap akan dilakukan untuk tahun 2024
- Untuk IKU dari sector pariwisata terkait PDRB mengambil data dari BPS masih data triwulan 3
- Untuk gunung talang apa intervensi kita (stevi)
- Jawab tetap melakukan intervensi sesuai dengan target RPJMD, membuat SK destinasi menuju kelas dunia.
- Facility study (FS) gunung talang sudah ada tinggal dipromosikan lagi (PTSP) DED nya juga sudah ada yang dibikin oleh Dinas PU
- Untuk menghitung Escaf ada kemungkinan mengganti formulanya penghitungannya (stevi)
- Ada pengembangan wacana kawasan wisata religi (stevi)
- Jawab SKnya sudah ada , rencananya pada saat bulan Ramadhan akan dilakukan kedatangan SPK dan MOU

DPMPTSP

- 27 Feb akan melaksanakan FORUM OPD
- Tahun 2024 isu-isu
- Lokasi investasi yang belum diakomodir, sinkronisasi dengan Dinas tataruang dan kementerian
- Kesulitan dalam pembebasan lahan, status kepemilikan lahan yang sebagian besar dikuasai oleh tanah ulayat mejadi penyebab ketidak pastian pelaksanaan investasi
- Izin prinsip yg telah dikeluarkan namun
- Blum optimalnya ..
- Membangun program kegiatan
- DMPTSP ada membangun aplikasi Broadkes SMS di Bandara dan Badan Penghubung Sumbar (mari berinvestasi di Sumatera Barat)
- Pengurusan izin yang banyak disambar adalah pelaku menengah kecil dan Mikro
- Kegiatan yang dilakukan tahun ini Forum komunikasi pelaku usaha daerah sebanyak 5 angkatan
- ada Subuh albarokah di Kota Solok yang launcingnya hari ini bentuk fasilitasi kemitraaan yg didorong oleh PTSP yang maksudnya terjadi pertemuan oleh pelaku usaha.

Tedi

- Sudah ada manfaat yang dirasakan dari brodkes SMS apa belum, perlu diskusi khusus terkait dengan kegiatan ini.
- Penyampaian definisi operasional terkait dengan Pelatihan, Perizinan, Permodalan dan SMK Prenuer

Bapenda

Apakah masuk misi 4 atau 5 dalam pelayanan pablik,

Jawab : Untuk Bapenda tidak ada Program progul tapi yang ada adalah pada IKU Isu strategis

- Pelayanan Publik, bagaimana meningkatkan THD efektif dan Efisien dengan cara inovasi dalam membayar pajak
- Permasalahan ada beberapa mitra polisi , jasa raharja dan Bank nagari
- Karna pengaruh kondisi ekonomi untuk meningkatkan target melebihi target yg ada di RPJMD.
- Pembagian hasil berdasarkan jumlah kendaraan di Kabupaten Kota
- Kondisi ekonomi akan mempengaruhi pendapatan
- Forum OPD akhir februari kalau tidak awal maret

(Deviyanti)

Dalam pembahasan renja OPD hanya membawa matrik renja OPD saja, untuk mengingatkan dalam pembahasan Renja nanti agar OPD harus sudah membuat dokumen Renja Lengkap yang terdiri dari 5 bab.

Koperasi

- Penambahan koperasi sebanyak tahun 2021 sebanyak 4.048 tahun 2022 sebanyak 4,137, Peningkatan koperasi aktif sebanyak tahun 2021 sebesar 49% tahun 2022 50,52%, peningkatan Folume usaha meningkat sebanyak 12, 7 %, Asetnya meningkat 19%.
- Peningkatan akses permodalan koperasi yang bersumber dari LPDB pada tahun 2022 ; 17 milyar (3 koperasi)
- Forum OPD akan dilaksanakan pada 27 dan 28 Februari di grad zuri

Isu isu strategis :

1. Masih rendahnya Kualitas kelembagaan koperasi, setahun hanya bisa melakukan pembinaan sebanyak 30 koperasi
2. Produktifitas dan pemasaran produk koperasi baik koperasi maupun UMKM, akan mendorong koperasi menjadi koperasi mederen

3. Masih rendahnya Sumber Daya Manusianya pelaku usaha dan UMKM dalam penguasaan IT
4. Tata kelola koperasi yang belum berjalan sesuai peraturan perundangan yang berlaku
5. Masih banyaknya KUMKM yang belum bankable

Stevi, 2 progul dinas koperasi belum tercatat capaian targetnya,

2. Fasilitasi dan Konsultasi BKK Provinsi 2024 Untuk Pengembangan Destinasi Wisata Lubuak Nyarai

Waktu dan Tempat	:	Jumat 16 Juni 2023
Pelaksanaan	:	Ruang Rapat Lt. I Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Dasar	:	Undanguan nomor 050/109/VI/Eko-SDA/Bappeda-2023
Pimpinan Rapat	:	Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Peserta Rapat	:	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pariwisata Provinsi - Kabid P2EDP Bappeda Provinsi - Bappeda Kabupaten Padang Pariaman - Dinas Kehutanan Kabupaten Padang Pariaman - Dinas Pariwisata Kabupaten Padang Pariaman - Podarwis Kabupaten Padang Pariaman - Staf Bidang Ekonomi dan SDA Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Agenda Rapat	:	Fasilitasi dan Konsultasi BKK Provinsi 2024 Untuk Pengembangan Destinasi Wisata Lubuak Nyarai
Pembahasan	:	<p>Bappeda</p> <ul style="list-style-type: none"> • BKK untuk kegiatan pariwisata yang akan di alokasikan di Kabupaten Padang Pariaman sesuai dengan menu BKK yang telah ditetapkan untuk tahun 2024. • Masalahnya target yang ada pada RPJMD dan target yang ada pada SK Gubernur berbeda • Di alihkan ke Hibah karna klu melalui BKK jalannya jadi membeli belit • Untuk dinas kehutanan sebaiknya yg diusulkan adalah yang bisa mendatangkan pendapatan ke Nagari. <p>Padang Pariaman</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berpedoman pada RPJM wisata unggulan padang pariaman adalah nyarai sementara di SK gubernur adalah Syeh Burhanuddin, kalau berpedoman pada RPJMD mohon SK Gubernur dirubah • Ada beberapa syarat yg harus dipenuhi oleh kab/kota salah satunya adalah harus Aset Kabupaten/Kota • Ada 5 usulan kegiatan untuk BKK kalau diarahkan ke belanja Hibah minta gambaran berapa yg diusulkan <p>Dinas Pariwisata</p>

- SK lebih duluan pada RPJMD
 - Pada waktu rakor yang diusulkan adalah Nyarai dari Kabupaten Padang Pariaman
 - Namun berdasarkan surat yang dimintakan secara legal yang diusulkan adalah makam Syeh Burhanuddin (ada suratnya)
 - Sudah menyusun draf SK namun akan mengundang rapat lagi sebelum SK dirubah.
- Kesepakatan/ Tindak Lanjut : 1. Diarahkan untuk mengusulkan dana Hibah Provinsi pada anggaran perubahan 2024
2. Proposalnya dipersiapkan oleh POKDARWIS dengan melakukan koordinasikan dengan dinas kehutanan terkait izin lahan kawasan lindungnya.
3. Semua kelengkapan dokumen untuk pengusulan dana hibah agar dipersiapkan dan dipenuhi oleh Pemerintah Kab. Padang Pariaman
- Dokumentasi :



Penutup : Demikian disampaikan, terima kasih.

3. Rapat koordinasi tindak lanjut pengelolaan Warisan Tambang Batubara Ombilin Sawahlunto (WTBOS)

- Dasar Pelaksanaan : 1. Undangan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat nomor 050/165/IX/EKO-SDA/Bappeda-2023 tanggal 15 September 2023 perihal undangan.
2. Undangan Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat nomor 050/166 /IX/EKO-SDA/Bappeda-2023 tanggal 14 September 2023 perihal undangan
- Hari / Tanggal : Senin / 18 September 2023
- Pukul : 16.00 - 21.00 wib
- Tempat : Ruang Rapat UPTD Balai Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Wilayah Utara Jl. Dr. Hamka No.37, Pakan Kurai, Kec. Guguk Panjang, Kota Bukittinggi.
- Acara : Rapat koordinasi tindak lanjut pengelolaan Warisan Tambang Batubara Ombilin Sawahlunto (WTBOS)
- Peserta Rapat : 10. Direktur Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan Ditjend Kebudayaan Kemendikbudristek
11. Setditjendbud Kemendikbudristek
12. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat
13. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat
14. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumbar
15. Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah III Sumatera Barat
16. Pimpinan PT. Bukit Asam UPO
17. Kepala PT. KAI Devisi Regional II
18. Kepala PT. Pelindo II
19. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang Kementerian Perhubungan
20. Kepala Balai Diklat Tambang Bawah Tanah Sawahlunto Kementerian ESDM
21. GM. PT. Bukit Asam, Unit Penambangan Ombilin, Sawahlunto
22. Sekretaris Daerah Kota Sawahlunto
23. Sekretaris Daerah Kota Solok
24. Sekretaris Daerah Kota Padang
25. Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang
26. Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Datar
27. Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman
28. Sekretaris Daerah Kabupaten Solok
29. Kepala Bidang PPM Bappeda Provinsi Sumatera Barat
30. Insanelator daerah bidang Kebudayaan

Isi Rapat :

Rapat dipimpin oleh Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat dengan penyampaian materi dan informasi oleh Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat dan Direktur Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan Ditjend Kebudayaan Kemendikbudristek.

- 1) Pemaparan oleh Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat
- a. Kegiatan Yang Telah Dilakukan Pasca Penetapan Tambang Batubara Ombilin Sawahlunto Sebagai Warisan Dunia Unesco 2019
- | | | | |
|----|--|--|---|
| 1 | Press Conference | 12 Juli 2019 Ruang Rapat Gubernur | Dipimpin Gubernur |
| 2 | Rapat Koordinasi Tindak Lanjut pengelolaan WT BOS | 23 Juli 2019 di Ruang Rapat Gubernur | Dipimpin Gubernur |
| 3 | Rapat Evaluasi Teknis OCMHS/WT BOS oleh ICOMOS | 3 September 2019, Ruang Istana Gubernur Sumbar | Dipimpin Gubernur |
| 4 | Rakor Teknis Pengelolaan WT BOS | 14 Agustus 2019, Kemenko PMK, Jakarta | Deputi Koord Kebudayaan |
| 5 | Rakor Persiapan Penyerahan Sertifikat dan Plakat WT BOS | 21 Oktober 2019 di Dinas Kebudayaan SB | Kadisbud Sumbar |
| 6 | Rapat Finalisasi Penyerahan Sertifikat WT BOS | 28 Oktober 2019, di Dinas Kebudayaan | Kadisbud Sumbar |
| 7 | Penyerahan Sertifikat WT BOS | 29 Oktober 2019, di Auditorium Gubernur | Dihadiri Ketua KNIU, Gubernur SB, Direktur WDB |
| 8 | Sosialisasi WT BOS kepada Masyarakat, Tokoh Masyarakat, Walinagari, Lurah, Camat, Tokoh Muda, Bundokanduang, Palaku Usaha, Pelaku Budaya | 31 Okt- 1 Nov 2019 di Kota Padang | Dihadiri Seluruh Kab/Kota Tanahdatar, BPCB PT KAI, PT Bukit Asam, PT Pelindo, Pegiat/Pelaku Budaya, Perg Tinggi, |
| 9 | Sosialisasi WT BOS kepada Masyarakat, Tokoh Masyarakat, Walinagari, Lurah, Camat, Tokoh Muda, Bundokanduang, Palaku Usaha, Pelaku Budaya | 8 - 9 November 2019 di Kota Sawahlunto | Dihadiri Kota Padang, Kota Solok, Kota Sawahlunto, PT KAI, PT Bukit Asam, PT Pelindo, Pegiat/Pelaku Budaya, Perg Tinggi, |
| 10 | Sosialisasi WT BOS kepada Masyarakat, Tokoh Masyarakat, Walinagari, Lurah, Camat, Tokoh Muda, Bundokanduang, Palaku Usaha, Pelaku Budaya | 18 - 19 November 2019 di Kota Bukittinggi | Dihadiri Kota Padang Panjang, Kab. Padang Pariaman, Kota Tanahdatar, BPCB PT KAI, PT Bukit Asam, PT Pelindo, Pegiat/Pelaku Budaya, Perg Tinggi, |

b. Kegiatan yang dilakukan Kemenko PMK dan Kemendikbud pasca penetapan Tambang Batubara Ombilin Sawahlunto Sebagai Warisan Dunia Unesco 2019

1	Rakor Teknis Pengelolaan WT BOS	14 Agustus 2019, Kemenko PMK, Jakarta	Deputi Koord Kebudayaan
2	Rakor Teknis Pengelolaan WT BOS dan Peninjauan Lapangan	11 November 2019 di Kota Sawahlunto	Dihadiri Deputi dan Asdep Kemenko PMK, Walikota Swl dan Inst terkait
3	Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Pengelolaan WT BOS	8 Oktober 2019 di Dit WDB Kemendikbud	Dipimpin Dir WDB
4	Penyerahan Sertifikat dan Plakat WT BOS kepada Stakeholder terkait	29 Oktober 2019	Dihadiri Ketua KNIU, Dirut PT BA Kemendagri, Kemlu

c. Tindak lanjut pengelolaan Warisan Tambang Batubara Ombilin Sawahlunto (WT BOS)

Tahun 2020

1	Rapat Evaluasi Tindak Lanjut dan Managemet Plan WT BOS	27 Januari 2020 – Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat	Pem. Pusat, Pemprov. Dan 7 Pem Kab/Ko terkait, BUMN
2	Rapat Bersama tentang Mitigasi Bencana	Maret 2020 – Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat	Dihadiri BPBD Prov. Sumbar, Dibud Sumbar, Disbud Kota Sawahlunto, dan BPCB Sumbar, Dinas ESDM Prov. Sumbar
3	Refleksi 1 Tahun Pasca Penetapan WT BOS	6 Juli 2020, Daring – Bersama Gunenur Dinas Sumatera Barat, di Ruang Rapat Gubernur	Pem. Pusat, Pemprov. Dan 7 Pem Kab/Ko terkait, BUMN dan Stakeholder terkait

Tahun 2021

1	Rapat Penyusunan Dokumen Pariwisata Berkelanjutan	Selasa, 2 Februari 2021 di Dinas Pariwisata Prov. Sumatera Barat	Stakeholder terkait, Provinsi dan Kab/Kota
2	Rapat Tindak Lanjut Fasilitasi Catatan Sidang Komite Warisan Dunia ke 43	10 Maret 2021 – Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat	Stakeholder terkait, Provinsi dan Kab/Kota

Tahun 2023

3	Rapat Bersama tentang Mitigasi Bencana	2 Juni 2021 – Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat	Dihadiri BPBD Prov. Sumbar, Dibud Sumbar, Disbud Kota Sawahlunto, dan BPCB Sumbar, Dinas ESDM Prov. Sumbar
4	Rapat Pembahasan Pemenuhan Catatan ICOMOS terkait Melanjutkan Pengecualian Operasi Penambangan pd area properti dan zona penyangga	21 Juni 2021 – Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat	Stakeholder terkait, Provinsi dan Kab/Kota, PT BA, PT, KAI, Bappeda, DLH
5	Penerbitan Buku/translet Managemen Plan WT BOS	Tahun 2020-Kota Sawahlunto	Dinas Kebudayaan, PBM Kota Sawahlunto
6	Penerbitan Buku/translet Dossier WT BOS	Tahun 2021-Disbud Prov. Sumbar	Dinas Kebudayaan, Prov. Sumbar
7	Tim Teknis Dalam Penyusunan Dokumen Pariwisata	Maret – Desember 2021, di Padang, Kota Sawahlunto dan Jakarta	Stakeholder terkait, Provinsi dan Kab/Kota, PTBA, PT KAI,
8	Pelaporan Perkembangan Kondidi Terkini WT BOS Oleh Dinas Kebudayaan Prov. Sumbar	1 -3 November 2021 di Arosa Hotel Jakarta	Dalam Rangka peloporan Kondisi Keterwawatan WT BOS Hingga Akhir Tahun 2021
9	Sosialisasi Warisan Tambang Batubara Ombilin Sawahlunto (WT BOS) Kawasan Kota Padang Panjang dan Tanah Datar	27 – 28 Juni 2022 Hotel Grand Royal Bulittinggi	Melibatkan Niniak mamak, Tokoh masyarakat, Komunitas di Kawasan WT BOS Kota Padangpanjang dan Kabupaten Tanah Datar
10	Tim Teknis Dalam Penyusunan Dokumen Pariwisata	Maret – Desember 2021, di Padang, Kota Sawahlunto dan Jakarta	Stakeholder terkait, Provinsi dan Kab/Kota, PTBA, PT KAI,

Tahun 2022

1	Audiensi dnegan Dirjen Kebudayaan, Setditjenbud, Kemendikbudristek	1 Februari 2022	Wakil Gubernur Sumbar, Kepala Dinas Kebudayaan Prov. Sumbar BPK Wilayah III Sumbar,
2	Rapat Koordinasi Tindak Lanjut	11 Agustus 2023 Di Auditorium	Stakeholder terkait, Provinsi dan 7

	Pengelolaan WT BOS "Penguatan Ekosistem Kebudayaan WT BOS	Gubernur Sumatera Barat	(Tujuh) Kab/Kota, PTBA, PT KAI, Dihadiri Dirjen Kebudayaan Gubernur Sumatera Barat Wakil Gubernur Sumatera Barat Direktur Pelindungan Kebudayaan Direktur Pengembangan Pemanfaatan Kebudayaan, Direktur Perfilman, Musik dan Media, Kepala BPK Wilayah III Sumatera Barat
3	Penanda tangan Pakta Integritas (Penguatan Komitmen Pemangku Kepentingan)	11 Agustus 2023 Di Auditorium Gubernur Sumatera Barat	Pemangku Kepentingan, Kepala Daerah 7 Kab/Kota, PT BA. PT. KAI.

- 2) Pemaparan oleh Direktur Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan Ditjend Kebudayaan Kemendikbudristek

Road Map dan Indikator

a. 2023

1. Riset: Rumusan Kuratorial
2. Website: Aktif/Online <https://whc.unesco.org/en/list/1610/>
3. Kick Off: Pakta Kesepakatan Bersama
4. Rangkaian Aktivasi / Festivalisasi
5. Koordinasi Perencanaan dengan melibatkan BAPPEDA
6. Pelaporan ke UNESCO
<https://whc.unesco.org/en/list/1610/indicators/>

b. 2024

1. Riset: Peta Ekosistem WT BOS, Pola Kebijakan, & Tata Ruang
2. Penyusunan Dokumen Community Participatory Planning: Dokumen
3. Inisiasi Platform Tata Kelola WT BOS: World Heritage Forum
4. Temukenali potensi objek / attribute OUV WT BOS: Dokumen
5. Eksplorasi pemanfaatan WT BOS: Festival dan Penciptaan Karya
6. Inisiasi Pengembangan Ekonomi Budaya WT BOS: Program Wisata Berkelanjutan, Lahirnya bentuk pendayagunaan berbasis pengetahuan dan ekonomi budaya
7. Pelaporan ke UNESCO
<https://whc.unesco.org/en/list/1610/indicators/>

c. 2025

1. Finalisasi Dokumen Tata Kelola WT BOS: Naskah Akademik

2. Pengembangan Ekonomi Budaya WTOS: Program Wisata Berkelanjutan, Lahirnya bentuk pendayagunaan berbasis pengetahuan dan ekonomi budaya
3. Pelaporan ke UNESCO
<https://whc.unesco.org/en/list/1610/indicators/>

Even yang akan dilaksanakan di setiap kabupaten/kota dikawasan WTOS tahun 2023

GALANGGANG ARANG: Anak Nagari Merayakan Warisan Dunia					
Kab/Kota/Dir	Tanggal	Judul Kegiatan	Lokasi	Rangkaian Kegiatan	Deskripsi
Padang	19-20 Oktober 2023	Padang Merayakan Warisan Dunia (Pembukaan Galanggang Arang)	Silo Gunung	Kick Off Galanggang Arang	
Padang Panjang / Dit. PMM		Padang Panjang Merayakan Warisan Dunia	Stasiun Padang Panjang	1. Pertunjukan Karya Kreasi Seni Media Baru	Kerjasama Pemko dan Komunitas Seni Padang Panjang
Padang Pariaman / Dit. PPK / BPK Sumbar	10-12 November 2023	Kayutanam Merayakan Warisan Dunia	Stasiun Kayu Tanam	1. FGD Penguatan Komunitas 2. Pertunjukan Kesenian Rakyat 3. Pertunjukan Musik dan Media Anak Nagari (Media Baru) 3. Pameran Foto di Gerbong Kereta 4. Pameran BPK 5. Pameran Kuliner/UMKM 6. Batajau Layang-Layang (Permainan Tradisional)	Nagari Kasang, Sungai Buluah, Sungai Buluah Selatan, Buayan, Jambak, Pasa Usang, Lubuk Alung, Pekandangan, Parit Malintang, Lubuk Pandan, Sicincin, Kayutanam, Kapalo Ilalang, Guguak Tambua Tasa, Indang, Dabuih, Katumbak, Rabab Galuak Pertunjukan garapan kreasi baru dari lintas Nagari Karya Komunitas terkurasi Koleksi BPK yang terkurasi Demo membuat Pinyaram dan membakar Kue Bika Kayutanam Festival layang-layang anak nagari
Kab. Tanah Datar / Dit. PPK / BPK Sumbar	17-19 November 2023	Pitabunga Merayakan Warisan Dunia	Stasiun Pitalah Bungo Tanjung	1. Peragaan Busana Tradisional Nagari di Jalur Rekereta Api 2. Pertunjukan Kesenian Rakyat 3. Pameran Kuliner Rakyat 4. Pameran BPK 5. Randai Anak-Anak Tapuak Galempong (pembukaan)	Diikuti oleh nagari sepanjang jalur WTOS Kabupaten Tanah Datar. Koleksi BPK yang terkurasi Pertunjukan Kreasi baru dari Anak Nagari
Kab. Solok / Dit. PPK / BPK Sumbar	24-26 November 2023	Kacang Merayakan Warisan Dunia	Stasiun Kacang	1. Makan Bajamba Budaya Kuliner Khas Kab. Solok / Danau Singkarak 2. Pertunjukan Kreasi Kesenian Rakyat 3. Pameran BPK 4. Pameran Hasil Bumi/UMKM	Piringan Bermayani, peserta/tamu membunyikan piring secara bersama menggunakan bambu (sumpit) setelah menonton tari piring dipandu oleh para penari piring yang terdiri dari anak nagari Koleksi BPK yang terkurasi
Kota Sawahlunto / Dit. PPK / Dit. PMM / BPK Sumbar	29 November s/d 1 Desember 2023	Sawahlunto Merayakan Warisan Dunia	Museum Goedang Ransum Sawahlunto	1. Media Sahabat Museum 2. Pameran Foto WTOS 3. Workshop Film bersama Garin Nugroho 4. Ulang Tahun Kota Sawahlunto	1 Desember, Paripurna, makan siang
Kota Solok	14-16 Desember 2023	Merajut Buni Menyambung Rasa (Penutupan Galanggang Arang 2023)	Stasiun Kota Solok	1. Pertunjukan Musik hasil Kolaborasi seniman 7 Kota/Kabupaten 2. Pameran WTOS 3. Pameran Industri Kreatif Kota Solok	
Dit. PPK	21 Oktober 2023		Fabrik Bloc	Lokakarya Kaba Rupa: Seniman Bicara WTOS	Open Call Peserta (seniman terkurasi). Lokakarya, 3 Narsum dari Sastra, Seni Pertunjukan, Film/Media.
Dit. PMM	22 Oktober - 30 November 2023			Produksi Kaba Rupa	Pitching dan Produksi Karya seniman terkurasi.
Dit. PMM & BPK Sumbar	16 Oktober - 14 Desember 2023		Museum Goedang Ransum Sawahlunto & Stasiun Kota Solok	2. Merajut Narasi WTOS & Jalur Kereta Api Lewat Tulisan dan Vlog	Lomba tulisan dan vlog dengan format reportase. Karya yang masuk semi final ditampilkan di Sawahlunto. Pengumuman Pemenang di Stasiun Kota Solok
PemProv Sumbar / Dit. PPK	29 Oktober 2023		Kantor Dinas P3AP2KB	Lokakarya Temukenal WTOS bersama Forum Anak Sumbar	
PemProv Sumbar/Dit. PMM	30 Oktober - 12 November 2023	Festival Anak Sumatera Barat 2023	Zona A.B & C WTOS	Forum Anak Sumbar membuat konten digital, musik, pertunjukan, kriya dan seni rupa di 12 Properti dan 24 Atribut WTOS	
	18-19 Nov 2023		Halaman Rumah Dinas Gubernur Sumbar	Pameran dan pertunjukan di puncak Festival Anak Sumatera Barat	

3) Sharing informasi dari OPD vertical dan Kabupaten/Kota

1. Edi Utama

- Untuk kegiatan di Kota Solok dan Kab. Tanah Datar masih rencana diatas kertas. diharapkan adanya sinergi rangkaian perayaan warisan tambang anak nagari dengan memerhatikan untuk penjagaan kawasan WT BOS
- Akan dilakukan seminar setengah hari dnegan mengundang walinagari dan bundo kanduang di sepanjang kawasan WT BOS agar mengenal kawasan WT BOS dan terlibat dalam pelestarian kawasan WT BOS. masih diperlukan inventarisir daftar nagari yang berada dikawasan WT BOS.
- Telah dilakukan penjelajahan di beberapa titik kawasan WT BOS. ditemukan bahwa berbagai nagari di kawasan WT BOS memiliki keterkaitan dengan jalur WT BOS. titik-tik tersebut dapat dibangkitkan untyk dijadikan titik ungkit untuk peningkatan ekonomi di kawasan WT BOS.

2. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang Kementerian Perhubungan

- Untuk pemakaian staiun kereta api dalam kegiatan WT BOS dapat dilakukan dengan memberikan tembusan surat dari kementrian
- Pemakaian stasiun kacang yang saat ini sudah tidak aktif, terdapat beberapa fase yang sudah hilang dari stasiun tersebut. Hingga saat ini sudah terjadi kehilangan aset pada kawasan stasiun kasang dengan 17 kasus yang kerugiannya mencapai Rp 16 milyar.
- Pada stasiun padang panjang telah dilakukan pembersihan, dan telah terjadi kehilangan aset di stasiun padang panjang. Mohon adanya kerjasama daro pemko dan pemda untuk penjagaan atas aset-aset KAI di stasiun-stasiun, terutama saat adanya acara.
- Pada stasiun solok juga telah dilakukan pembersihan dari gulma dlam rangka persiapan aktivasi kereta api.
- Kereta api yang direncanakan akan digunakan di stasiun solok saat ini statusnya telah terjual dan dibeli oleh PT Krakatau Stil.
- Untuk reaktifasi perkerata apian direncanakan tahun 2024 akan dilakukan pembebasan di kawasan naras dan... diarahkan ke bagian pinggir.

3. Kabupaten Solok

- Daerah sangat mendukung kegiatan yang telah direncanakan dengan mengkoordinasikan juga dengan daerah
- Apakah ada opsi lain juga untuk diadakan di daerah.
- Terdapat delapan nagari di kawasan wt bos kab solok : pianggu, guguak sarai, sawah laweh, nagari singkarak, nagari sumani, sungai lasi, kacang. Sehingga untuk kegiatan di kab. Solok sebaiknya jangan menggunakan nama kacang, karna akan sulot melibatkan nagari-nagari lainnya. Sebaiknya menggunakan nama “kabupaten solok merayakan warisan dunia” sehingga dapat melibatkan kedelapan nagari di kawasan wt bos

4. Kota Sawahlunto

- Disarankan untuk lebih memepertegas tujuh kabupaten/kota saat melaksanakan rapat-rapat dapat dilakukan bergiliran di tujuh kabupaten/kota tersebut.
- Disarankan juga adanya dana bkk provinsi untuk penunjang kegiatan wt bos

- Di sawahlunto telah dilakukan kegiatan sisca, wayang, dan juga disarankan kegiatan ombilin jazz festival, sawahlunto orchestra, dan kegiatan lainnya yang telah dirancang.
 - Dalam pelaksanaan kegiatan di kawasan wtbos diharapkan adanya indra khas wtbos, adanya penciuman khas wtbos, etika khas wtbos.
5. Tanah Datar
- Kabupaten tanah datar telah memiliki kegiatan satu nagari satu even, dimana tahun ini terdapat 35 nagari yang akan melaksanakan even. Hal ini dapat dikolaborasikan dengan kegiatan even wtbos. Dan bentuk dari kolaborasi ini perlu didetailkan.
6. Kota Padang
- Untuk kegiatan even WTBO yang akan dilaksanakan pada dasarnya daerah sangat mendukung. Mohon adanya kejelasan dari rencana kegoatan yang akan dilaksanakan di Kota Padang
7. Padang Panjang
- Untuk mendukung WTBO telah dilaksanakan beberapa kegiatan yaitu, DED di stasiun kereta api tahun 2022, peningkatan kapasitas SDM pokdarwis. Sedangkan untuk pembangunan fisik masih terkendala dengan perizinan dan penganggaran.
 - Tahun 2021 telah dilaksanakan even perempuan creator dengan perizinan yang cukup sulit dan bersifat berbayar.
 - Untuk kegiatan even WTBO yang akan dilaksanakan pada dasarnya daerah sangat mendukung. Diharapkan adanya koordinasi lebih detail terkait kegiatan ini.
8. Padang Pariaman
- Untuk Kabupaten Padang Pariaman dengan even di kawasan kayutaman yang berkolaborasi dengan Dinas Pariwisata pada prinsipnya kami sangat mendukung. Diharapkan adanya koordinasi terkait tindak lanjut dari even ini dengan pengarahannya yang lebih jelas.
 - Telah dilakukan kegoatan baru-baru ini kegiatan anak nagari yang melibatkan beberapa nagari di Padang Pariaman.
9. Kota Solok
- Kota solok mendapat jadwal yang bertepatan dengan ulang tahun Kota Solok. Dapat dilakukan kolaborasi dengan even ulang tahun kota.
 - Perlu adanya penjelasan terkait dukungan konkrit dari pemerintah kota solok. Terutama saat ini sedang dalam tahapan perubahan anggaran 2023, sehingga jika dibutuhkan masih dapat dilakukan pengalokasian anggaran.
10. Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat
- Dinas pariwisata prov sumbar telah menyusun dokumen pariwisata berkelanjutan tahun 2021.
 - Dari ekmentrian pariwisata telah menyusun travel pattern dalam pelaksanaan kegiatan wtbos ini.
 - Tahun 2022 telah dilakukan sosialisasi pada 7 kabupaten/kota di kawasan wtbos dengan orientasi penggiat pariwisata di kawasan wtbos.
11. Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah III Sumatera Barat

- Sudah empat tahun kegiatan WT BOS belum memperlihatkan kejelasan kedepannya.
 - Untuk berbicara WT BOS belum diketahui oleh masyarakat apa itu WT BOS.
 - Perlu adanya intervensi pada 7 kab/kota untuk pengenalan dan rasa kepemilikan dari WT BOS ini.
 - Perlu adanya sharing pendanaan terkait pelestarian kawasan WT BOS
 - Perlu dilakukan diskusi terkait pembentukan badan pengelola WT BOS
12. Bappeda Sumbar
- Perlu adanya surat dari kementerian sebagai dasar bagi Gubernur untuk mengarahkan kabupaten/kota agar mencantumkan penganggaran kegiatan WT BOS.
 - Diharapkan di tujuh kabupaten/kota ini mencantumkan logo WT BOS pada surat dispar, baju, dan lainnya untuk membantu branding WT BOS.
13. Direktur kebudayaan
- Perlu adanya pesan jelas yang akan disampaikan dalam kegiatan WT BOS nantinya.
 - Pelaksanaan even WT BOS ini akan berkolaborasi dengan insineltor daerah nantinya.
 - Perlu adanya regulasi daeri daerah untuk membentuk branding dari WT BOS.
 - Diharapkan akan adanya keberpihakan anggaran daerah untuk pelestarian WT BOS kedepannya.



BAB III

PERMASALAHAN

Permasalahan yang ditemukan selama pelaksanaan kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) sangat beragam, bisa berasal dari faktor internal dan faktor eksternal yang berasal dari Kabupaten/Kota. Permasalahan yang dibahas disini adalah permasalahan secara umum dari keseluruhan Kabupaten/Kota sebagai Berikut :

1. **Industri**

- a. Daya saing produk Industri Kecil Menengah yang masih rendah (kualitas, desain, harga, kemasan, kontinuitas produksi).

Dalam kondisi persaingan yang semakin ketat, setiap IKM dituntut dapat meningkatkan daya saing produk-produk yang dihasilkannya. Karena dengan peningkatan daya saing membuat IKM dapat mengungguli usaha lain yang menghasilkan produk sejenis. Daya saing produk dapat ditelaah dari berbagai aspek; mulai dari mutu produk yang lebih baik, harga jual yang lebih rendah, desain yang lebih menarik, sampai pada pelayanan purna jual yang lebih terjamin. Inovasi secara berkesinambungan memungkinkan suatu usaha meningkatkan daya saing produk yang dihasilkannya. Hal ini dimungkinkan, karena melalui inovasi akan terjadi perbaikan-perbaikan dalam proses produksi, baik melalui adopsi teknologi maju diluar perusahaan, maupun melalui riset dan pengembangan dalam perusahaan sendiri. Dengan demikian dapat dihasilkan produk yang memiliki daya saing yang lebih tinggi, apakah berupa peningkatan kualitas produk, peningkatan desain produk, atau peningkatan efisiensi produksi. Peningkatan efisiensi produksi berarti produk tersebut dapat diproduksi dengan biaya yang lebih murah, sehingga produk tersebut memiliki daya saing dari segi harga jualnya. Suatu hal yang perlu diingat adalah bahwa setiap inovasi produk harus selalu diarahkan kepada kebutuhan pelanggan. Inovasi tanpa memperhatikan kebutuhan pelanggan hanya akan mengakibatkan produk tersebut gagal ketika dipasarkan. Akar dari lemahnya daya saing produk industry

kecil menengah secara umum disebabkan karena terbatasnya kemampuan dan ketrampilan industry, masih rendahnya penguasaan teknologi serta kurangnya promosi dan jejaring produk.

- b. Pengembangan industri sesuai potensi daerah belum optimal.

Dalam memanfaatkan keunggulan komparatif suatu daerah, dalam hal ini diimplementasikan dalam pengembangan industri suatu daerah sesuai dengan potensi daerah tersebut, perlu disusun perencanaan pembangunan industri yang disesuaikan dengan keunggulan/kompetensi inti yang ada serta kendala dan prospek dari komoditi yang dikembangkan, sehingga dapat memberikan hasil yang optimal. Perencanaan tersebut dikoordinasikan secara intensif dengan daerah kab/kota sehingga dapat menghasilkan master plan yang rinci. Dengan master plan ini, pengembangan industry akan lebih terarah serta dapat memberikan manfaat yang besar terhadap pengembangan potensi daerah tersebut.

- c. Jaringan kemitraan usaha antara IKM dengan industri besar belum optimal.

Jejaring kemitraan usaha antara IKM dengan industri besar merupakan salah satu hal penting dalam mengembangkan IKM kedepannya. Sektor IKM (Industri Kecil dan Menengah) diharapkan menjadi mitra bisnis bagi perusahaan besar. Namun kendala IKM untuk menjadi mitra bisnis bagi perusahaan besar adalah kurang optimalnya IKM dalam memenuhi persyaratan teknis maupun administrasi dan pasokan barang yang kurang kontinyu yang menyebabkan keterlambatan produksi. Hal ini perlu mendapatkan perhatian pemerintah, sehingga IKM dapat tumbuh seiring dengan semakin majunya industri besar.

2. Perdagangan

- a. Sistem distribusi barang kebutuhan pokok dan strategis belum efektif dan efisien.

Distribusi barang kebutuhan pokok yang efektif dan efisien merupakan Kebijakan umum pembangunan sektor perdagangan yang ditetapkan dalam rangka pencapaian kinerja. Belum Optimalnya sistem distribusi barang kebutuhan pokok dan strategis yang efektif dan efisien disebabkan karena belum memadainya sarana dan prasarana logistik, seperti sarana transportasi (jalan, akses dan alat angkut), sarana pergudangan dan ketrampilan SDM perdagangan. Permasalahan ini harus segera mendapatkan solusi, karena sistem distribusi bahan pokok yang tidak strategis menyebabkan kelangkaan dan harga barang pokok yang menjadi beragam.

- b. Jaringan pasar dalam dan luar negeri belum optimal

- c. Kualitas sarana dan prasarana dagang pasar rakyat masih rendah.

- d. Ekspor masih terkonsentrasi pada beberapa komoditi tertentu, barang setengah jadi dan negara tujuan ekspor masih terpaut ke negara tujuan tradisional.

- e. Barang beredar yang tidak memenuhi ketentuan, seperti barang yang tidak mencantumkan kode produksi, tanggal kadaluarsa, tanda SNI, manual dan garansi masih banyak ditemui di pasaran.

3. Penanaman Modal/Investasi

- a. Masih belum terwujudnya jaminan stabilitas politik, keamanan dan penegakan hukum yang pasti dan konsisten. Faktor ini berpotensi menjadi penghambat minat investor dalam melirik Sumatera Barat sebagai tujuan investasi. Kecenderungan setiap investor yang menghendaki stabilitas keamanan terhadap proses investasi mereka perlu menjadi perhatian penting bagi pemerintah.
- b. Regulasi yang belum efektif dan sering tumpang tindih berkaitan dengan penanaman modal baik pada tingkat pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Kefektifan regulasi tercermin dari kepastian pelaksanaan hukum dan peraturan. Kepastian tersebut memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang dihadapi dan biaya yang ditimbulkan sehingga dapat risiko cenderung mudah dikalkulasi. Bagi investor, tingkat resiko bisnis sudah cukup besar untuk dikelola dan cenderung tidak menginginkan risiko tambahan lainnya yang tidak berkaitan dengan proses bisnis.
- c. Perlunya meningkatkan standar pelayanan optimal dan mekanisme kerja pelayanan satu pintu.
- d. Diperlukan pola insentif penanaman modal yang dapat diberikan oleh pemerintah kepada calon investor untuk menarik minat mereka menanamkan modal di Sumatera Barat.
- e. Masih belum tersedianya informasi yang akurat dan minimnya dokumen perencanaan pendukung investasi (master plan, feasibility study, DED, dan business plan) yang dibutuhkan oleh calon investor dalam kaitannya dengan penanaman modal di daerah.
- f. Diperlukan kebijakan yang terintegrasi antar daerah kabupaten/kota berkaitan dengan potensi dan daya saing unggulan yang dibangun oleh masing-masing daerah. Setiap daerah perlu memiliki potensi dan sumber keunggulan untuk bersaing yang dapat membedakan mereka dengan daerah lain baik antar daerah di dalam provinsi maupun dengan daerah lain di luar provinsi.

4. Koperasi

- a. Masih terbatasnya jumlah SDM yang kompeten tentang perkoperasian
- b. Data koperasi yang belum akurat dan update
- c. Masih terbatasnya bantuan dan fasilitasi dalam peningkatan kinerja usaha koperasi
- d. Data koperasi yang belum akurat dan update

- e. Masih terbatasnya bantuan dan fasilitasi dalam peningkatan permodalan koperasi
- f. Masih terbatasnya bantuan dan fasilitasi dalam peningkatan pembiayaan, pemasaran, standarisasi bagi UMKM
- g. Masih terbatasnya kompetensi pelaku UMKM
- h. Masih terbatasnya SDM yang kompeten dalam pembinaan koperasi dan UMKM
- i. Masih terbatasnya bantuan dan fasilitasi dalam peningkatan pembiayaan, pemasaran, standarisasi
- j. Masih terbatasnya bantuan dan fasilitasi dalam peningkatan pembiayaan, pemasaran, standarisasi bagi KUMKM

5. Pariwisata

- a. Pembangunan Destinasi Wisata belum berbasis keberlanjutan lingkungan dan aktivitas berbasis kearifan lokal dan budaya daerah;
- b. Promosi kepariwisataan masih belum efektif dan efisien.
- c. Belum tergalinya produk unggulan pariwisata dan ekonomi kreatif di masing-masing kab/kota;
- d. Kerjasama antara pentahelix pariwisata serta hexahelix ekonomi kreatif belum optimal
- e. Pengembangan ekonomi kreatif belum mengacu kepada industri budaya lokal.
- f. Pembangunan Pariwisata masih belum Terpadu dan masih bersifat sektoral.
- g. Belum optimalnya pengembangan potensi dan pengelolaan pariwisata halal.
- h. Belum optimalnya pengembangan daya tarik wisata tematik berbasis alam, budaya, dan buatan;
- i. Belum terintegrasinya kawasan Geopark sebagai kawasan wisata tematik.
- j. Belum tersedianya aturan terkait standarisasi baku pembangunan dan pengelolaan daya tarik wisata.
- k. Masih rendahnya kapasitas SDM serta produk Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang berdaya saing.

BAB IV

PENUTUP

Dalam penyusunan perencanaan pembangunan Bidang Ekonomi di Sumatera Barat perlu dilakukan koordinasi, sinkronisasi dan sinergi dengan pemerintah pusat, regional dan kabupaten/kota se Sumatera Barat adalah pariwisata, industri, perdagangan, koperasi, UMKM dan investasi, mengacu kepada kebijakan nasional dengan memperhatikan kondisi dan potensi daerah, dalam merumuskan kebijakan dan program kerja setiap tahun sesuai dengan tugasnya dan fungsinya, dan untuk menciptakan sinkronisasi program tahunan Bappeda diperlukan koordinasi antar OPD terkait dan lembaga swadaya masyarakat untuk menghimpun berbagai masukan baik di Provinsi maupun kabupaten/kota.

Untuk terlaksananya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas program/kegiatan dengan Kementerian/Lembaga/SKPD Provinsi/Kab/Kota/Institusi Lainnya yang terkait dengan lingkup pembangunan bidang ekonomi, dilakukan melalui peran aktif dalam mengumpulkan data dan informasi, menghadiri rapat-rapat koordinasi ataupun berperan aktif untuk mengkoordinasikan program/kegiatan terutama untuk tahun berjalan serta perencanaan ke depannya, baik ke kabupaten/kota, Kementerian, Lembaga dan provinsi lainnya. Serta melakukan dan menghadiri rapat koordinasi terkait dengan pembangunan ekonomi baik di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, Provinsi Lainnya, Kementerian/Lembaga serta stakeholder terkait.